

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD) PROVINSI GORONTALO 2025-2045



PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO



GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 – 2045
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang :
- a. bahwa Provinsi Gorontalo memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka RPJPD Provinsi Gorontalo ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang

- Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

dan

GUBERNUR GORONTALO





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 – 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.

KEPALA BIRO HUKUM	Plt.KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			





5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala negara dengan berpedoman pada RPJP Nasional.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Daerah Provinsi Gorontalo untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 2025 sampai dengan tahun 2045.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah provinsi untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta mengacu pada RPJM Nasional.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten/Kota adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah Kabupaten/kota serta mengacu pada RPJM Daerah Provinsi.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJP DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJPD Provinsi adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
- (2) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah untuk tahun 2025-2045 yang disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik, dan potensi daerah dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043.

KEPALA BIRO HUKUM	Pit.KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

BAB III
SISTIMATIKA RPJP DAERAH
Pasal 3





- (1) RPJPD Provinsi disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- BAB I Pendahuluan
 - BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah
 - BAB III Permasalahan Dan Isu Strategis
 - BAB IV Visi Dan Misi Pembangunan Daerah
 - BAB V Arah Kebijakan Dan Sasaran Pokok
 - BAB VI Penutup
- (2) Materi RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
KAIDAH PELAKSANAAN
Pasal 4

- (1) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten/Kota, dengan memperhatikan RPJP Nasional.
- (2) RPJPD Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam rangka menjaga kesinambungan rencana pembangunan jangka panjang maka Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 diwajibkan menyusun RPJPD Provinsi untuk periode 20 tahun berikutnya.

BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Provinsi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun dengan menggunakan hasil evaluasi RPJMD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEPALA BIRO HUKUM	Plt. KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6

- (1) RPJPD Provinsi dapat dilakukan perubahan dalam hal terjadi perubahan mendasar yang mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Tata cara perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN


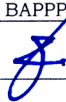

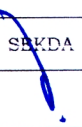
Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari adanya kekosongan rencana pembangunan daerah, maka Gubernur pada tahun terakhir dimasa pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintahan berikutnya yang mengacu pada Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan ketentuan RPJPD Provinsi Tahun 2025 - 2045 dalam Peraturan Daerah ini dimulai pada Tahun 2025.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2007-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2009 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 03) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEPALA BIRO HUKUM	Pt.KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2024
Pj. GUBERNUR GORONTALO,



RUDY SALAHUDDIN

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 SEPTEMBER 2024
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,



SOFIAN IBRAHIM

LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO: (4-196/2024)





PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 4 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
PROVINSI GORONTALO TAHUN 2025 – 2045

I. UMUM

Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan daerah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional memegang peranan penting dalam upaya mewujudkan tujuan bernegara, yakni masyarakat adil dan makmur. Implementasi otonomi daerah yang diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, merupakan upaya nyata pemerintah untuk memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal.

Provinsi Gorontalo sebagai provinsi ke 32 di Indonesia, lahir bersamaan dengan digulirkannya otonomi daerah pada tanggal 16 Pebruari 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Berdasarkan sejarah, pada era perang kemerdekaan, Gorontalo telah memproklamkan kemerdekaan pada tanggal 23 Januari 1942, yang dikenal dengan “Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942”. Semangat nasionalisme yang dimiliki oleh para perintis dan pejuang kemerdekaan di Gorontalo, memiliki arti penting bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Patriotik 23 Januari 1942, telah menjadi tonggak sejarah perjuangan kemerdekaan di tanah air. Pada saat itu Gorontalo dapat mewujudkan cita-cita yang telah dicetuskan oleh gerakan Budi Utomo 1908 dan Sumpah Pemuda 1928, yaitu; *Satu Tanah Air, Satu Bangsa dan Satu Bahasa, yakni Indonesia*. Hal ini menunjukkan suatu sikap dan semangat masyarakat Gorontalo untuk selangkah lebih maju dalam mewujudkan rasa nasionalisme kedalam bentuk yang sesungguhnya, yaitu KEMERDEKAAN. Sikap dan semangat tersebut merupakan Inovasi Nasionalisme, dimana “Nilai-Nilai Kebangsaan Indonesia” telah lebih dahulu menjadi Jati Diri Rakyat Gorontalo, sebelum Negara Indonesia berdiri.

KEPALA BIRO HUKUM	Plt.KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Untuk menjaga kesinambungan dan keselarasan pembangunan nasional sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045, yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional). RPJP Daerah disusun secara sistimatis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan lima pendekatan, yaitu :

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).




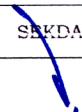
Oleh karena itu, Pembangunan Jangka Panjang Daerah diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi dan misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RPJPD Tahun 2025-2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Hal tersebut didasarkan pada prinsip hak asasi bahwa dalam mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan, Pemerintah Daerah harus menitikberatkan masyarakat sebagai penikmat dan pelaku pembangunan

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045 merupakan kelanjutan dari pembangunan sebelumnya untuk mencapai tujuan pembentukan Provinsi Gorontalo sebagaimana diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo. Untuk itu, dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi Provinsi Gorontalo untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah dan kebijakan, antara lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, lingkungan hidup dan kelebagaannya sehingga Provinsi Gorontalo dapat mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing yang kuat di dalam pergaulan masyarakat nasional dan internasional.

RPJP Daerah digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJM Daerah dan RPJMD Kabupaten/Kota. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat.

Tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045 adalah untuk: (a) mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan dalam pencapaian tujuan daerah dan nasional, (b) menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar provinsi dan kabupaten/kota, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah Pusat,

KEPALA BIRO HUKUM	Pt.KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Provinsi dan Kabupaten/Kota, (c) menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, (d) menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan, dan (e) mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025–2045 terdiri dari 6 bab dan 6 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJP Daerah, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJP Daerah, dan penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Tahun 2045 merupakan tahun terakhir periode pelaksanaan RPJP Daerah, oleh karena itu Kepala Daerah terpilih yang memangku jabatan sampai dengan tahun 2045 harus menyusun RPJP Daerah untuk 20 tahun berikutnya.

Pasal 5

Ayat (1)




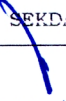
Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah dilakukan oleh masing-masing pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan RPJP Daerah dari masing-masing pimpinan OPD.

Ayat (2)

Sosialisasi kepada calon Gubernur dalam proses Pilkada dapat dilaksanakan dalam bentuk penyerahan Perda tentang RPJP Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2025 – 2045 kepada setiap calon melalui Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

KEPALA BIRO HUKUM	Plt.KABAN BAPPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas





Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 4.

KEPALA BIRO HUKUM	Pt.KABAN BAPPEDA	ASISTEN	SEKDA
			



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Periode 2025-2045 dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun sebagaimana amanat ketentuan Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang disebutkan bahwa RPJPD merupakan penjabaran Visi, Misi, Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah untuk 20 (dua puluh) tahun yang selaras Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dalam Penyusunan RPJPD berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, RPJPD telah memperhatikan dan selaras dengan beberapa dokumen perencanaan lainnya baik RPJP Nasional 2025-2045, RTRW Provinsi periode 2023-2042, dan telah diselaraskan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Provinsi Gorontalo. Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan di antaranya Rapat Orientasi, Penyelarasan KLHS dan RTRW, Forum Konsultasi Publik, Musrenbangda dan rapat koordinasi sektoral lainnya, dengan melibatkan beberapa pemangku kepentingan, di antaranya Pemerintah OPD Provinsi, Unsur Legislatif, Pemerintah Kabupaten/Kota, Unsur Legislatif, Akademisi, CSR, LSM dan Unsur Masyarakat lainnya agar lebih partisipatif dan akomodatif. Atas sinergi dan kinerja kolaboratif tersebut, Alhamdulillah Provinsi Gorontalo telah menyelesaikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang dapat memberikan arahan dan landasan bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Gorontalo.

Harapannya dokumen ini dapat bermanfaat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD Provinsi), Renstra Perangkat Daerah, dokumen RPJPD Kabupaten/Kota serta dokumen perencanaan tematik dan sektoral lainnya, sehingga sinergi pembangunan dapat terwujud dalam pencapaian Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah menuju Gorontalo Provinsi Madani, yang Maju dan Berkelanjutan 2045, serta mendukung perwujudan Indonesia Emas 2025-2045 sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 ini disusun. Masukan, kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan dan penyempurnaan pembangunan kedepannya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan bagi kita semua untuk senantiasa memberikan yang terbaik melalui kerja ikhlas dan kerja cerdas demi pembangunan yang lebih baik. Amin... Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-5
1.4 Maksud dan Tujuan	I-6
1.5 Sistematika Penulisan	I-7
BAB II GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH.....	II-1
2.1 Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1 Aspek Geografi.....	II-1
2.1.2 Demografi.....	II-45
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	II-49
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	II-49
2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya.....	II-66
2.3 Aspek Daya Saing Daerah	II-73
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah	II-73
2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)	II-76
2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah	II-79
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi.....	II-83
2.4 Aspek Pelayanan Umum.....	II-87
2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Periode Sebelumnya.....	II-95
2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik ..	II-99
2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-109
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH	III-1
3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah.....	III-1
3.2 Isu Strategis	III-12
3.2.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)	III-12

3.2.2	Penelaahan terhadap RPJPN	III-16
3.2.3	Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo.....	III-17
3.2.4	Isu Pembangunan Daerah.....	III-17
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH		IV-1
4.1	Visi	IV-1
4.2	Sasaran Visi	IV-2
4.3	Misi	IV-4
BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK		V-1
5.1	Arah Kebijakan Daerah	V-1
5.1.1	Mewujudkan Transformasi Sosial.....	V-4
5.1.2	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	V-6
5.1.3	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola.....	V-9
5.1.4	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah.....	V-10
5.1.5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	V-11
5.1.6	Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yg merata dan berkeadilan	V-13
5.1.7	Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	V-14
5.1.8	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan	V-14
5.2	Sasaran Pokok	V-17
5.3	Kerangka Implementasi	V-36
5.4	Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers).....	V-37
5.5	Pengembangan Kewilayahan.....	V-46
BAB VI PENUTUP.....		VI-1
6.1	Implementasi Pelaksanaan	VI-1
6.2	Kerangka Pengendalian	VI-4
6.3	Mekanisme Perubahan	VI-5
6.4	Komunikasi Publik	VI-6
6.5	Pembiayaan Pembangunan	VI-7



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya.....	I-4
Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Gorontalo	II-1
Gambar 2.2 Peta Topografi Provinsi Gorontalo	II-3
Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo	II-4
Gambar 2.4 Peta Geologi Provinsi Gorontalo	II-6
Gambar 2.5 Peta Patahan Provinsi Gorontalo	II-23
Gambar 2.6 Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo.....	II-24
Gambar 2.7 Peta Risiko Bencana Tanah Longsor di Provinsi Gorontalo	II-25
Gambar 2.8 Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Gorontalo	II-26
Gambar 2.9 Peta Risiko Bencana Banjir di Provinsi Gorontalo	II-27
Gambar 2.10 Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Gorontalo	II-31
Gambar 2.11 Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Provinsi Gorontalo	II-32
Gambar 2.12 Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo Tahun 2022	II-37
Gambar 2.13 Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2022.....	II-39
Gambar 2.14 Status IPM Kab/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II-56
Gambar 2.15 Data Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo	II-61
Gambar 4.1 Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045	IV-5
Gambar 5.1 Pentahapan Implementasi RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045	V-2



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota	II-2
Tabel 2.2 Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo.....	II-4
Tabel 2.3 Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo	II-7
Tabel 2.4 Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Provinsi Gorontalo.....	II-7
Tabel 2.5 Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan menurut Kab/Kota di Provinsi Gorontalo Tahun 2021	II-11
Tabel 2.6 Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Gorontalo.....	II-32
Tabel 2.7 Distribusi Presentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020	II-34
Tabel 2.8 Luasan dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020	II-35
Tabel 2.9 Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020.....	II-36
Tabel 2.10 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Gorontalo	II-42
Tabel 2.11 Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo	II-45
Tabel 2.12 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2023	II-54
Tabel 2.13 PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 -2023 (Milyar Rupiah)	II-50
Tabel 2.14 Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran Tahun 2010-2023	II-51
Tabel 2.15 Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2023	II-53
Tabel 2.16 IPM Provinsi Se-Sulawesi Tahun 2019-2023	II-62
Tabel 2.17 Capaian Dimensi IPM Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2014-2023	II-62
Tabel 2.18 Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II-64
Tabel 2.19 Indeks Ketimpangan Gender Regional Sulawesi 2018-2022	II-70
Tabel 2.20 Skor Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II-86
Tabel 2.21 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan 2023	II-90



Tabel 2.22 Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023	II-93
Tabel 2.23 Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Gorontalo Tahun 2023	II-95
Tabel 2.24 Analisis Kebutuhan Rumah	II-104
Tabel 2.25 Analisis Kebutuhan Air Minum	II-104
Tabel 2.26 Proyeksi Kebutuhan Listrik	II-105
Tabel 2.27 Tren Perkembangan Timbulan Sampah di Provinsi Gorontalo	II-106
Tabel 2.28 Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	II-106
Tabel 2.29 Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan	II-108
Tabel 2.30 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan	II-109
Tabel 3.1 Hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan	III-13
Tabel 4.1 Sasaran Visi, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan 2045 ...	IV-3
Tabel 5.1 Arah Kebijakan/Tujuan Pembangunan Provinsi Gorontalo 2025-2045	V-1
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah per Periode Pembangunan	V-15
Tabel 5.3 Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD	V-17
Tabel 5.4 Sasaran Pokok, Indikator Pembangunan dan Target Pembangunan Per Periodisasi Pembangunan	V-28

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2015-2022	II-28
Grafik 2.2 Indeks Lingkungan Hidup tahun 2011-2022	II-33
Grafik 2.3 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo	II-37
Grafik 2.4 Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2022	II-38
Grafik 2.5 Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2007-2022	II-40
Grafik 2.6 Rata-Rata Distribusi PDRB Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2010-2022	II-42
Grafik 2.7 Rata-Rata Distribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran selang Tahun 2010-2022	II-43
Grafik 2.8 Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Regional Sulawesi Tahun 2007-2022 ...	II-44
Grafik 2.9 Perkembangan Inflasi Provinsi Gorontalo	II-46
Grafik 2.10 Indeks Gini Provinsi Gorontalo 2007-2022	II-48
Grafik 2.11 Perbandingan Gini Rasio Provinsi Perkotaan dan Perdesaan.....	II-48
Grafik 2.12 Persentase Kemiskinan di Provinsi Gorontalo 2007-2022	II-49
Grafik 2.13 Presentase Kemiskinan Regional Sulawesi 2017-2022	II-50
Grafik 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional 2007-2022	II-51
Grafik 2.15 TPT menurut Tingkat Pendidikan yang di Tamatkan Provinsi Gorontalo	II-52
Grafik 2.16 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional tahun 2014-2023	II-53
Grafik 2.17 Indeks Ketimpangan Gender Nasional dan Provinsi Gorontalo 2018-2022	II-62
Grafik 2.18 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo	II-64
Grafik 2.19 PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2022	II-66
Grafik 2.20 Indeks Ekonomi Hijau Ekoregion Sulawesi	II-67
Grafik 2.21 Indeks Literisasi Digital Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022	II-68
Grafik 2.22 Tingkat Pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional 2008-2023	II-71
Grafik 2.23 TPT menurut tingkat Pendidikan yang ditamatkan Provinsi Gorontalo	II-72
Grafik 2.24 Skor Indeks Literisasi Digital Nasional dan Provinsi Gorontalo 2022	II-73
Grafik 2.25 Realisasi Pendapatan dan Presentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo	
Tahun 2017-2022	II-84
Grafik 2.26 Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribu) dan TFR Provinsi Gorontalo 2025-2045 .	II-91
Grafik 2.27 Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020-2035	II-91
Grafik 2.28 Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo 2025-2045	II-92
Grafik 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-Laki Tahun 2025-2045	II-93
Grafik 2.30 Rasio Ketergantungan Provinsi Gorontalo 2020-2045	II-94



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Gorontalo secara resmi terbentuk pada tanggal sejak terbentuk berdasarkan Undang-Undang 38 Tahun 2000 tanggal 22 Desember 2000 dan menjadi Provinsi ke 32 di Indonesia, yang merupakan hasil pemekaran daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dalam usianya yang telah memasuki lebih dari 2 (dua) dekade, berbagai pencapaian pembangunan telah dilaksanakan secara progresif dan dinamis diberbagai aspek pembangunan, mulai dari perekonomian, tingkat kesejahteraan, kualitas Sumber Daya Manusia, Lingkungan dan Tata Kelola Pemerintahan. Penyelenggaraan pembangunan Provinsi Gorontalo tersebut sebagai wujud dari pencapaian kinerja pembangunan yang telah dijabarkan dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.

Kinerja pembangunan daerah sebagai refleksi pencapaian pembangunan pada periode RPJPD 2007-2025 menunjukkan berbagai keberhasilan yang telah dicapai oleh Provinsi Gorontalo. Pada aspek pembangunan ekonomi ditunjukkan dengan ekonomi yang tumbuh mencapai 4,30% tahun 2023, dengan nilai PDRB mencapai Rp. 51,37 Trilyun dan Pendapatan perkapita mencapai Rp. 42,35 juta/tahun (2.779,11 US\$) tahun 2023 meningkat 185% dibanding tahun 2010 yang mencapai Rp 14,81 Juta/tahun. Pada aspek kesejahteraan, ditandai dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran mengalami penurunan yang , meskipun masih menjadi tantangan pembangunan kedepan. Tingkat kemiskinan turun mencapai 14,57 % tahun 2023, turun sebesar 12,78% poin dibanding tahun 2007 sebesar 27,35%. Tingkat Pengangguran terbuka tahun 2023 mencapai 3,07 persen turun cukup signifikan dibanding tahun 2007 yang mencapai 7,16 %. Ketimpangan pengeluaran yang ditandai dengan indeks gini 0,417 (2023), dan Tingkat pengangguran terbuka turun mencapai 3,07 persen ditahun 2023. Pada aspek kualitas SDM, ditandai dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, dan ditahun 2023 mencapai 72,98 persen. Pada Aspek Lingkungan ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mencapai 79,79 atau masih dalam kategori Baik. Sedangkan pada aspek tata kelola pemerintahan ditandai dengan nilai SAKIP Tahun 2023 mencapai 68,66 % (kategori B), Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 77,75% (Kategori BB), Indeks Daya Saing Daerah mencapai skor 3,15 namun masih dibawah rata-rata nasional.

Meskipun capaian indikator makro menunjukkan kinerja positif, namun masih banyak permasalahan maupun tantangan pembangunan kedepan diberbagai bidang pembangunan, yang perlu dituntaskan baik dalam periode pemabangunan jangka panjang, menengah



maupun jangka pendek. Dimana tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diposisi 5 tertinggi secara Nasional dan tertinggi diwilayah Sulawesi, Pengelolaan sektor-sektor ekonomi belum optimal dalam mendorong peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya, pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana pelayanan dasar serta aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah belum optimal dalam rangka mengurangi ketimpangan dan kesenjangan antar wilayah, disisi lingkungan belum optimalnya pengelolaan sampah, kualitas air yang rendah serta bencana hidrometeorologi yang masih sering terjadi di wilayah Provinsi Gorontalo.

Keberhasilan maupun tantangan pembangunan perlu direspon pada perencanaan dimasa mendatang, yang dirumusan melalui strategi dan akselerasi penyelesaian masalah maupun kinerja-kinerja pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan. Selain mengacu pada hasil evaluasi pencapaian periode sebelumnya, penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo juga mengacu dan selaras dengan kebijakan yang tertuang dalam RPJPN Tahun 2025-2045 serta memperhatikan pola ruang dan struktur ruang dalam RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2024-2043. Hal ini sebagaimana ketentuan undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa dalam rangka perencanaan pembangunan yang sistematis, terarah terpadu, menyeluruh dan responsif, maka pemerintah perlu menjamin pelaksanaan pembangunan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dengan mengacu pada RPJP Nasional dan RTRW Provinsi, yang disusun dengan mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD.

Dalam rangka memperkuat sinergi perencanaan pusat dan daerah dan dalam rangka menjalankan fungsi sebagai wakil pemerintah Pusat didaerah, maka Pemerintah Provinsi berkewajiban menyelaraskan kebijakan sesuai dengan kebijakan pusat sebagaimana Surat Edaran Bersama Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan RPJPD dengan RPJM Nasional 2025-2045. RPJPD Provinsi memiliki peran penting dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2045. Perwujudan Indonesia Emas 2045 sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, terdiri dari 8 Misi, 17 Arah Pembangunan dan 45 Indikator Utama Pembangunan yang memiliki filosofi yang kuat yaitu mencerminkan kemerdekaan bangsa Indonesia, sehingga penjabaran kebijakan dan sasaran ditingkat daerah bersifat imperatif. RPJPD Provinsi Gorontalo dalam mendukung pencapaian Visi RPJPN telah menjabarkan Visi, Misi, Arah Kebijakan serta sasaran pokok yang selaras dengan RPJP Nasional yang diantaranya menjabarkan upaya transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola serta memperkuat landasan transformasi dan menjalankan

kerangka implementasi transformasi berupa pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan dan kesinambungan pembangunan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi, transformasi sosial menggambarkan adanya perubahan sosial atau perubahan yang ada dalam kehidupan masyarakat yang signifikan dan meluas dalam suatu masyarakat, Transformasi Ekonomi merupakan upaya untuk mendorong perubahan besar pada kinerja perekonomian, yang umumnya diindikasikan melalui peningkatan pendapatan, yang pada masa itu selalu dicoba untuk disejajarkan dengan negara-negara Eropa Barat sebagai *benchmark* untuk negara maju, dan Transformasi tata kelola (*governance*) merupakan suatu upaya untuk memperbaiki sistem tata kelola suatu organisasi, institusi, atau pemerintahan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kepentingan publik.

Selain mengacu dan selaras dengan RPJP Nasional, RPJPD Provinsi juga mempertimbangkan berbagai dokumen seperti RTRW, KLHS RPJPD, SDGs, dan dokumen sektoral lainnya. Dokumen tersebut menjadi bagian dari sistem perencanaan pembangunan Nasional, yang akan menjadi arah pembangunan Provinsi Gorontalo dalam 20 tahun kedepan. Proses penyusunan RPJPD telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan dengan melibatkan berbagai unsur-unsur pembangunan dalam Forum Konsultasi Publik, Forum Tematik maupun Musrenbang, untuk memastikan penyusunan RPJPD sudah sesuai prinsip-prinsip perencanaan baik Politik, Teknokratis, Top Down, Bottom Up maupun Paritispatif, sehingga melahirkan dokumen RPJPD yang berkualitas, mudah diterjemahkan dan sesuai dengan harapan masyarakat Provinsi Gorontalo kedepan.

Penjabaran arah pembangunan dalam RPJPD Provinsi Gorontalo akan dijabarkan lebih teknis kedalam dokumen turunannya baik RPJMD, RKPD maupun Renstra Perangkat Daerah. Selain itu dalam rangka menjamin sinergitas pembangunan daerah, RPJPD juga diharapkan menjadi acuan bagi penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten dan Kota di wilayah Provinsi Gorontalo, serta rencana-rencana pembangunan sektoral lainnya, serta dapat dipedomani bagi pemerintah dan unsur-unsur pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan daerah dengan mengelaborasi aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJPD tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

2. Undang-undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5757);
9. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
13. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
18. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.4/110/SJ Tahun 2023 tentang Penyelarasan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan RTRW;
19. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ – Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
20. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.2.1/3647/SJ – Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemutakhiran Sasaran Pembangunan Provinsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
21. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 – 2043 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2).

1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam menjaga sinergi dan sinkronisasi pembangunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah memiliki hubungan dengan dokumen Rencana

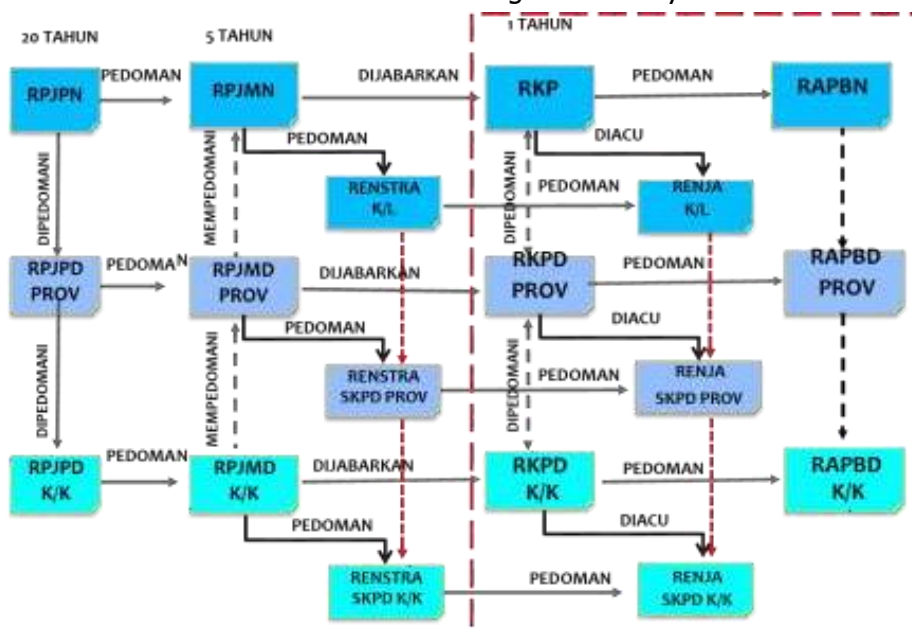
Pembangunan lainnya baik Rencana Pembangunan Nasional, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, yaitu di antaranya sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 mengacu dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 sebagaimana Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 600.1/176/SJ – Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 memperhatikan dokumen rencana spasial Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Gorontalo Tahun 2024-2043;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Gorontalo.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam Perumusan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Gorontalo.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 juga memperhatikan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi berbatasan, dan memperhatikan rencana pembangunan kewilayahan/regional.

Keterkaitan/hubungan antar dokumen RPJPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, secara lebih rinci digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Hubungan antar Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dengan Dokumen Rencana Pembangunan Lainnya



1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yaitu sebagai arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dan menjadi acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan daerah (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah yang integral dengan tujuan pembangunan Nasional, sebagaimana Visi, Misi dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama, dalam rangka mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan serta berkolaborasi dalam satu tujuan dan kerangka pembangunan bersama.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat Visi, Misi Arah Kebijakan dan Program Kepala Daerah.
2. Untuk menjabarkan arahan kebijakan pembangunan jangka panjang yang selaras dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka panjang nasional;
3. Untuk menjamin kesinambungan pembangunan daerah yang dikemas dalam kerangka sasaran dan arah kebijakan pembangunan dalam mewujudkan Visi Misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen RPKPD dengan dokumen rencana pembangunan lainnya, serta maksud dan tujuan tujuan penyusunan dokumen RPJPD.

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat penjabaran analisis gambaran umum kondisi daerah yang

meliputi:

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
 - 2.1.1 Aspek Geografi
 - 2.1.2 Aspek Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
- 2.3. Aspek Daya Saing Daerah
 - 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
 - 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia
 - 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
 - 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi
- 2.4. Aspek Pelayanan Umum
- 2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2025-2025
- 2.6. Tren Demografi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis daerah yang menjadi dasar perumusan visi misi pembangunan jangka panjang daerah.

- 3.1 Permasalahan
- 3.2 Isu Strategis Daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Menyajikan Visi dan Misi pembangunan daerah selama 20 (dua) puluh tahun yang menjadi bagian penting dalam penyajian dokumen RPJPD, sebagai cita-cita yang diharapkan dari hasil pembangunan daerah.

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK DAERAH

Memuat arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang daerah, yang menjabarkan kebijakan dan indikator serta target pembangunan jangka panjang daerah dalam perwujudan visi misi pembangunan. Arah kebijakan dan sasaran pokok juga merupakan fondasi dalam pentahapan pembangunan yang dilakukan pada 4 (empat) periodisasi pembangunan jangka menengah.

4.1 Arah Kebijakan Daerah

4.2 Sasaran Pokok

BAB VI PENUTUP

Memuat Kaidah Pelaksanaan dan Pembiayaan Pembangunan dalam Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo 2025-2045, diantaranya diantaranya melalui konsistensi perencanaan dan pendanaan, sistem insentif, kerangka pengendalian, termasuk pengendalian dan evaluasi pembangunan dan manajemen risiko, mekanisme perubahan, komunikasi publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik, peningkatan kapasitas pembiayaan sektor non publik, dan manajemen investasi sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

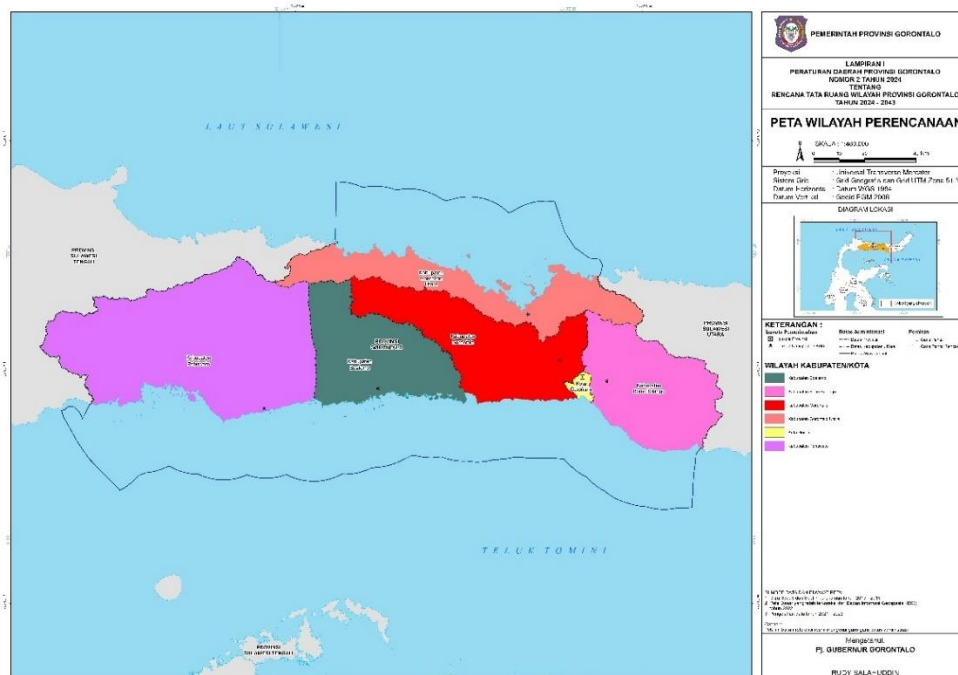
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

Provinsi Gorontalo dibentuk pada tanggal 5 Desember Tahun 2000, dan menjadi provinsi ke-32 di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo tanggal 22 Desember 2000. Provinsi Gorontalo memiliki luas wilayah sebesar 12.025,147 Km², atau sebesar 0,63 persen dari luas wilayah Indonesia, sebagaimana Kepmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau. Sedangkan cakupan wilayah perencanaan sebagaimana RTRW Provinsi seluas kurang lebih 2.107.785 Ha, meliputi wilayah darat dan wilayah laut.

Wilayah Administrasi Provinsi berada pada posisi geografis 0°6' 18" – 1°15' 25" Lintang Utara dan 121°9' 40" – 123°33' 99" Bujur Timur. Letak Provinsi Gorontalo sangat strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Provinsi Gorontalo juga berbatasan langsung dengan dua provinsi, yaitu Provinsi Sulawesi Tengah di sebelah Barat dan Provinsi Sulawesi Utara di sebelah Timur.

Gambar 2.1 Peta Administrasi Provinsi Gorontalo



Sumber: RTRW Provinsi Gorontalo tahun 2024-2043

Secara Administratif, Provinsi Gorontalo terbagi atas 5 Kabupaten dan 1 Kota yakni Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi. Dari 6 wilayah administrasi tersebut terdiri atas 77 Kecamatan, 72 Kelurahan dan 657 Desa. Kabupaten dengan kecamatan terbanyak adalah Kabupaten Gorontalo. Kabupaten Pohuwato memiliki wilayah terluas di Provinsi Gorontalo dengan luas wilayah sebesar 4.370,359 km² atau sebesar 36,34 %, sedangkan Kota Gorontalo memiliki wilayah terkecil di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 70,933 km² atau sebesar 0,59%.

Tabel 2.1

Luas Wilayah Provinsi Gorontalo menurut Kabupaten/Kota

Kode Wilayah	Wilayah	Jumlah Kecamatan	Kelurahan/Desa			Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
			Kelurahan	Desa	Jumlah		
75.01	Kabupaten Gorontalo	19	14	191	205	2.160,364	17,97
75.02	Kabupaten Boalemo	7	-	84	84	1.830,865	15,23
75.03	Kabupaten Bone Bolango	18	5	160	165	1.888,998	15,71
75.04	Kabupaten Pohuwato	13	3	101	104	4.370,359	36,34
75.05	Kabupaten Gorontalo Utara	11	-	123	124	1.703,628	14,17
75.71	Kota Gorontalo	9	50	-	50	70,933	0,59
75	Provinsi Gorontalo	77	72	657	729	12.025,147	100

Sumber : *Keppmendagri 100.1.1-1667 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.*

A. Kondisi Topografi

Berdasarkan topografinya wilayah Provinsi Gorontalo merupakan daerah dataran, perbukitan dan pegunungan. Wilayah Kota Gorontalo adalah yang terletak pada elevasi yang paling rendah, dari 0 sampai 500 meter di atas permukaan laut. Kabupaten Gorontalo terdiri dari wilayah dataran dan pegunungan berada pada elevasi bervariasi, dari 0 sampai 2.065 m dari permukaan laut. Kabupaten Boalemo terdiri dari wilayah dengan topografi datar sampai bergunung terletak pada ketinggian dengan variasi dari 0 sampai 2.100 m dari permukaan laut. Kabupaten Pohuwato terletak pada elevasi 0 sampai 1.920 m yang ditemukan di daerah perbatasan dengan Sulawesi Tengah. Kabupaten Bone Bolango mempunyai topografi dengan variasi antara 0 sampai 1.954. Kabupaten Gorontalo Utara mempunyai topografi dengan ketinggian yang berbeda-beda, dengan variasi ketinggian antara 0 sampai 1.970 m dari permukaan laut.

Gambar 2.2
Peta Topografi Provinsi Gorontalo



Sumber : KHLs RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Wilayah Gorontalo dikelompokkan menjadi 2 satuan wilayah morfologi, yaitu:

- 1) Satuan morfologi pegunungan berlereng terjal, terutama menempati wilayah bagian tengah dan utara wilayah Gorontalo, yang menjadi pembatas sebelah timur dan sebelah utara dari Cekungan Air Tanah Limboto yaitu dengan beberapa puncaknya berada di Pegunungan Tilongkabila, antara lain : G. Gambut (1954 m), G. Tihengo (1310 m), G. Pombolu (520 m) dan G. Alumolingo (377 m). Satuan morfologi ini terutama dibentuk oleh satuan batuan Gunung api tersier dan batuan Plutonik.
- 2) Satuan morfologi perbukitan bergelombang, terutama dijumpai di daerah bagian selatan dan bagian barat dan menjadi batas cekungan di sebelah selatan dan sebelah utara. Satuan morfologi ini umumnya menunjukkan bentuk puncak membulat dengan lereng relatif landai dan berjulang kurang dari 200 meter yang terutama ditempati oleh satuan batuan Gunung api dan batuan sedimen berumur Tersier hingga Kuartar.

Satuan morfologi dataran, merupakan daerah dataran rendah yang berada di bagian tengah wilayah Cekungan Limboto yaitu di sekitar Danau Limboto. Pada umumnya daerah ini ditempati oleh satuan aluvium dan endapan danau. Aliran sungai di wilayah ini umumnya mempunyai pola sub dendritic dan sub paralel. Satuan morfologi pegunungan dicirikan dengan bentuk bentang alam berbentuk kerucut, dengan puncak-puncak tertinggi adalah Gunung Tabongo (2.100 mdpl), Gunung Boliyohuto (2.065 mdpl), Gunung Mopangga (2.051 mdpl) dan Gunung Pontolo (2.017 mdpl).

Tabel 2.2

Kelas Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo

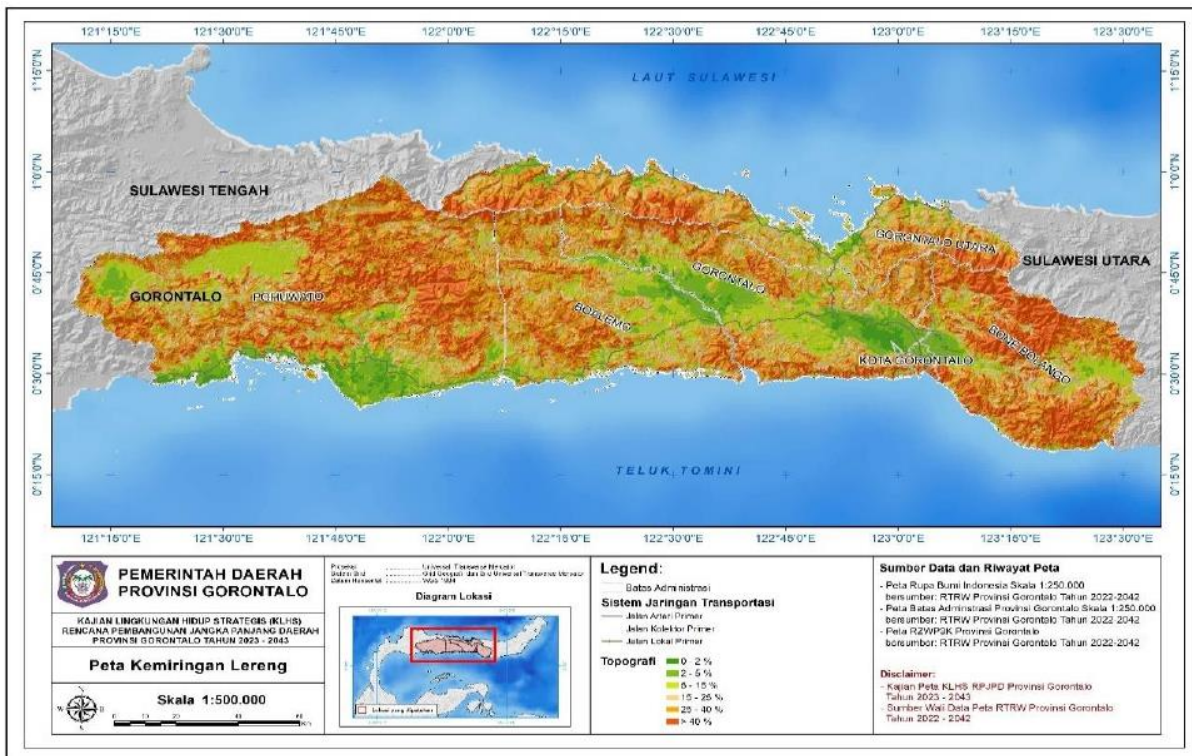
Kelas Lereng	Kemiringan (%)	Luas (ha)	Persentase (%)
A	0 – 2	22.043,96	1,83
B	2 – 5	100.302,18	8,33
C	5 – 15	189.728,33	15,76
D	15 – 25	183.796,47	15,26
E	25 – 40	400.774,82	33,29
F	>40%	307.414,80	25,53
Jumlah		1.204.060,56	100,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa wilayah dengan kemiringan paling sedikit yaitu 0 – 2 % yaitu 22.043,96 ha, kemudian kemiringan 2 – 5 % yaitu 100.302,18, sedangkan wilayah kemiringan paling banyak yaitu antara 25>40% atau seluas 708.189,62 ha.

Gambar 2.3

Peta Kemiringan Lereng Provinsi Gorontalo



Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

B. Geologi

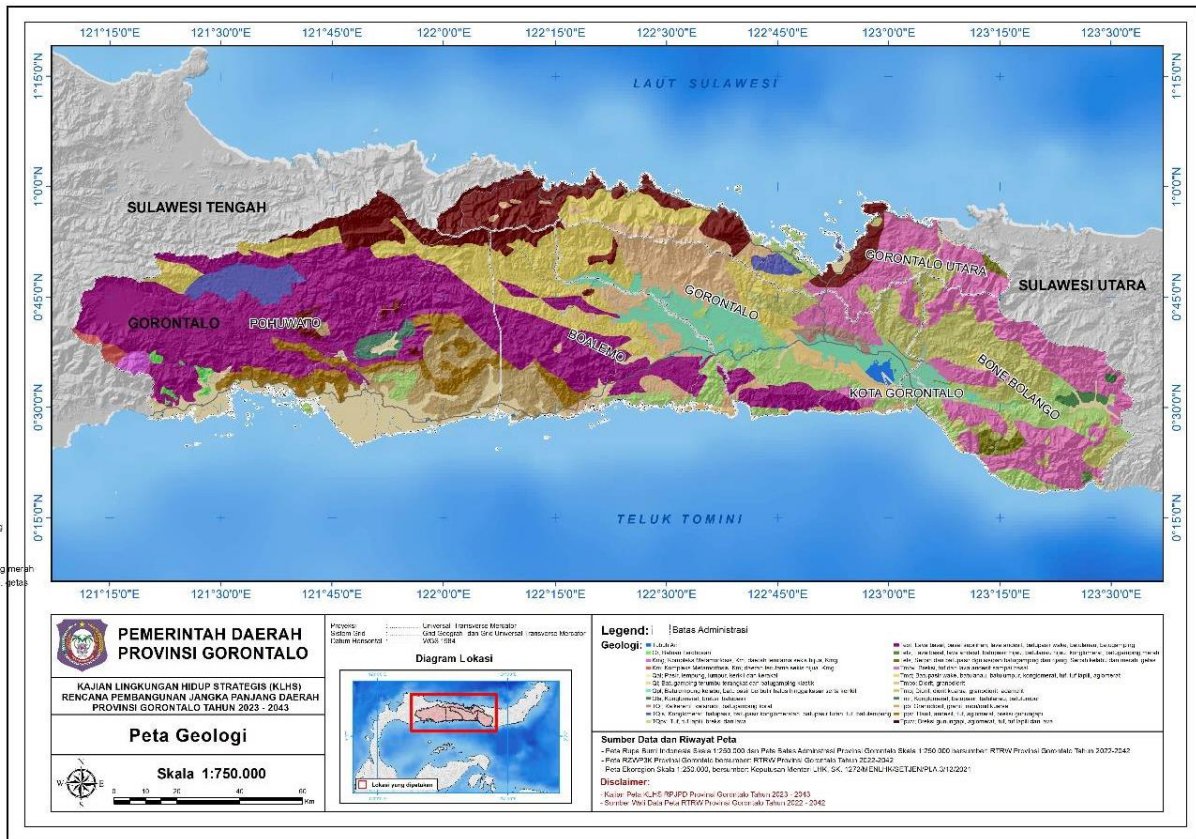
Provinsi Gorontalo merupakan bagian dari lengan utara Sulawesi yang sebagian besar batuan nya ditempati oleh batuan gunung api Tersier. Di wilayah tengah bagian timur dijumpai dataran rendah yang berbentuk memanjang, terbentang dari Danau Limboto ke Lembah Paguyaman yang diduga semula merupakan danau. Batuan yang ada di daerah penyelidikan

terdiri dari batuan-batuan yang berumur Tersier hingga Kuartar. Urutan batuan dari yang tertua hingga batuan yang termuda adalah sebagai berikut:

- Formasi Tinombo (Teot): Terdiri dari lava basal, basal sepilitan, lava andesit, breksi gunungapi, batu pasir wake, batu lanau, batu pasir hijau, batu gamping merah, batu gamping kelabu dan batuan termalihkan lemah. Formasi ini berumur Eosen – Pertengahan Oligosen.
- Secara selaras diatas Formasi Tinombo terdapat Formasi Dolokopa (Tmd) yang terdiri dari: batu pasir wake, batu lanau, batu lumpur, konglomerat, tuf, tuflapili, aglomerat, breksi gunung api, lava andesit sampai basalt. Formasi Dolokopa berumur Miosen Tengah – Pertengahan Miosen Atas.
- Kedua formasi batuan tersebut selanjutnya di intrusi oleh Diorit Boliohuto (Tmbo) yang terdiri dari diorit dan granodiorit yang berumur Pertengahan Miosen Tengah - Pertengahan Miosen Atas.
- Diatas ketiga batuan baik Formasi Tinombo, Formasi Dolokopa dan intrusi Diorit Boliohuto secara tidak selaras ditempati oleh Batuan Gunung api Pinggu (TQpv) yang terdiri dari: aglomerat, tuf, lava andesit, basalt yang berumur Pliosen Atas - Plistosen Bawah. Selaras lebih muda bersamaan diendapkan batu gamping klastika (TQI) yang terdiri dari kalkarenit, kalsirudit dan batu gamping koral. Selanjutnya pada Plistosen mulai di endapkan endapan Danau yang berumur Plistosen Bawah - Holosen dan di atasnya secara selaras diendapkan batu gamping terumbu (QI) yang dimulai pada Plistosen Atas – Holosen berupa batu gamping koral, sedangkan endapan yang paling muda di daerah penyelidikan adalah berupa endapan permukaan/ aluvium (Qpl).

Struktur geologi yang utama yang berkaitan dengan daerah penyelidikan adalah sesar, berupa sesar normal dan sesar geser. Sesar normal yang terdapat di G. Boliohuto menunjukkan pola memancar, sedangkan sesar geser umumnya bersifat mengangan tetapi ada pula yang mengiri. Sesar tersebut memotong batuan yang berumur tua (Formasi Tinombo) hingga batuan yang berumur muda (Satuan Batu gamping Klastik).

Gambar 2.4
Peta Geologi Provinsi Gorontalo



Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

C. Klimatologi

Suhu udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut dari permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Provinsi Gorontalo memiliki iklim tropis. Dengan kondisi wilayah Provinsi Gorontalo yang letaknya di dekat garis khatulistiwa, menjadikan daerah ini mempunyai suhu udara yang cukup panas. Menurut catatan Stasiun Klimatologi Gorontalo, suhu udara rata-rata Provinsi Gorontalo selama tahun 2023 adalah 29,84°C. Suhu terendah terjadi di bulan Oktober yaitu 19,2°C. Provinsi Gorontalo memiliki kelembaban udara yang relatif tinggi. Rata-rata kelembaban udara pada tahun 2023 sebesar 69,59 persen. Sementara itu, untuk jumlah curah hujan selama tahun 2023 yaitu sebesar 1.292,1 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Januari, yaitu mencapai 169,60 mm.

D. Hidrologi

1) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Wilayah Provinsi Gorontalo dibagi kedalam tiga Daerah Aliran Sungai (DAS) utama, masing-masing DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Limboto Bolango Bone. Diluar dari

ketiga DAS utama tersebut, juga terdapat Daerah Aliran Sungai Kecil lainnya yang umumnya terdapat di hampir seluruh wilayah pegunungan dipinggiran kawasan pantai. Air dari DAS-DAS kecil bermuara di Teluk Tomini untuk DAS dibagian Selatan Provinsi dan dilaut Sulawesi untuk DAS dibagian utara Provinsi.

Tabel 2.3
Wilayah Sungai (WS) Provinsi Gorontalo

NO	NAMA WILAYAH SUNGAI	KODE	LUAS (Km ²)
1.	Wilayah Sungai Limboto-Bolango-Bone (WS LBB)	WS No. 05.05.A2	456.944,03
2.	Wilayah Sungai Paguyaman	WS No. 05.05.A3	3.485,65
3.	Wilayah Sungai Randangan	WS No. 05.06.A2	3.945

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Tabel 2.4
Wilayah Sungai (WS) dan Daerah Aliran Sungai (DAS)
Di Provinsi Gorontalo

DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)			
WS Paguyaman	WS Limboto-Bolango-Bone (LBB)		WS Randangan
1. DAS Paguyaman,	1. DAS Tolinggula,	38. DAS Waluhu	1. DAS Randangan
2. DAS Limba,	2. DAS Potanga,	39. DAS Bilolantunga	2. DAS Beringin
3. DAS Olibuhu,	3. DAS Limbato	40. DAS Tombulilato	3. DAS DingaMotohohu,
4. DAS Tumba,	4. DAS Biawu,	41. DAS Ombulo	4. DAS Patihu,
5. DAS Bolangga,	5. DAS Bulolila,	42. DAS Momungaa	5. DAS Sidorukun,
6. DAS Bubaa,	6. DAS Bulontio,	43. DAS Bangahu	6. DAS Sukadamai,
7. DAS Tumbihi,	7. DAS Boliohulu	44. DAS Mopuya	7. DAS Wonggarasi,
8. DAS Limbatihu,	8. DAS Boliyohuto,	45. DAS Kaidundu	8. DAS Lemito,
9. DAS Tabongo,	9. DAS Baladu,	46. DAS Uabanga	9. DAS Lomuli,
10. DAS Dulupi,	10. DAS Mooti,	47. DAS Tongo	10. DAS Milangodaa,
11. DAS Sambat,	11. DAS Sipatana,	48. DAS Bilungala	11. DAS Popayato,
12. DAS Tilamuta,	12. DAS Dulukapa,	49. DAS Tamboo	12. DAS Dudeulo,
13. DAS Lamu,	13. DAS Deme I,	50. DAS Tolotio	13. DAS Molosipat,
14. DAS Botumoito,	14. DAS Dunu,	51. DAS Olele	14. DAS Moutong
15. DAS Tapadaa,	15. DAS Bubalango,	52. DAS Oluhuta	
16. DAS Salilama,	16. DAS Tengah,	53. DAS Molotabu	
17. DAS Tabulo,	17. DAS SOgu,	54. DAS Botutonuo	
18. DAS Bumbulan,	18. DAS Monano,	55. DAS Modelamo	
19. DAS Libuo	19. DAS Tudi,	56. DAS Buluango	
20. DAS Marisa	20. DAS Tolango,	57. DAS Huangobutu	
	21. DAS Datahu,	58. DAS Inengo	
	22. DAS Popalo,	59. DAS Leato	
	23. DAS Tolangio,	60. DAS Bolango-Bone	
	24. DAS Pontolo,	61. DAS Limboto	
	25. DAS Buda,	62. DAS Pohe	
	26. DAS Posso,	63. DAS TanjungKramat	
	27. DAS Bubode,	64. DAS Bongo	
	28. DAS Sanbungo,	65. DAS Lopo	
	29. DAS Tolotapo,	66. DAS Kayu Bulan	
	30. DAS Butoimola,	67. DAS Bilihu Timur	
	31. DAS Samia	68. DAS Langgula	
	32. DAS Tapaibuhu	69. DAS Lamu	
	33. DAS Soklat	70. DAS Limo'o	
	34. DAS Sapawea	71. DAS Lobuto Timur	
	35. DAS Imana	72. DAS Lobuto	
	36. DAS Taludaa	73. DAS Biluhu Barat	
	37. DAS Sogitia	74. DAS Huango	

Sumber : BWS Sulawesi II Provinsi Gorontalo, 2022

Berdasarkan hasil kajian menunjukkan bahwa dari total 245.000 Ha lahan DAS Limboto-Bone Bolango, 140.487 Ha termasuk dalam kategori agak kritis, kritis dan sangat

kritis. Hal ini diindikasikan menjadi penyebab meningkatnya sedimentasi baik disungai maupun didanau Limboto. Dalam kurun waktu 6 tahun (2013-2018) terjadi alih fungsi lahan hutan sebesar 2.100 Ha diwilayah DAS Limboto dan Bone, menjadi kawasan permukiman, pertanian, semak belukar, dll. Perubahan lahan ini berkontribusi terhadap peningkatan koefisien pengaliran dan indeks Erosi Tanah. Sempadan sungai belum efektif sebab pembangunan wilayah pemukiman masih dilaksanakan di wilayah sempadan sungai dan tanpa menerapkan konsep waterfront city. Hal ini menyebabkan tingginya kerawasan banjir di Kota Gorontalo, dimana 57% masyarakat tinggal dikawasan rawan banjir di Pusat Kota Gorontalo

2) Danau

Di Provinsi Gorontalo terdapat 2 (dua) danau yang secara potensial mempunyai nilai ekonomi bagi pengembangan bidang-bidang kepariwisataan, pengairan, dan energi antara lain :

1. Danau Limboto merupakan sebuah danau yang terletak di 2 (dua) wilayah yaitu wilayah Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo dimana pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau mencapai 30 m dengan luas 7.000 ha tetapi mulai tahun 1990 sampai sekarang kedalaman danau rata-rata hanya tinggal 2.5 m pada musim kemarau dan bisa mencapai 5 m pada musim hujan dengan luas kurang lebih 3.000 ha. Pendangkalan danau diakibatkan oleh adanya erosi dan sedimentasi dan masalah lain yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya gulma air seperti enceng gondok yang menutupi permukaan mencapai 30% sampai 35 % dari luas danau.
2. Danau Perintis yang terdapat di Desa Huluduotamo Kec. Suwawa ± 11 Km dari pusat kota Gorontalo dapat ditempuh ± 12 menit dengan kendaraan darat. Danau perintis merupakan obyek wisata seluas ± 6 Ha yang dibuat untuk kepentingan pengairan sawah. Air yang mengalir ke Danau Perintis berasal dari mata air pegunungan yaitu mata air Lulahu dan mata air Poso.

3) Cekungan Air Tanah

Wilayah cekungan air tanah di Provinsi Gorontalo ditetapkan sebanyak 9 (sembilan) wilayah cekungan air tanah berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah, yang terdiri atas CAT Bone, CAT Pinogu, CAT Tombulilato, CAT Gorontalo, CAT Molombulahe, CAT Mahinoto, CAT Sogniti, CAT Marisa, dan CAT Popayato.

E. Penggunaan Lahan

Secara umum penggunaan lahan di Provinsi Gorontalo terbagi menjadi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1) Kawasan Lindung

Kawasan lindung seluas kurang lebih 575.415 Ha, yang meliputi :

a. Badan Air

Badan air memiliki luas kurang lebih 7.192 Ha, yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.

b. Kawasan yang memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (PTB) memiliki luas kurang lebih 202.053 Ha, tersebar diseluruh wilayah Kabupaten/Kota.

c. Kawasan Perlindungan Setempat (PS)

Kawasan Perlindungan Setempat dengan luas kurang lebih 2.703 Ha, tersebar diwilayah Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo dan Kota Gorontalo.

d. Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi memiliki luas kurang lebih 279.403 Ha, terdiri dari :

1. Cagar Alam Mas Popaya Raja di Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Cagar Alam Panua di Kabupaten Gorontalo;
3. Cagar Alam di Kabupaten Gorontalo Utara;
4. Cagar Alam Tangale di Kabupaten Gorontalo;
5. Cagar Alam Tanjung Panjang di Kabupaten Pohuwato;
6. Kawasan Konservasi teluk Gorontalo di Laut;
7. Suaka Margasatwa Nantu di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo Utara;
8. Taman Hutan Raya di Kabupaten Gorontalo;
9. Taman Nasional Bogani Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo Utara.

Sedangkan Kawasan konservasi yang berada di Wilayah Laut diatur berdasarkan arahan zona kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

e. Kawasan Pencadangan Konservasi di laut

Kawasan pencadangan konservasi di Laut (KPL) memiliki luas kurang lebih 82.551 Ha, yang terdiri atas :

1. Kawasan konservasi Dulangka di Laut;
2. Kawasan konservasi Gorontalo Utara di Laut;
3. Kawasan konservasi Maruangi Mabasari di Laut;
4. Kawasan konservasi Monduli di Laut;
5. Kawasan konserbasi Olinggobe di Laut
6. Kawasan konservasi Sumalata di Laut;. Dan
7. Kawasan Konservasi Tolinggula di Laut.

Kawasan pencadangan konservasi di Laut yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

f. Kawasan Cagar Budaya,

Kawasan Cagar Budaya memiliki luas kurang lebih 26 Ha, yang terdiri atas :

1. Bangunan Indis Rumah Keluarga Hiola di Kabupaten Gorontalo
2. Bangunan Indis Rumah Keluarga Nelly Yusuf di Kabupaten Gorontalo;
3. Bangunan Indis Rumah Tinggi di Kota Gorontalo;
4. Bangunan Kantor Pos Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
5. Benteng Maas di Kabupaten Gorontalo Utara;
6. Benteng Orange di Kabupaten Gorontalo Utara;
7. Kantor Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM)/Kantor PT Pelayaran Nasional di Kota Gorontalo;
8. Makam Herman Christiaan Knappert di Kabupaten Gorontalo Utara;
9. Makam Nani Wartabone di Kabupaten Bone Bolango;
10. Makam Raja Blongkod di Kabupaten Bone Bolango;
11. Masjid Ar-Rahman Bulila di Kabupaten Gorontalo;
12. Masjid Tua Hunto Sultan Amay di Kota Gorontalo;
13. Pillbox 1 di Kabupaten Gorontalo Utara;
14. Rumah Dulohupa di Kota Gorontalo;
15. SDN 56 Kota Timur di Kota Gorontalo;
16. Situs Benteng Otanaha, Benteng Ulupahu, Benteng Otahiya di Kota Gorontalo;
17. SMA Negeri 1 Kota Gorontalo di Kota Gorontalo;
18. Struktur Makam Raja Tabala-Bala di Kabupaten Gorontalo;
19. Kompleks Makam Hubulo (Gobel) di Kabupaten Bone Bolango; dan
20. Makam Hilamuhu (Talo Tahangi Lipu) di Kabupaten Bone Bolango.

g. Kawasan Ekosistem Mangrove.

Kawasan Ekosistem Mangrove memiliki luas kurang lebih 1.486 Ha, terdapat di wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boalemo dan Laut. Kawasan Ekosistem Mangrove yang berada di wilayah Laut diatur dalam arahan zona kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut.

2) Kawasan Budidaya

Kawasan Budidaya meliputi Kawasan budidaya yang bernilai strategis provinsi, baik di darat maupun laut, memiliki luas kurang lebih 1.532.370 Ha, yang terdiri atas :

a. Kawasan hutan Produksi

Kawasan Hutan Produksi (KHP) terdapat di Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Boelamo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi hutan produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan hutan produksi konversi.

Berdasarkan data dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XV Gorontalo. Luas hutan Provinsi Gorontalo pada tahun 2010 seluas 824.668 Ha. Seiring berjalannya pembangunan, terjadi pelepasan kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan kelapa sawit dan untuk daerah transmigrasi, sehingga pada tahun 2023 luas kawasan hutan di Provinsi Gorontalo berkurang menjadi 764.881,23 Ha. Berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kehutanan, Kawasan Hutan dibagi kedalam kelompok hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi. Berikut adalah luas kawasan hutan menurut Kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2023 :

Tabel 2.5

Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo tahun 2023

Kabupaten/Kota	Hutan Lindung	Suaka Alam dan Pelestarian Alam	Hutan Produksi Terbatas	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi dapat dikonversi	Jumlah luas hutan dan perairan
Boalemo	28.514,52	10.970,62	44.240,78	14.537,49	4.783,09	103.046,50
Gorontalo	13.124,94	24.777,84	41.899,34	17.714,06	2.395,33	99.911,51
Pohuwato	136.582,81	39.707,97	83.304,44	41.476,29	10.522,52	311.594,03
Bone Bolango	15.634,23	104.855,72	18.830,08	824,10	-	140.144,13
Gorontalo Utara	8.021,54	16.210,33	64.388,66	15.540,08	5.554,01	109.714,62
Kota Gorontalo	470,48	-	-	-	-	470,48
Provinsi Gorontalo	202.348,52	196.522,47	252.663,30	90.092,02	23.254,95	764.881,27

Sumber : Gorontalo Dalam Angka Provinsi Gorontalo (2024)

Sebagaimana Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja disebutkan bahwa Pasal 38 Ayat (1) Penggunaan kawasan untuk kepentingan Pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan didalam kawasan hutan produksi dan hutan lindung, tanpa mengubah pokok kawasan hutan. Pemanfaatan Hutan Lindung dan Hutan Produksi dapat dilakukan Kegiatan Perhutanan Sosial.

- b. Kawasan Budidaya lainnya yaitu meliputi Kawasan Pertanian (KP), Kawasan Perikanan (IK), Kawasan Pergaraman (KEG), Kawasan Pertambangan dan Energi (TE), Kawasan Peruntukan Industri (PI), Kawasan Pariwisata (W), Kawasan Permukiman (PM), Kawasan Transportasi (TR), dan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

F. Potensi Wilayah

1) Potensi Pertanian

Sektor pertanian merupakan sektor unggulan Provinsi Gorontalo dan menjadi penyumbang terbesar PDRB. Sektor ini berpeluang besar dalam menyerap tenaga kerja

terutama masyarakat yang berada di perdesaan. Potensi pertanian Provinsi Gorontalo antara lain :

- Tanaman pangan meliputi padi dan palawija (jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedele, kacang tanah dan kacang hijau). Luas panen padi sawah adalah 48.498 ha dan produksi 249.709 ton (produktivitas 56,22 kw/ha), dengan luas panen terbesar berada di Kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 ha. Untuk padi ladang adalah seluas 38 ha dengan produksi 120 ton (produktivitas 31,58 kw/ha). Luas panen jagung adalah 334.945 ha dengan 1.050.662 ton produksi (48,22 kw/ha produktivitas), 48% di antaranya berada di Kabupaten Pohuwato.
- Hortikultura meliputi komoditas sayur-sayuran (bawang merah, bawang daun, bayam, cabai besar, cabai rawit, kacang panjang, kangkung, ketimun, kubis, melon, petsai/sawi, semangka, terung, tomat dan wortel) dan buah-buahan (alpukat, belimbing, duku, durian, jambu air, jambu biji, jeruk besar, jeruk siam, mangga, manggis, nangka, nenas, pepaya, rambutan, salak, sawo, sirsak dan sukun). Cabai rawit merupakan komoditas utama sayur-sayuran dengan luas panen 1.993 hektar dengan produksi sebanyak 147.292 ton. Dari komoditas buah-buahan, pisang adalah yang utama dengan produksi 131.664 kw.

Luas Baku lahan Provinsi Gorontalo tahun 2020 sebesar 1.302.650 yang terdiri dari Luas lahan Sawah sebesar 32.488 Ha, Lahan pertanian bukan sawah sebesar 999.471 Ha, dan Lahan Bukan Pertanian sebesar 270.691 Ha.

Kota Gorontalo, memiliki Pertanian lahan basah seluas \pm 796 Ha berada di 7 (tujuh) Kecamatan dari 9 (Sembilan) Kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Kawasan tanaman pangan lahan basah untuk tanaman padi berada di Kecamatan Duingingi, Kota Timur, kota Utara, kota tengah, dan Sibatana. Lahan sawah di Kota Gorontalo hanya berupa lahan sawah irigasi teknis. Pertanian lahan kering seluas \pm 157 Ha. Kawasan tanaman pangan lahan kering dikembangkan untuk berbagai jenis tanaman antara lain: jagung di Kecamatan kota Barat, Duingingi, Kota Timur dan Kota Utara; tanaman buah mangga dan pisang di hampir seluruh wilayah kecamatan; tanaman buah nangka berada di Kecamatan Kota Barat, Kota Timur, Dumbo Raya, Kota Utara dan Sibatana; tanaman Buah pepaya di Kecamatan Kota Barat, Kota utara dan Sibatana. Kawasan hortikultura, berada di Kecamatan Kota Barat, duingingi, dan Kota Utara dengan Komoditi cabe dan tomat.

Kabupaten Boalemo, Lahan pertanian di Kabupaten Boalemo untuk lahan sawah irigasi berada di 5 kecamatan yaitu Manunggu, Botumoito, Paguyaman, Wonosari dan Dulupi dengan jenis komoditi berupa padi sawah. Sementara untuk Kawasan perkebunan di

Kabupaten Boalemo diarahkan pada pengembangan perkebunan dengan komoditi yang potensial untuk dikembangkan yaitu cengkeh, kakao, kelapa, kelapa sawit dan tebu dengan menyesuaikan ketinggian lahan.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Sektor Pertanian di wilayah ini terdiri dari beberapa komoditas pertanian yaitu: Komoditas Pertanian tanaman pangan terdiri dari padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, kacang kedelai, ubi jalar dan ubi kayu; Komoditas tanaman hortikultura terdiri dari bawang merah, bawang daun, petsai/sawi, cabe rawit, tomat, terong, ketimun, kangkung, bayam dan kacang panjang; Komoditas tanaman perkebunan antara-lain Kelapa, Kakao, Kemiri, Jambu, Kapuk, Pala, Cengkih, Kopi, Aren, Vanili, Kayu Manis; dan Komoditas Tanaman Buah-buahan yaitu Alpokat, Belimbing, duku, langsung, Durian, Jambu Biji, Jambu air, Jeruk Siam/Kepron, Jeruk Besar, mangga, Nangka, nenas, Pepaya, Pisang, Rambutan, Sirsak, dan Sukun.

Kabupaten Gorontalo, Potensi di Sektor Pertanian di daerah Kabupaten ini adalah tanaman Padi yang menjadi komoditi andalan, yang tersebar di 2 kawasan yaitu kawasan agropolitan, meliputi Kecamatan Telaga, Telaga Biru, Limboto Barat Tabongo, Dungaliyo, Batudaa, Pulubala, Tibawa Mootilango, Asparaga, Tolangohula, Boliyohuto, Telaga Jaya, Tilango, Bilato dan Limboto; dan di kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Batudaa Pantai, Biluhu, Bilato, Telaga, Telaga Biru, Limboto, Limboto Barat, Tabongo, Bongomeme, Dungaliyo, Pulubala, Tibawa, Mootilango, Boliyohuto, Tolangohula dan Asparaga. Sektor Pertanian sangat memungkinkan mengingat lahan produktif cukup luas yaitu tanah persawahan/basah 11.856 ha.

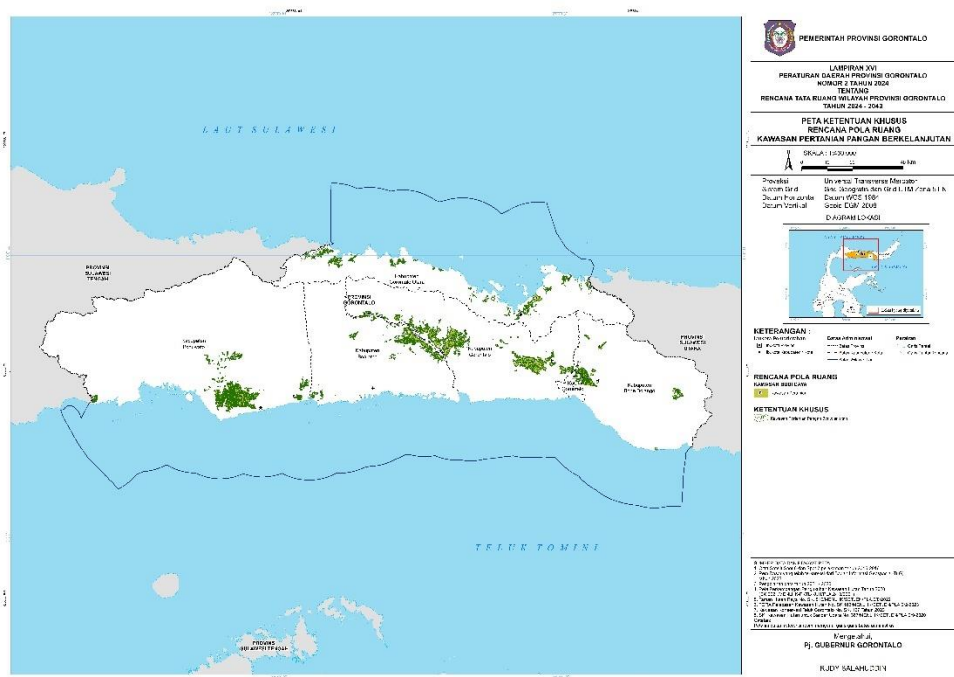
Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas yang termasuk pada tanaman pangan adalah padi, jagung, kacang tanah, kacang kedelai, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Gorontalo Utara tersebar di seluruh kecamatan. Kabupaten Gorontalo Utara juga memiliki produksi beberapa komoditas hortikultura. Komoditas hortikultura yang berupa tanaman sayur antara lain cabai rawit, tomat, terung, kacang panjang, dan kangkung. Tanaman sayuran yang paling banyak tumbuh dan tersebar merata di setiap kecamatan adalah cabai rawit, dengan luas panen seluas 455 hektar dan produksi mencapai 2.104,5 Ton pada tahun 2021. Untuk tanaman buah-buahan yang paling banyak adalah durian yang produksinya mencapai 655,3 Ton. Kecamatan Atinggola merupakan produsen buah durian terbanyak di Kabupaten Gorontalo Utara.

Kabupaten Pohuwato, Kabupaten ini mengandalkan Jagung dan Padi Sawah sebagai *brand* daerah, bahkan dinamakan sebagai Lumbung Jagung terbesar di Provinsi Gorontalo. Pengembangan pertanian Padi Sawah menjadi unggulan kedua setelah jagung

dengan luas areal lahan yang terhampar mencapai kira-kira 41.212 ha, atau sebesar 9,71% dari luas wilayah kabupaten. Petani di daerah ini juga mengembangkan komoditi Hortikultura dan Perkebunan dengan berbagai jenis tanaman seperti kopi, kakao, mete, kelapa dalam, kelapa sawit, cengkeh, panili dan kemiri serta buahan-buahan seperti durian, jeruk dan mangga. Luas areal yang diarahkan untuk pengembangan tanaman perkebunan adalah seluas 48.481 ha dengan areal pengembangannya merata ke segenap wilayah Kabupaten Pohuwato. Di Provinsi Gorontalo, komoditas tanaman pangan merupakan komoditas yang dominan dan dikembangkan secara intensif terutama padi dan jagung. Luas Panen Padi Provinsi Gorontalo Tahun 2022 sebesar 48.498 Ha, yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya seluas 66.401 Ha. Luas panen padi terbesar berada di kabupaten Gorontalo sekitar 24.123 Ha.

Dalam rangka menjamin kedaulatan pangan berkelanjutan, maka dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, dengan luasan kurang lebih 40.121 Ha, yang tersebar diwilayah Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato.

Gambar 2.5
Peta Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Peta KP2B sangat diperlukan untuk menjadi dasar acuan dalam setiap tahap pembangunan, terkait perijinan dan pengendalian pemanfaatan lahan. Dengan adanya

pemetaan kawasan pertanian pangan berkelanjutan, diharapkan juga menjadi dasar perencanaan bagi pembuat kebijakan di bidang pertanian.

Adapun beberapa rekomendasi tindak lanjut pemetaan LP2B, yaitu (1) Perlu dibuat program peningkatan produktifitas lahan melalui penerapan sapta usaha yang meliputi pemakaian benih unggul, pengolahan tanah yang baik, pengelolaan air, pemakaian pupuk berimbang dan pengendalian hama dan penyakit serta penanganan pasca panen dan pemasaran. (2) Melakukan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan jaringan irigasi baru (jaringan irigasi sederhana: jaringan berskala kecil, menggunakan teknologi sederhana, cepat berfungsi, serta murah biayanya dengan kemampuan membawa air dari sumbernya ke tempat pemanfaatan dengan cara sesederhana mungkin), peningkatan pemeliharaan jaringan irigasi – untuk mencapai tingkat kinerja jaringan irigasi yang andal, optimal dan berkelanjutan. (3) Masalah regenerasi petani, disebabkan rendahnya pendapatan di bidang pertanian dan makin menyusutnya lahan pertanian perlu ditangani dengan upaya-upaya misalnya memberikan perlindungan stabilitas harga di tingkat usahatani yang disesuaikan dengan biaya produksi serta melindungi lahan pertanian khususnya lahan pangan agar tidak beralih fungsi.

2) Potensi Peternakan

Selain Pertanian, peternakan juga menjadi salah satu potensi yang cukup berkembang di Provinsi Gorontalo. Faktor pendorongnya diantaranya adalah ketersediaan lahan dan pakan ternak. Populasi ternak Sapi Provinsi Gorontalo Tahun 2021 mencapai 261.690 ekor, sementara populasi ternak kambing 2021 sebesar 107.685 ekor. Selain ternak sapi dan kambing, potensi peternakan lainnya adalah jenis unggas ayam dan itik yang cukup mendorong perekonomian daerah. Berikut sebaran populasi unggas menurut kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo.

Kabupaten Bone Bolango : potensi peternakan adalah peternakan besar : sapi, kuda dan kambing, ayam kampung, ayam ras, dan itik. Populasi ternak sapi pada tahun tahun 2021 mencapai 48.317 Ekor. Peningkatan populasi sapi disebabkan Pelaksanaan Inseminasi Buatan melebihi target yang telah ditetapkan pada program SIKOMDAN sejumlah 2.400 Ekor.

Kabupaten Boalemo : Kawasan peruntukan peternakan di Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Manangu, Kecamatan Botumoito, Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Dulupi, Kecamatan Wonosari, Kecamatan Paguyaman Dan Kecamatan Paguyaman Pantai. Populasi peternakan di wilayah kabupaten ini meliputi sapi potong,

kuda, kambing dan babi. Yang masih paling dominan adalah sapi yakni 44.667 ekor per tahun. Ternak ayam buras, ayam pedaging, ayam petelur dan itik juga terdapat di daerah ini.

Kabupaten Gorontalo : Di sektor peternakan kabupaten gorontalo terus berusaha memenuhi permintaan pasar local dan regional yang terus meningkat termasuk permintaan pasar luar negeri, di antaranya yang terjalin melalui kerja sama ekspor. Potensi peternakan di daerah ini adalah sapi, (lokasi di seluruh kecamatan), kambing (lokasi dikembangkan di kecamatan biluhu dan batudaa pantai) dan itik (lokasi dikembangkan di kecamatan batudaa, tobango dan bongomeme).

Kabupaten Pohuwato : Potensi di sektor peternakan meliputi ternak ruminansia dan unggas. Untuk ruminansia dominan yang dikembangkan adalah ternak sapi dan kambing. Sedangkan untuk unggas terdiri dari ayam ras dan buras serta itik.

Kabupaten Gorontalo Utara : Potensi di sektor peternakan adalah sapi potong dan kambing sekaligus sebagai komoditas unggulan. daerah yang menjadi penghasil hewan ternak non unggas terbesar jenis sapi potong yaitu di Kecamatan Kwandang dan Anggrek, Kambing di Sumalata Timur dan Anggrek, Babi di Gentuma dan Kuda di Kecamatan Atinggola. Sedangkan pada jenis unggas, ayam kampung sebagai unggas terdominan di Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo : Pengembangan ternak dan unggas diarahkan pada lahan pertanian sawah bukan irigasi, pertanian lahan kering dan hortikultura. Rencana Kawasan ini di Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara yang berbatasan dengan Kabupaten Bone Bolango.

3) Potensi Perikanan

Potensi sumber daya alam di Provinsi Gorontalo sangat strategis khususnya disektor perikanan dan kelautan. Provinsi Gorontalo memiliki luas perairan laut 876.663,08 Ha atau 9.638.44 Km² yang memiliki panjang garis pantai 903,7 Km terdiri dari 572,5 Km Pantai Selatan/ Teluk Tomini dan 331,2 Km Pantai Utara/ Laut Sulawesi.

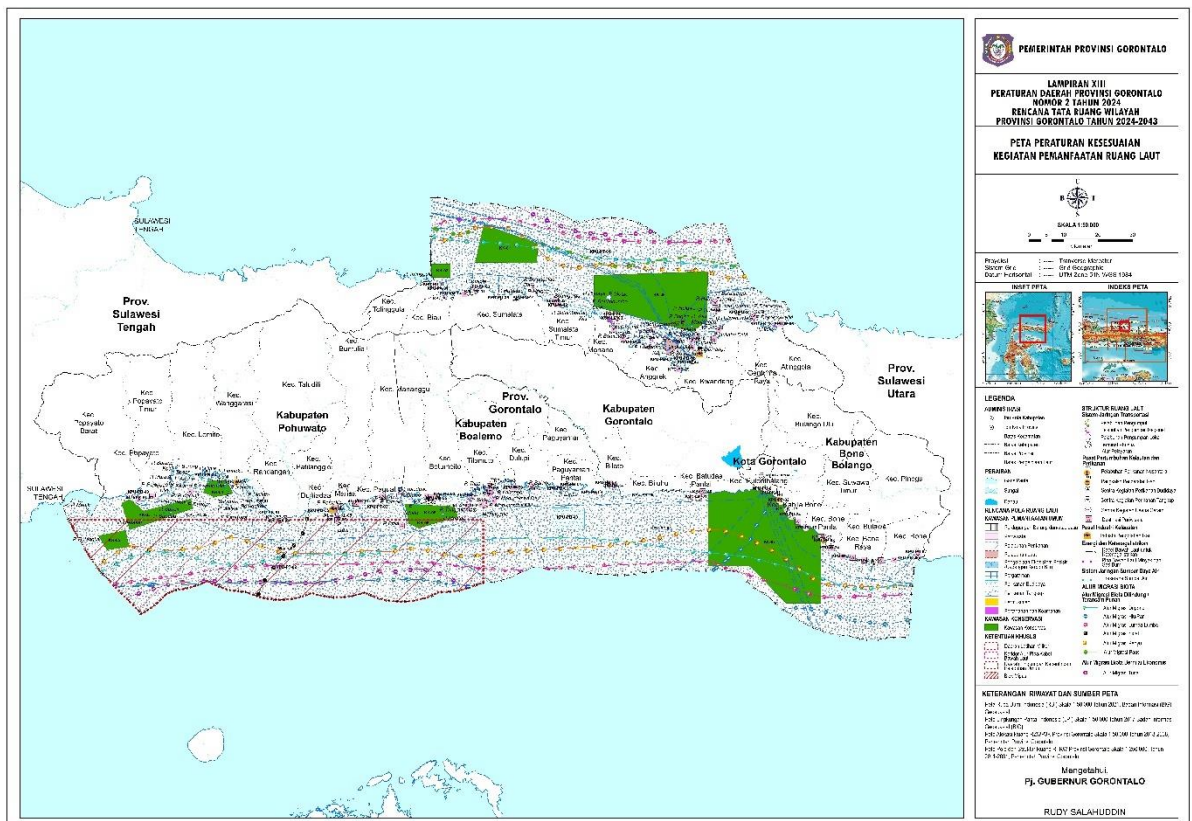
Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo tidak bisa dipisahkan dari potensi perikanan tangkap yang berbasis pada WPP (Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan) dan diakui secara Nasional maupun Internasional. Potensi perikanan tangkap Provinsi Gorontalo masuk dalam 2 (dua) WPP yaitu :

1. WPP 715 (perairan Teluk Tomini sampai perairan Laut Seram) potensi perikanan tangkapnya : 1.242.526 ton per tahun.

- WPP 716 (Laut Sulawesi sampai Samudra Pasifik bagian Utara pulau Halmahera dan Irian Jaya) potensi perikanan tangkapnya : 597.139 ton per tahun. Potensi ini sudah termasuk potensi perikanan di wilayah ZEE pada wilayah tersebut.

Sebagaimana RTRW, Pengelolaan perikanan tangkap dan budidaya dilaksanakan sebagaimana ketentuan pengelolaan kawasan dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut sesuai RTRW Provinsi Gorontalo

Gambar 2.5
Peta Kawasan Pemanfaatan Ruang Laut



Sumber : Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo, 2024-2043

Jumlah produksi perikanan tangkap di laut tahun 2022 sebesar 126.100 ton. Produksi perikanan terbesar berada di Kabupaten Pohuwato yaitu 27.084 ton atau sekitar 19 persen. Hasil perikanan terbesar diperoleh dari budidaya perikanan darat yaitu sebesar 49.378 ton dengan produksi ikan bandeng terbesar di Kabupaten Pohuwato sebanyak 15.740 ton.

Kabupaten Bone Bolango, Potensi Perikanan dan Kelautan di Kabupaten ini berada di garis sepanjang pantai selatan Gorontalo, terbentang dari Kecamatan Kabila Bone sampai dengan Kecamatan Bone dan menjadi tempat pencaharian sebagian penduduk Bone Bolango. Produksi perikanan Bone Bolango terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan

tangkap. Perikanan tangkap berasal dari perikanan tangkap laut dan perairan umum, sedangkan produksi perikanan budidaya berasal dari budidaya kolam, karamba, jaring apung dan rumput laut. Jenis ikan Laut di wilayah ini adalah Ikan Layang, Tongkol, Cakalang, Selar, Tenggiri, Ikan Terbang, Julung, Kuwe, Cumi, Tuna dan Madidihang. Produksi perikanan tangkap laut di Kabupaten Bone Bolango sebesar 10.991 ton/tahun.

Kota Gorontalo, Budidaya perikanan darat yang sudah berkembang di Kota Gorontalo meliputi keramba jaring apung yang terletak di wilayah Danau limboto Kecamatan Kota Barat dan Kecamatan Utara, sedangkan budidaya berupa kolam ikan tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Gorontalo. Sebagian kecamatan di Kota Gorontalo juga merupakan produsen perikanan tangkap. Kecamatan yang menjadi produsen perikanan adalah Hulontalo dan Dumbo Raya dengan hasil produksi perikanan laut pada Kecamatan Hulontalo sebesar 17.190 Ton dan Kecamatan Dumbo Raya 12.188 ton.

Kabupaten Boalemo, Sektor perikanan ini meliputi jenis perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Untuk perikanan tangkap terbesar berasal dari Kecamatan Talamuta, Manangu, Botumoito, Dulupi, Paguyaman dan Paguyaman Pantai. Sedangkan untuk budidayanya adalah pembudidayaan ikan Bandeng, Ikan air tawar, ikan kuwe dan budi daya rumput laut (basah).

Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo yang berbatasan dengan Teluk Tomini adalah salah satu penghasil ikan yang cukup besar karena memiliki wilayah kelautan yang cukup luas. Dengan panjang garis pantai sekitar 80 Km (13,6 % dari panjang pantai Provinsi Gorontalo) memiliki karakteristik sebagian besarnya adalah pantai berbatu/berpasir dan luas ZEE mencapai kira-kira 587,6 km² yang membentang di 3 kecamatan dan 21 desa pesisir. Kabupaten Gorontalo juga memiliki potensi ekosistem pesisir yang terdiri dari ekosistem terumbu karang sekitar 72 ha, ekosistem estuaria sekitar 12,4 ha dan ekosistem lamun sekitar 87,7 ha. Produksi perikanan Kabupaten Gorontalo di dominasi oleh perikanan tangkap dan sebagian kecil perikanan budidaya yang berada di Danau Limboto (2.400 ha) dan kolam air tawar (potensi sekitar 580 ha).

Kabupaten Gorontalo Utara, Komoditas unggulan di Kabupaten Gorontalo Utara adalah ikan cakalang. Potensi perikanan ini berada di perairan 12 mil dengan hasil sebesar 25.831 ton per tahun. Aktivitas perikanan menonjol adalah perikanan tangkap dan budidaya (rumput laut, kerang mutiara, udang laut, ikan karapu dan ikan karang). Pengelolaan ikan umumnya masih bersifat tradisional (penggaraman, pengeringan dan pengasapan ikan).

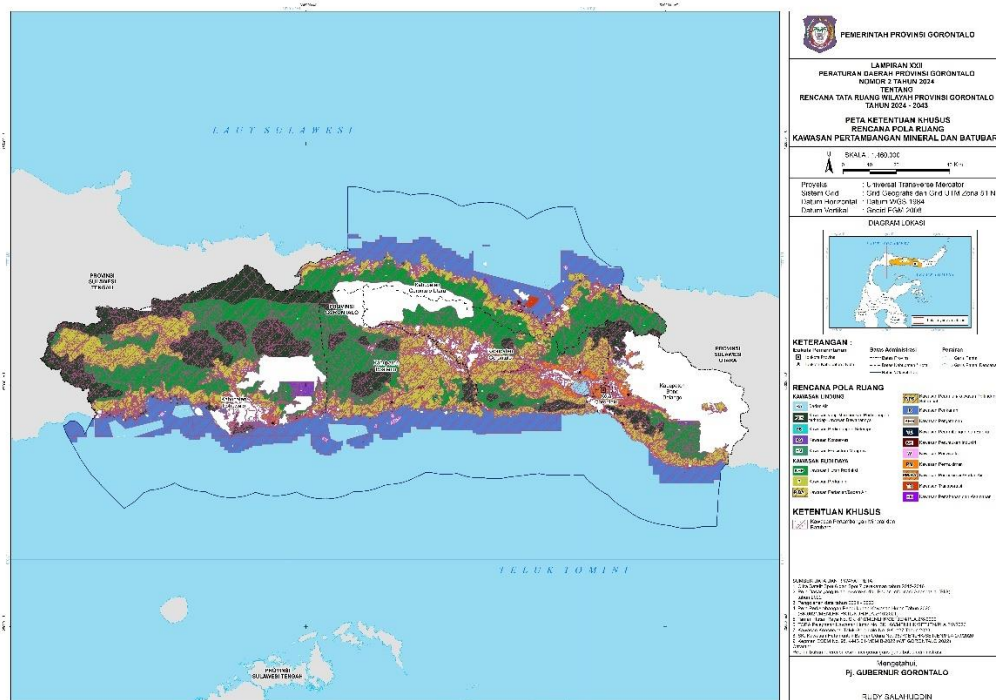
Kabupaten Pohuwato, Sektor perikanan merupakan salah satu sektor unggulan di Kabupaten Gorontalo dimana dari 13 kecamatan yang ada, 10 kecamatan berada di wilayah pesisir. Pencaharian masyarakat disektor ini terdiri dari dua yakni pada perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Jenis ikan tangkap yang dominan diperoleh nelayan adalah ikan tongkol, cakalang, tuna, udang dan jenis lainnya. Sedangkan untuk jenis budidaya ikan air tawar melalui kolam belum masif dilaksanakan padahal ikan air tawar mudah dikembangkan.

4) Potensi Pertambangan dan Energi

Sektor pertambangan Provinsi Gorontalo memiliki berbagai jenis bahan tambang logam, misalnya: emas, perak, tembaga, pasir besi; sedangkan bahan non logam antara lain: slag pasir, batu, pasir-batu (sirtu), kerikil, besi andesit, batu makora, basalt, batu gamping, toseki, batu granit, dll.

Sesuai RTRW Provinsi Gorontalo, ditetapkan wilayah pertambangan mineral dan batubara yang tersebar di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Gorontalo.

Gambar 2.6
Peta Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Gorontalo



Sumber : Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Provinsi 2024-2043

Potensi pertambangan dan energy tersebar di Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo dengan potensi yang dimiliki, sebagai berikut :

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pertambangan di wilayah ini adalah pertambangan:

- Emas di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Tulabolo, Sungai Mak, Motomboto dan Kayu Bulan) dan Bone Raya (Desa Tombulilato Kiri).
- Tembaga di Kecamatan Suwawa Tengah (Desa Tapadaa), Suwawa Timur (Desa Kayu Bulan, Motomboto dan Sungai Mak) dan Bone Pantai Cabang Kiri.

Potensi Energi di wilayah ini meliputi sumber energi yang **belum** dikelola yakni : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur; Pembangkit Listrik Tenaga Udara/Uap (PLTU) di Kecamatan Kabila Bone; dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (Geothermal) di Kecamatan Suwawa Tengah dan Suwawa Selatan.

Sementara Potensi Energi yang sudah dikelola adalah: Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berlokasi di Kecamatan Suwawa Timur (Pinogu 450 unit, Tulabolo Timur 145 Unit, Tulabolo Barat 100 Unit, Poduma 71 Unit), Suwawa Selatan (Molintogupo 1 unit, Bulontala 45 unit), Suwawa Tengah (Tapadaa 71 Unit), Kabila Bone (Biluango 50 unit, Olele 50 unit) dan Tilongkabila (Tunggulo 48 unit); serta Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) berlokasi di Kecamatan Bolango Ulu (Owata 1 unit), Bolango Timur (Desa Kopi 1 unit) dan Suwawa Timur (Desa Tulabolo sebanyak 15 Unit).

Kabupaten Gorontalo Potensi sumber daya alam mineral di daerah ini baik logam dan non logam dapat ditemukan di setiap wilayah kecamatan, dengan potensi yang beragam. Pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat sebagian besar pengelolaannya masih dilakukan secara tradisional.

- Potensi mineral logam: Emas dengan jumlah cadangan sekitar 528.29 ton yang tersebar di Kecamatan Boliyohuto dan Tembaga dengan jumlah cadangan sekitar 3.978.390 m³ tersebar di Kecamatan Boliyohuto.
- Potensi mineral non logam meliputi: Granit (jumlah cadangan sekitar 470.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Telaga Biru dan Batudaa Pantai; Batu Gamping (jumlah cadangan sekitar 12.414.500 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa, Limboto, Limboto Barat, Bongomeme, Batudaa dan Batudaa Pantai; Toseki (jumlah cadangan sekitar 6.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Tibawa dan Boliyohuto; Felspar (jumlah cadangan sekitar 1.000.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai; dan Andesit (jumlah cadangan sekitar 1.050.000 m³), tersebar di Kecamatan Batudaa Pantai Boliyohuto dan Tibawa.
- Potensi Energi sumber daya panas bumi terdapat di Kecamatan Telaga Biru dan Mootilango.

Kabupaten Gorontalo Utara, Potensi sumberdaya pertambangan logam meliputi: emas, perak, tembaga dan pasir besi. Sedangkan bahan mineral non-logam adalah;

granit, slag pasir, batu, sirtu, kerikil, besi Andesit, batu Makora dan basalt. Disamping itu terdapat potensi sumberdaya air sungai yang banyak mengalir wilayah ini yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro.

Kabupaten Pohuwato, Potensi Pertambangan yang dimiliki daerah ini adalah: Emas; Sirtu (13.313.250 m³); Batu Andesit (13.350.810 m³); Batu Dasit (24.227.775 m³); Batu Granodiorit (1.279.299.750 m³); Batu Granit (1.064.226.900 m³); dan Toseki (10.771.431 m³). Kesemuanya tersebar di Kecamatan Marisa, Taluditi, Paguat, Buntulia, Randangan, Wonggarasi, Popayato dan Patilanggio.

Beberapa lokasi yang menjadi pusat penambangan emas oleh masyarakat diantaranya: Kecamatan Dengilo, Taluditi, Popayato Barat, Buntulia dan Kec. Patilanggio. Meski tergolong tradisional namun stabilitas keamanan terjaga dengan baik. Dalam hal pengolahan limbah para penambang berupaya maksimal menjaga aktivitas ini agar tidak memberi dampak negatif terhadap lingkungan sekitarnya.

5) Potensi Industri

Pembangunan ekonomi merupakan transformasi secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui transformasi ekonomi dilakukan proses industrialisasi. Proses tersebut mencakup perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Dalam prosesnya meliputi interaksi antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi, dan perdagangan untuk meningkatkan pendapatan dan mendorong perubahan struktur ekonomi.

Sektor industri dipersiapkan untuk mendorong perkembangan sektor lainnya yang terkait, baik keterkaitan kedepan (*forward linkage*), maupun keterkaitan kebelakangan (*backward linkage*). Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada, maka Provinsi Gorontalo sangat potensial untuk mendorong sektor industri, baik dari pengolahan pertanian, dan perikanan.

Beberapa potensi sektor industri di masing-masing kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo **Kabupaten Gorontalo Utara**, Adapun potensi Industri di Kabupaten ini berbasis keunggulan daerah yaitu :

- Industri berbasis Ikan. Potensi bahan baku ikan ini terdapat di 11 kecamatan sepanjang garis pantai 320 km terpanjang (se-Provinsi Gorontalo) dengan laut ZEE seluas 40.000 Km². Industri pengelolaan ikan ini berupa pengeringan ikan dengan kapasitas produksi 1.394.526 kg/tahun dan pengasapan ikan sebesar 337.680 kg/tahun;

- Industri berbasis kerajinan kerang laut berada di pesisir garis pantai dan berlokasi di pulau ponelo yang bisa dikembangkan sebagai sentra kerajinan kerang;
- Industri berbasis Aren dan ijuk Aren. Potensi bahan baku pohon aren ini memiliki total luas areal tumbuh tanaman sekitar 332 Ha atau sekitar 51.792 pohon aren dengan asumsi 1 ha ditumbuhi 156 pohon. Hasil aren berupa nira diproduksi secara tradisional menjadi gula merah aren dan ijuk pohonnya dibuatkan sapu ijuk, atap ijuk dsb.;
- Industri berbasis tanaman Bambu Burik di Kecamatan Gentuma Raya, Tomilito dan Monano. Tanaman ini hanya tumbuh di Kabupaten Gorontalo Utara dan sangat potensial dicarikan investor yang memproduksi furniture; Industri berbasis kerajinan Sulaman Karawo yang dikenal dengan sulaman Kabate Gorontalo Utara.

Kota Gorontalo, Kota Gorontalo terus berkembang sebagai pusat perindustrian dan perdagangan. Industri kecil di Kota Gorontalo terbagi atas 2 (dua) kategori perusahaan industri dan industri kerajinan rumah tangga. Industri yang berkembang di Kota Gorontalo adalah industri makanan dan industri kerajinan dan pakaian jadi. Perusahaan perdagangan yang menonjol terdiri dari perusahaan terbatas, Firma (CV), Koperasi dan perorangan. Selain itu juga terdapat pedagang besar, pedagang menengah dan pedagang kecil/mikro.

Kabupaten Gorontalo. Pengembangan kawasan industri di Kabupaten Gorontalo berdasarkan informasi bahwa potensi di sektor industri masih bersifat menyebar (kegiatan *home industry*). Berdasarkan jenisnya, unit usaha industri di Kabupaten Gorontalo terbagi atas : Industri Hasil Pertanian; Industri Aneka; Industri Logam; dan Industri Perikanan.

Beberapa industri yang sudah berkembang di antaranya adalah

- Pabrik Tepung Kelapa dan Nata de Coco. Sektor Perkebunan kelapa menjadi prospek andalan untuk pengembangan produksi pabrik tepung kelapa dan *nata de coco* di Kabupaten Gorontalo. Industri yang bahan bakunya ditunjang dari hasil pertanian rakyat dari seluruh wilayah Kabupaten serta beberapa wilayah di sekitarnya. Pabrik tepung kelapa Tri Jaya Tangguh terletak di kawasan Boliyohuto. Sejak awal berproduksi pabrik ini telah meluncurkan ekspor tepung kelapa ke Rusia sebanyak 40 feet.
- Pabrik Gula Tolangohula berdiri sejak tahun 1990 pada areal seluas 15.700 ha dengan lahan perkebunan tebu mencapai sekitar 8.000 ha. Pabrik Gula Tolangohula pada setiap tahun memproduksi gula sebesar 35.000 ton sampai dengan 39.000 ton. Besaran produksi tersebut memenuhi kebutuhan gula bagi masyarakat se Provinsi

Gorontalo sejumlah 12.000 Ton, sedangkan lainnya dipasarkan ke luar daerah. Pabrik ini mengangakat 1.800 karyawan ditambah 4.000 orang tenaga pekerja lepas yang dikontrak setiap musim produksi.

- Pabrik Rumput Laut. Sebagian besar produksi rumput laut yang dikelola melalui kelompok-kelompok usaha masyarakat ataupun secara perorangan ditampung pada pabrik pengolahan. Kapasitas yang dihasilkan pabrik rumput laut mencapai 2 ton per hari dan dipasarkan ke berbagai wilayah, terutama ke Jakarta, Malaysia dan Korea. Pabrik ini juga menampung hasil rumput laut dari beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Gorontalo, seperti Gorontalo Utara, Boalemo dan juga Pohuwato.

6) Potensi Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai sektor pendorong ekonomi daerah. Pengembangan dan pendayagunaan sumber daya dan potensi pariwisata daerah diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian. Sektor ini merupakan salah satu jenis industri yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan pekerjaan, standar hidup serta dapat menstimulasi sektor-sektor produktivitas lainnya.

Majunya industri pariwisata suatu daerah sangat bergantung kepada jumlah wisatawan yang datang, karena itu harus ditunjang dengan peningkatan pemanfaatan Daerah Tujuan Wisata (DTW) sehingga industri pariwisata akan berkembang dengan baik.

Berbagai Potensi Pariwisata di wilayah Provinsi Gorontalo ini, diantaranya:

1. *Wisata Pantai* : Obyek wisata pantai yang memiliki prospek sangat menjanjikan adalah Wisata Pantai Bolihutuo (Kabupaten Boalemo) dan Taman Laut Olele (di Kabupaten Bone Bolango). Destinasi wisata lainnya adalah Pantai Karang Putih, Pantai Diyonumo, Pantai Pulau Popaya-Raja, Pantai Minanga, Pantai Molotabu, Pantai Bumbulan, Pantai Pohon Cinta, Pantai Langala, Pantai Manunggu, Pantai Batu Buaya, Pantai Kurenai, Pantai Dunu dan Pantai Ratu Tenilo.
2. *Wisata Laut dan Pulau* : Obyek wisata Pulo Cinta (Kabupaten Boalemo), Laut Torosiaje (Kabupaten Pohuwato) dan obyek wisata Pulau Saronde (Kabupaten Gorontalo Utara) adalah salah satu dari beberapa destinasi wisata yang sangat indah. Destinasi wisata lainnya meliputi: Objek Wisata Hiu Paus (*whale shark*), Pulau Bogisa, Pulau Ponelo, Pulau Oile, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Pulau Asiangi, Pulau Monduli dan Pulau Mohinggito.
3. *Wisata Alam dan Pegunungan* : Obyek wisata Hutan Pinus Dulamayo, Taman Nasional Bogani Nani Wartabone dan Danau Limboto merupakan destinasi wisata

yang sangat mengagumkan. Disamping itu juga Goa-Goa, Air terjun Taludaa, Air terjun Ayuhulalo, Air Terjun Tilmuta, Cagar Alam Panua di Kelurahan Libuo, Cagar Alam Tangole, Kolam Renang Potanga, Sumber Mata Air Panas Alami Pentadio dan Lombongo serta Air Terjun Ayuhulalo.

4. *Wisata Adat dan Situs Sejarah* : Obyek wisata yang perlu dikunjungi adalah Objek Wisata Religi Bubohu, Tumbila Tohe; Rumah Adat Dulohupa; Rumah Adat Bandayo Pomboide, Benteng Oranye, Benteng Otanaha, Pentadio Resort, Masjid Baiturrahim, Makam kerajaan Ju Panggola, Batu berbentuk tapak kaki, Tangga 2000 dan Jejak Kaki Lahilote, Torosiaje (Desa Terapung Suku Bajo), Pendaratan Soekarno dan Pusat Kerawang.

Potensi Pariwisata yang tersebar di Kabupaten Kota di Provinsi Gorontalo sangat beragam dan memiliki keunikan dan karakteristiknya masing-masing.

Kabupaten Bone Bolango. Potensi Pariwisata di Kabupaten ini cukup besar dan dapat dikembangkan sebagai daerah tujuan wisata. Berdasarkan analisis dan pengamatan dilapangan daerah ini memiliki potensi pengembangan wisata pantai dan wisata taman bawah laut. Pengembangan wisata lainnya yang belum dikembangkan adalah wisata alam jenis *outbond* (*hiking, tracking, climbing* dan *rafting*). Garis pantai Bonebol ada di daerah sepanjang pesisir perairan pantai selatan (Teluk Tomini) dan wisata bawah laut yang terletak di Olele dan Botubarani. Jenis Obyek wisata lainnya adalah Wisata alam Lombongo, Wisata Budaya Makam Raja Atinggola, Benteng Ulantha, Owista Lamahu (Kampung Digital), Owista Huntu Selatan, Pantai Botutonuo, Pantai Molotabu, dsb. Tercatat sebanyak 25 Objek Wisata di Bone Bolango.

Kota Gorontalo. Beberapa objek wisata yang telah dikembangkan di Kota Gorontalo diantaranya adalah objek wisata alam dan objek wisata budaya sekaligus perpaduan antara keduanya. Salah satu objek wisata yang juga menjadi situs bersejarah di Gorontalo terletak di Kota Gorontalo yaitu Benteng Otanaha. Kota juga telah memiliki penunjang pariwisata berupa hotel berbintang, cafe, restoran dan biro-biro perjalanan.

Kabupaten Boalemo. Beberapa objek wisata lain yang dikembangkan di Kabupaten Boalemo meliputi : Pulau Bitila, wisata pantai Kramat, danau teratai, di Kecamatan Manangu; Pantai Boalemo Indah, pemandian air panas Dulangea, Taman Laut Pulau Monduli di Kecamatan Botumoito; Pulau Cinta, Pulau Pasir Putih, Pulau Mohupomba, wisata alam air terjun Ayuhulalo, air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Tilmuta; Taman Polohungo, air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi; Taman laut Pulau Limba, teluk Bubaa di Kecamatan Paguyaman Pantai; dan Ekowisata Sungai Paguyaman, Sungai Moliliulo, dan Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari.

Kabupaten Gorontalo. Potensi Pariwisata di Kabupaten Gorontalo memiliki daya tarik dan keunikan masing-masing. Obyek wisata yang dapat dikembangkan meliputi : Teluk Paguyaman sepanjang Batudaa Pantai; Hutan Suaka Marga Satwa Nantu di Kecamatan Tolangohula; Cagar alam Tangale; Rumah Adat/Banthayo Poboide; Danau Limboto; Pentadio Resort; Pakaya Tower/Eks Menara Keagungan; dan Pemandian Taluhu Barakati, Desa Wisata Religi Bubohu.

Kabupaten Gorontalo Utara. Potensi wisata di Kabupaten Gorut adalah sebagai berikut : Wisata Pantai yang menjadi unggulan yaitu Pulau Saronde, Pulau Diyonumo, Pantai Minanga, Pantai Mokonow, Pantai Toliteyuhu dan masih terdapat 52 pulau yang berpotensi untuk dijadikan wisata pantai meskipun 50 pulau di antaranya tidak berpenghuni. Pulau yang berpenghuni adalah Pulau Poneo dan Pulau Dudepo; Wisata Sejarah yaitu Benteng Oranye/*Orange Fortress*, Benteng Emas yang dibangun bangsa Portugis sebagai benteng pertahanan tahun 1630; dan Kawasan pariwisata Kota Jin sebagai situs Geopark di Kec. Atinggola.

Kabupaten Pohuwato. Potensi Pariwisata yang ada di wilayah ini adalah Air Terjun Lemito Indah yang terkenal dengan panorama alam air terjun dengan hawa sejuk di pegunungan, lokasinya berada di Desa Lomuli, Kecamatan Lemito; Pulau Bitila dan Pulau Lahe terkenal dengan pesona alam dan panorama bawah laut yang berlokasi di Kecamatan Marisa dan Kecamatan Paguat; Tanjung Bajo, tempat ini sangat cocok untuk menyalurkan hobi menyelam dan memancing berlokasi di Kecamatan Paguat; Pantai Indah Bumbulan dikenal dengan panorama pantai. Pantai ini biasanya digunakan untuk berselancar, perahu tradisional dan terdapat *cottage-cottage* di sekitar lokasi pariwisata ini. Lokasi pantai ini berada di Kelurahan Libuo dan Kecamatan Paguat; Cagar Alam Panua yang merupakan habitat Burung Maleo (Maskot Sulawesi). Lokasi cagar alam ini berada di sejumlah Kecamatan termasuk di ibu kota Marisa; dan Kampung Torosiaje yang dikenal dengan perkampungan Suku Bajo yang mengapung di atas air, berlokasi di Kecamatan Popayato (sekitar 88 km dari kota Marisa).

G. Kondisi Kebencanaan

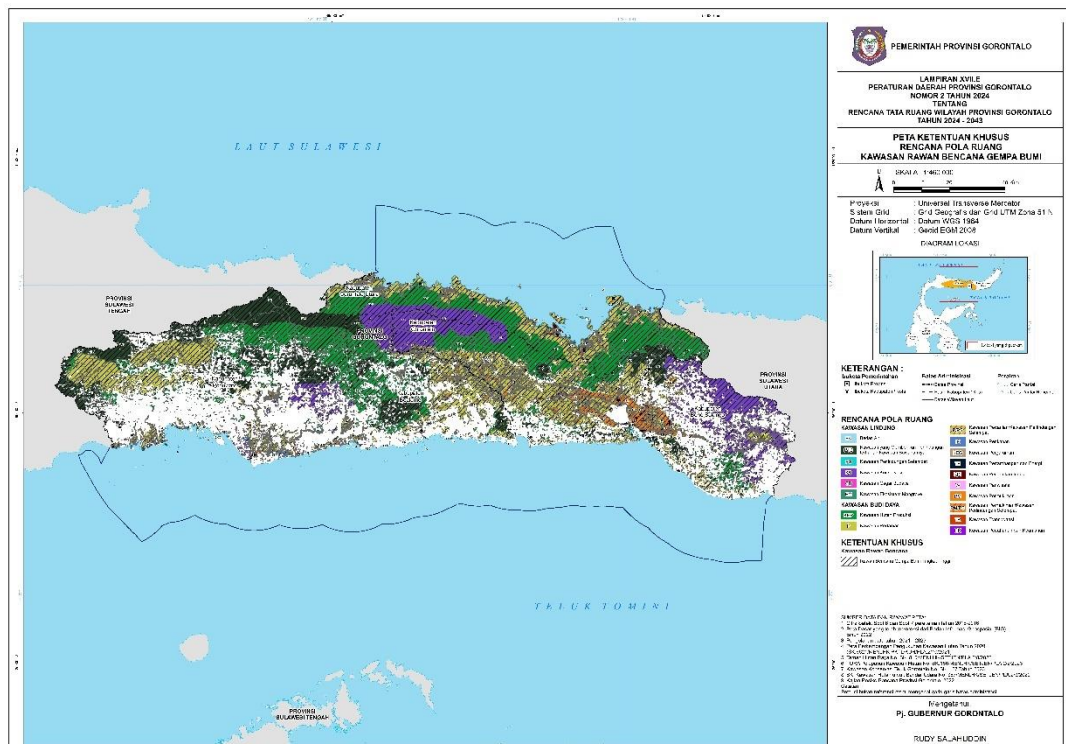
1. Kawasan Rawan Gempa

Gempa bumi adalah peristiwa alam karena proses tektonik maupun vulkanik. Gempa bumi tektonik disebabkan dari pergerakan tektonik lempeng. Wilayah Provinsi Gorontalo dan sekitarnya terletak pada jalur subdaksi lempeng, yaitu Lempeng Indo – Australia yang menyusup di bawah Lempeng Eurasia. Dengan demikian wilayah Gorontalo merupakan wilayah yang rawan gempa bumi tektonik.

Berdasarkan analisis peta geologi lembar Gorontalo, sesar/patahan Gorontalo merupakan bagian zona pertemuan antara zona eurasia dan zona pasifik. Sesar Gorontalo tersebut menyerupai garis diagonal tunggal mulai dari Leato sampai Kwandang, yang berpotensi terjadinya gempa tektonik endogen yang menyebabkan patahan. Di daerah patahan ini terdapat potensi terjadinya tektonik endogen dalam bentuk bergesernya kerak/lapisan bumi secara vertikal. Kawasan rawan bencana patahan aktif dengan jarak 10 (sepuluh) meter dari kiri dan kanan garis patahan yang telah teridentifikasi jalurnya sebagai zona bahaya deformasi sesar aktif.

Gambar 2.7

Peta Risiko Bencana Gempa Bumi di Provinsi Gorontalo

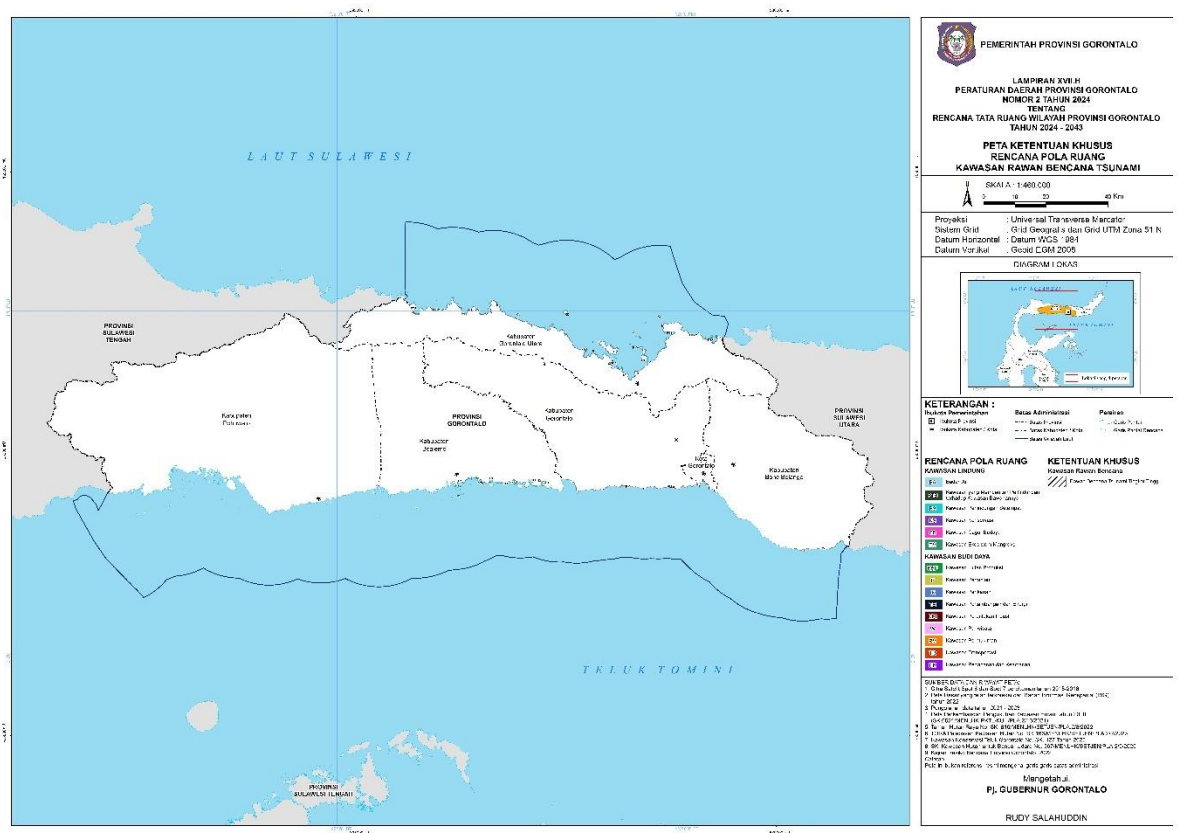


Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Beberapa kawasan yang sering dilanda dan rawan longsor adalah Kota Gorontalo berada pada Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Kota Timur dan Kota Barat. Kabupaten Gorontalo berada pada Kecamatan Tibawa dan Kecamatan Tolangohula. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Tilamuta, Botumoito dan Mootilango. Di Kabupaten Pohuwato yaitu di Kecamatan Buntulia (lokasi tambang). Sedangkan di Kabupaten Bone Bolango kawasan rawan longsor berada pada Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Botupingge, Boneraya dan Bulawa. Di Kabupaten Gorontalo Utara berada di kecamatan Kwandang, Atinggola, Sumalata dan Tolinggula.

Gambar 2.8

Peta Risiko Bencana Tsunami di Provinsi Gorontalo



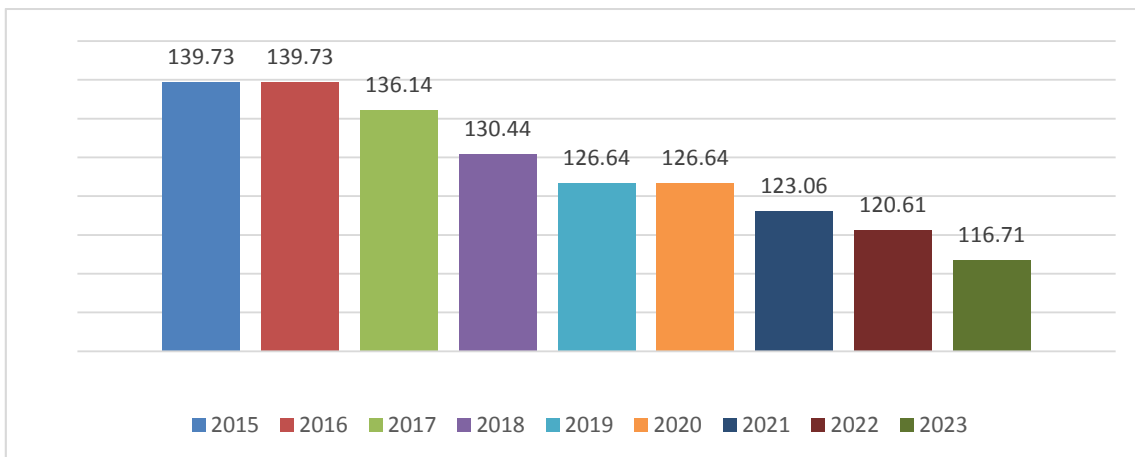
Sumber: Perda Nomor 2 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi Gorontalo 2024-2043

Provinsi Gorontalo potensial untuk terjadi banjir karena bentuk topografi lahannya yang berbentuk seperti mangkuk. Kawasan Rawan Banjir di Provinsi Gorontalo berada pada semua kabupaten dan kota yang ada, yaitu Kota Gorontalo terdapat pada Kecamatan Kota Selatan, Kota Timur, Kota Utara dan Kota Barat. Pada kabupaten Gorontalo terdapat di Kecamatan Limboto, Limboto Barat, Telaga, Telaga Jaya, Tibawa, Tolangohula, Bongomeme, Pulubala dan Boliyohuto. Kabupaten Boalemo terdapat di Kecamatan Talamuta, Botumoito dan Mootilango. Pada Kabupaten Pohuwato berada di Kecamatan Randangan, Marisa, Lemito dan Popayato. Untuk Kabupaten Bone Bolango terdapat di Kecamatan Suwawa, Kabila, Botupingge dan Tilongkabila sedangkan di Kabupaten Gorontalo Utara terdapat di Kecamatan Kwandang, Anggrek dan Sumalata.

Secara Nasional, Provinsi Gorontalo merupakan wilayah dengan potensi bencana sedang berdasarkan Indeks Rawan Bencana Indonesia yang diterbitkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Berdasarkan dari data yang dihimpun dari DIBI BNPB data dari BPBD selama periode 10 tahun terakhir provinsi Gorontalo, dari tahun 2018-2023, telah mengalami sebanyak 222 kejadian bencana. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023 Provinsi Gorontalo memiliki indeks risiko sedang dengan nilai indeks 116,71 turun dibanding tahun 2022 sebesar 120,61. Indeks risiko bencana meliputi kelompok bahaya, kerentanan dan kapasitas. Komponen bahaya maupun kerentanan cenderung mengalami peningkatan yang disebabkan faktor-faktor alam, lingkungan dan aktifitas manusia, seperti , peningkatan jumlah penduduk, degradasi lingkungan, perubahan iklim, dan peningkatan pembangunan. Oleh karena itu upaya penurunan indeks risiko bencana dapat dicapai melalui strategi peningkatan kapasitas (capacity) yang diukur berdasarkan kapasitas penanggulangan bencana.

Grafik 2.1

Nilai Indeks Risiko Bencana Provinsi Gorontalo tahun 2015-2022



Sumber: Buku IRBI 2023

Upaya mengurangi indeks risiko bencana akan mampu dilaksanakan didaerah dengan implementasikan fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah yang mengatur penanggulangan bencana yang menjadi urusan wajib daerah. Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi.

Berdasarkan data di atas, secara keseluruhan ketahanan daerah Provinsi Gorontalo dalam menghadapi potensi bencana memiliki Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Tahun 2022 sebesar 0,51, nilai menunjukkan Tingkat kapasitas daerah Sedang. IKD Tahun 2022 mengalami peningkatan dibanding capaian tahun sebelumnya 2021 sebesar 0,38. Capaian ini

menunjukkan bahwa komitmen pemerintah dan komponen terkait pengurangan risiko bencana di Provinsi Gorontalo telah tercapai dan didukung oleh kebijakan sistematis, tetapi capaian yang diperoleh dengan komitmen dan kebijakan tersebut dinilai belum menyeluruh hingga masih belum cukup berarti untuk mengurangi dampak negatif dari bencana.

Tabel 2.6
Hasil Kajian Indeks Ketahanan Daerah Provinsi Gorontalo

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks ketahanan Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1	Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan	0,82	0,51	SEDANG
2.	Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu	0,47		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik	0,45		
4.	Penanganan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,45		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana	0,46		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana	0,56		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0,41		

Sumber : Kajian Resiko Bencana 2022-2026

H. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung lingkungan merupakan kemampuan alam untuk mendukung kehidupan manusia. Oleh karenanya, keberadaan lingkungan alam menjadi sebuah keharusan untuk terus dijaga dalam eksistensinya terhadap daya dukung alam agar memenuhi prinsip-prinsip berkelanjutan. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (DDDTLH) berupa DDDTLH air dan pangan di Provinsi Gorontalo, dengan memperhatikan jasa ekosistem penyedia air dan pengaturan tata air dan banjir.

a. Daya Dukung Lingkungan Hidup Penyedia Air.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air bersih yaitu ketersediaan air bersih baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya). Secara alami, air bersih dapat berasal dari air permukaan, seperti: sungai dan danau maupun berasal dari air tanah. Bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa.

- *Jasa Ekosistem Penyedia Air*

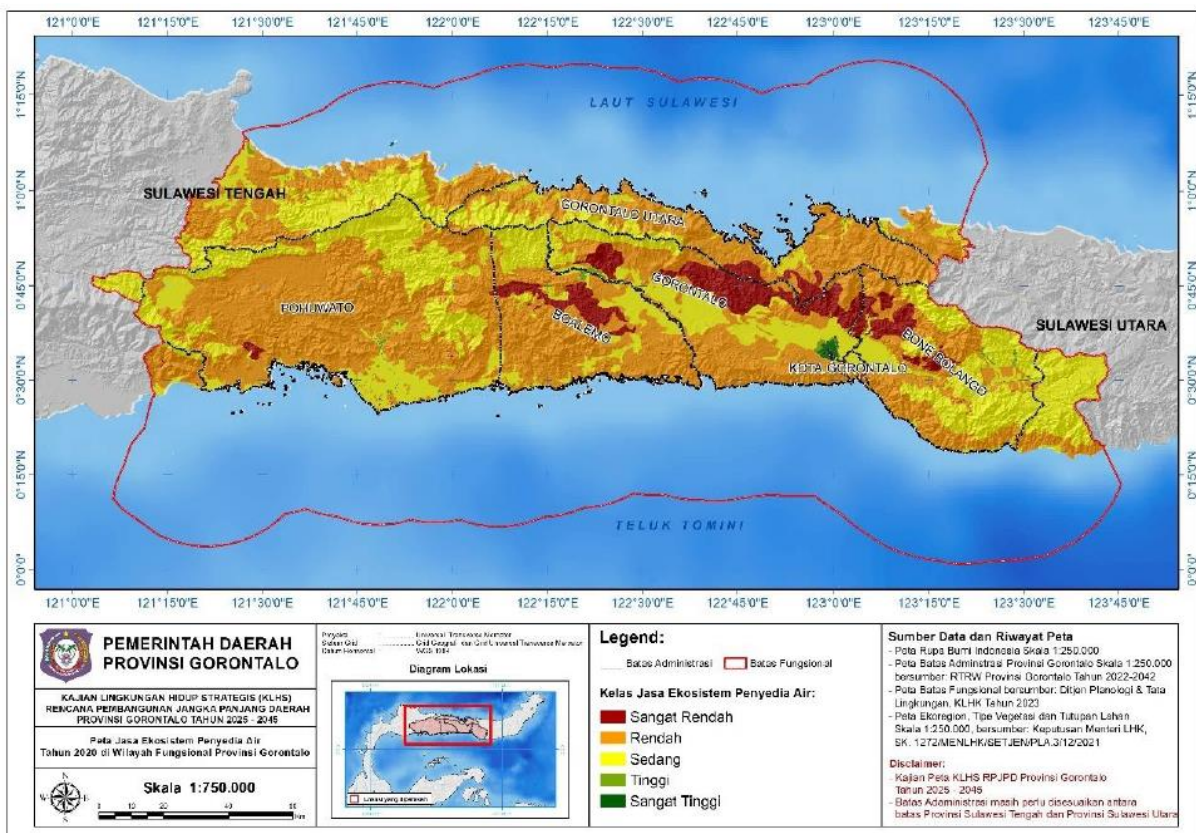
Peta jasa ekosistem penyedia air Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa jasa ekosistem penyediaan air kelas rendah dan sedang terdapat diseluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Gorontalo. Perhitungan jasa ekosistem penyediaan air menggunakan tiga sumber data yaitu bentang lahan, vegetasi alami dan penutup lahan. Berdasarkan bobot yang diberikan yaitu bentang lahan 0.28, vegetasi alami 0.12 dan penutup lahan

0.6 maka faktor yang paling berpengaruh pada nilai indeks jasa ekosistem penyediaan air adalah penutup lahan. Hasil overlay antara peta jasa ekosistem penyediaan air dan peta penutup lahan menunjukkan bahwa jasa ekosistem dengan kelas tinggi dan sangat tinggi terdapat pada penutup lahan badan air, rawa, dan pertanian lahan kering campur.

Kondisi ketersediaan air di Provinsi Gorontalo Tahun 2020, masih didominasi pada kondisi ketersediaan air kelas rendah (berkategori sangat rendah dan rendah) dan kelas sedang. Dengan persentase sebesar 55,08 persen kelas rendah dan 26,39 persen kelas sedang dari total persentase luas wilayah fungsional. Wilayah fungsional ketersediaan air yang paling kecil masih tetap kelas tinggi dengan persentase sebesar 0,79 persen dari total persentase luas wilayah fungsional. Berdasarkan pembagian administrasi kabupaten/kota jasa ekosistem penyediaan air kelas berkategori sangat tinggi terluas berada di Kabupaten Gorontalo dan jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat rendah berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 4974,67 hektar atau sebesar 0,41%.

Gambar 2.10

Distribusi Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Daratan Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Tabel 2.7

Distribusi Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Wilayah	Persentase Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020				
	Rendah	Sedang	Tinggi	NA	Jumlah
Provinsi Gorontalo	55,08%	26,39%	0,70%	0,0127%	82,19%
Kabupaten Boalemo	9,43%	2,96%	0,09%	0,0005%	12,49%
Kabupaten Bone Bolango	6,57%	6,18%	0,14%	0,0028%	12,88%
Kabupaten Gorontalo	9,92%	4,50%	0,31%		14,74%
Kabupaten Gorontalo Utara	9,20%	2,53%	0,02%	0,0009%	11,76%
Kabupaten Pohuwato	19,71%	10,00%	0,12%	0,0085%	29,84%
Kota Gorontalo	0,25%	0,22%	0,01%		0,48%
Sulawesi Tengah	6,43%	6,13%	0,07%	0,0017%	12,63%
Buol	5,50%	5,91%	0,07%	0,0016%	11,47%
Parigi Moutong	0,93%	0,22%	0,00%	0,0001%	1,16%
Sulawesi Utara	1,82%	3,34%	0,02%	0,0019%	5,18%
Bolaang Mongondow Selatan	0,68%	2,98%	0,00%	0,0009%	3,66%
Bolaang Mongondow Utara	1,14%	0,36%	0,02%	0,0011%	1,52%
Jumlah Wilayah Fungsional	63,33%	35,86%	0,79%	0,02%	100,00%

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

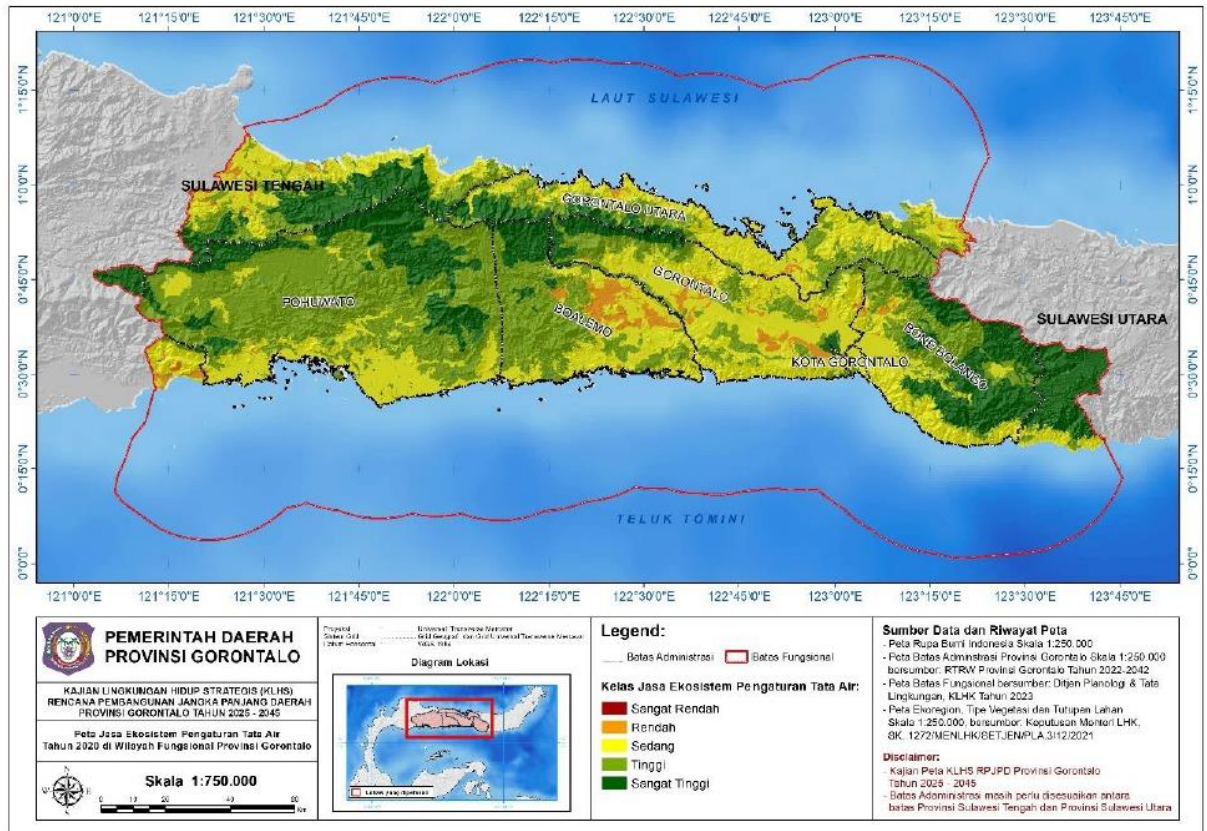
- *Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air*

Kondisi pengaturantata air di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi pengaturantata air kelas tinggi dengan total persentase luas sebesar 64,57% dari total persentase luasan Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo. Pengaturan tata air dengan luasan terbesar kedua disusul oleh ketersediaan air rendah dengan total luasan 450.483,41 hektar atau sebesar 37,44% dan ketersediaan air yang paling kecil adalah ketersediaan air tinggi dengan luas 2295,04 hektar atau sebesar 0,19% dari total luas Provinsi Gorontalo. Berdasarkan pembagian administrasi kabupaten/kota jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat tinggi terluas berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 2415,64 hektar atau sebesar 0,20% dan jasa ekosistem penyediaan air kelas sangat rendah berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 4974,67 hektar atau sebesar 0,41%.

Kondisi jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi jasa ekosistem pengaturan iklim tinggi dengan total luasan sebesar 665,171.88 hektar atau sebesar 55,28% dari total luas Provinsi Gorontalo. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir dengan luasan terbesar kedua yaitu jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir kelas rendah dengan luasan 391,554.98 hektar atau sebesar 32,54%. Jasa ekosistem pengaturan tata aliran air yang paling kecil luasannya adalah jasa ekosistem pengaturan tata aliran air dan banjir pada kategori sangat rendah dengan luas 8,917.53 hektar atau sebesar 0,74% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Gambar 2.11

Peta Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air di Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Tabel 2.8

Luasan dan Persentase Jasa Ekosistem Penyedia Air di Wilayah Fungsional Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Wilayah	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Air Tahun 2020				Jumlah
	Rendah	Sedang	Tinggi	NA	
Provinsi Gorontalo	2,66%	29,92%	52,26%	0,0127%	82,19%
Kabupaten Boalemo	1,27%	5,12%	7,36%	0,0005%	12,49%
Kabupaten Bone Bolango	0,13%	3,58%	9,30%	0,0028%	12,88%
Kabupaten Gorontalo	0,98%	9,45%	5,28%		14,74%
Kabupaten Gorontalo Utara	0,18%	5,69%	6,07%	0,0009%	11,76%
Kabupaten Pohuwato	0,08%	5,64%	24,19%	0,0085%	29,84%
Kota Gorontalo	0,03%	0,43%	0,05%		0,48%
Sulawesi Tengah	0,52%	5,32%	7,29%	0,0017%	12,63%
Buol	0,28%	4,30%	7,17%	0,0016%	11,47%
Parigi Moutong	0,24%	1,03%	0,12%	0,0001%	1,16%
Sulawesi Utara	0,07%	1,41%	3,77%	0,0019%	5,18%
Bolaang Mongondow Selatan	0,00%	0,57%	3,09%	0,0009%	3,66%
Bolaang Mongondow Utara	0,07%	0,84%	0,68%	0,0011%	1,52%
Jumlah Wilayah Fungsional	3,25%	36,66%	63,32%	0,02%	100,00%

Sumber : Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

- *Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air*

Status daya dukung dan daya tampung air, menunjukkan bahwa kebutuhan air lebih didominasi oleh kebutuhan untuk lahan yaitu sebesar Ro. 2.719.722.,705 m³/tahun. sedangkan kebutuhan air untuk domestik sebesar 100.904.314 m³/tahun. Perhitungan ambang batas ketersediaan air dilakukan untuk mengetahui populasi penduduk maksimal yang dapat didukung kebutuhan airnya secara alamiah oleh karakteristik wilayah di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan hasil kajian KLHS menunjukkan bahwa jumlah populasi penduduk maksimal yang dapat didukung oleh ketersediaan air secara alamiah di Provinsi Gorontalo 111.036.732 jiwa. Berdasarkan jumlah populasi penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu 1.167.874 jiwa, maka status daya dukung penyediaan air bagi penduduk di Provinsi Gorontalo Belum Melampaui.

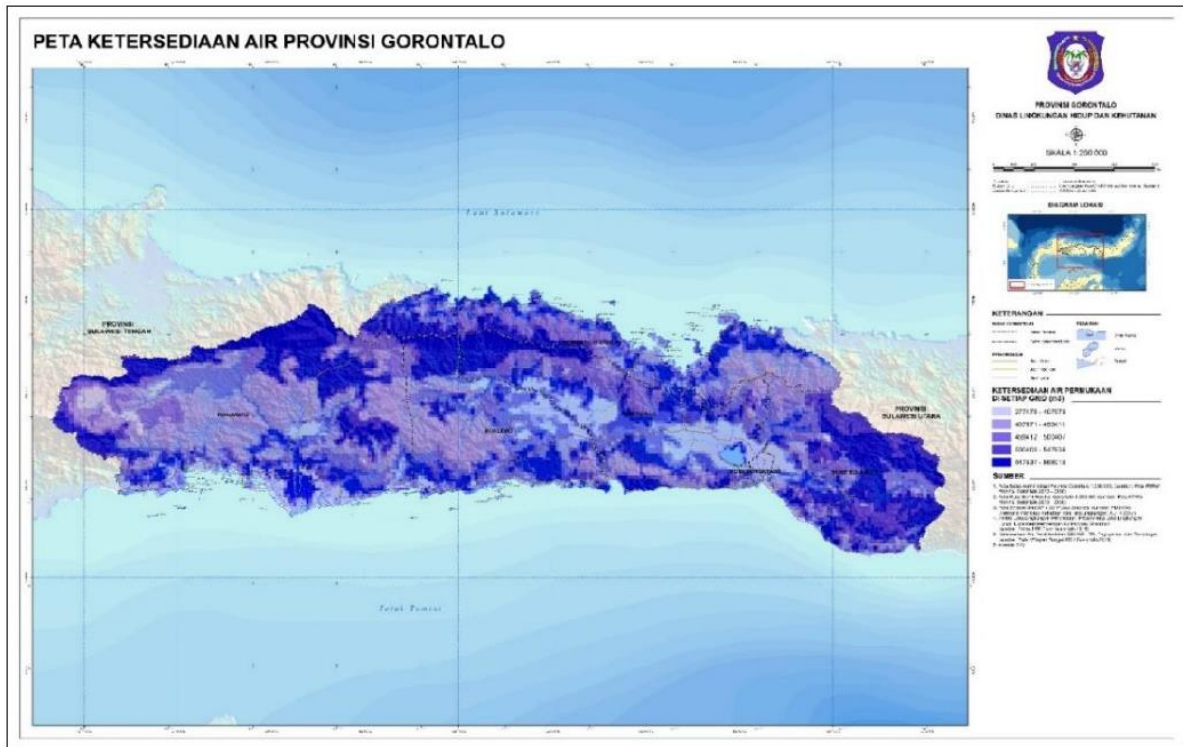
Tabel 2.9
Status Daya Dukung Penyediaan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020

KABUPATEN/KOTA	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN AIR PROVINSI GORONTALO									
	MODEL (POPULASI PERGRID)	KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN LAHAN (DEMAND)	KEBUTUHAN DOMESTIK (DEMAND)	DEMAND TOTAL	AMBANG BATAS	SELISIH	PERSENTASE WILAYAH MASIH MENDUKUNG	PERSENTASE WILAYAH TIDAK MENDUKUNG	
	Jiwa	m ³ /Tahun	m ³ /Tahun	m ³ /Tahun	m ³ /Tahun	Jiwa	Jiwa	%	%	
Boalemo	158.351	1.113.975.694	592.864.421	13.681.526	606.545.947	12.062.802	11.904.451	13,27%	2,02%	
Bone Bobngo	157.152	1.223.737.157	260.341.341	13.577.933	273.919.274	22.300.758	22.143.606	15,02%	0,67%	
Gorontalo	374.813	1.343.057.524	951.605.946	32.383.843	983.989.789	9.061.340	8.686.527	14,69%	3,82%	
Gorontalo Utara	112.836	1.185.912.044	379.888.649	9.749.030	389.637.679	18.657.962	18.545.126	13,95%	0,66%	
Pohuwato	153.937	2.607.144.422	504.196.258	13.300.157	517.496.414	48.679.378	48.525.441	32,76%	2,51%	
Kota Goiontab	210.785	42.734.226	30.876.092	18.211.824	49.087.916	274.492	63.707	0,38%	0,25%	
TOTAL	1.167.874	7.516.561.068	2.719.722.705	100.904.314	2.820.677.019	111.036.732	109.868.858	90,07%	9,93%	

Sumber : DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020.

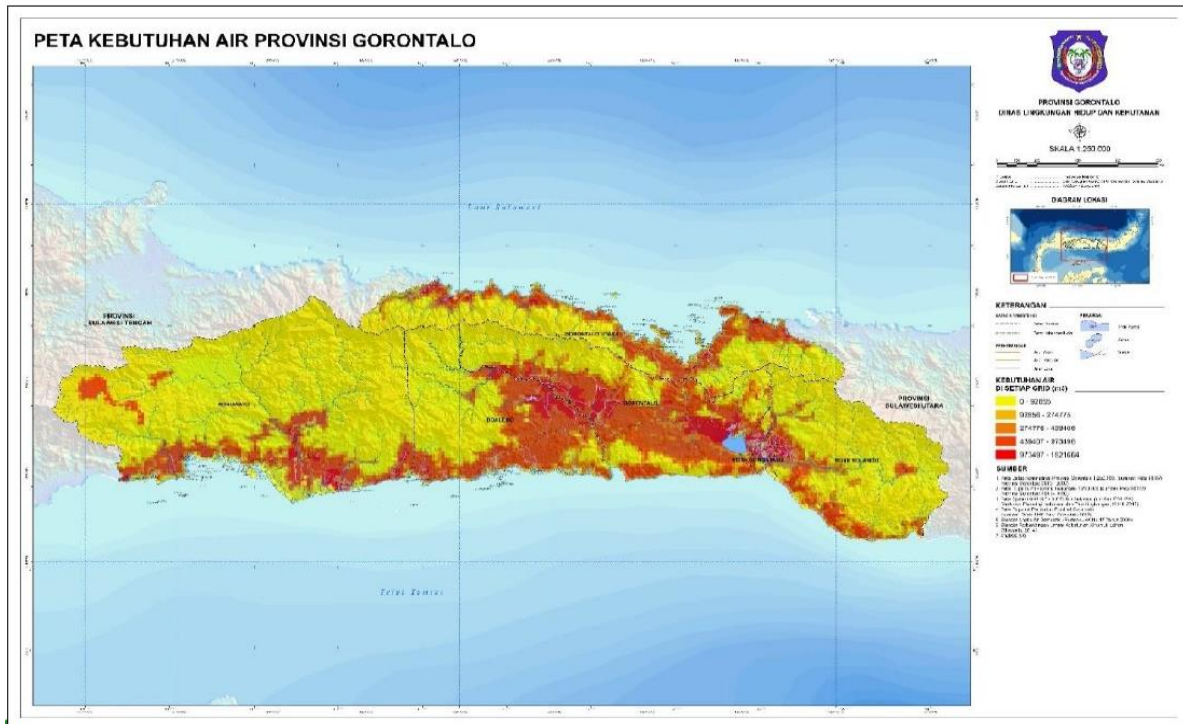
Total ketersediaan air Provinsi Gorontalo sebesar 7.516.561.068 m³/tahun. Total Kebutuhan air Provinsi Gorontalo yaitu 2.820.677.019 m³/tahun. Ketersediaan air terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato yaitu sebesar 2.607.144.422 m³/tahun dan ketersediaan air terkecil terdapat di Kota Gorontalo sebesar 42.734.226 m³/tahun. Sedangkan kebutuhan air terbesar di Kabupaten Gorontalo, dan kebutuhan air terkecil di Kabupaten Gorontalo Utara.

Gambar 2.12
 Peta Ketersediaan Air Provinsi Gorontalo



Sumber : DDDTLH Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Gambar 2.13
 Peta Kebutuhan Air Provinsi Gorontalo Tahun 2020



Sumber : DDDTLH Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Jika dirinci per administrasi kabupaten/kota, maka ambang batas tertinggi penyediaan air yaitu Kabupaten Pohuwato sebesar 48,679,378 jiwa, ambang batas terendah yaitu di Kota

Gorontalo sebesar 274,492 jiwa. Selisih antara ambang batas penyediaan air dan populasi di Provinsi Gorontalo yaitu sebesar 109,868,858 jiwa. Hal tersebut berarti bahwa ketersediaan air di Provinsi Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan air bagi sejumlah 109,868,858 jiwa diluar populasi yang ada. Data per kabupaten/kota menunjukkan bahwa selisih ambang batas ketersediaan air dan jumlah populasi tertinggi yaitu Kabupaten Pohuwato dengan nilai selisih 48,525,441 jiwa. Selisih antara ambang batas ketersediaan air dan populasi yang terendah yaitu di Kota Gorontalo yaitu sebesar 63,707 jiwa. Wilayah yang telah melampaui ambang batas ketersediaan air Provinsi Gorontalo meliputi Kabupaten Gorontalo sebesar 3,82%, Kabupaten Pohuwato 2,51%, Kabupaten Boalemo sebesar 2,02%, Kabupaten Bone Bolango 0,67%, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 0,66% dan Kota Gorontalo sebesar 0,25% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Berdasarkan hasil analisis status daya dukung air Provinsi Gorontalo, menunjukkan bahwa 90.07% wilayah Provinsi Gorontalo masih belum melampaui ambang batas ketersediaan air dan 9.93% wilayahnya sudah melampaui ambang batas ketersediaan air. Secara rinci berdasarkan administrasi kabupaten/kota, luasan wilayah yang belum melampaui ambang batas berturut-turut dari wilayah yang paling luas hingga terendah yaitu kabupaten pohuwato seluas 408,143.74 hektar atau 32.76% dari total luas provinsi gorontalo, kabupaten bone bolango seluas 187,203.14 hektar atau sebesar 15.02% wilayah provinsi gorontalo, kabupaten gorontalo seluas 183,051.44 hektar atau sebesar 14.69% , kabupaten gorontalo utara seluas 173,878.42 hektar atau sebesar 13.95%, kabupaten boalemo seluas 165,300.04 hektar atau sebesar 13.27% dan kota gorontalo seluas 4751.44 hektar atau sebesar 0.38% dari total wilayah provinsi gorontalo.

Tabel 2.10
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Provinsi Gorontalo

Kabupaten/ Kota	Status Daya Dukung Daya Tampung Air			Jumlah
	Belum Terlampaui	Terlampaui	NA	
Kabupaten Boalemo	8,34%	6,86%	0,00%	15,19%
Kabupaten Bone Bolango	12,09%	3,58%	0,00%	15,68%
Kabupaten Gorontalo	7,23%	10,69%	0,00%	17,93%
Kabupaten Gorontalo Utara	9,41%	4,89%	0,00%	14,31%
Kabupaten Pohuwato	28,76%	7,51%	0,03%	36,30%
Kota Gorontalo	0,16%	0,43%	0,00%	0,59%
Jumlah	66,00%	33,96%	0,04%	100,00%

Sumber : SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 diolah Tim Ahli KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Gambar 2.14

Peta Status Daya Dukung Air Provinsi Gorontalo 2023



Sumber : SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 diolah Tim Ahli KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Gambaran daya dukung dan daya tampung air Nasional dengan sumber peta Nomor SK.146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023, Wilayah Provinsi Gorontalo secara keseluruhan telah terlampaui sebanyak 33,6%. Kabupaten tertinggi telah terlampaui daya dukung dan daya tampung air yakni Kabupaten Gorontalo sebanyak 10,6% dan belum terlampaui sebanyak 7,23%. Selanjutnya Kabupaten Boalemo Telah terlampaui 6,86% dan belum terlampaui sebanyak 8,34%.

b. Daya dukung Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia sehingga ketersediaan bahan pangan menjadi aspek penting. Berdasarkan hasil analisa ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo sebesar 3.219.492.120,142 Kkal, sementara total kebutuhan pangan Provinsi Gorontalo yaitu 916.489.121.500 Kkal. Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato dan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo. Sedangkan untuk kebutuhan pangan, kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294.134.501.750 Kkal dan kebutuhan pangan terkecil yaitu di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 88.548.051.000 Kkal.

Kajian status daya dukung penyediaan pangan menunjukkan bahwa ambang batas penduduk terkait ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo adalah 4,100,184 jiwa. Hasil kajian jumlah populasi penduduk Provinsi Gorontalo Tahun 2017 yaitu 1,167,874 jiwa maka daya dukung penyediaan pangan bagi penduduk Provinsi Gorontalo pada BELUM MELAMPAUI.

Tabel 2.11
Status Daya Dukung Penyediaan Pangan Provinsi Gorontalo

KABUPATEN/KOTA	MODEL (POPULASI PERGRID)	DDDTLH INDIKATIF PENYEDIAAN PANGAN PROVINSI GORONTALO					PERSENTASE WILAYAH MASIH MENDUKUNG	PERSENTASE WILAYAH TIDAK MENDUKUNG
		KETERSEDIAAN (SUPPLY)	KEBUTUHAN (DEMAND)	AMBANG BATAS	SELISIH			
		Jiwa	kcal	kcal	Jiwa	Jiwa		
Boalemo	158.351	489,784,197,841	124.265.947.250	623.773	465422	15,12%	0,17%	
Bone Bolango	157.152	499,813.185.055	123.325.032.000	636.436	479284	13,94%	1,75%	
Gorontalo	374.813	554,756.973.095	294.134.501.750	706.508	331695	13,69%	4,83%	
Gorontalo Utara	112.836	492,853.605.556	88.548.051.000	627.827	514991	14,61%	0,00%	
Pohuwato	153.937	1.164.590.991.104	120.802.060.750	1.483.097	1329160	35,06%	0,20%	
Kota Gorontalo	210.785	17.693.167.490	165.413.528.750	22.543	-188242	0,10%	0,53%	
TOTAL	1.167.874	3.219.492.120.142	916.489.121.500	4.100.184	2.932.310	92,52%	7,48%	

Sumber : DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020

Berdasarkan data tersebut, menunjukkan bahwa ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo masih dapat mencukupi kebutuhan pangan bagi 2.932.310 jiwa luar populasi yang ada. Selisih ambang batas ketersediaan pangan dan jumlah populasi tertinggi yaitu Kabupaten Pohuwato dengan nilai selisih 1.329.160 jiwa. Sedangkan yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah yang memiliki nilai selisih terendah yaitu Kota Gorontalo dimana nilai selisihnya adalah -188.242 jiwa (minus). Ambang batas ketersediaan pangan di Kota Gorontalo hanya dapat mencukupi 22.543 jiwa, sedangkan jumlah populasi mencapai 210.785 jiwa.

Analisis status daya dukung pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa 92.52% wilayah Provinsi Gorontalo masih belum melampaui ambang batas ketersediaan bahan pangan dan 7.48% wilayahnya sudah melampaui ambang batas ketersediaan bahan pangan. Secara rinci berdasarkan administrasi kabupaten/kota, luasan wilayah yang belum melampaui ambang batas berturut-turut dari wilayah yang paling luas hingga terendah yaitu Kabupaten Pohuwato seluas 436,911.38 hektar atau 35.06% dari total luas Provinsi Gorontalo, Kabupaten Boalemo seluas 188,359.03 hektar atau sebesar 15.12% wilayah Provinsi Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara seluas 182,030.76 hektar atau sebesar 14.61%, Kabupaten Bone Bolango seluas 173,739.85 hektar atau sebesar 13.94%, Kabupaten Gorontalo seluas 170,579.29

hektar atau sebesar 13.69% dan Kota Gorontalo seluas 1,188.96 hektar atau sebesar 0.10% dari total wilayah Provinsi Gorontalo.

Wilayah yang melampaui ambang batas ketersediaan pangan Provinsi Gorontalo terdistribusi di Kabupaten Gorontalo sebesar 4.83%, Kabupaten Bone Bolango 1.75%, Kota Gorontalo 0.53%, Kabupaten Pohuwato 0.20%, Kabupaten Boalemo sebesar 0.17%, dan Kabupaten Gorontalo Utara seluas 9.87 hektar atau sebesar 0.001% dari total luas Provinsi Gorontalo. Peta Status Daya Dukung Pangan Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa distribusi spasial wilayah yang sudah melampaui ambang batas ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo merupakan kawasan perkotaan dengan penutup lahan umumnya berupa permukiman dan atau lahan terbangun.

Gambar 2.15
Peta Status Daya Dukung Daya Tampung Pangan Provinsi Gorontalo



Sumber : DDDTLH Provinsi Gorontalo, 2020

Kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo dominan pada kondisi ketersediaan pangan tinggi dengan total luasan sebesar 702,367.82 ha atau sebesar 58,37% dari total luas Provinsi Gorontalo.

Dari hasil analisis tersebut, maka Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) berada pada angka 14,84 persen tahun 2021, meningkat dibanding tahun 2017 dari 9,27 persen tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 14 s/d 15 orang dari 100 orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi untuk hidup aktif dan sehat. Ketidakcukupan konsumsi pangan tersebut dapat dipengaruhi oleh tingkat

kesejahteraan masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperoleh dan mengonsumsi makanan sehat.

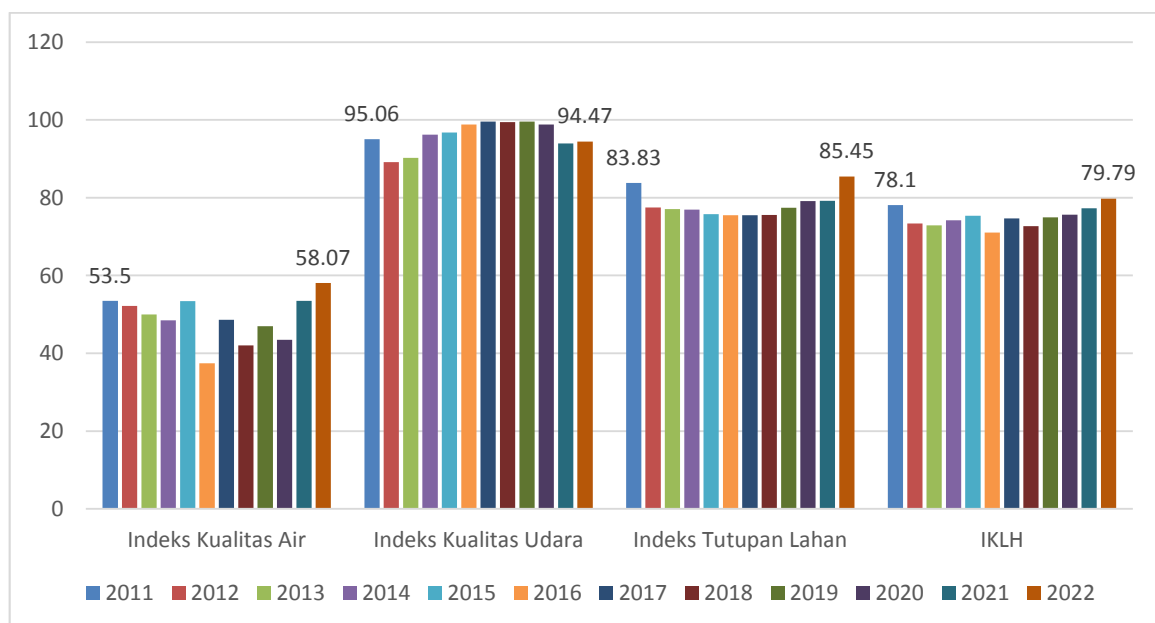
Indikator lainnya yang menggambarkan capaian pembangunan ketahanan pangan disuatu wilayah yaitu Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang meliputi tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan. Berdasarkan peringkat IKP Provinsi, Provinsi Gorontalo menempati urutan keenam skor terbaik setelah Provinsi DIY dengan nilai skor 80,35. Wilayah Indonesia bagian timur secara umum memiliki nilai IKP lebih rendah dibandingkan dengan Indonesia bagian barat. Penyebab rendahnya nilai IKP antara lain produksi pangan wilayah lebih kecil dibanding kebutuhan (kurang), prevalensi balita stunting tinggi, akses air bersih terbatas, dan persentase penduduk hidup miskin tinggi. Penanganan kerentanan pangan yang komprehensif perlu diprioritaskan pada daerah tersebut sesuai dengan faktor penyebabnya.

I. Kualitas Lingkungan Hidup

Ukuran indeks kualitas lingkungan hidup diukur berdasarkan 3 (tiga) kriteria penilaian yaitu indeks kualitas air, indeks kualitas udara dan indeks tutupan lahan menunjukkan adanya peningkatan IKLH selama 10 tahun terakhir, meskipun belum signifikan peningkatannya. Tahun 2022 IKLH mencapai 79,79 atau dalam kategori Baik. Meskipun demikian berdasarkan ketiga indeks komposit pembentuk IKLH, indeks Kualitas Air capaiannya masih sangat rendah yaitu berada pada angka 58,07 atau dengan kategori cemar sedang.

Grafik 2.2

Indeks Lingkungan Hidup tahun 2011-2022



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Gorontalo, 2023

Berbagai masalah yang masih menjadi perhatian dari kualitas lingkungan di Provinsi Gorontalo yaitu kerusakan hutan dan lahan, terumbu karang dan mangrove, kebersihan dan penghijauan kota yang belum merata di setiap Kabupaten/Kota, masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI), longsor dan banjir yang masih sering terjadi, serta masih minimnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan.

Selain itu terjadinya penurunan kualitas air dipermukaan, serta kerusakan dan penurunan kualitas air Danau Limboto. Penurunan kualitas air berdampak pada tingginya sedimentasi, dan proses eutrofikasi atau pencemaran air yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor di dalam perairan. Permasalahan lainnya yaitu pertumbuhan enceng gondok yang tumbuh semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau, selain itu juga pencemaran limbah cair dan padat akibat aktifitas masyarakat di sekitar danau, meningkatnya laju erosi dari hulu sungai serta meningkatnya aktifitas perikanan Kerambah Jaring Apung (KJA), serta persoalan sampah domestik juga turut mengancam kelestarian danau Limboto.

Danau Limboto merupakan salah satu asset sumberdaya alam yang dimiliki Provinsi Gorontalo saat ini. Berada dilokasi yang sangat strategis yang membentang pada 2 (dua) wilayah yaitu 30 % di Kota Gorontalo dan 70% di Kabupaten Gorontalo. Danau Limboto sangat potensial sebagai sumber pendapatan bagi nelayan, pencegah banjir, sumber air pengairan dan obyek wisata. Berdasarkan hasil penelitian total nilai manfaat ekosistem Danau Limboto adalah Rp 581.919.234.588/tahun.

Namun demikian, nilai manfaat Danau Limboto yang sangat besar sangat kontras dengan kondisi danau. Pengukuran yang dilakukan oleh *Laja* pada tahun 2016 dengan menggunakan data citra satelit memotret perubahan luasan danau dan vegetasi air periode 2000-2015. Luas Danau Limboto pada Tahun 2000 sebesar 4.019 ha dan pada Tahun 2015 sebesar 2.943 ha. Selama Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Luas penyusutan terbesar terjadi pada bagian barat, timur dan utara danau. Pada tahun 1932 rata-rata kedalaman danau Limboto ± 30 meter dengan luas 8.000 Ha. Dalam kurun waktu 52 tahun luas danau limboto berkurang sekitar 4.304 Ha atau 62,60 % dari total luas danau. Tahun 2012-2018 kedalaman danau Limboto hanya $\pm 2,5$ meter dengan luas yang tersisa yaitu ± 2.537 Ha. Berdasarkan luas lahan kritis di Daerah Aliran Sungai (DAS) Limboto, data menunjukkan bahwa tahun 2013 luas lahan kategori sangat kritis tahun 2013 sebesar 23.871,48 Ha, sedangkan tahun 2018 meningkat menjadi 94.834 Ha.

Seiring dengan makin berkurangnya luasan danau, vegetasi air mengalami perluasan dari 1.148 ha dengan persentase tutupan 28,56% dari luas danau pada Tahun 2000 meningkat menjadi 1.811 ha pada Tahun 2015 dengan persentase tutupan 61,53% dari luas danau Tahun 2015. Selama kurun waktu 15 tahun vegetasi air bertambah 663 ha dengan rata-rata perluasan sebesar 44,2 ha atau 3,85% per tahunnya. Penyebaran vegetasi air pada Tahun 2000 berada disekitar pinggiran danau. Sementara pada Tahun 2015, nampak sebagian vegetasi air sudah menyebar ke tengah danau. Vegetasi air yang menyebar ke tengah danau didominasi oleh eceng gondok.

Selain pelestarian danau Limboto, persoalan di bidang lingkungan hidup lainnya adalah terkait dengan persampahan. Dalam hal penanganan sampah, Pemerintah Provinsi Gorontalo telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Gorontalo dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga baik yang mencakup pengurangan dan penanganan sampah. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Gorontalo, produksi sampah di Gorontalo rata-rata mencapai diatas 30.000 ton pertahun, yang dihitung dari rata-rata buangan sampah pada TPA Talumelito sebagai pembuangan akhir sampah untuk wilayah Kota Gorontalo, Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo. Sementara total laju timbunan sampah untuk seluruh wilayah di Provinsi Gorontalo mencapai rata-rata 122.687 ton / tahun (2019-2022). Tahun 2022 volume sampah mencapai 149.443 ton.

- **Keanekaragaman Hayati (Biodiversity)**

Keanekaragaman hayati merupakan keragaman organisme hidup dari semua sumber termasuk antara lain ekosistem darat, laut dan akuatik. Dalam periodisasi pembangunan jangka panjang, salah satu hal penting dan strategis yang perlu menjadi perhatian yaitu aspek keberlanjutan keanekaragaman hayati (*biodiversity*). Keanekaragaman hayati merupakan komponen penyusun ekosistem alam yang memiliki peranan yang sangat besar baik dari segi ekologi, sosial, ekonomi maupun budaya. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, maka kebutuhan akan sumber daya alam hayati juga meningkat, sehingga jika tidak dikelola secara lestari maka akan memiliki dampak terhadap lingkungan dan mengakibatkan degradasi sumberdaya hutan. Oleh karenanya kebutuhan akan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berkelanjutan perlu menjadi prioritas utama.

Berbagai keanekaragaman hayati yang dimiliki Provinsi Gorontalo, diantaranya 81 jenis burung endemic Pulau Sulawesi, 21 jenis mamalia endemic Pulau Sulawesi, 17 jenis reptile endemic Sulawesi, 9 jenis amphibi endemic. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga telah menetapkan beberapa area wilayah konservasi di Provinsi Gorontalo seperti Taman

Nasional Bogani Nani Wartabone, Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohatu, Cagar Alam Panua dan Cagar Alam Tanjung Panjang. Selain itu ada Cagar Alam Mas Popaya Raja dan Cagar Alam Tangale.

Salah satu upaya pembangunan berkelanjutan adalah menjamin pelestarian keanekaragaman hayati. Hal ini menjadi salah satu yang perlu diperhatikan dalam periode pembangunan jangka panjang dalam pemanfaatan dan pengelolaan komponen keanekaragaman hayati untuk masyarakat dan generasi yang akan datang. Untuknya, sebagai modal dasar pembangunan dan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan, maka salah satu ukuran yang dapat digunakan yaitu melalui Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang merupakan salah satu tolok ukur utama untuk mengukur aksi/kegiatan/tindakan yang dilakukan dalam rangka pengurangan ancaman kehilangan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati. Indeks Pengelolaan keanekaragaman hayati Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 0,524 (nilai indeks).

- **Persentase Penurunan Emisi GRK (%)**

Sejak tahun 2010-2021 kegiatan pembangunan rendah karbon di berbagai sector secara nasional berhasil menurunkan emisi GRK kumulatif sebesar 5,65GtCO₂eq atau 27,07 persen, sedangkan intensitas emisi di tahun 2021 secara nasional adalah 118 ton CO₂e/miliar rupiah atau 31,42 persen. Angka intensitas emisi mengindikasikan bahwa setiap 1 miliar rupiah dari aktivitas ekonomi/pembangunan yang dilakukan di Indonesia berpotensi menghasilkan emisi GRK sebesar 118 ton CO₂e.

2.1.2. Demografi

Jumlah penduduk Gorontalo menduduki peringkat ke 32 dari 38 provinsi di Indonesia. Keseluruhan penduduk tersebar ke dalam 5 kabupaten dan 1 kota. Berdasarkan hasil Proyeksi Interim SP 2020, jumlah penduduk Gorontalo pada tahun 2023 mencapai 1.213.180 jiwa, bertambah sebanyak 26,32 % dibanding tahun 2007.

Grafik 2.3

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk
Provinsi Gorontalo Tahun 2020-2022



Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Laju pertumbuhan penduduk tahun 2020 – 2023 rata-rata sebesar 1,17 persen per tahun. Tahun 2023, pertumbuhan penduduk sebesar 1,71 persen. Pertumbuhan jumlah penduduk Gorontalo tertinggi pada tahun 2010 yaitu mencapai 6,19 persen, diantaranya disebabkan oleh peningkatan transmigran, sedangkan pertumbuhan penduduk terendah terjadi pada tahun 2020, di masa pandemi Covid-19, dimana jumlah penduduk mengalami penurunan hingga 2,57 persen. Berdasarkan wilayah kabupaten/kota, jumlah penduduk tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo sebanyak kurang lebih 405.320 ribu jiwa, sedangkan laju pertumbuhan tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo Utara yang tumbuh sebesar 1,51 persen.

Tabel 2.12

Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2020 - 2023

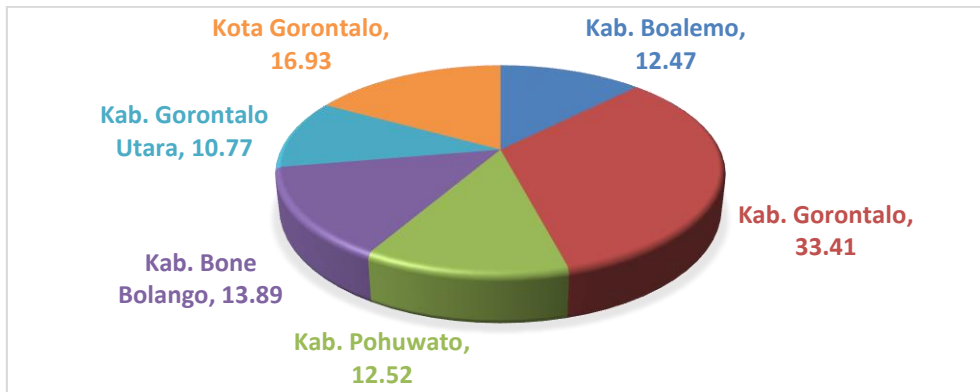
Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)		Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	
	2020	2023	2010-2020	2020-2023
Kab. Boalemo	145,87	151,34	1,18	1,23
Kab. Gorontalo	393,11	405,32	0,96	1,03
Kab. Pohuwato	146,43	151,83	1,25	1,22
Kab. Bone Bolango	162,78	168,56	1,34	1,17
Kab. Gorontalo Utara	124,96	130,72	1,78	1,51
Kota Gorontalo	198,54	205,40	0,95	1,14
Provinsi Gorontalo	1.171,68	1.213,18	1,16	1,17

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo. 2024

Persebaran penduduk adalah distribusi penduduk menurut wilayah. Pada tahun 2023, persebaran penduduk Provinsi Gorontalo yang tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo yaitu

sebesar 33,44 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo. Sementara wilayah dengan penduduk paling sedikit adalah Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 10,78 persen dari total penduduk Provinsi Gorontalo.

Grafik 2.4
Persentase Persebaran Penduduk Provinsi Gorontalo, 2022



Sumber: Proyeksi Interim SP 2023, BPS RI

Kepadatan penduduk adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah. Indikator tersebut menunjukkan rata-rata jumlah penduduk setiap satuan luas (kilometer persegi). Provinsi Gorontalo tergolong sebagai provinsi dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif kecil. Dengan luas wilayah 11.257,07 kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Provinsi Gorontalo sebesar 101 jiwa per km² pada tahun 2023.

Gambar 2.16
Peta Kepadatan Penduduk Provinsi Gorontalo berdasarkan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo, 2023



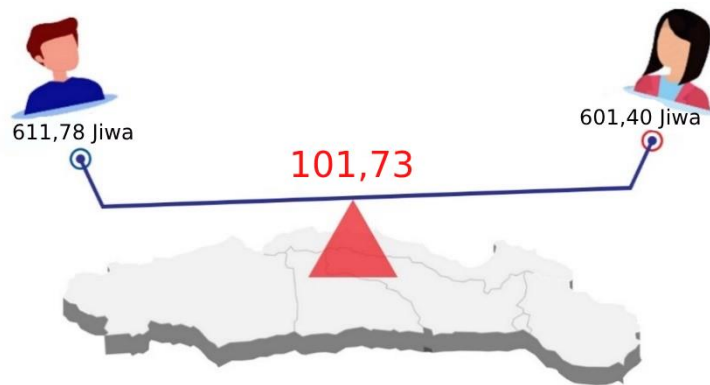
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2024

Data empiris menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Gorontalo terpusat di Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah sebesar 79,59 km² kepadatan penduduk mencapai 2.839 jiwa per km². Padatnya penduduk Kota Gorontalo terkait erat dengan fungsi sentral Kota Gorontalo disamping sebagai ibukota provinsi (pusat pemerintahan), juga sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat kesehatan, dan pendidikan.

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan per 100 penduduk perempuan. Informasi mengenai rasio jenis kelamin berguna untuk pengembangan perencanaan yang berwawasan gender. Dilihat dari struktur penduduk menurut jenis kelamin, rasio jenis kelamin/seks ratio (SR) di Provinsi Gorontalo sejak tahun 2010 hingga tahun 2023 menunjukkan jumlah penduduk perempuan relatif seimbang dengan jumlah penduduk laki-laki. Artinya, tidak terdapat selisih jumlah yang signifikan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan. Jumlah penduduk laki-laki Tahun 2023 sebanyak 611,78 Ribu orang, sedangkan perempuan sebanyak 601,40 ribu orang. Pada tahun 2023 rasio jenis kelamin Provinsi Gorontalo sebesar 101,73 yang berarti bahwa terdapat 101 hingga 102 penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan.

Gambar 2.17

Rasio Jenis Kelamin Provinsi Gorontalo Tahun 2023



Sumber: Proyeksi Interim SP 2020, BPS RI

Dilihat dari kelompok umur terlihat bahwa untuk kelompok umur usia produktif (15-64 tahun) sebesar 69,62 persen dan non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) sebesar 30,38 persen. Dengan demikian, angka beban tanggungan penduduk usia produktif (*dependency ratio*) sebesar 43,65 atau mengalami penurunan dibanding tahun 2018 yang tercatat sebesar 44,32. Penduduk usia produktif yang cukup tinggi di Gorontalo menjadi pendorong utama pembangunan. Hal ini menunjukkan Gorontalo mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 15 tahun ke depan.

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk menunjukkan Total Fertility Rate Provinsi Gorontalo Mengalami Penurunan Dalam 22 Tahun Terakhir. Sensus Penduduk 2000 Mencatat Angka TFR Sebesar 2,70, sementara Long Form SP2020 sebesar 2,30 yang menggambarkan seorang perempuan melahirkan rata-rata 2 – 3 anak selama masa reproduksinya.

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

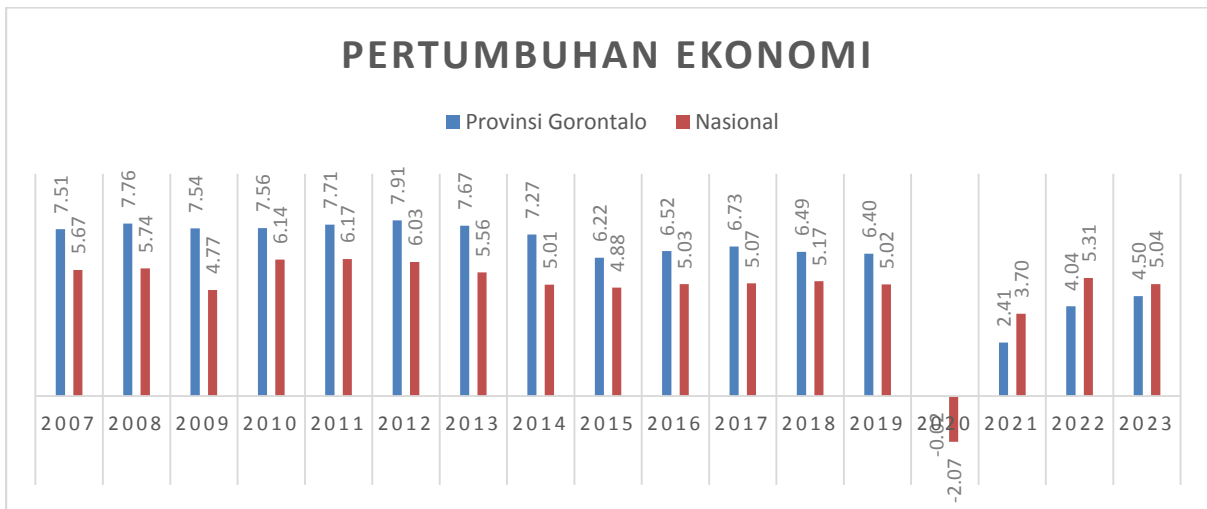
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Kondisi perekonomian Provinsi Gorontalo dalam dua dekade terakhir mengalami perkembangan yang fluktuatif. Ekonomi Gorontalo mencapai puncaknya di tahun 2012 yang tumbuh mencapai 7,91 persen diatas laju pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara ditahun 2020 gejolak ekonomi akibat pandemi Covid19 mengakibatkan beberapa sektor ekonomi mengalami pelemahan, sehingga ekonomi Gorontalo berada pada level minus 0,02 persen. Dalam kurun waktu 2010-2022, rata-rata pertumbuhan ekonomi Gorontalo tumbuh sebesar 5,92 persen per tahun. Jika dilihat dari rata-rata per periodisasi RPJMD, pada periodisasi RPJMD 2007-2012, ekonomi tumbuh rata-rata 7,6 persen, pada RPJMD 2012-2017 tumbuh rata-rata 7,05 persen, sedangkan periodisasi RPJMD 2017-2022 ekonomi tumbuh sebesar 4,34 persen. Tahun 2023, Ekonomi tumbuh diangka 4,50 persen. Kondisi ekonomi pasca pandemi, terus mengalami peningkatan, meskipun berada dibawah rata-rata Nasional

Grafik 2.5

Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Gorontalo Tahun 2007-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Kinerja perekonomian Gorontalo ditunjang oleh beberapa kebijakan strategis dalam upaya mendorong pemulihan dan penguatan ekonomi. Hal ini dapat ditunjukkan dari nilai Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang terus mengalami peningkatan setiap tahun. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023 mencapai 31.647,60 Milyar Rupiah atau meningkat 95,70 persen dibanding tahun 2010. PDRB Provinsi Gorontalo menyumbang sebesar 0,25 persen dari total PDRB Nasional yang mencapai 11.710.387,80 Milyar Rupiah.

Tabel 2.13
PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 -2023 (Milyar Rupiah)

PDRB Lapangan Usaha	Harga Berlaku					Harga Konstan				
	2010	2012	2017	2022	2023	2010	2012	2017	2022	2023
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5.977,73	6.763,85	13.127,27	18.073,68	19.392,62	5.977,73	6.763,85	9.314,37	10.909,94	11.369,43
B Pertambangan dan Penggalian	237,30	265,97	399,98	519,28	562,13	237,30	265,97	308,31	353,96	375,69
C Industri Pengolahan	632,22	737,13	1.413,09	2.169,61	2.269,47	632,22	737,13	973,80	1.331,65	1.335,46
D Pengadaan Listrik dan Gas	10,30	12,72	15,79	23,96	25,65	10,30	12,72	18,89	27,24	28,95
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah & Daur Ulang	7,81	8,94	19,93	27,76	29,28	7,81	8,94	14,03	18,49	19,21
F Konstruksi	1.815,63	2.136,49	1.978,86	5.189,74	5.717,04	1.815,63	2.136,49	2.920,43	3.274,17	3.464,07
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.473,20	1.806,27	3.938,42	6.221,61	7.080,63	1.473,20	1.806,27	2.740,5	3.757,84	4.131,62
H Transportasi dan Pergudangan	862,40	1.022,92	2.092,42	2.668,65	3.040,11	862,40	1.022,92	1.484,97	1.693,94	1.798,58
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	334,80	383,57	814,28	1.076,22	1.153,82	334,80	383,57	580,73	720,57	760,24
J Informasi dan Komunikasi	422,31	495,65	921,96	1.286,08	1.370	422,31	495,65	785,82	1.095,92	1.140,60
K Jasa Keuangan dan Asuransi	526,54	675,93	1.493,39	2.192,18	2.070,44	526,54	675,93	1.064,49	1.302,73	1.206,46
L Real Estate	285,80	337,57	661,58	820,71	820,26	285,80	337,57	489,18	566,46	557,15
M, N, O Jasa Perusahaan	15,72	17,73	33,45	42,80	42,33	15,72	17,73	23,82	27,66	26,51
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	1.505,96	1.685,04	2.427,25	2.802,94	2.975,08	1.505,96	1.685,04	1.978,57	2.165,30	2.237,22
P Jasa Pendidikan	537,10	692,83	1.442,74	2.125,46	2.249,90	537,10	692,83	1.056,57	1.415,29	1.474,89
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	531,90	610,73	1.216,76	1.717,14	1.910,14	531,90	610,73	914,89	1.176,97	1.246,85
R, S, T, U Jasa lainnya	299,02	333,76	540,47	616,29	665,35	299,02	333,76	420,93	448,33	474,67
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	15.475,74	17.987,07	34.537,68	47.569,65	51.374,40	15.475,74	17.987,07	25.090,13	30.286,45	31.647,60

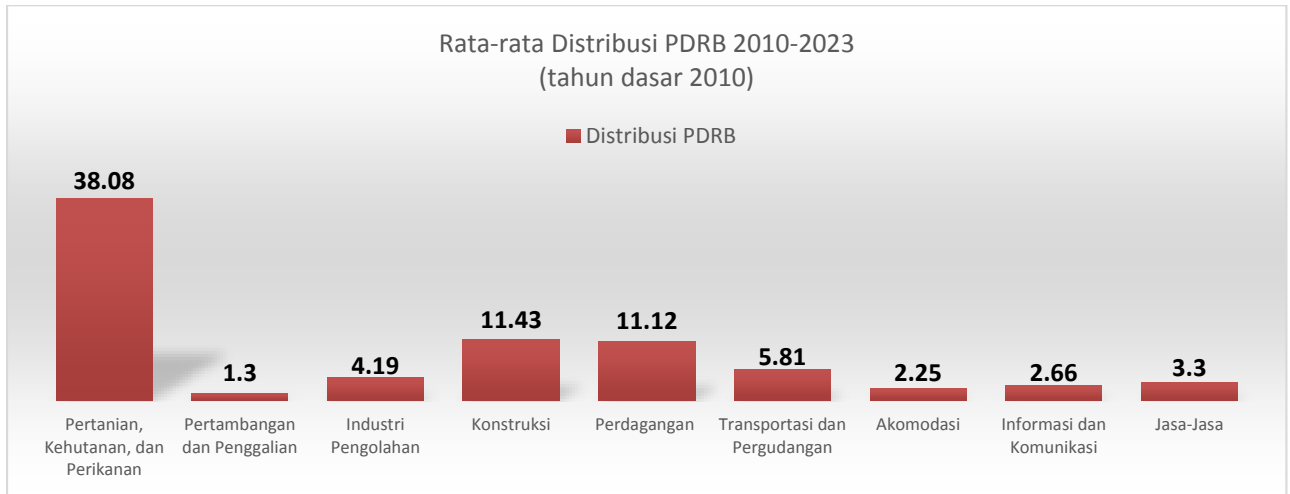
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

* Angka Sementara

Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo sebagian besar masih berasal dari sektor Primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, yang masih memberikan kontribusi rata-rata 38 persen pertahunnya, diikuti konstruksi rata-rata sebesar 11,43 persen, perdagangan barang dan jasa rata-rata sebesar 11,12 persen. Sementara sektor industri pengolahan hanya berkontribusi rata-rata sebesar 4,19 persen dari total PDRB lapangan usaha.

Grafik 2.6

Rata-rata Distribusi PDRB Provinsi Gorontalo Selang Tahun 2010-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (diolah, 2023)

Dari sisi pengeluaran, kontribusi tertinggi berasal dari Pengeluaran Konsumsi rumah tangga dengan rata-rata sebesar 61,77 persen (selang tahun 2010-2023), dengan nilai PDRB mencapai 29.323,23 Milyar Rupiah (ADHB). Dari sisi Pengeluaran PMTB kontribusi sebesar 30,02 persen, pengeluaran konsumsi Pemerintah 22,48 persen, dan ekspor sebesar 24,13 persen. Disisi lain komponen impor sebagai komponen pengurang dalam PDRB juga masih berkontribusi relatif tinggi sebesar 41,16 persen.

Tabel 2.14

Produk Domestik Regional Bruto ADHB dan ADHK Menurut Pengeluaran, Tahun 2010-2023

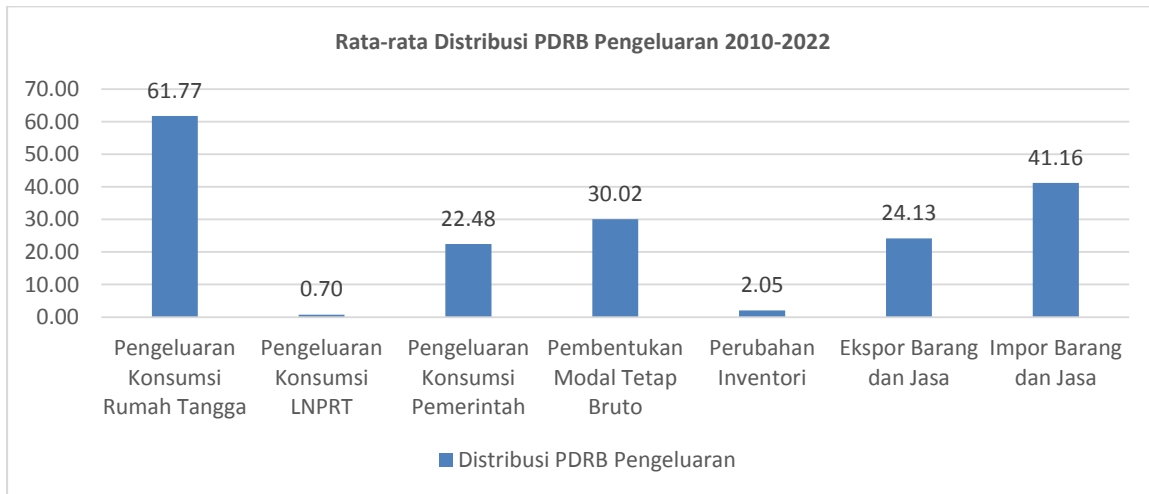
Lapangan Usaha	ADHB					ADHK				
	2010	2012	2017	2022	2023*	2010	2012	2017	2022	2023*
1 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	9.691,20	11.038,73	21.233,69	29.323,23	31.733,41	9.691,2	11.038.73	15.268,75	18.598,13	19.394,13
2 Pengeluaran Konsumsi LNPR	103,81	117,02	246,47	349,11	381,49	103,81	117.02	184,29	231,69	243,32
3 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	3.642,77	4.169,00	7.804,16	8.903,88	9.208,25	3.642,77	4.169.00	5.177,15	5.418,50	5.446,93
4 Pembentukan Modal Tetap Bruto	4.863,97	5.726,69	10.309,60	13.225,57	14.207,97	4.863,97	5.726.69	7.956,78	8.874,28	9.188,43
5 Perubahan Inventori	380,46	499,06	787,45	685,41	738,72	380,46	499.06	429,24	327,07	338,25
6 Ekspor Barang dan Jasa	3.226,69	4.775,88	7.737,49	12.482,78	13.879,90	3.226,69	4.775.88	5.383,5	7.242,12	7.755,53
7 Impor Barang dan Jasa	6.433,17	8.339,29	13.580,86	17.395,55	18.775,34	6.433,17	8.339.29	9.309,58	10.405,33	10.718,98
Produk Domestik Regional Bruto	15.475,74	17.987,07	34.538,00	47.574,43	51.374,40	15.475,74	17.987.07	25.090,13	30.286,45	31.647,60

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

* Angka Sementara

Grafik 2.7

Rata-rata Distribusi PDRB dari Sisi Pengeluaran selang Tahun 2010-2023

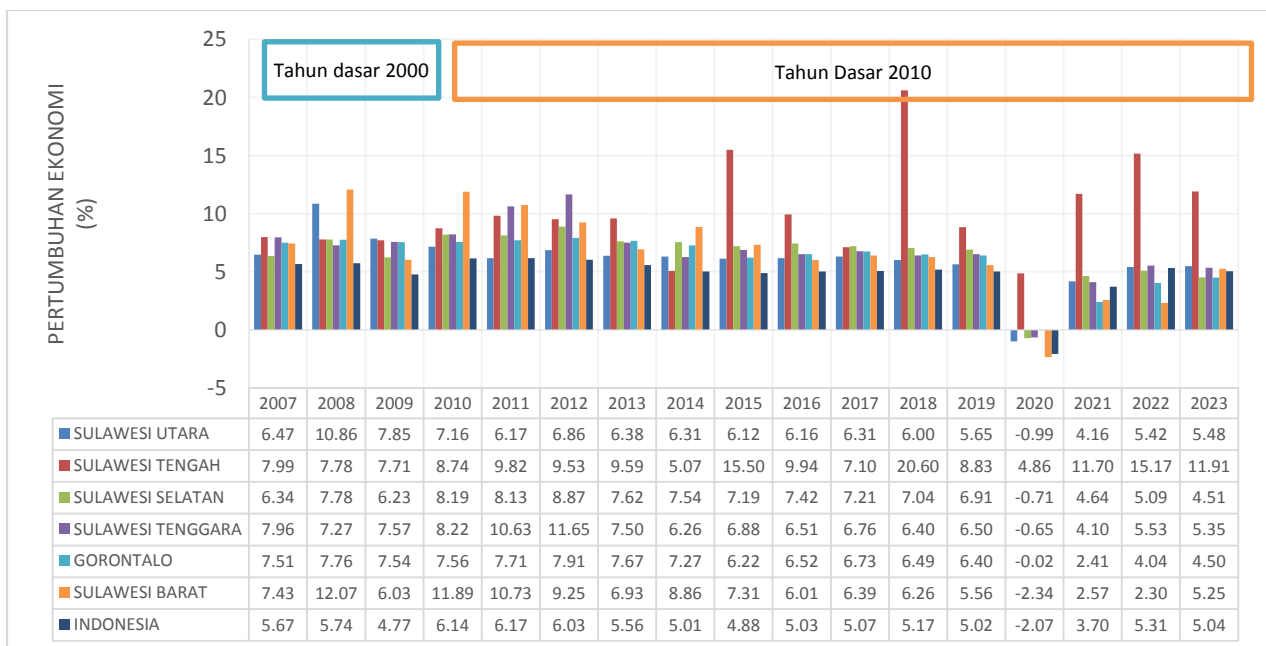


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo (diolah, 2023)

Jika dilihat secara regional, Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo Tahun 2023 berada di urutan kedua terbawah setelah Sulawesi Barat. Kedua Provinsi ini masih bergantung pada kontribusi sektor Primer dalam struktur PDRB. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang masih bertumpu pada sektor primer, memiliki laju pertumbuhan yang cenderung lebih rendah dibanding pertumbuhan pada sektor sekunder industri manufaktur.

Grafik 2.8

Pertumbuhan Ekonomi Gorontalo dan Regional Sulawesi Tahun 2007-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional dan Gorontalo 2023

Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari intervensi pembangunan Nasional dan Kabupaten/Kota yang saling bersinergi dan saling mendukung dalam rangka

pencapaian target-target makro pembangunan. Laju Pertumbuhan ekonomi tertinggi berada di Kota Gorontalo yang tumbuh sebesar 4,52 % ditahun 2023, dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6,31 % selang 2010-2023.

Tabel 2.15
Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Rata-rata Laju Pertumbuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2010-2023

No	Kabupaten/Kota	2010	2023	Rata-rata Pertumbuhan (2010-2023)
1	Kabupaten Boalemo	6,25	4,42	5,60
2	Kabupaten Gorontalo	7,69	4,51	5,93
3	Kabupaten Pohuwato	7,30	4,4	5,71
4	Kabupaten Bone Bolango	6,70	4,47	5,83
5	Kabupaten Gorontalo Utara	6,93	4,31	5,90
6	Kota Gorontalo	7,60	4,52	6,31
	Provinsi Gorontalo	7,56	4,50	5,92

Sumber : Data Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, (diolah 2023)

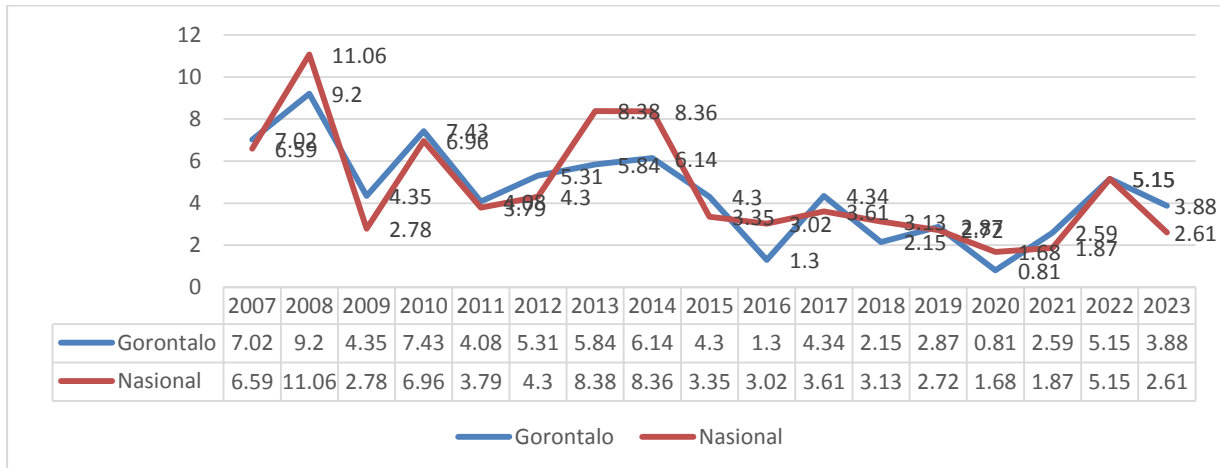
Jika dilihat secara menyeluruh, struktur ekonomi dari sisi lapangan usaha di Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten/Kota masih bergantung pada sektor primer dalam hal ini pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Sementara dari sektor strategis lainnya seperti industri pengolahan, kontribusi sektor masih sangat kecil. Hal ini karena selain potensi wilayah Gorontalo, juga karena disebabkan sumber daya manusia di Provinsi Gorontalo yang lebih besar bekerja disektor pertanian. Sementara dari sisi pengeluaran, masih didominasi oleh konsumsi Rumah Tangga dengan kisaran diatas 60 persen, sedangkan kontribusi PMTB dan ekspor masih sangat kecil dan fluktuatif. Olehnya upaya transformasi ekonomi perlu kembali didorong, dengan menjadikan sektor-sektor primer sebagai katalisator dalam mendorong sektor-sektor industri dan UMKM, melalui penguatan rantai nilai (*value chain*) masing-masing sektor dan berintegrasi dalam memperkuat perdagangan barang dan jasa serta ekspor.

b. Laju Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang dapat menunjukkan baik/buruknya perekonomian suatu daerah. Tingkat inflasi tinggi, menggambarkan perlambatan laju pertumbuhan ekonomi, tetapi terjadinya deflasi tidak selalu menggambarkan hal yang positif. Angka inflasi yang stabil menunjukkan bahwa indikator perekonomian semakin baik.

Grafik 2.9

Perkembangan Inflasi Kota Gorontalo 2007-2023



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Laju inflasi di Provinsi Gorontalo, dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen diwilayah Kota Gorontalo. Selang Tahun 2007-2023, Inflasi Kota Gorontalo mengalami fluktuasi. Inflasi terendah terjadi pada Tahun 2020 sebesar 0,81, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid19 yang berlangsung sejak Bulan Februari 2020 dan Inflasi Tahunan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 sebesar 5,84.

Tingkat inflasi Kota Gorontalo Desember 2022 dan Desember Tahun 2023 (Januari-Desember) menunjukkan adanya penurunan. Laju Inflasi Tahun 2022 sebesar 5,15 persen turun menjadi 3,88 persen pada Tahun 2023. Tahun 2023 inflasi Kota Gorontalo masih lebih tinggi dibanding Nasional dengan tingkat inflasi sebesar 2,61 %.

Perkembangan harga berbagai komoditas di Kota Gorontalo selama Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS pada Desember 2023 terjadi inflasi *year on year (yoy)* sebesar 3,88 persen, atau terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 112,64 pada Desember 2022 menjadi 117,01 pada Desember 2023. Tingkat inflasi *month to month (mtm)* sebesar 1,32 persen, dan tingkat inflasi *year to date (ytd)* sebesar 3,88 persen. Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau selama Desember 2022 sampai dengan Desember 2023 mengalami inflasi (yoy) sebesar 8,37 persen dan memberikan sumbangan inflasi yoy sebesar 2,53 persen. Beberapa komoditas kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang dominan memberikan sumbangan inflasi yoy yaitu cabai rawit sebesar 1,32 persen, beras sebesar 0,85 persen.

Untuk mengendalikan tingginya inflasi berbagai program kebijakan yang dilakukan Pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan, dukungan perhubungan laut dan darat untuk membuka akses lalu lintas

barang, serta kebijakan sektoral lainnya diantaranya program pasar murah, program Pola Pangan Lestari dan Germas Batari (Gerakan Masyarakat Tanam Rica/Cabe) juga menjadi upaya pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Mulai tahun 2024, inflasi wilayah Provinsi Gorontalo dihitung berdasarkan Indeks Harga Konsumen di 2 wilayah yaitu Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo.

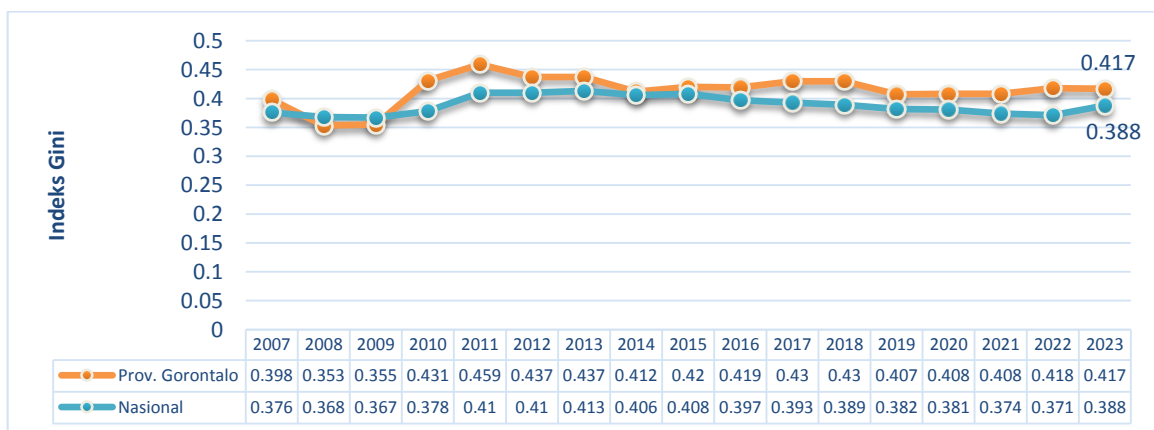
c. Indeks Gini

Indeks Gini digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah secara menyeluruh. Indeks Gini berkisar antara 0 sampai 1. Angka Gini Rasio sebagai ukuran pemerataan pendapatan mempunyai selang nilai antara nilai 0 (nol) dan 1 (satu). Gini Rasio sama dengan 0 (nol) menunjukkan kesenjangan sebaran pendapatan yang rendah (pemerataan sempurna). Sedang nilai 1 (satu) menunjukan tingkat kesenjangan sebaran yang tinggi (kesenjangan sempurna).

Gini Rasio Provinsi Gorontalo periode tahun 2007–2023 terjadi fluktuasi dengan menunjukkan trend yang cenderung meningkat dalam periode 5 tahun terakhir. Dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro, maka tingkat ketimpangan pendapatan di Provinsi Gorontalo pada kurun waktu 2007-2023 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”.

Grafik 2.10

Indeks Gini Provinsi Gorontalo 2007-2023



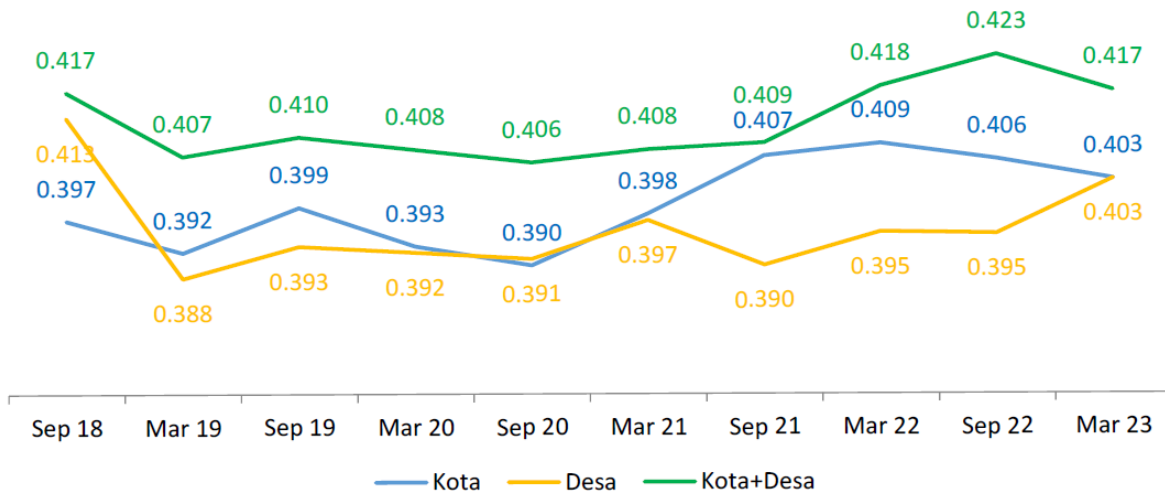
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Ketimpangan distribusi pendapatan menyebabkan masyarakat yang memiliki penghasilan tinggi semakin kaya sedangkan masyarakat yang berpenghasilan rendah menjadi semakin miskin. Dimana nilai indeks gini ratio merepresentasikan kondisi masyarakat di suatu wilayah, ketika nilai indeks gini ratio pada salah satu wilayah tergolong tinggi maka

merepresentasikan pendistribusian pendapatan tidak menyeluruh sehingga menyebabkan kesenjangan yang jauh antara orang kaya dengan orang miskin.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, ketimpangan tampak lebih jelas di daerah perkotaan yang ditunjukkan dengan angka Gini Rasio yang lebih tinggi dibanding di pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan pendapatan dipertanian lebih tinggi dibandingkan dipedesaan, ini disebabkan karena tingkat kemajemukan penduduk di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan dipedesaan dengan struktur pekerjaan dan tingkat pendapatan yang cenderung lebih merata. Namun demikian tahun 2023, tingkat kesenjangan perkotaan maupun pedesaan berada pada angka 0,403, dan berada dalam kategori ketimpangan sedang.

Grafik 2.11
Perbandingan Indeks Gini Perkotaan dan Pedesaan Provinsi Gorontalo 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

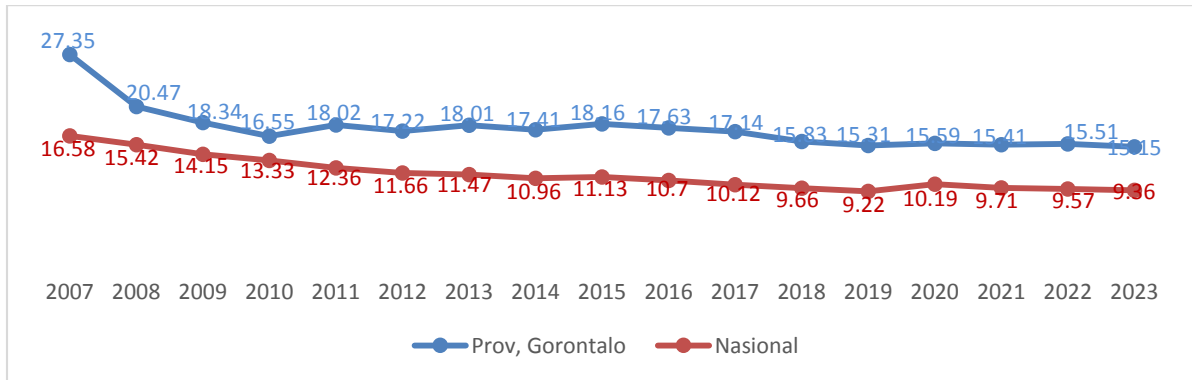
d. Kemiskinan

Secara umum kemiskinan dianggap sebagai kondisi ketidakmampuan memenuhi standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan yang layak. Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar atau *basic needs approach*. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, Kemiskinan Provinsi Gorontalo selama periode 2007-2022 menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan sebesar 11,84 persen poin, atau dengan rata-rata penurunan 0,04 persen per tahunnya. Persentase Kemiskinan Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 15,15 persen (Maret 2023) atau sebesar 183,71 ribu jiwa.

Selama 3 (tiga) tahun terakhir kemiskinan Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan akibat pandemi, namun perlahan mulai menunjukkan adanya pemulihan tingkat kesejahteraan masyarakat. Selain itu, persentase kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada diatas rata-rata Nasional dan masih menjadi Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi ke-5 secara Nasional.

Grafik 2.12
Persentase Kemiskinan di Provinsi Gorontalo 2007-2023



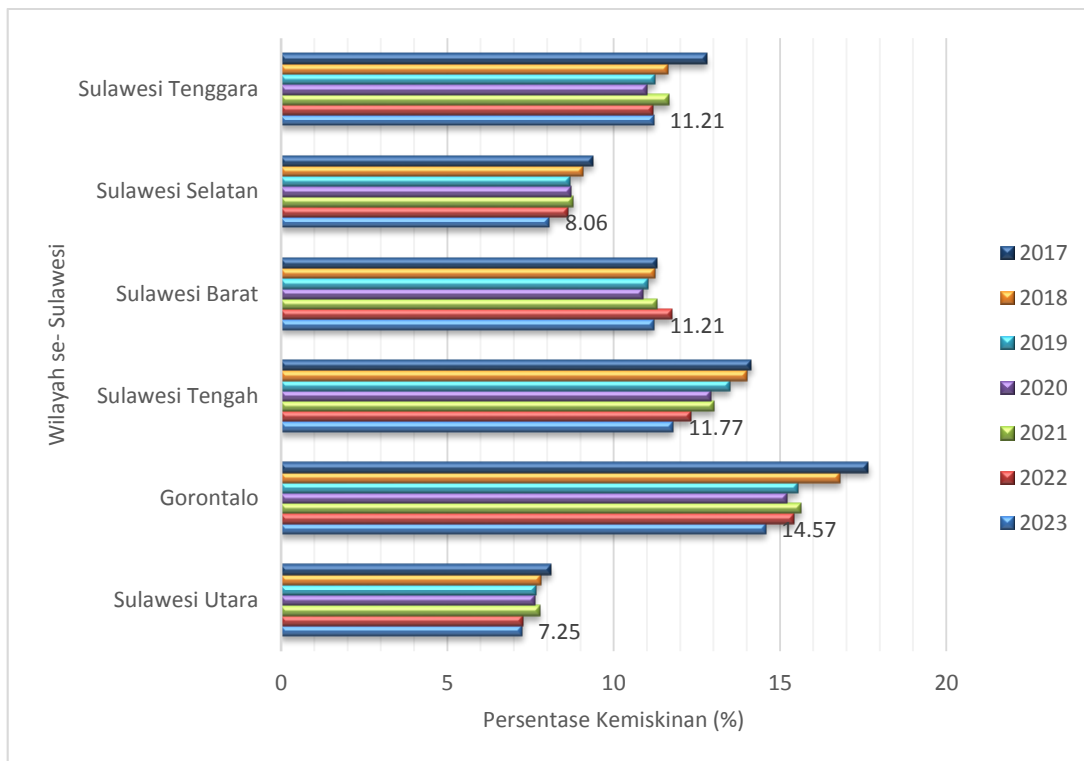
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Jika dilihat dari Indeks kedalaman kemiskinan yang menggambarkan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, Indeks kedalaman kemiskinan (P1) tertinggi yaitu pada tahun 2008 sebesar 6,05, sedangkan tahun 2023 turun hingga berada diangka 2,918. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk yang berada jauh garis kemiskinan tahun 2023 cenderung lebih sedikit dan terus berkurang dibandingkan tahun 2007. Kondisi yang sama juga terjadi pada indeks keparahan kemiskinan (P2) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Dimana tahun 2008 Indeks keparahan kemiskinan berada pada angka 1,86, sedangkan tahun 2023 turun menjadi 0,740.

Pada Maret 2023 sebesar 23,73 persen atau sejumlah 159,60 ribu penduduk miskin berada di pedesaan, sedangkan kemiskinan perkotaan sebesar 4,47 persen atau 24,12 ribu jiwa penduduk miskin perkotaan. Hal ini karena di wilayah pedesaan mata pencaharian utama sebagai petani yang tingkat pendapatannya lebih rendah.

Tahun 2023, kemiskinan Gorontalo masih berada pada posisi 5 tertinggi secara nasional, dan menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi diwilayah regional sulawesi.

Grafik 2.13
Presentase Kemiskinan Regional Sulawesi 2017-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Nasional, 2023

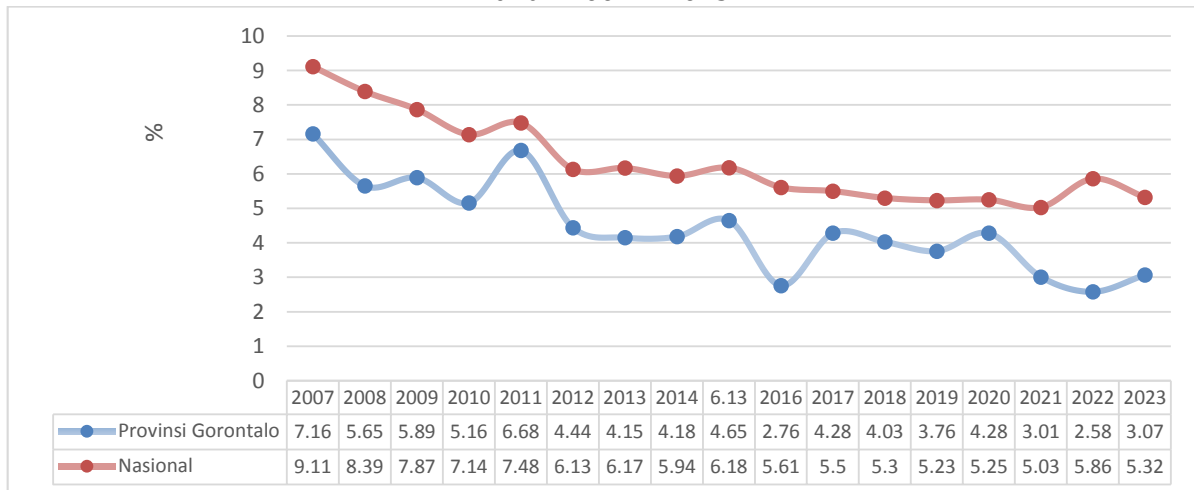
Tahun 2023 Kemiskinan ekstrim Provinsi Gorontalo sebesar 2,44 %, turun dibanding tahun 2022 sebesar 4,28 persen dan turun 5,73 persen poin dibandingkan dengan tahun 2020 yang masih sebesar 8,17 persen. Upaya penurunan kemiskinan ekstrim dilakukan melalui berbagai strategi diantaranya penurunan beban pengeluaran, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan melalui bantuan sosial, peningkatan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan UMKM, bantuan usaha dibidang pertanian, peternakan dan perikanan.

e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Pada rentang 15 tahun dari 2006 – 2022 secara tren angka TPT di Provinsi Gorontalo menunjukkan penurunan, meskipun pada beberapa tahun mengalami peningkatan, tetapi secara umum menunjukkan perkembangan yang positif untuk sektor tenaga kerja. Posisi pada tahun 2023 berada pada angka 3,07% tumbuh negatif dibanding tahun 2022 sebesar 2,58 persen, sedangkan BPS mencatat pada tahun 2006 TPT Provinsi Gorontalo berada pada angka 7,62%. Penurunan angka TPT terbesar terjadi pada tahun 2011 ke 2012, dimana pada jangka waktu tersebut terjadi penurunan sebesar 2,24% dimana pada tahun 2011 TPT pada angka 6,68% dan pada tahun 2012 menjadi 4,44%. Kenaikan angka TPT terakhir terjadi pada tahun 2020, dimana sebelumnya pada angka 3,76% dan pada tahun 2020 menjadi 4,28% yang diakibatkan oleh adanya Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak orang kehilangan

pekerjaannya mengingat adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi adanya event dan kontak langsung antara manusia. Sebagian besar pekerjaan yang bisa dilakukan secara remote dilaksanakan secara WFH (*Work From Home*) diantaranya sektor pemerintahan dan swasta.

Grafik 2.14
Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2007 – 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

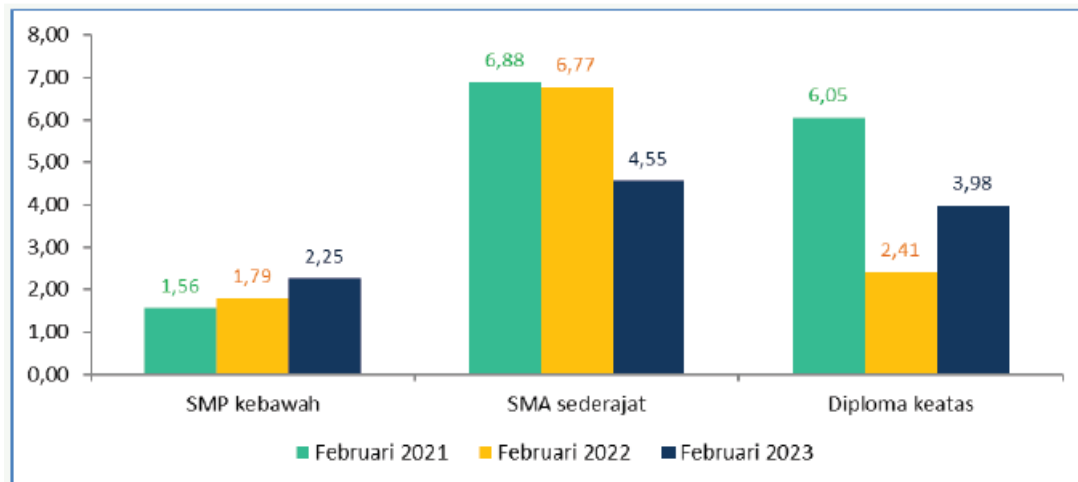
Secara tren capaian dari tahun 2007 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Gorontalo selalu berada pada posisi di bawah nasional sehingga memberikan kontribusi positif dalam pencapaian indikator ketenagakerjaan secara nasional. Hal ini disebabkan antara lain jumlah penyerapan tenaga kerja yang berada pada sektor pertanian yang masih cukup tinggi mengingat PDRB Provinsi Gorontalo didominasi oleh Lapangan Usaha dari sektor Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang sampai tahun 2023 pada angka 38%. Yang perlu menjadi perhatian adalah dengan rendahnya angka pengangguran belum memberikan kontribusi signifikan pada angka kemiskinan di Provinsi Gorontalo. Data menunjukkan capaian angka persentase kemiskinan pada 15,51% dan Provinsi Gorontalo berada pada 5 daerah dengan peringkat terbawah. Hal ini berarti bahwa dengan banyaknya angkatan kerja yang bekerja belum bisa memberikan pendapatan yang cukup dan layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat pendapatan masyarakat yang bekerja masih relatif rendah, yang dapat disebabkan karena tingkat produktivitas tenaga kerja di Provinsi Gorontalo yang juga cenderung masih rendah.

Struktur lapangan pekerjaan utama di Provinsi Gorontalo didominasi oleh penduduk yang bekerja di kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (A) dan pada kelompok Perdagangan besar eceran, transportasi, penyimpanan, akomodasi dan layanan makanan (G, H dan I) dengan total jumlah kedua kategori ini sebesar 62,26%. Dua kelompok besar lainnya

pada kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, Pendidikan dan Kegiatan Sosial lainnya (O, P dan Q) sebesar 14,37% dan kategori Industri Pengolahan, Pertambangan-Penggalian dan Kegiatan Industri lainnya (B, C dan E) sebesar 13,88%.

Grafik 2.15

TPT Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan Provinsi Gorontalo, Feb 2021, Feb 2022 dan Feb 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

Gambar di atas menunjukkan nilai TPT menurut tingkat Pendidikan yang ditamatkan, secara garis besar bahwa TPT di Provinsi Gorontalo didominasi oleh mereka yang berada pada tingkat Pendidikan SMA sederajat, hal ini sejalan dengan pola pada tahun – tahun sebelumnya. Peringkat kedua diisi oleh tingkat Pendidikan Diploma ke atas dan terakhir mereka yang memiliki Pendidikan SMP ke bawah. Hal ini dapat diartikan bahwa mereka yang berpendidikan lebih rendah cenderung untuk mau menerima pekerjaan apa saja, sedangkan untuk yang berpendidikan lebih tinggi cenderung untuk memilih pekerjaan yang lebih sesuai (cenderung untuk memilih – milih jenis pekerjaan). Selain itu di Provinsi Gorontalo belum tersedia banyak industri atau jenis usaha yang mampu untuk langsung menyerap lulusan SMA / SMK terutama dengan bidang keahlian spesifik yang dihasilkan oleh lulusan pada tingkat Pendidikan Menengah.

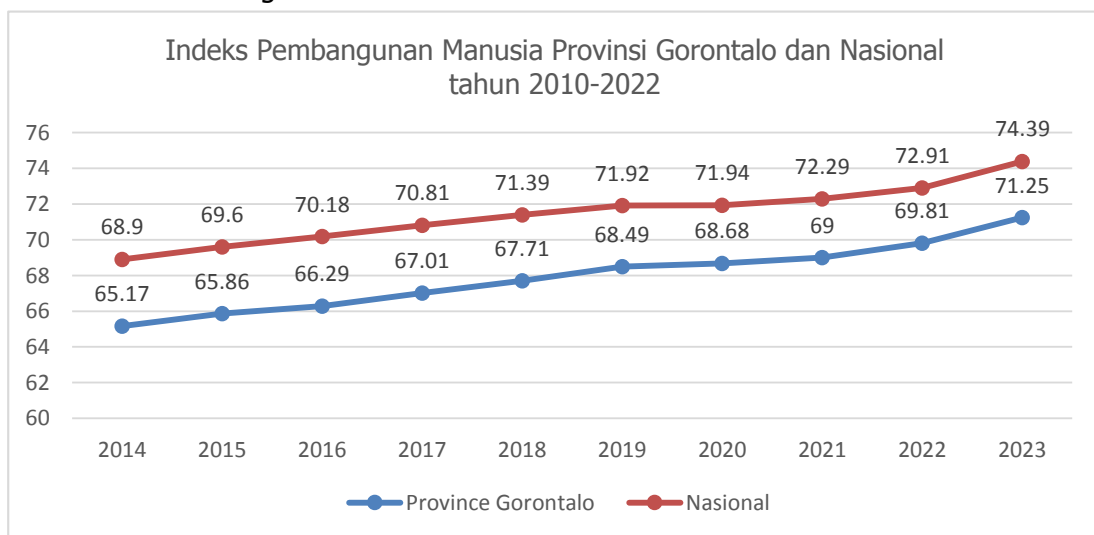
Indikator lainnya menunjukkan bahwa tingkat setengah penganggur di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi. Indikator setengah menganggur lebih menggambarkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi Gorontalo. Kondisi ini menggambarkan ketika seseorang bekerja di bawah jam kerja normal atau tidak bekerja secara optimal. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi, yang ini diindikasikan dari jam kerja yang rendah. Tahun 2023 menunjukkan bahwa Pekerja setengah penganggur Provinsi Gorontalo sebesar 7,43 persen. Sementara pekerja paruh waktu sebesar 22,59 persen.

f. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Capaian Indeks Pembangunan Manusia sejak tahun 2010 dengan penghitungan metode baru, BPS mencatat terjadi peningkatan dalam kurun waktu tersebut, walaupun dalam 3 dimensi IPM terjadi perlambatan akibat pandemic covid ditahun 2020-2021. Capaian IPM Provinsi Gorontalo tahun 2023 mencapai 71,25 atau meningkat 0,63 poin dibanding tahun sebelumnya dimana capaian IPM pada tahun 2022 sebesar 70,62. Hal ini berarti bahwa IPM Gorontalo tumbuh sebesar 0,83 persen selama periode 2020-2023. Dalam kurun waktu sepuluh tahun, IPM Gorontalo telah mengalami kenaikan sebesar 6,08 poin, yaitu dari 65,17 (2014) menjadi 71,25 (2023). Perkembangan ini menunjukkan bahwa diakhir periode RPJPD Provinsi Gorontalo tahun 2007-2025 terjadi kemajuan dalam pembangunan manusia di Gorontalo.

Grafik 2.16

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi dan Nasional tahun 2014-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Dalam kurun waktu tersebut IPM Provinsi Gorontalo rata-rata tumbuh sebesar 0,46 persen per tahun. Rata-rata pertumbuhan tersebut relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata IPM Indonesia yang tumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Pertumbuhan IPM Gorontalo paling cepat terjadi pada periode 2022-2023, yaitu mencapai 1,44 persen. Sementara pada IPM Indonesia, pertumbuhan tercepat juga terjadi pada periode 2022-2023 dengan pertumbuhan sebesar 1,48 persen. Gorontalo masuk ke dalam kategori IPM "sedang" bersama dengan delapan provinsi lainnya di Indonesia. Jika dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Sulawesi maka capaian IPM Provinsi Gorontalo berada pada posisi kedua terendah setelah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 2.16
IPM Provinsi Se-Sulawesi Tahun 2019-2023

Propinsi Se-Sulawesi	2019	2020	2021	2022	2023
Sulawesi Utara	72,99	72,93	73,3	73,81	75,04
Sulawesi Selatan	71,66	71,93	72,24	72,82	74,6
Sulawesi Tenggara	71,2	71,45	71,66	72,23	72,94
Sulawesi Tengah	69,5	70,28	69,79	70,28	71,66
Gorontalo	68.49	68.68	69	69,81	71,25
Sulawesi Barat	65,73	66,11	66,36	66,92	69,8

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2023

Capaian IPM Provinsi Gorontalo tahun 2023 meningkat dengan dimensi Angka Harapan Hidup Saat Lahir di Gorontalo mencapai 70,50 tahun. Ini berarti bahwa bayi yang baru lahir dapat bertahan hidup hingga usia 70,50 tahun. Secara rata-rata, penduduk Gorontalo usia 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun dari 8,02 tahun menjadi 8,10 tahun pada tahun 2023 sudah menempuh 8,10 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas VII (SMP kelas II). Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun yang mulai bersekolah, diharapkan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,16 tahun atau setara dengan Diploma I. Dimensi hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita (yang disesuaikan) mencapai 11.069 ribu rupiah per kapita, meningkat 3,57 persen dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.17
Capaian Dimensi IPM Provinsi Gorontalo dan Nasional
Tahun 2014-2023

Dimensi/Indikator	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
GORONTALO										
<i>Umur Panjang dan Hidup Sehat</i>										
Usia Harapan Hidup(UHH)	67,00	67,12	67,13	67,14	67,45	67,93	69,83	69,93	70,22	70,50
<i>Pengetahuan</i>										
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,49	12,70	12,88	13,01	13,03	13,06	13,08	13,11	13,12	13,16
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	6,97	7,05	7,12	7,28	7,46	7,69	7,82	7,90	8,02	8,10
<i>Standar Hidup Layak</i>										
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	8,762	9,035	9,175	9,532	9,839	10,075	10,02	10,157	10,687	11,069
IPM Gorontalo	65.17	65.86	66.29	67.01	67.71	68.49	68.68	69.00	69.81	71,25
NASIONAL										
<i>Umur Panjang dan Hidup Sehat</i>										
Usia Harapan Hidup(UHH)	70,59	70,78	70,90	71,06	71,2	71,34	73,37	73,46	73,70	73,93
<i>Pengetahuan</i>										

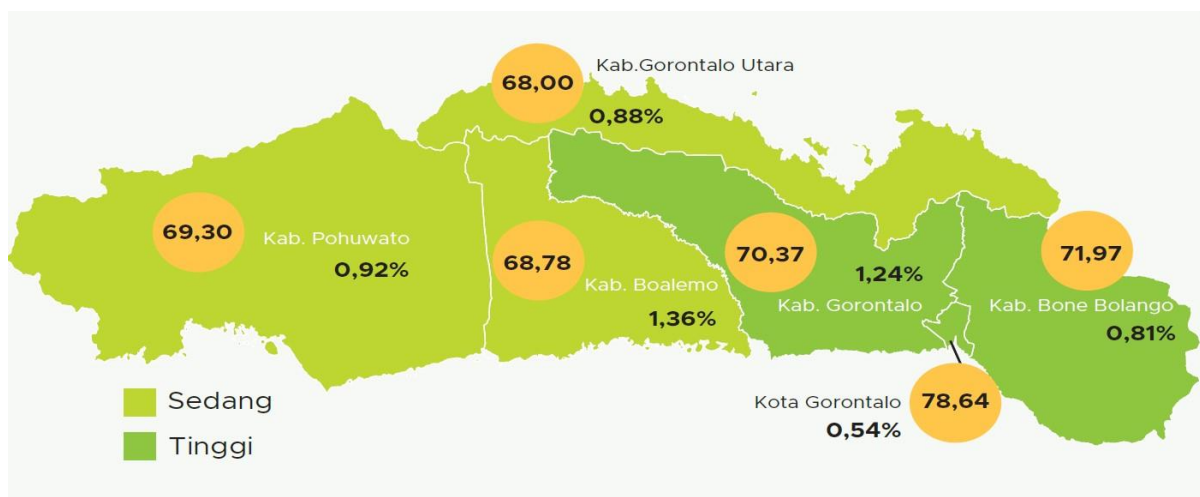
Harapan Lama Sekolah (HLS)	12,39	12,55	12,72	12,85	12,91	12,95	12,98	13,08	13,10	13,15
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	7,73	7,84	7,95	8,10	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77
Standar Hidup Layak										
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan) –	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899
IPM Nasional	68,9	69,6	70,18	70,81	71,39	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Capaian dimensi IPM Provinsi Gorontalo tahun 2014-2023 masih berada dibawah rata-rata capaian nasional. Dari dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat, indikator Usia Harapan Hidup tahun 2023 sebesar 70,50 tahun sedangkan capaian nasional adalah 73,93 tahun. Dimensi pengetahuan, capaian indikator HLS Provinsi Gorontalo tahun 2023 sebesar 13,16 tahun berada diatas Nasional dan RLS 8,10 tahun. Adapun capaian nasional yaitu HLS sebesar 13,15 tahun dan RLS sebesar 8,77 tahun. Capaian Dimensi Standar Hidup Layak Provinsi Gorontalo, dengan indikator Pengeluaran Riil per Kapita tahun 2023 sebesar 11.069 ribu rupiah, berada dibawah capaian nasional yang mencapai 11.899 ribu rupiah. Jika dilihat rata-rata pertumbuhan capaian indikator penyusun IPM Provinsi Gorontalo tahun 2014-2023, pertumbuhan terbesar pada capaian indikator pengeluaran riil perkapita.

Secara umum, dari enam wilayah pemerintahan yang ada di Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo merupakan wilayah di Provinsi Gorontalo yang memiliki capaian pembangunan manusia berkategori "tinggi". Sementara tiga wilayah lainnya masuk dalam kategori "sedang". Tahun 2023, capaian IPM tertinggi pada level kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo dicapai oleh Kota Gorontalo dengan IPM sebesar 78,64, sedangkan capaian terendah diduduki oleh Kabupaten Gorontalo Utara dengan IPM sebesar 68.

Gambar 2.18
Status IPM Kab/Kota se-Province Gorontalo tahun 2023



Sumber : BPS Provinsi Gorontalo, 2023

Jika dilihat berdasarkan masing-masing komponen IPM diwilayah Kabupaten/Kota, dari aspek Pendidikan, Kesehatan maupun Ekonomi menunjukkan bahwa rata-rata wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo masih rendah di komponen kesehatan terutama di wilayah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo Utara, sedangkan pada aspek pendidikan dan ekonomi yang masih perlu didorong adalah Kabupaten Boalemo.

Tabel 2.18

Komponen Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2023

No	Wilayah	UHH	HLS	RLS	Pengeluaran Perkapita	IPM
1	Boalemo	71,24	12.48	7.30	9.941	68,78
2	Gorontalo	70,81	13.21	7.79	10.336	70,37
3	Pohuwato	69,40	12.46	7.59	11.018	69,30
4	Bone Bolango	70,19	13.67	8.35	11.114	71,97
5	Gorontalo Utara	69,65	12.49	7.17	10.037	68,00
6	Kota Gorontalo	73.25	14.58	10.40	13.351	78,64
	Provinsi Gorontalo	70,50	13.16	8.10	11.069	71,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2023

g. Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) serta Nilai Tukar Nelayan (NTN)

Pada periode 2007-2012, rata-rata Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Gorontalo mencapai angka 101,99. Meskipun demikian, NTP pada sub sektor tanaman pangan dan peternakan masih berada di bawah 100, dengan rata-rata masing-masing sebesar 88,99 dan 93,61. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode ini, sektor pertanian masih menghadapi tantangan dalam mencapai kesejahteraan petani, terutama dalam sub sektor tanaman pangan dan peternakan. Penyebab penurunan NTP pada sub sektor tersebut berkaitan dengan faktor-faktor seperti cuaca ekstrem, penyakit tanaman, dan fluktuasi harga pakan ternak.

Namun, periode 2012-2017 menggambarkan perbaikan yang signifikan dalam kesejahteraan petani. Rata-rata NTP secara keseluruhan naik menjadi 103,02, dan seluruh sub sektor pertanian mencapai nilai NTP di atas 100. Faktor utama yang berkontribusi terhadap peningkatan ini adalah tingkat produksi yang lebih tinggi, didorong oleh kebijakan pembangunan pertanian seperti bantuan benih dan Program Brigade Alsintan. Peningkatan ini mengindikasikan adanya upaya yang berhasil dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian dan kesejahteraan petani.

Pada periode 2017-2022, meskipun NTP Umum mencapai 103,34 atau rata-rata 102,60 selama lima tahun terakhir, sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan nelayan pembudidaya masih menghadapi tantangan dengan NTP rata-rata di bawah 100. Ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam pembangunan sektor-sektor tersebut atau mungkin dampak dari faktor-faktor lingkungan dan ekonomi yang berubah seiring waktu.

Berdasarkan data pada periodisasi pembangunan jangka menengah tersebut, kendati menunjukkan tren peningkatan secara keseluruhan pada angka NTP, perhatian lebih lanjut masih diperlukan untuk memastikan bahwa setiap sub sektor pertanian juga mengalami peningkatan kesejahteraan yang seimbang.

Berdasarkan data capaian bulanan di periode tahunan masa lampau, evaluasi capaian Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) menggambarkan dinamika yang mencerminkan adaptasi sektor pertanian terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan. Fluktuasi dan pertumbuhan yang diamati menawarkan wawasan penting mengenai stabilitas dan adaptabilitas sektor ini. Refleksi nyata tergambar pada data tahun 2020 – 2023. Tahun 2020 mengalami fluktuasi bulanan yang relatif stabil dengan tren pertumbuhan perlahan sepanjang tahun. Meskipun perubahan bulanan kecil, akumulasi tersebut mengindikasikan adaptasi sektor terhadap perubahan ekonomi. Tahun 2021 mencatat kenaikan yang signifikan, menunjukkan stabilitas dan adaptabilitas sektor terhadap kondisi yang lebih mapan. Tahun 2022 menampilkan dinamika yang lebih intens dengan fluktuasi yang lebih terlihat, tetapi tetap dalam kisaran yang positif, mencerminkan ketahanan sektor terhadap tantangan eksternal. Awal 2023 menunjukkan fluktuasi kembali, mengindikasikan sensitivitas sektor pertanian terhadap perubahan ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Secara keseluruhan, evaluasi ini menggambarkan kemampuan sektor pertanian untuk beradaptasi dengan tantangan seperti dampak pandemi dan perubahan pasar, menghasilkan stabilitas dan perkembangan yang berdampak positif pada ekonomi dan lingkungan secara keseluruhan.

Produksi perikanan tangkap adalah produksi perikanan yang dihasilkan oleh kegiatan penangkapan ikan baik di perairan laut maupun di perairan umum (Danau Limboto). Produksi perikanan tangkap merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi tingkat pendapatan nelayan dan nilai tukar Nelayan (NTN). Rata-rata Produksi Perikanan Tangkap pada tahun 2012 sebesar 85.815 ton, tahun 2017 sebesar 136.157 ton dan pada tahun 2022 turun menjadi sebesar 132.051 Ton.

Nilai Tukar Nelayan dan pembudidaya (NTN-P) adalah nilai angka perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan/pembudidaya dengan indeks harga yang dibayar nelayan/pembudidaya yang dinyatakan dalam persentase. Indeks yang diterima adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi nelayan /

pembudidaya. Sedangkan indeks yang dibayar nelayan/pembudidaya adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumah tangga petani, baik kebutuhan untuk konsumsi rumah tangga maupun kebutuhan untuk proses produksi perikanan. NTN-P (Nilai Tukar Nelayan Pembudidaya) pada tahun 2012 sebesar 105,73 %, tahun 2017 sebesar 108,38 % dan pada tahun 2022 sebesar 100.29%.

Pengelolaan kawasan konservasi perairan di Provinsi Gorontalo sampai dengan tahun 2022 sebesar 76.529,34 ha. Kawasan konservasi perairan daerah yang turut menjadi pengembangan Potensi wisata bahari di wilayah Perairan Laut Sulawesi & Teluk Tomini antara lain : Olele, Leato, Botubarani (Lokasi Hiu Paus), Ex Kurenai, Pulau Mohupomba Daa, Pulau Monduli, Pulau Bitila, Pulau Olinggobe, Torosiaje, Pulau Bungkil, Pulau Dokokayu Daa, Pulau Huha, Pulau Lampu, Pulau Mohinggito, Pulau Ponelo, Pulau Saronde, Pulau Bogisa, Pulau Dudepo dan Pulau Raja.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial Budaya

a. Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan modal dasar pembangunan sangat penting untuk memiliki kualitas yang baik. Sebagai upaya untuk mencapai hal tersebut, arah kebijakan sektor kesehatan diarahkan pada upaya promotif, preventif maupun kuratif melalui peningkatan akses layanan kesehatan yang berkualitas, aspek kesehatan dasar, edukasi pencegahan, kesadaran lingkungan dan pola hidup sehat.

Kebijakan pembangunan disektor kesehatan tersebut sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, yang ditandai dengan Usia Harapan Hidup (UHH). Usia Harapan Hidup penduduk Provinsi Gorontalo menunjukkan trend peningkatan dari 66,76 tahun 2012 menjadi 70,50 tahun ditahun 2023. Peningkatan UHH ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Gorontalo. Akan tetapi indikator lainnya seperti Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi masih tinggi. Pada tahun 2017, AKI berjumlah 209 dan tahun 2021 meningkat menjadi 251,7. Sementara AKB pada tahun 2017 sebesar 11,1 dan mengalami peningkatan pada tahun 2000 menjadi 13,5 kemudian menurun di tahun 2021 menjadi 11,1.

Penyediaan fasilitas kesehatan untuk menunjang Kesehatan masyarakat masih belum memadai dan belum merata diseluruh wilayah. Pada tahun 2021 Rasio puskesmas per kecamatan di Provinsi Gorontalo adalah 1,21, dibawah rata-rata nasional. Jumlah tenaga medis yang bekerja di unit Kesehatan kabupaten/kota se Provinsi Gorontalo tahun 2021 sebanyak 7.162. Namun demikian, sebaran tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo kurang merata dan masih terkonsentrasi di wilayah Kota Gorontalo. Hal ini tentunya

mempengaruhi layanan yang kesehatan yang dapat diakses oleh masyarakat selain kualitas yang juga perlu dipenuhi.

Faktor lain yang mempengaruhi Usia Harapan Hidup adalah faktor sosial ekonomi. Keterbatasan pendapatan dan rendahnya tingkat pendidikan menjadi penyebab kemiskinan yang seringkali mengakibatkan keterbatasan akses terhadap layanan Kesehatan yang berkualitas dan makan yang bergizi. Kekurangan gizi dapat menyebabkan terganggunya tumbuh kembang anak yang sering disebut dengan Stunting. Hal ini ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren penurunan sejak tahun 2019 sebanyak 34,9 persen dan terus menunjukkan perbaikan sampai dengan tahun 2022. Angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 berdasarkan SSGI sebesar 23,8 persen dan masih berada diatas angka rata-rata prevalensi Nasional. Jika dilihat berdasarkan urutan per Provinsi, Provinsi Gorontalo berada pada urutan 17 dari 34 Provinsi. Meskipun demikian, masih diperlukan akselerasi agar daerah ini memiliki generasi yang berkualitas.

Untuk kondisi penyakit tidak menular di Provinsi Gorontalo sesuai data Riskesdas, Provinsi Gorontalo menduduki peringkat 2 (dua) nasional penyakit jantung, sementara kanker di urutan ke-3 tertinggi nasional. Adapun penyakit ginjal nomor 4 nasional disusul stroke dan hipertensi urutan ke-6 nasional dan diabetes melitus di urutan ke 8. Bahkan persentase merokok pada penduduk Umur ≥ 15 Tahun sejak 2015 diatas rata-rata nasional. Hal ini tentunya memerlukan perhatian yang intens dari pemerintah dan masyarakat agar penambahan usia harapan hidup dibarengi juga dengan kondisi Kesehatan yang baik.

Angka insiden tuberkulosis di Gorontalo pada tahun 2021 mencapai 223 per 100.000 penduduk. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 (188 per 100.000 penduduk) serta lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka nasional yang mencapai 146 per 100.000 penduduk. Gorontalo menempati urutan ketiga tertinggi setelah provinsi Papua dan DKI Jakarta. Hingga 2022, jumlah terduga TB tertinggi yang mendapatkan pelayanan sesuai standar di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 2.940 orang dan terendah di Kota Gorontalo dengan jumlah 1.810 orang. Sedangkan Jumlah Kasus TB tertinggi berada di Kabupaten Gorontalo dengan jumlah 1.219 kasus dan terendah berada di Kabupaten Boalemo dengan jumlah 255 kasus. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*) di Provinsi Gorontalo tahun 2022 sebesar 60% sedangkan angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*) berada diangka 92%. Tingginya angka insiden tuberkolosis di Gorontalo mengindikasikan masih tingginya risiko penduduk terjangkit tuberkulosis. Penerapan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) menjadi salah satu cara untuk mengurangi tuberkulosis di masyarakat.

Salah satu program unggulan Provinsi Gorontalo adalah program kesehatan yang prima diantaranya meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesta). Gorontalo meraih prestasi terbaik kelima secara nasional untuk kategori provinsi dengan jumlah kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) atau cakupan kesehatan menyeluruh. Jumlah peserta JKN di Gorontalo 1.183.834 jiwa atau mencapai 96,58 persen dari total penduduk yang tercatat sebanyak 1.225.808 jiwa per 1 Desember 2023. Capaian ini menempatkan Gorontalo sebagai provinsi kelima terbaik di seluruh Indonesia.

b. Indeks Kualitas Keluarga

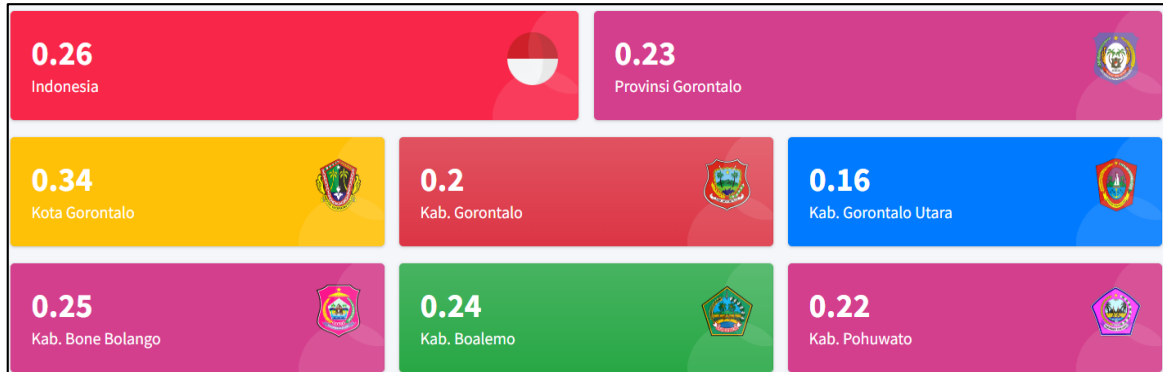
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga mengukur kualitas keluarga berdasarkan 3 (tiga) dimensi, yaitu kesejahteraan, ketahanan, dan partisipasi. Ketiga dimensi tersebut merupakan elemen vital yang menunjukkan fungsi keluarga serta peranannya sebagai modal sosial dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga merupakan ukuran yang baru di kembangkan pada tahun 2023 untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang kemudian menjadi ukuran juga di daerah dalam mendukung pencapaian nasional. Dimana pada tahun 2022 secara nasional capaian rata-ratanya sebesar 58,49.

Capaian Indeks Kualitas Keluarga di Provinsi Gorontalo di tahun 2021 sebesar 73,16 naik dari tahun sebelumnya yaitu 70,32. Dari Capaian Indeks Kualitas Keluarga nasional tahun 2021 sebesar 73,43 mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu 70,93. Namun dalam capaian komponen IKK Provinsi Gorontalo terdapat 3 dimensi pembentuk IKK yang masih buruk yaitu: Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB). Catatan terkait capaian 3 dimensi yang buruk adalah terkait PoU (Prevalensi Kurang Gizi) untuk semua umur mengalami peningkatan, rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi mengalami penurunan, rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan mengalami penurunan, rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah mengalami peningkatan, rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja mengalami penurunan, rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir juga mengalami penurunan.

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Indikator ini dirancang untuk memastikan bahwa keluarga memiliki lingkup dan akses hidup sehat yang memadai. Sementara itu, Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan indikator lain yang digunakan untuk

mengukur kesehatan masyarakat. AHH adalah perkiraan rata-rata usia yang dapat dicapai oleh seseorang pada suatu populasi tertentu. Indikator ini dihitung berdasarkan faktor-faktor seperti tingkat kematian dan kelahiran.

Gambar 2.19
Data Indeks Keluarga Sehat Sehat Provinsi Gorontalo Tahun 2022



Sumber : Dashboard Data Indeks Keluarga Sehat Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, 2023

Berdasarkan data di atas capaian Indeks Keluarga Sehat Provinsi Gorontalo masih berada di bawah capaian nasional dengan nilai 0,23. Capaian tertinggi ditempati oleh Kota Gorontalo dengan skor 0,34 , Kab Bone Bolango 0,25 dan Kab Boalemo 0,24. Daerah yang masih di bawah peringkat Provinsi adalah Kab Gorontalo dengan skor 0,2, Kab Gorontalo Utara 0,16 dan Kab Pohuwato 0,22.

c. Kesetaraan Gender (IPG, IDG, IKG)

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menjadi kebijakan pemerintah Provinsi Gorontalo sejak Provinsi ini resmi berdiri. Perempuan merupakan salah satu unsur yang menjadi subyek sekaligus obyek pembangunan, sehingga kondisi dan kualitas perempuan menjadi hal penting untuk ditingkatkan.

Kondisi dan kualitas Perempuan ditunjukkan dengan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pemberdayaan perempuan di Provinsi Gorontalo menunjukkan tren positif. Sampai dengan tahun 2022 IPG Provinsi Gorontalo berada pada angka 88,12. Sementara IDG Provinsi Gorontalo pada tahun yang sama sebesar 71,20.

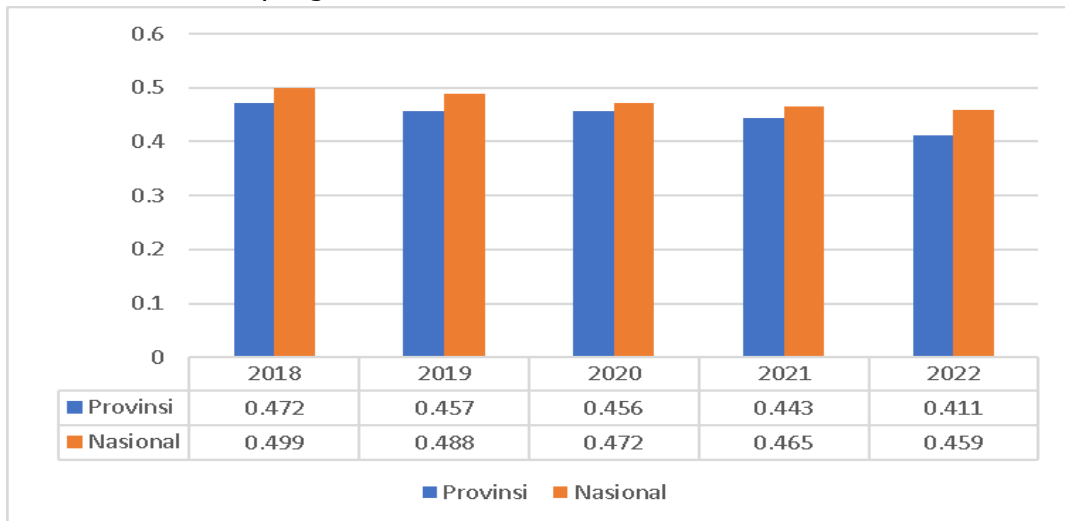
Untuk mengukur perkembangan pencapaian kesetaraan, juga digunakan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian Pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dengan laki-laki (Bappenas, 2023). Terdapat tiga dimensi pembentuk IKG, yaitu dimensi Kesehatan reproduksi, dimensi pemberdayaan dan dimensi pasar tenaga kerja.

Secara nasional, IKG Provinsi Gorontalo lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini secara konsisten, dimana IKG Provinsi Gorontalo lebih rendah dan terus menunjukkan penurunan sejak tahun 2018. Rata-rata pertumbuhan IKG untuk periode 2018-2022 adalah sebesar -3,40.

Kinerja yang meningkat ini dikontribusi oleh dimensi pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas. Selain itu peningkatan ibu hamil 15-49 yang melahirkan di fasilitas kesehatan serta TPAK Perempuan. Namun yang masih perlu perhatian pada peningkatan proporsi perempuan yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun.

Grafik 2.17

Indeks Ketimpangan Gender Nasional dan Provinsi Gorontalo 2018-2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Secara regional, untuk tahun 2022 nilai Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Gorontalo termasuk baik, yaitu kedua yang terendah setelah Sulawesi Selatan sebesar 0,411. Bila dilihat di wilayah kabupaten dan kota, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki poin paling baik yaitu 0,226 sementara yang tertinggi adalah Kabupaten Bon Bolango dengan nilai 0,523.

Tabel 2.19

Indeks Ketimpangan Gender Regional Sulawesi 2018-2022

Provinsi	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Sulawesi Utara	0,463	0,453	0,431	0,439	0,444
Sulawesi Tengah	0,524	0,518	0,520	0,497	0,477
Sulawesi Selatan	0,492	0,460	0,427	0,410	0,390
Sulawesi Tenggara	0,575	0,565	0,559	0,554	0,490
Gorontalo	0,472	0,457	0,456	0,443	0,411
Sulawesi Barat	0,539	0,554	0,543	0,543	0,510

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

d. Indeks Pembangunan Pemuda

Pencapaian pembangunan di bidang sosial dan budaya juga ditunjukkan oleh Capaian Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Saat ini Indonesia sedang berada di fase penting di mana persentase usia produktif lebih besar dibandingkan persentase usia tidak produktif yang didapatkan melalui bonus demografi yang akan mencapai puncaknya di tahun 2030. Pemuda dengan jumlah yang besar tersebut diharapkan menjadi motor penggerak produktivitas sehingga dapat berkontribusi terhadap kemajuan Indonesia ke arah yang lebih baik di masa depan. Pada tahun 2020 tercatat bahwa jumlah pemuda di Provinsi Gorontalo sebanyak 314 ribu pemuda (Statistik Pemuda, 2020). Dari tahun 2019 ke 2020, nilai IPP Provinsi Gorontalo naik sebesar 1,34 poin. Selain naik signifikan, capaian domain kesehatan dan kesejahteraan Provinsi Gorontalo juga lebih baik dari level nasional, sebesar 5 poin di atas rata-rata nasional. Sebaliknya, domain pendidikan serta domain partisipasi dan kepemimpinan lebih rendah dari capaian nasional. Meskipun nilai capaian kedua indikator tersebut lebih rendah dibanding level nasional, namun keduanya merupakan penyumbang terbesar terhadap IPP Provinsi Gorontalo.

e. Indeks Pembangunan Kebudayaan

Pencapaian pembangunan di bidang budaya dan adat istiadat juga ditunjukkan oleh capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) sebagai salah satu instrumen yang telah dirilis sejak tahun 2018 untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan didasarkan pada 7 dimensi yaitu ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. Dimana IPK Provinsi Gorontalo sejak 2018-2021 bergerak secara dinamis dari 49,86 di tahun 2018, kemudian meningkat menjadi 50,57 di tahun 2019. Dan pada tahun 2020 kembali meningkat menjadi 51,49, meskipun kemudian di tahun 2021 terjadi penurunan dengan perolehan sebesar 47,14.

Dari hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa dimensi yang pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender pencapaiannya lebih tinggi dari angka nasional. Jika dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sulawesi, Provinsi Gorontalo berada di posisi ke 5 setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Tengah.

f. Indeks Perlindungan Anak

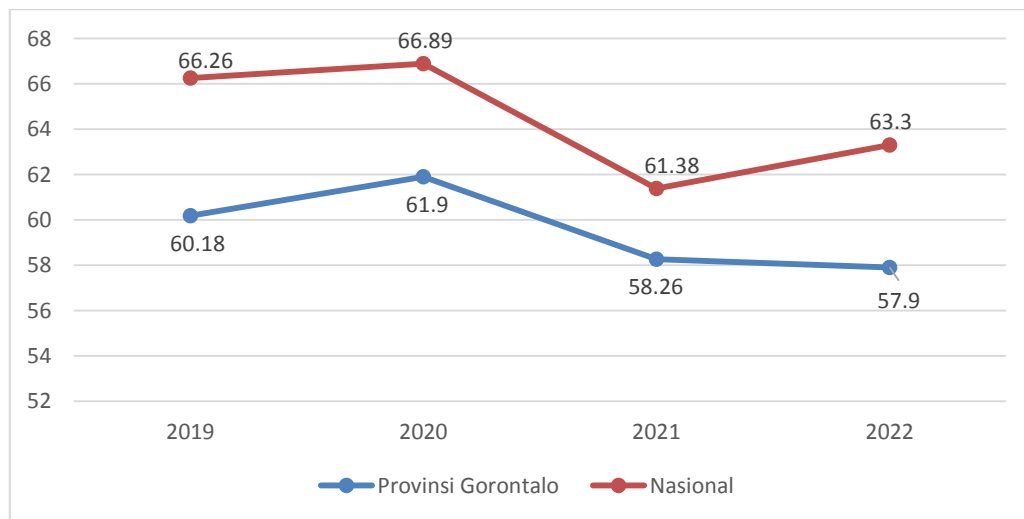
Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menyatakan bahwa setiap anak berhak atas

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan terhadap hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Perlindungan anak merupakan isu yang krusial dalam pembangunan. Dalam upaya untuk mencapai generasi emas, perlindungan dan pemenuhan atas hak anak sangat menentukan kualitas generasi penerus pembangunan. Untuk melihat perkembangannya, Indeks Pelindungan Anak (IPA) digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengukur pembangunan perlindungan anak dengan memperhatikan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Grafik 2.18

Indeks Perlindungan Anak Provinsi Gorontalo



Sumber : Kementerian PPA RI, 2022

Tingginya kasus – kasus yang terkait dengan isu pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak merupakan indikasi perlunya upaya pemerintah yang terstruktur, berkesinambungan, serta melibatkan banyak pihak. Salah satu indikator untuk mengukur capaian keberhasilan Pembangunan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak melalui Indeks Perlindungan Anak. Berdasarkan data dari KemenPPA Gorontalo termasuk dalam 3 Provinsi Indonesia yang delta pertumbuhannya menurun yaitu Nusa Tenggara Barat dan Papua sehingga diperlukan perhatian khusus untuk isu ini terutama di Kabupaten Gorontalo Utara yang pada 2022 memiliki capaian indeks terendah se Provinsi Gorontalo yaitu 54,83. Terdapat 5 klaster pembentuk indikator ini yaitu klaster I Hak Sipil dan kebebasan, Klaster II Lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, Klaster III Kesehatan dasar dan kesejahteraan,

Klaster IV Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dan klaster ke V adalah perlindungan khusus.

Provinsi Gorontalo memiliki nilai yang rendah pada klaster IV yaitu sebesar 26,10 pada tahun 2022. Klaster IV terdiri atas 5 indikator yaitu (1) persentase anak usia 7-17 tahun yang tidak sekolah, (2) persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia, (3) persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar), (4) persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler dan (5) persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni.

Berdasarkan wilayah, tahun 2022 Kota Gorontalo menjadi daerah yang memiliki persentase tertinggi untuk IPA yaitu 67,53 persen berada diatas rata-rata provinsi. Kabupaten Gorontalo Utara adalah daerah yang memiliki persentase terendah yaitu 54,83 persen. Selain Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat 2 daerah lainnya yang memiliki persentase dibawah rata-rata provinsi, yaitu Kabupaten Boalemo (55,71) dan Kab Pohuwato masing-masing 55,71 persen dan 56,10 persen.

2.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.3.1. Daya Saing Ekonomi Daerah

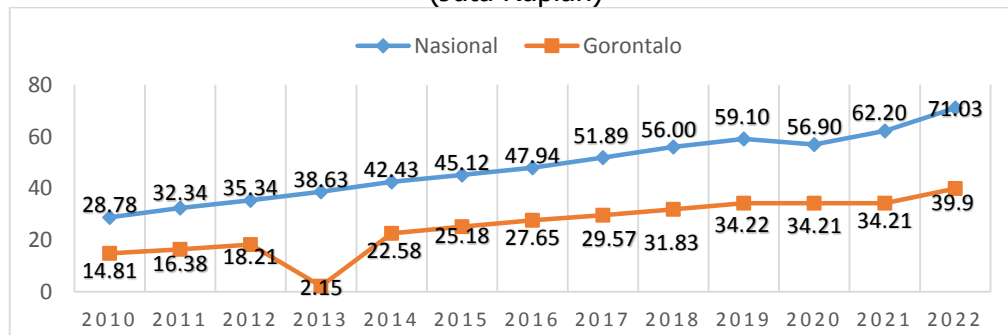
a. PDRB Perkapita

PDRB Perkapita merupakan indikator yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara makro yang diukur berdasarkan indikator pendapatan / perkapita income. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan bertambah baik. Dengan asumsi bahwa pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar sama dengan pendapatan faktor produksi dan transfer yang masuk, maka pendapatan regional sama besar dengan PDRB perkapita. Namun demikian peningkatan PDRB perkapita belum menggambarkan secara riil kenaikan daya beli masyarakat Gorontalo secara umum, karena PDRB perkapita yang dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku yang masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

PDRB Perkapita Provinsi Gorontalo Tahun 2022 mencapai 39,9 Juta Rupiah, meningkat 0,16 persen dibanding tahun 2021 dan 169,41 persen dibanding tahun 2010. Rata-rata PDRB perkapita Provinsi Gorontalo selang tahun 2010-2022 sebesar 25,45 juta rupiah. Meningkatnya PDRB perkapita menunjukkan tingkat kesejahteraan di Provinsi Gorontalo relatif meningkat namun tidak secara riil menunjukkan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Grafik 2.19

PDRB per kapita Nasional dan Provinsi Gorontalo Tahun 2010 s/d 2022 (Juta Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Jika dilihat dari grafik diatas PDRB perkapita Provinsi Gorontalo, trend PDRB perkapita rata-rata meningkat 0,08 persen setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Gorontalo masih sejalan dengan laju pertumbuhan penduduk. Akan tetapi PDRB Perkapita Gorontalo masih berada dibawah rata-rata Nasional, berada pada posisi 6 terrendah secara Nasional, dan pada posisi 2 terrendah secara regional Sulawesi setelah Sulawesi Barat.

b. Indeks Inklusi Keuangan

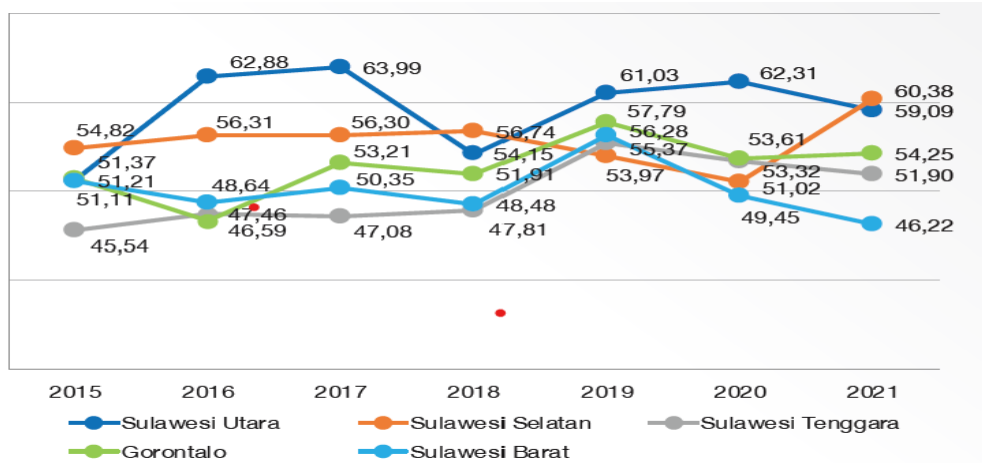
Inklusi Keuangan adalah ketersediaan akses bagi masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan di lembaga keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan. Peningkatan inklusi keuangan menunjukkan adanya peningkatan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan formal oleh masyarakat baik dengan tujuan bertransaksi, menabung, melakukan investasi dan lainnya. Tingkat inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pendalaman sektor keuangan dan mengindikasikan semakin luasnya peran jasa keuangan sebagai *enabler* dalam pembangunan nasional. Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2022 capaian Provinsi Gorontalo baru mencapai 52,21 persen berada dibawah rata-rata nasional yang mencapai 85,10.

c. Indeks Ekonomi Hijau

Pada tahun 2022, Kementerian PPN/ Bappenas telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat nasional. Indeks Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga) pilar pembangunan berkelanjutan, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ke-16 indikator tersebut antara lain luas tutupan hutan, bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) primer, kualitas air, kualitas udara, penurunan G kumulatif, penurunan tutupan lahan

gambut, intensitas emisi, intensitas energi final, GNI/kapita, produktivitas pertanian, produktivitas tenaga kerja sektor industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa, rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat pengangguran terbuka.

Grafik 2.20
Indeks Ekonomi Hijau Ekoregion Sulawesi



Sumber: Capaian dan Progres Ekonomi Hijau Provinsi 2015-2021 Kementerian PPN/Bappenas RI, 2022

Dari hasil perhitungan Indeks Ekonomi Hijau Provinsi pada periode 2015-2021, Provinsi Gorontalo memiliki capaian nilai Indeks Ekonomi Hijau sebesar 54,25 (kategori baik tier 1). Bila dilihat tren Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Gorontalo bergerak fluktuatif setiap tahunnya, namun tetap berada pada kategori baik tier 1, lebih baik dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara di tahun 2021. Bila ditelaah lebih detail, beberapa nilai komposit masih diperlukan sejumlah intervensi yang lebih mendukung dan masif untuk meningkatkan performa diantaranya pada pilar lingkungan (kualitas air dan kualitas udara), pilar ekonomi (intensitas emisi dan intensitas energi final) serta pilar sosial (penanggulangan kemiskinan dan tingkat pengangguran).

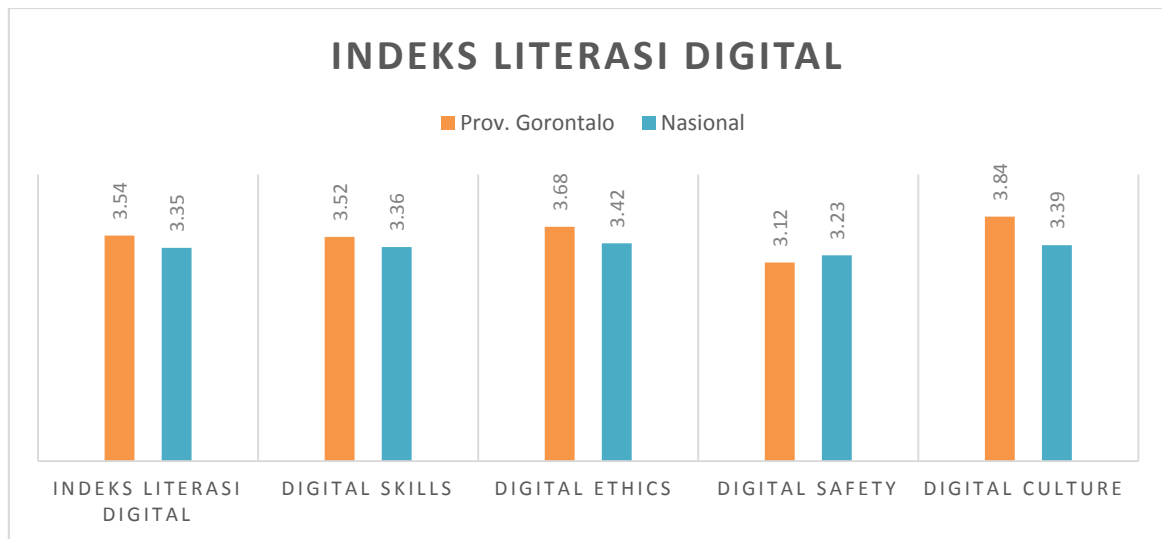
d. Indeks Literasi Digital

Literasi digital berhubungan dengan kecakapan (*life skill*) karena tidak hanya melibatkan teknologi, melainkan meliputi kemampuan untuk belajar, berpikir kritis, kreatif, dan inovatif untuk menghasilkan kompetensi digital. Terdapat 4 (empat) kecakapan literasi digital yang perlu diperkuat meliputi Keterampilan Digital, Budaya Digital, Etika Digital, dan Keamanan Digital. Hasil pemetaan literasi digital Indonesia merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah Tanah Air.

Capaian Indeks Literasi Digital Provinsi Gorontalo pada 2022 sebesar 3.35 lebih rendah 0.19 poin dibandingkan capaian literasi digital nasional dan cenderung menurun jika dibandingkan capaian ILD Provinsi Gorontalo pada 2021 yakni 3.61. Dari 4 (empat) kecakapan digital, skor tertinggi untuk Gorontalo berada pada aspek keamanan digital dan yang terendah adalah budaya digital kesadaran masyarakat Gorontalo untuk tidak mengunggah data pribadi ke media sosial sudah relatif baik. Namun masih perlu lebih berhati-hati agar terhindar dari berbagai kemungkinan serangan siber (*cyber attack*).

Grafik 2.21

Indeks Literasi Digital Provinsi Gorontalo dan Nasional Tahun 2022



Sumber : Survey Literasi Digital Kemenkominfo RI

2.3.2. Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan bagian dalam upaya peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia. Pendidikan sebagai salah satu urusan wajib pelayanan dasar beroleh pengaturan dalam UU 23 Tahun 2014 yang membagi kewenangan berdasarkan jenjang pendidikan, dimana intervensi pemerintah Provinsi berada pada jenjang pendidikan menengah dan khusus (SMA, SMK, dan SLB). Pembangunan pendidikan Provinsi Gorontalo telah menunjukkan upaya perbaikan, hal ini didorong dengan implementasi berbagai kebijakan dari perbaikan kualitas dan mutu layanan pendidikan.

Hal tersebut ditandai dengan peningkatan rata-rata lama sekolah tahun 2023 mencapai 8,10 tahun. Indikator lainnya ditunjukkan dari Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2017 sampai dengan 2022 pada kelompok umur 7-12 tahun bertumbuh positif dari 98,8 menjadi 98,93 persen atau naik 0,13 poin, melambat 0,93 poin dibanding periode sebelumnya.

Selanjutnya kelompok umur 13-15 tahun dengan kenaikan 0,63 poin dari 91,2 menjadi 91,83 persen. Kelompok Umur 16-18 tahun mengalami perbaikan sebesar 1,78 poin dari 69,9 pada 2017 menjadi 71,68 di Tahun 2022 secara keseluruhan kinerja partisipasi sekolah mengalami pelambatan dibanding periode 5 tahun sebelumnya.

Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD naik 1,2 poin dari 97,54 menjadi 98,74 persen. Jenjang SMP mengalami kenaikan dari 69,15 menjadi 71,66 persen. sama halnya dengan jenjang menengah yang naik hampir 1,65 poin dari posisi 56,82 menjadi 58,47. Sedangkan Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang SD tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 mengalami penurunan dari 111,3 menjadi 108,7. Kondisi tersebut turut terjadi pada jenjang SMP turun 2,33 poin dari capaian 81,7 (2017) menjadi 79,37 (2022). Kondisi berbeda terjadi pada jenjang menengah yang bergerak naik 6,94 poin dibandingkan 2017 (80,89 persen) dengan capaian sebesar 87,83 persen.

Untuk Harapan Lama Sekolah Provinsi Gorontalo pada Tahun 2022 telah mencapai 13,12 Tahun yang memiliki arti bahwa anak-anak usia 7 tahun di Gorontalo berpeluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga Diploma I. Peningkatan harapan lama sekolah tersebut dapat mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan partisipasi sekolah di Gorontalo yang artinya bahwa semakin banyak penduduk Gorontalo yang bersekolah.

Pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), semakin banyak penduduk yang berpendidikan tinggi menunjukkan keadaan kualitas penduduk yang semakin baik. Hal tersebut juga dapat mencerminkan taraf intelektualitas suatu masyarakat. Tahun 2022 persentase tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan penduduk Provinsi Gorontalo terbanyak berada pada kategori SMP ke bawah, yaitu sebesar 66,04 persen. Penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak memiliki ijazah masih memiliki porsi yang cukup besar yaitu 25,01 persen.

Indikator keberhasilan pendidikan adalah tingkat literasi dan numerasi yang menggambarkan kualitas pendidikan. Angka literasi dihitung berdasarkan Jumlah kabupaten/kota di provinsi Gorontalo yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah kabupaten/kota yang ada. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hasil capaian

Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap". Pada RPJPD ini, capaian pembangunan Pendidikan di Gorontalo akan diukur dari capaian literasi membaca dan numerasi.

b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota. Interpretasinya, semakin tinggi TPAK di suatu wilayah, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa suatu perekonomian di wilayah tersebut. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa komposisi angkatan kerja pada Agustus 2023 terdiri atas 631.521 orang penduduk yang bekerja dan 19.904 orang pengangguran. Jika dibandingkan Agustus 2022 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan dari 68,91 persen menjadi 70,79 persen di Tahun 2023. TPAK laki-laki pada tahun 2023 sebesar 85,34 persen sedangkan TPAK perempuan sebesar 56,07 persen. Perbedaan nilai TPAK perempuan dan laki-laki terpaut cukup jauh menunjukkan kesenjangan partisipasi angkatan kerja perempuan dan laki-laki masih sangat besar. Kesenjangan ini kerap dikaitkan dengan perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga di mana laki-laki diposisikan sebagai pencari nafkah utama sedangkan perempuan lebih diposisikan untuk mengurus urusan domestik rumah tangga. Pada tahun 2023, baik TPAK laki-laki maupun perempuan mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 0,04 persen poin pada laki-laki dan 3,43 persen poin pada perempuan.

Jika dilihat berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan, maka tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan Tingkat Partisipasi Perkotaan. Hal ini diindikasikan karena 2 (dua) faktor yaitu dimana penduduk perdesaan memiliki etos kerja yang tinggi atau masyarakat desa terpaksa untuk bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dan ketidakmampuan untuk menyambung ke dunia pendidikan. Olehnya TPAK pedesaan masih lebih tinggi dibanding masyarakat yang kuat akan basic pendidikan sehingga lebih memilih pekerjaan.

Tantangan dalam sektor ketenagakerjaan adalah Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan Provinsi Gorontalo masih rendah, masih terdapat Ketidaksesuaian antara kebutuhan industri terhadap tenaga kerja dengan pendidikan dan pelatihan, rendahnya cakupan angkatan kerja yang memperoleh pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan,

pengukuran produktivitas ketenagakerjaan belum dilakukan secara maksimal, persentase perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan masih rendah.

c. Indeks Literasi Digital

Indeks Literasi Digital merupakan penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan Tingkat kecakapan dan pengetahuan digital, sekaligus memberikan gambaran kondisi dan peluang di setiap wilayah tanah air. Indeks ini terdiri atas 4 pilar, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety dan digital culture.

Grafik 2.24

Skor Indeks Literasi Digital Nasional dan Provinsi Gorontalo, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, 2022

Indeks Literasi Digital Nasional tahun 2022 adalah sebesar 3,54. Pilar Digital Culture merupakan pilar dengan skor indeks tertinggi (3,84), sedangkan Digital Safety merupakan pilar dengan skor indeks terendah (3,12). Sedangkan, skor Indeks Literasi Digital Gorontalo mendapatkan skor indeks 3,35. Pilar Digital Ethics tahun 2022 adalah sebesar (3,42), sedangkan Digital Safety merupakan pilar dengan skor indeks yang paling rendah (3,23).

2.3.3. Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

a. Jalan dan Jembatan

Infrastruktur merupakan salah satu pilar dasar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Dukungan infrastruktur memiliki nilai elastisitas yang tinggi dalam perekonomian disuatu wilayah. Oleh karenanya pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas pembangunan provinsi Gorontalo. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan dilakukan melalui pembangunan serta perbaikan jalan dan jembatan provinsi, serta pembangunan jalan

dan jembatan strategis provinsi sebagai akses pusat-pusat perekonomian, akses pendidikan dan kesehatan, dan akses pemukiman.

Penyediaan akses jalan di Provinsi Gorontalo, dibagi berdasarkan kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Panjang jalan Nasional di Provinsi Gorontalo yaitu sepanjang 748,60, dan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota sepanjang 3.637,55 km. Sementara yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 383/18/XI/2017 tanggal 27 November 2017, panjang ruas jalan provinsi 467,17 Km dan jalan strategis provinsi 176,4 Km. Terjadi perubahan dan penambahan ruas jalan yang menjadi kewenangan Provinsi, dari sebelumnya yang ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor 373/09/IX/2012 yaitu sepanjang 432,51 km. Penetapan status ruas jalan Provinsi sebagai jalan kolektor primer 2 (JKP-2), jalan kolektor primer 3 (JKP-3), dan jalan strategis provinsi dilakukan dengan memperhatikan fungsi jalan yang ditetapkan oleh Gubernur. Kondisi Mantap Jalan Provinsi Gorontalo Tahun 2023 sebesar 70,03 persen, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 60,05 persen. Sedangkan untuk kondisi mantap Jalan Nasional mencapai 93,2 persen dari total panjang jalan kewenangan Nasional di Provinsi Gorontalo 748,610 Km.

Kondisi jalan provinsi dibagi kedalam 4 (empat) kategori yaitu kondisi Baik, Sedang, Rusak Ringan dan Rusak Berat. Tahun 2007 panjang jalan dengan kondisi baik yaitu sebesar 129,44 Km atau 30,97 persen dari total panjang jalan kewenangan Provinsi sebesar 408,26 Km. Selanjutnya tahun 2022 dengan panjang jalan sebesar 467 Km, kondisi jalan baik meningkat mencapai 233,75 Km atau sebesar 50,05%.

Selama periodisasi 2007-2022, total panjang jalan Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan sepanjang 152,5 Km, baik disebabkan oleh alih status jalan maupun pembukaan jalan baru. Pembukaan jalan baru, seperti Pembangunan Jalan *Gorontalo Outer Ring Road* (GORR) dimaksudkan untuk dapat mengurai kemacetan dari dan ke Pusat Kota Gorontalo, serta diharapkan sebagai akses perekonomian dan lalu lintas dari dan menuju Pelabuhan dan Bandar Udara. Disamping itu Pemerintah Provinsi Gorontalo juga pembangunan jalan-jalan strategis dalam rangka mendorong perekonomian, menunjang akses pertanian.

Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan tingkat peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya meningkat rata-rata 0,12 persen pertahun.

b. Sumber Daya Air dan Irigasi

Ketersediaan infrastruktur sumber daya air dan irigasi sangat mempengaruhi perkembangan sektor pertanian. Luas lahan sawah irigasi di Provinsi Gorontalo dibedakan berdasarkan kewenangan yang dibedakan menjadi 3 (tiga) tingkat kewenangan, yaitu :

- a) Kewenangan pusat dengan luas lahan sawah > 3.000 ha. Sampai dengan tahun 2022 sudah terdapat 4 Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pusat dengan total luas sebesar 22.371 Ha .
- b) Kewenangan provinsi dengan luas lahan sawah antara 1.000 – 3.000 ha. Daerah Irigasi (DI) yang menjadi kewenangan provinsi sebanyak 7 DI. Dengan total luasan sebesar 10.313 Ha.
- c) Kewenangan kabupaten dengan luas lahan sawah < 1.000 ha. Total luas DI. Kewenangan Kabupaten sebesar 17. 892 Ha.

Lahan sawah terdiri dari lahan sawah irigasi dan lahan sawah non irigasi Sebagian besar lahan sawah di Provinsi Gorontalo merupakan lahan sawah irigasi. Tahun 2014 luas sawah irigasi sebesar 26.864 ha sampai dengan tahun 2018 luasnya bertambah menjadi 27.027 ha. Pada tahun 2019 luas sawah irigasi mengalami penurunan dibandingkan tahun 2018 yaitu sebesar 2.420 ha. Pada tahun 2022 luas lahan sawah di Provinsi Gorontalo sebesar 33.131 ha, yang terdiri dari luas sawah irigasi sebesar 24.237 Ha, dan luas sawah non irigasi sebesar 8.894 Ha.

c. Air Minum dan Sanitasi

Akses terhadap air minum dan pelayanan dasar merupakan prioritas nasional dan daerah, dan hal itu sangat erat kaitannya dengan isu pembangunan lain seperti kesehatan, kemiskinan, dan pembangunan manusia. Selama tahun 2007-2022 rumah tangga di Provinsi Gorontalo yang mendapatkan kriteria sanitasi dan air minum layak cenderung meningkat, meskipun masih di bawah target nasional. Walaupun akses terhadap layanan sumber air minum layak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun di Provinsi Gorontalo. Meskipun angka proyeksi pada tahun 2030 menyatakan bahwa akses terhadap sumber air minum layak sudah universal, masih diperlukan upaya untuk meningkatkan akses terhadap air minum aman dan sistem persediaan air perpipaan. Akses Air Minum Layak 100% pada tahun 2024 dan 2030. Akses terhadap air minum aman ditargetkan mencapai 15% pada tahun 2024 dan 43,15% pada tahun 2030. Sementara itu, akses terhadap sistem persediaan air perpipaan ditargetkan mencapai 30,54% pada tahun 2024, dan 53,94% pada tahun 2030.

Jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan air minum di Provinsi Gorontalo selama 2009-2022 meningkat dari 44,85% menjadi 96,16%. Namun cakupan dari cadangan air yang

dikelola secara aman masih rendah. Jumlah rumah tangga dengan kriteria air minum aman 9,2% pada tahun 2020. Akses air minum perpipaan di 25,15% pada tahun 2022. Tahun 2007-2008, PDAM merupakan satu-satunya perusahaan yang berperan dalam menyalurkan air bersih di Provinsi Gorontalo. Jumlah pelanggannya pun kian meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo. Upaya pemenuhan air bersih di Provinsi Gorontalo dilakukan melalui peningkatan kapasitas produksi air bersih, pemberdayaan dan pemanfaatan sumber bahan baku lainnya, serta sistem distribusi air bersih khususnya di kawasan perkotaan. Pengembangan prasarana air bersih akan lebih difokuskan pada penambahan jaringan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang sampai saat ini 3,84% dari target nasional belum terlayani jaringan air bersih di Provinsi Gorontalo yaitu dengan adanya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota (SPAM Regional Gorontalo Raya). Intervensi yang kuat, seperti penyediaan air minum, dapat berkontribusi sebesar 70% terhadap pencegahan stunting. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya ini merupakan Standar Pelayanan Minimal bagi Pemerintah Provinsi Gorontalo, yang untuk saat ini direncanakan melayani 3 (tiga) Kabupaten/Kota dan pekerjaan pembangunan dilakukan 4 (empat) tahap. Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya masih pada tahapan perencanaan persiapan pembangunan berupa telah disusunnya dokumen Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Minum (Risipam) dan dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) air minum pada tahun 2022, tahapan selanjutnya adalah proses pengadaan tanah, Sebagai upaya pencapaian pemerintah provinsi dalam Pembangunan SPAM Regional Gorontalo Raya.

Senada dengan akses terhadap air minum layak, akses terhadap sanitasi layak berkaitan erat dengan kesehatan dan lingkungan. Khususnya, kurangnya akses terhadap sanitasi layak akan menurunkan kualitas air dan berpengaruh terhadap meningkatkan prevalensi stunting pada anak-anak dengan koefisien korelasi sebesar 0,66 (Riskesdas, 2013). Selain akses terhadap sanitasi layak, akses terhadap sanitasi yang aman juga merupakan bagian dari agenda 2030. Akses terhadap sanitasi layak 90% pada tahun 2024 dan 100% pada tahun 2030. Akses terhadap sanitasi aman ditargetkan mencapai 20% dan menurunkan BABS hingga 0% pada tahun 2024 dan 53,71% pada tahun 2030.

Jumlah rumah tangga dengan kriteria kelayakan sanitasi di Provinsi Gorontalo cenderung meningkat pada tahun 2015 ke tahun 2022, yaitu dari 54,47% menjadi 79,82%. Berbanding terbalik dengan jumlah rumah tangga dengan kriteria sanitasi aman 2,94% pada tahun 2022 dan menempati urutan ke-5 provinsi terendah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan akses sanitasi layak untuk masyarakat di Provinsi Gorontalo masih sebesar 10,18% dari target nasional. Sementara itu Ketersediaan sanitasi layak untuk memenuhi

rumah sehat juga semakin meningkat karena kesadaran masyarakat untuk hidup sehat juga semakin tinggi. Untuk memenuhi hal tersebut, Pemerintah Provinsi Gorontalo berdasarkan kewenangannya berusaha menyediakan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat. Sebagai upaya dalam pengelolaan dan pengembangan SPALD Regional, pada tahun 2023 telah dianggarkan Penyusunan Dokumen Rencana Induk SPALD Provinsi Gorontalo serta kegiatan koordinasi Bersama *stakeholder* terkait dan penguatan kelembagaan Pokja PKP. Pembangunan Fasilitas limbah B3 di Provinsi Gorontalo saat ini seluruh dokumen pendukung baik dokumen DED, Dokumen Lingkungan serta lahan sudah tersedia.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo, maka pertumbuhan kebutuhan rumah untuk masyarakat juga akan mengalami peningkatan yang pesat. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan pokok mendasar di kalangan masyarakat. Untuk menanggapi masalah tersebut tentu masyarakat berusaha memperbaiki kondisi permukimannya relatif besar. Akan tetapi karena berbagai keterbatasan dari tingkatan sosial kemasyarakatan, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dan penyediaan tanah serta Prasarana Sarana Umum (PSU) seringkali mengakibatkan kondisi permukiman yang tidak memenuhi syarat. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh dan tidak layak huni juga semakin meningkat.

Dalam rangka penuntasan kawasan kumuh sebagaimana mendukung program pemerintah melalui program 100, 0, 100 (100 % akses air minum aman, 0 % kawasan kumuh dan 100% sanitasi layak) Pemerintah Provinsi Gorontalo sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2022 melaksanakan penanganan luasan Kawasan Kumuh 98 Ha dari target 109 Ha Kawasan kumuh dengan beberapa program antaranya Pembangunan Rumah Plus Jamban, Advokasi Sosialisasi Hidup Bersih dan Sehat, Fasilitasi Pokja PKP dan Penanganan Fisik Kawasan Kumuh. Tahun 2022 luas Kawasan Kumuh di Provinsi Gorontalo direview kembali oleh masing-masing Kabupaten Kota sebagaimana SK yang ditetapkan yakni 459 Ha. Sehingga Rencana Pembangunan Daerah akan menangani 37 kawasan yang terdapat dalam SK bupati/walikota terbaru dengan luas total keseluruhan kawasan tersebut adalah 459 Ha.

2.3.4. Daya Saing Iklim Investasi

a. Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

Negara dalam hal ini pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin keamanan dan ketertiban. Semakin maju dan berkembangnya suatu wilayah, dan semakin terbukanya akses informasi maka tingkat

kejahatan dimasyarakat semakin meningkat, sehingga hal ini menjadi salah satu isu penting dalam pembangunan. Pemerintah hadir dalam memberikan jaminan kepada masyarakat agar dapat hidup aman dan nyaman, salah satunya diukur melalui seberapa besar penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Indikator ini mencakup beberapa aspek yang meliputi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggal pada siang dan malam hari. Indikator ini biasanya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan sektoral di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat serta perencanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Untuk provinsi Gorontalo, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya mencapai 62,80 tahun 2023 meningkat dibanding tahun 2020 yang mencapai 51,72 persen di tahun 2020.

Pembangunan keamanan dan ketertiban juga diarahkan pada upaya untuk mendorong kemampuan aparat pemerintah dan masyarakat untuk menjaga stabilitas daerah. Berdasarkan tren data tahun 2007-2012, dapat dilihat bahwa jumlah kejadian kejahatan di Provinsi Gorontalo setiap tahun cenderung mengalami penurunan dengan angka penurunan mencapai 1.963 kasus. Hal ini mengindikasikan tindak kriminal di Provinsi Gorontalo tergolong cukup rendah, dimana pada tahun 2012, Provinsi Gorontalo merupakan provinsi dengan jumlah kejadian kejahatan terendah ke-3 setelah Maluku Utara dan Maluku. Menurunnya jumlah kejadian kejahatan, berbanding lurus dengan menurunnya tingkat resiko kejahatan per 100.000 penduduk. Hal ini masih berbanding terbalik dengan capaian persentase penyelesaian tindak pidana, dimana rentang waktu 2007-2012, rata-rata persentase penyelesaian tindak pidana di Provinsi Gorontalo masih cukup rendah yakni sebesar 61,94%. Sampai dengan periode pembangunan tahun 2018-2021, jumlah tindak pidana di Provinsi Gorontalo masih berada pada tren positif, dimana jumlah tindak pidana pun terus mengalami penurunan dengan rata-rata 2.000 kasus. Penurunan ini juga diikuti oleh tingkat resiko kejahatan di Provinsi Gorontalo yang juga mengalami penurunan. Sedangkan untuk persentase penyelesaian tindak pidana masih tergolong cukup rendah, bahkan pada tahun 2021 hanya mencapai 54,60%. Jika dibandingkan dengan Provinsi lain di Pulau Sulawesi, jumlah kejadian kejahatan di Provinsi Gorontalo berada pada posisi ke-4 setelah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dengan capaian Indeks Kriminalitas sebesar 0,02.

Berdasarkan hasil survei Indeks Kerukunan Umat Beragama pada 2018-2023 terjadi fluktuasi, tahun 2023 Indeks Kerukunan Umat Beragama mencapai 75,49 meningkat dibanding tahun 2022 yang mencapai 74,11. Capaian ini menggambarkan suatu kondisi hubungan umat beragama yang toleran, setara, dalam menjalankan agama, serta bekerja



sama dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang terdiri dari dimensi toleransi, kesetaraan dan kerjasama.

b. Indeks Demokrasi

Kesadaran politik merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Kesadaran politik dan partisipasi politik memiliki hubungan yang berbanding lurus. Asumsinya bahwa semakin tinggi kesadaran politik maka semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat. Kesadaran politik dapat diukur dengan melihat capaian Indeks Demokrasi di suatu wilayah. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi. Tingkat perkembangan demokrasi tersebut diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan sejumlah aspek demokrasi di semua provinsi di Indonesia. `

Untuk menyusun Indeks Demokrasi Indonesia, BPS bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menjaring sebanyak mungkin fenomena demokrasi dalam suatu daerah, dengan melibatkan BPS, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kemenkopolkum, serta Pemerintah Daerah. Tahun 2021, BPS menggunakan metode baru dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Adapun metode baru dalam perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia meliputi 3 (tiga) aspek, meliputi kebebasan, kesetaraan dan kapasitas lembaga demokrasi.

Tahun 2009, capaian indeks demokrasi sebesar 73,50 dengan kategori Sedang, dan mengalami penurunan pada tahun 2012 hingga mencapai 59,37 dengan kategori Kurang. Namun demikian dengan menggunakan metode terbaru perhitungan Indeks Demokrasi Indonesia dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut mengalami peningkatan, Tahun 2021 sebesar 77,01, Tahun 2022 sebesar 73,74 persen dan Tahun 2023 sebesar 79,71 persen. Peningkatan dipengaruhi oleh peningkatan aspek Kebebasan berpendapat ditahun 2023 meningkat menjadi 81,68 persen, aspek kesetaraan meningkat dari 82,21 persen tahun 2022 menjadi 83,32 persen, serta aspek Lembaga Demokrasi tahun 2023 sebesar 73,32 persen, meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 71,92 persen. Berdasarkan kategori, Indeks Demokrasi Indonesia tahun 2023 masih berada pada ketagori "sedang", dan lebih tinggi jika dibandingkan IDI Nasional sebesar 79,51 persen tahun 2023.

Indeks Demokrasi Provinsi maupun Nasional sering mengalami fluktuasi yang menggambarkan cerminan dinamika demokrasi Indonesia. IDI sebagai alat ukur perkembangan demokrasi yang dirancang untuk sensitif terhadap naik turunnya kondisi demokrasi, karena IDI disusun secara cermat berdasarkan evidence based (fakta) sehingga potret yang dihasilkan merupakan refleksi realitas yang terjadi. Capaian Indeks Demokrasi



Indonesia tahun 2023 tertinggi dibanding provinsi lainnya wilayah Sulawesi. Hal ini menunjukkan Sistem Demokrasi di Provinsi Gorontalo menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, namun terhadap beberapa aspek masih perlu ditingkatkan khususnya perlindungan kebebasan sipil, independensi lembaga yudisial, serta keselarasan kebijakan pemerintah dan kehendak publik yang dapat memperbaiki kualitas demokrasi.

c. Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah dan telah diinisiasi oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sejak tahun 2017. Kerangka pengukuran IDSD terdiri dari empat komponen yang dielaborasi dalam 4 komponen yaitu Lingkungan Pendukung, Sumber Daya Manusia, Pasar dan Ekosistem Inovasi, serta terdiri dari 12 pilar daya saing, yang diukur berdasarkan perspektif daya saing yaitu faktor ketersediaan kebutuhan fundamental (basi

Tahun 2023 Provinsi Gorontalo memiliki skor IDSD sebesar 3,43, dibawah capaian Indeks Daya Saing Nasional sebesar 3,44, dan urutan kedua di wilayah Sulawesi setelah Sulawesi Selatan dengan skor 3,70 dan Sulawesi Utara 3,48.

Tabel 2.20

Skor Indeks Daya Saing Daerah Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo Tahun 2023

NAMA PROVINSI	LINGKUNGAN PENDUKUNG				SDM				PASAR		EKOSISTEM INOVASI		SKOR IDSD
	Pilar 1	Pilar 2	Pilar 3	Pilar 4	Pilar 5	Pilar 6	Pilar 7	Pilar 8	Pilar 9	Pilar 10	Pilar 11	Pilar 12	
NASIONAL*	4,30	2,71	3,58	3,54	3,79	3,77	2,64	3,85	2,53	4,36	3,22	3,03	3,44
PROV. GORONTALO	4,38	1,81	3,31	3,88	3,63	3,68	4,08	4,42	2,12	3,77	2,95	3,16	3,43
RATA-RATA KAB/KOTA	4,31	1,75	3,80	3,32	3,71	3,45	2,09	4,03	0,74	3,76	2,84	1,82	2,83
BOALEMO	4,15	1,40	3,68	3,19	3,82	3,09	1,39	3,54	0,41	3,66	2,93	1,06	2,69
KAB. GORONTALO	4,32	1,90	3,95	3,36	3,67	3,44	1,85	4,17	1,46	4,08	2,61	2,48	3,11
POHUWATO	4,42	1,59	3,26	3,23	3,43	3,19	1,14	3,81	0,91	3,78	2,53	1,53	2,74
BONE BOLANGO	4,35	1,62	3,41	3,20	3,75	3,59	1,84	4,32	0,43	3,62	2,96	1,47	2,88
GORONTALO UTARA	4,01	1,58	3,75	3,65	3,56	3,37	1,54	3,55	0,50	3,48	3,29	0,60	2,74
KOTA GORONTALO	4,60	2,42	4,74	3,29	4,06	4,02	4,81	4,77	-	3,92	2,72	3,76	-

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2023

Tiga pilar yang memiliki skor lebih tinggi dari nasional adalah pilar institusi, pasar produk dan pasar tenaga kerja, sedangkan pada pilar infrastruktur, adopsi TIK, stabilitas ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, sistem keuangan, ukuran pasar, dinamisme bisnis dan kapabilitas inovasi masih perlu didorong. Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo memiliki rata-rata skor IDSD 2,97 berada dibawah skor provinsi.

d. Indeks Inovasi Daerah

Untuk mendorong tingkat daya saing dan optimalisasi otonomi daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kemendagri, melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah BPP Kemendagri mengukur tingkat inovasi di suatu daerah, melalui indeks inovasi daerah.

Pemerintah dalam beberapa regulasi juga menekankan pentingnya kepala daerah melakukan inovasi untuk mendorong efektivitas pelayanan publik, menciptakan nilai tambah, serta tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional.

Kinerja inovasi daerah baru dapat diukur melalui indikator Indeks inovasi Daerah pada tahun 2018, namun dalam dokumen perencanaan, kebijakan pemerintah terkait pengembangan inovasi, menciptakan nilai tambah dan pemberdayaan masyarakat sudah terdapat program dan kegiatan yang menunjang untuk pencapaian target inovasi daerah.

Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2018-2020 masih berada dalam kategori kurang inovatif, hal ini tidak lepas dari aspek institusi dan sumber daya manusia yang belum mendukung ekosistem inovasi. Hal lain yang mempengaruhi adalah Provinsi Gorontalo belum memiliki *road map* Sistem Informasi Daerah yang menjadi pedoman serta arah pelaksanaan inovasi daerah.

Meskipun demikian, capaian Indeks Inovasi daerah mengalami peningkatan di tahun 2021 yaitu skor 50,42 dengan predikat inovatif. Bahkan pada tahun 2020 Kota Gorontalo masuk dalam Top 99 inovasi pelayanan public. Ditahun 2022 capaian Indeks Inovasi daerah turun menjadi 48,19, Dan tahun 2023, kembali turun menjadi 44,63 yang berada di peringkat ke-24 dari 38 provinsi. Predikat Inovatif adalah daerah capaian skor IID 35,00 – 60,00. Sehingga capaian indeks inovasi daerah Provinsi Gorontalo masih dikategori predikat inovatif. Pemerintah Provinsi Gorontalo masih perlu mendorong peningkatan inovasi daerah dalam membangun kapasitas penyelenggaraan pemerintah, peningkatan tata kelola pemerintahan serta daya saing daerah.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

a. Tata kelola pemerintahan

Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Provinsi Gorontalo yang diarahkan untuk menggerakkan fungsi pemerintahan dalam memberikan pelayanan prima dan berkualitas serta berorientasi pada kepuasan masyarakat telah menunjukkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Gorontalo. Indeks Reformasi Birokrasi menjadi indikator pencapaian terhadap sasaran yang diharapkan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam pelayanan pada masyarakat serta mewujudkan reformasi birokrasi yang baik di Provinsi Gorontalo.

Tahun 2023, Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo mencapai 77,75 dengan kategori BB, meningkat dibandingkan capaian tahun 2022 dengan nilai 69,61 (Kategori B). Hal ini terus meningkat sejak tahun 2016 dengan perolehan nilai sebesar 55,05 dengan kategori CC, meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar 0,35 dari tahun 2019 yakni 63,36 dari nilai 63,71.

Selain penerapan Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) juga dalam rangka peningkatan tata kelola pemerintahan perlu penguatan area Akuntabilitas serta implementasi Manajemen Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah merupakan integrasi sistem perencanaan, penganggaran dan sistem laporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Penerapan SAKIP Provinsi Gorontalo telah menunjukkan progress yang cukup baik, pencapaian nilai SAKIP tahun 2023 mencapai 68,66 persen, meningkat dibanding tahun 2022 adalah 68,27 dan berada pada kategori B.

Demikian halnya dengan kinerja pengelolaan keuangan daerah provinsi Gorontalo yang sejak tahun 2013 secara berturut-turut sampai dengan 2023, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Keberhasilan pelayanan publik tentu akan bermuara pada kepercayaan masyarakat. Keterbukaan pemerintah dalam era *open government* saat ini dapat diartikan sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat dilakukan melalui penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang sampai dengan tahun 2022, perolehan nilai IKM Provinsi Gorontalo adalah sebesar 85,05%.

Selain itu peningkatan Kualitas Pelayanan Publik terlihat dari capaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik. Dengan perbaikan kualitas tata kelola pelayanan, Tahun 2023 Indeks Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi Gorontalo meningkat menjadi 83,36 (Zona Hijau, Kategori "B", dengan predikat Tinggi), yang sebelumnya pada tahun 2022 senilai 72,65 (Zona Kuning, Kategori "C", dengan predikat Sedang).

Dari segi pengendalian dan pengawasan internal pemerintah terus berupaya meningkatkan kinerjanya. Hal ini terlihat dari capaian Indeks Kapabilitas SPIP dan Indeks Maturitas SPIP, Provinsi Gorontalo berada pada level 3 dan capaian tahun 2022 presentasi pelaporan LHKPN 100 %, LHKS 99,9%, dan SPT Tahunan 87,03%.

Integrasi system dalam pelaksanaan pembangunan sangat penting. Salah satu cara untuk dapat mencapai birokrasi dan pelayanan public yang berkinerja tinggi adalah dengan penerapan system pemerintahan berbasis elektronik yang meliputi Penyediaan Pusat Data

Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 meningkat mencapai 3,22 jika dibanding tahun 2022 sebesar 2,48.

Salah satu perwujudan semangat reformasi birokrasi di pemerintahan, khususnya dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik (*clean and good governance*) melalui *E-Procurement* pemerintah melaksanakan penguatan terhadap proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan secara elektronik terutama berbasis web atau internet. Instrumen ini memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi meliputi pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh LPSE. Provinsi Gorontalo terus membenahi kualitas pengelolaan barang dan jasa dengan hasil capaian Indeks Kualitas Pengadaan Barang dan Jasa yang menunjukkan hasil yang terus meningkat mencapai 72,50 tahun 2023, dibanding capaian tahun 2022 sebesar 65,90 pada tahun 2022 dan tahun 2021 pada angka 62,14.

Salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap integritas dalam pelaksanaan pembangunan adalah dengan melaksanakan pengajuan unit kerja sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) merupakan langkah akselerasi guna mencapai sasaran reformasi birokrasi. Sampai tahun 2023 terdapat 6 (enam) unit kerja pemerintah Provinsi Gorontalo yang telah berkomitmen menjadi Zona Integritas WBK WBBM walaupun belum meraih predikat WBK dan WBBM.

b. Keuangan Daerah

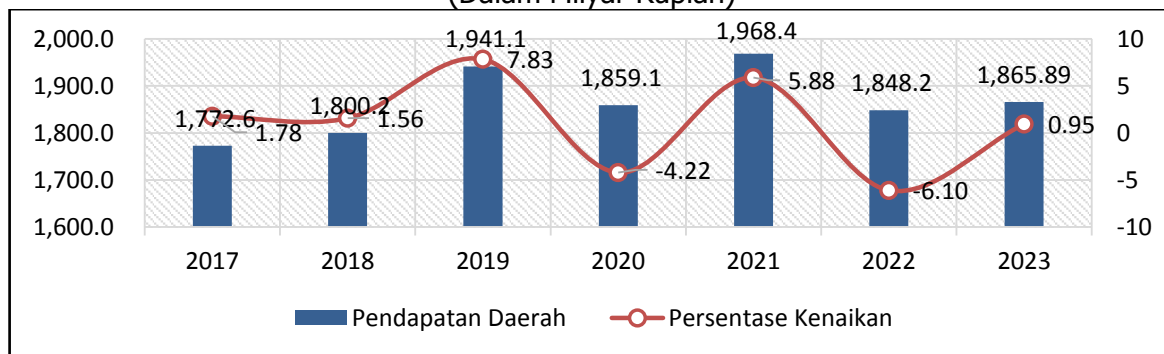
Otonomi daerah sebagaimana diamanatkan UU 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, menuntut pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengelola sumber keuangannya sendiri. Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang , Pendapatan Daerah terdiri atas : (1) Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok, selanjutnya Pendapatan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dalam hal ini bagian laba penyertaan modal serta Lain-lain PAD yang sah, (2) Pendapatan Transfer meliputi Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus serta Dana Penyesuaian (DID), serta (3) Lain-lain Pendapatan yang Sah yang meliputi Pendapatan Hibah dan Pendapatan lainnya. Pendapatan

daerah dapat didorong melalui optimalisasi pengelolaan potensi PAD, dan perbaikan kinerja pemerintah dalam merencanakan besaran pagu DAU dan DAK yang merupakan dan transfer dari pemerintah pusat.

Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo cenderung mengalami fluktuasi, Tahun 2023 Pendapatan Daerah sebesar 1,86 Trilyun Rupiah, meningkat 0,95 persen dibanding pendapatan tahun 2022 1.85 Trilyun Rupiah, dimana Tahun 2022 sempat mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yang mencapai 1,96 Trilyun Rupiah.

Grafik 2.25

Realisasi Pendapatan dan Persentase Kenaikan PAD Provinsi Gorontalo Tahun 2017-2023 (Dalam Milyar Rupiah)



Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2023

Kenaikan sumber pendapatan tahun 2023 berasal dari Pendapatan Transfer dengan kenaikan sebesar 1,20 %, khususnya pada alokasi DAK Fisik, dan Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan sebesar 0,67%. Sedangkan pendapatan yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Yang Sah turun dibanding tahun sebelumnya sebesar -56,03.

Tabel 2.21

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2022 dan 2023

NO.	URAIAN	2022			2023			%
		TARGET	REALISASI	% REALISASI I	TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1	PENDAPATAN	1.819.032.592.082,00	1.848.593.656.987,83	101,63	1.877.746.586.137,00	1.865.895.363.862,68	99,37	0,94
1.1	Pendapatan Asli Daerah	442.748.816.082,00	510.337.164.773,83	115,27	505.005.590.137,00	513.750.596.416,68	101,73	0,67
1.1.1	Pajak Daerah	376.125.487.471,00	440.543.999.280,00	117,13	434.888.172.626,00	432.768.958.556,00	99,51	-1,76
1.1.2	Retribusi Daerah	7.405.098.965,00	5.003.122.986,00	67,56	6.689.330.011,00	4.233.625.024,00	63,29	-15,38
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5.456.586.737,00	5.590.830.014,00	102,46	10.969.310.090,00	13.167.345.878,00	120,04	135,52
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	53.761.642.909,00	59.199.212.493,83	112,71	52.458.777.410,00	63.580.666.958,68	112,71	7,40
1.2	Pendapatan Transfer	1.370.663.237.000,00	1.334.494.317.475,00	97,36	1.369.451.816.000,00	1.350.490.486.338,00	99,90	1,20
1.2.1	Dana Perimbangan	1.300.012.881.000,00	1.263.843.961.475,00	97,22	1.339.006.471.000,00	1.320.045.141.338,00	98,58	4,45

NO.	URAIAN	2022			2023			%
		TARGET	REALISASI	% REALISASI	TARGET	REALISASI	% REALISASI	
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak	23.340.674.000,00	23.900.291.978,00	102,40	20.860.281.000,00	23.512.160.326,00	112,71	-1,62
1.2.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	940.903.029.000,00	940.903.029.000,00	100,00	973.834.635.000,00	979.869.891.000,00	100,62	4,14
1.2.3	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	158.312.936.000,00	136.703.216.522,00	86,35	165.500.063.000,00	140.281.348.223,00	84,76	2,62
1.2.4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	177.456.242.000,00	162.337.423.975,00	91,48	178.811.492.000,00	176.381.741.789,00	98,64	8,65
1.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	70.650.356.000,00	70.650.356.000,00	100	30.445.345.000,00	30.445.345.000,00	100	-56,91
1.2.5	Dana Insentif Daerah (DID)	70.650.356.000,00	70.650.356.000,00	100	30.445.345.000,00	30.445.345.000,00	100	-56,91
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	5.620.539.000,00	3.762.174.739,00	66,94	3.289.180.000,00	1.654.281.108,00	50,29	-56,03
1.3.1	Hibah	3.620.539.000,00	3.264.864.061,00	90,18	1.289.180.000,00	1.234.701.108,00	95,77	-62,18
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000.000,00	497.310.678,00	24,87	2.000.000.000,00	419.580.000,00	20,98	-15,63

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2023

Jika dibandingkan dengan target pendapatan daerah tahun 2023 sebesar 1,877 Trilyun Rupiah, maka realisasi pendapatan daerah terealisasi sebesar 99,37 persen. Struktur Pendapatan Daerah masih didominasi dari pendapatan transfer sebesar 72,38% dari total pendapatan, sementara sumber pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah memberikan kontribusi sebesar 27,53% dari total Pendapatan.

Provinsi Gorontalo terus berupaya memperbaiki sistem dan mekanisme pengelolaan pendapatan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah untuk mewujudkan kemandirian fiskal daerah. Pendapatan Asli Daerah Provinsi Gorontalo tahun 2023 mencapai 513.750.596.416,68, meningkat 0,67% dibanding tahun 2022 dan melebihi target pendapatan sebesar 101,73.

A. Pendapatan Asli Daerah

1). Pajak Daerah

Pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan pajak daerah dengan kontribusi sebesar 30,88 persen dari total keseluruhan pajak daerah, sementara terendah yaitu pajak air permukaan yang hanya memberikan kontribusi sebesar 0,03 persen dari total pajak daerah. Realisasi tertinggi yaitu pada sumber pajak PBBKB yang terealisasi sebesar 120,54 persen.

2). Retribusi Daerah

Penerimaan pajak dari retribusi daerah sebesar Rp. 4.233.625.024,00, atau sebesar 63,29 persen dari target realisasi. Tidak tercapainya realisasi retribusi daerah, disebabkan karena belum optimalnya unit-unit penghasil retribusi daerah, yang disebabkan oleh pengelolaan aset yang belum optimal, maupun penyediaan sarana prasarana maupun fasilitas layanan yang belum memadai. Penerimaan retribusi daerah berasal dari :

- Retribusi Jasa Umum, dengan realisasi sebesar Rp 2 .564.050.000,00, atau sebesar 93,38% dari target, yang terdiri dari retribusi pelayanan kesehatan sebesar Rp. 674.702.000,00, dan pelayanan pendidikan sebesar Rp. 1.889.348.000,00.
- Realisasi Jasa Usaha, realisasi sebesar Rp. 1.669.575.024,00, atau sebesar 43,38 % dari target, yang terdiri dari retribusi pemakaian kekayaan daerah sebesar Rp.510.241.874,00, retribusi pelayanan kepelabuhanan sebesar Rp. 400.147.150,00 dan retribusi penjualan produksi usaha daerah Rp. 759.186.000,00.

3). Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Sumber pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berasal dari bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah sebagai Dividen atas Penyertaan Modal pada BUMD, dengan realisasi sebesar Rp. 13.167.345.878,00, atau terrealisasi sebesar 120,04 persen dari target yang ditetapkan

4). Lain-lain PAD yang Sah

Penerimaan PAD yang bersumber dari Lain-lain PAD yang sah terrealisasi sebesar Rp.63.580.666.958,68 atau tercapai sebesar 112,71 persen dari target. Sumber-sumber PAD tertinggi berasal dari Pendapatan Badan Layanan Usaha Daerah sebesar Rp.45.693.057.734,00.

B. Realisasi Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. Pendapatan transfer memberikan kontribusi sebesar 72,38 % terhadap total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur APBD Provinsi Gorontalo masih cukup bergantung pada pendapatan transfer Pemerintah Pusat. Pendapatan Transfer Tahun 2023 mencapai Rp. 1.350.490.486.338,00, atau terealisasi sebesar 99,90 dari target pendapatan transfer, yang terdiri atas :

Tabel 2.22

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023

No	Uraian	2023*		
		Target	Realisasi	% Realisasi
1.2	Pendapatan Transfer	1.369.451.816.000,00	1.350.490.486.338,00	101,73
1.2.1	Dana Perimbangan	1.339.006.471.000,00	1.320.045.141.338,00	99,51
<i>1.2.1.1</i>	<i>Dana Bagi Hasil Pajak / bagi hasil bukan pajak</i>	<i>20.860.281.000,00</i>	<i>23.512.160.326,00</i>	<i>99,77</i>
1.2.1.1.1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.415.510.000,00	1.448.264.461,00	102,31
1.2.1.1.2	DBH PPh Pasal 21	15.973.882.000,00	17.370.691.545,00	108,74
1.2.1.1.3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPND	0,00	1.223.017.000,00	100
1.2.1.1.4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	735.000,00	33.320,00	4,53
1.2.1.1.5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	200.816.000,00	110.448.800,00	55
1.2.1.1.6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	0,00	90.367.200,00	0
1.2.1.1.7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	2.221.632.000,00	2.221.632.000,00	100
1.2.1.1.8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	1.047.706.000,00	1.047.706.000,00	100
<i>1.2.1.2</i>	<i>Dana Alokasi Umum (DAU)</i>	<i>973.834.635.000,00</i>	<i>979.869.891.000,00</i>	<i>92,58</i>
1.2.1.2.1	DAU	973.834.635.000,00	979.869.891.000,00	92,58
<i>1.2.1.3</i>	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik</i>	<i>165.500.063.000,00</i>	<i>140.281.348.223,00</i>	<i>120,54</i>
1.2.1.3.1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	29.854.837.000,00	24.106.664.789,00	80,75
1.2.1.3.2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	33.628.846.000,00	27.773.480.808,00	82,59
1.2.1.3.3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	304.858.000,00	304.858.000,00	100,00
1.2.1.3.4	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	9.077.485.000,00	7.937.823.936,00	87,45
1.2.1.3.5	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	11.268.797.000,00	10.014.699.871,00	88,87
1.2.1.3.6	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	57.611.913.000,0	50.788.646.900,00	88,16
1.2.1.3.7	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	3.753.327.000,00	19.355.173.919,00	515,68
<i>1.2.1.4</i>	<i>Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik</i>	<i>178.811.492.000,00</i>	<i>176.381.741.789,00</i>	<i>67,09</i>
1.2.1.4.1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	83.261.750.000,00	82.008.380.741,00	98,49
1.2.1.4.2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	3.603.750.000,00	3.563.750.000,00	98,89

1.2.1.4.3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	79.378.949.000,00	79.378.947.000,00	100,00
1.2.1.4.4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	3.256.500.000,00	2.655.976.234,00	81,56
1.2.1.4.5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	164.573.000,00	164.573.000,00	100,00
1.2.1.4.6	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1.800.000.000,00	1.691.013.608,00	93,95
1.2.1.4.7	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.963.587.000,00	3.748.440.665,00	94,57
1.2.1.4.8	DAK Non Fisik-PK2UKM	2.021.583.000,00	1.984.249.995,00	98,15
1.2.1.4.9	DAK Non Fisik-Fasilitas Penanaman Modal	985.800.000,00	894.694.204,00	90,76
1.2.1.4.10	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	375.000.000,00	291.716.342,00	77,79
1.2.2	Dana Insentif Daerah (DID)	30.445.345.000,00	30.445.345.000,00	90,78
1.2.2.1	DID	30.445.345.000,00	30.445.345.000,00	63,29

* Unaudited BPK

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2024

Pemerintah Provinsi Gorontalo Tahun 2023 memperoleh dana transfer terbesar bersumber dari objek DAU sebesar 72,56%, sedangkan DAK sebesar 23,45% dari total pendapatan transfer pemerintah pusat. Tahun 2023 Pemerintah Provinsi Gorontalo juga memperoleh alokasi Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp. 30.445.345.000,00, salah satunya karena Pemerintah Provinsi Gorontalo dinilai berhasil mengendalikan inflasi pada triwulan I 2023.

C. Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2023, realisasi pendapatan yang bersumber dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai Rp. 1.654.281.108,00, atau sebesar 0,08 % dari total pendapatan, yang terdiri dari Pendapatan Hibah pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.234.701.108,00, dan Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN sebesar Rp. 419.580.000,00.

Tabel 2.23

Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah Provinsi Gorontalo Tahun 2023

NO.	URAIAN	2023*		
		TARGET	REALISASI	% REALISASI
1.3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	3.289.180.000,00	1.654.281.108,00	99,90
1.3.1	Hibah	1.289.180.000,00	1.234.701.108,00	50,29
1.3.1.1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	1.289.180.000,00	1.234.701.108,00	50,29
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	2.000.000.000,00	419.580.000,00	95,77
1.3.2.1	Pendapatan atas Pengembalian Hibah pada BUMN	2.000.000.000,00	419.580.000,00	95,77

* Unaudited BPK

Sumber : Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, 2024

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Periode Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi RPJPD Provinsi Gorontalo periode 2007-2025, bahwa Kinerja Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Gorontalo periode 2007-2025 telah dilaksanakan cukup baik dan progresif, ditandai dengan beberapa capaian kinerja Makro Daerah Tahun 2022 diantaranya : Indeks Pembangunan Manusia tumbuh sebesar 69,81 persen, meningkat 1,42 persen poin dibanding tahun 2007, Angka Kemiskinan sebesar 15,51 persen atau turun 11,84 persen, angka pengangguran turun signifikan hingga diangka 2,58 persen, turun 4,58 persen. Pendapatan perkapita Provinsi Gorontalo mencapai 42,35 Juta Rupiah / tahun. Ketimpangan menurun akan tetapi masih berada pada angka 0,409 dan trendnya masih fluktuatif. Sedangkan untuk capaian pertumbuhan ekonomi mengalami pelambatan jika dibanding periode awal RPJPD, meskipun demikian nilai PDRB Provinsi Gorontalo mencapai 47.574 Trilyun Rupiah.

Adapun beberapa rekomendasi yang menjadi rujukan kebijakan pada periode 2025-2045 sebagai berikut :

1. Mendorong transformasi ekonomi melalui akselerasi dan hilirisasi sektor primer dengan mengoptimalkan potensi wilayah/lokal sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah menjadi sektor sekunder (industri manufaktur, investasi dan perdagangan) melalui pengembangan infrastruktur dan adaptasi teknologi yang memadai, kelembagaan dan kewirausahaan serta kepastian adanya pemasok/pasar yang siap mengakomodir produk

tersebut dalam rangka mendorong ekspor dan menjadikan Gorontalo sebagai salah satu daerah penyangga IKN. Hal ini dilakukan melalui :

- Peningkatan Produktivitas sektor Pertanian, percepatan regenerasi dan peningkatan ketrampilan petani dan nelayan, percepatan adopsi teknologi yang berkelanjutan dan akses keuangan serta penguatan kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum.
 - Memberikan kemudahan investasi terutama bagi investor yang bergerak dalam bidang hilirisasi sektor strategis seperti pertanian, perikanan dan pertambangan.
 - Mendorong peningkatan produktifitas tenaga kerja dengan memberikan ruang yang lebih luas untuk mengakses Pendidikan vokasi serta peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi dengan merespon kebutuhan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
 - Pengembangan pelabuhan, bandara dan infrastruktur jalan yang mendukung aktivitas ekonomi dan konektivitas antar wilayah.
 - Mendorong implementasi dan kebijakan ekonomi syariah dan menjadikan Gorontalo sebagai salah satu Pusat Pengembangan Industri Halal berbasis potensi lokal dan Pariwisata Ramah Syariah.
2. Penguatan ketahanan ekonomi yang memperhatikan daya dukung sumberdaya alam berkelanjutan, melalui :
- Menjaga dan mempertahankan kelestarian danau Limboto, serta mendorong pengembangan Danau Limboto sebagai salah satu Pusat Kawasan Ekonomi baru.
 - Pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus untuk menggerakkan kegiatan ekonomi terutama kawasan yang strategis dan cepat tumbuh dengan memperhatikan konservasi sumber daya lingkungan dari hulu sampai dengan hilir.
 - Pengembangan sektor pariwisata melalui pembangunan destinasi wisata meliputi aksesibilitas, amenitas, atraksi dan perbaikan tata kelola kepariwisataan, pengembangan Kawasan Wisata yang terintegrasi dan pelibatan stakeholder UMKM (masyarakat dan pelaku ekonomi kreatif), serta mendorong investasi sektor pariwisata.
3. Penyediaan Layanan Pendidikan yang berkualitas dan merata
- Percepatan peningkatan akses dan layanan Pendidikan
 - Percepatan peningkatan kompetensi dan distribusi guru
 - Peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan yang merata
 - Peningkatan kemitraan antara institusi Pendidikan dengan industry/perusahaan agar dapat menghasilkan lulusan yang relevan dengan dunia kerja

- Membangun budaya literasi
 - Mendorong partisipasi sektor swasta dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan.
4. Penyediaan layanan Kesehatan menyeluruh melalui;
- Peningkatan akses terhadap fasilitas Kesehatan, tenaga medis, obat-obatan dan layanan Kesehatan lainnya untuk semua lapisan masyarakat .
 - Membangun system Kesehatan yang responsive terhadap kebutuhan masyarakat.
 - Pemanfaatan inovasi pada bidang Kesehatan seperti teknologi medis untuk sistem informasi Kesehatan elektronik, telemedicine untuk pemantauan Kesehatan kepada pasien yang tidak dapat mengakses layanan Kesehatan secara langsung.
 - Menyediakan layanan kesehatan yang berkelanjutan termasuk Upaya pencegahan penyakit, promosi gaya hidup sehat dan Kesehatan masyarakat dan perawatan Kesehatan primer
5. Peningkatan peran Inovasi, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
- Memperkuat peran inovasi dan Iptek dengan membentuk kebijakan dan strategi yang memberikan arah yang jelas bagi inisiatif inovasi dan iptek
 - Pengembangan ASN dalam bidang inovasi dan Iptek untuk memperkuat kapasitas dan ketrampilan dalam menerapkan solusi inovasi dan memanfaatkan teknologi yang ada
 - Membangun pusat inovasi sebagai wadah kolaborasi antara pemerintah daerah, Lembaga Pendidikan, Lembaga penelitian dan swasta untuk pertkaran pengetahuan dan pengembangan solusi inovatif
6. Perlindungan sosial yang inklusif dan adil;
- Transformasi data dan digitalisasi dalam pengembangan bantuan sosial, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat
 - Peningkatan perlindungan kelompok masyarakat lansia, disabilitas, perempuan dan anak terlantar
 - Perluasan cakupan perlindungan sosial
7. Mewujudkan Pemerintahan Daerah Gorontalo Yang Amanah
- Peningkatan kualitas dan keprofesionalan aparatur pemerintah, menciptakan kebijakan- kebijakan yang mendukung terselenggaranya peningkatan kualitas pelayanan kepada publik serta meningkatkan penyediaan fasilitas yang menunjang kualitas pelayanan publik

- Mendorong keterbukaan akses terhadap akuntabilitas Pemerintah melalui pelaksanaan pembangunan zona integritas sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, system pengawasan, dan system integritas di tingkat unit kerja serta meningkatkan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo
- Meningkatkan kualitas perencanaan dengan indikator kinerja yang berorientasi hasil sesuai dengan jenjang kinerja, meningkatkan kualitas pengukuran kinerja dengan pemanfaatan rencana aksi yang ada, serta meningkatkan konsistensi perencanaan dan penganggaran
- Mendorong komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum melalui tata kelola penyelenggaraan hukum khususnya yang menjadi wewenang Pemerintah Provinsi Gorontalo.
- Penguatan fungsi Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, optimalisasi potensi dan peluang kerjasama dengan luar negeri, dukungan politis dalam konteks legislatif dalam penyelenggaraan kerjasama daerah serta rencana yang sistematis yang mengatur tentang target, capaian dan sasaran kerjasama daerah yang menyesuaikan dengan urusan pelayanan dasar dan urusan pilihan yang disesuaikan dengan kebutuhan perangkat daerah.
- Perbaikan Tata Kelola Kepegawaian Daerah, melalui penguatan penerapan merit system dengan menjadikan kualifikasi, kompetensi dan kinerja sebagai pertimbangan utama manajemen kepegawaian
- Pemetaan potensi daerah menuju kemandirian keuangan dengan cara Pembenahan infrastruktur untuk memberikan kepercayaan bagi investor, Peningkatan sistem informasi dan teknologi, peningkatan sumber daya aparatur, serta pemberian kemudahan perijinan dalam membuka akses usaha bagi UKM
- Mendorong pelaksanaan pembangunan dam pelestarian budaya melalui peningkatan pembangunan gender, Pendidikan, ketahanan social budaya, warisan budaya serta ekspresi budaya.
- Penguatan Lembaga Demokrasi dalam rangka menumbuhkan komitmen bersama untuk meningkatkan capaian lembaga demokrasi antara lain peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah serta peradilan yang independen

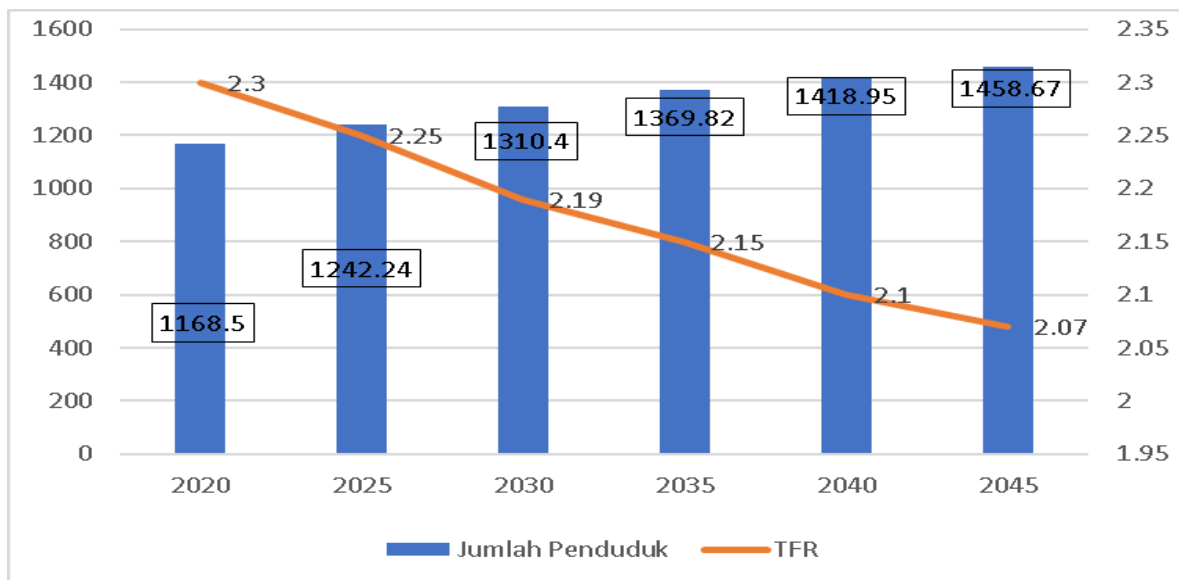
2.6 Trend Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis Trend Demografi

Penduduk sebagai modal dasar yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan. Pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, terlebih Provinsi Gorontalo mulai memasuki Bonus demografi Provinsi Gorontalo tahun 2025 yang menjadi peluang bagi daerah untuk lebih produktif dan berimplikasi terhadap kemajuan daerah. Peningkatan jumlah penduduk mempengaruhi pembangunan, baik kebutuhan sarana prasarana dasar maupun penunjang yang menjadi tantangan pembangunan kedepan. Dalam kurun waktu 2020-2045 penduduk Gorontalo diproyeksikan akan bertambah sebanyak 290.180 jiwa menjadi 1.458.680 jiwa pada tahun 2045.

Grafik 2.26

Proyeksi Jumlah Penduduk (Ribuan) dan TFR Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045

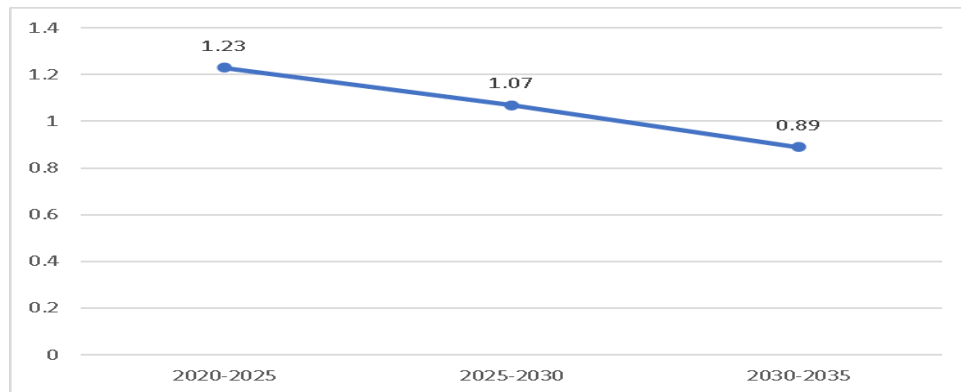


Sumber : Badan Pusat Statistik RI 2023

Meskipun jumlah penduduk bertambah, namun angka kelahiran (*Total Fertility Rate*) akan terus menurun menjadi 2,07 di tahun 2045. TFR menurun mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk, sehingga pertumbuhan penduduk Provinsi Gorontalo diproyeksikan secara bertahap akan melambat juga. Pada periode 2020-2025 sebesar 1,23 persen dan terus menurun sampai dengan periode 2030-2035 menjadi sebesar 0,89 persen.

Grafik 2.27

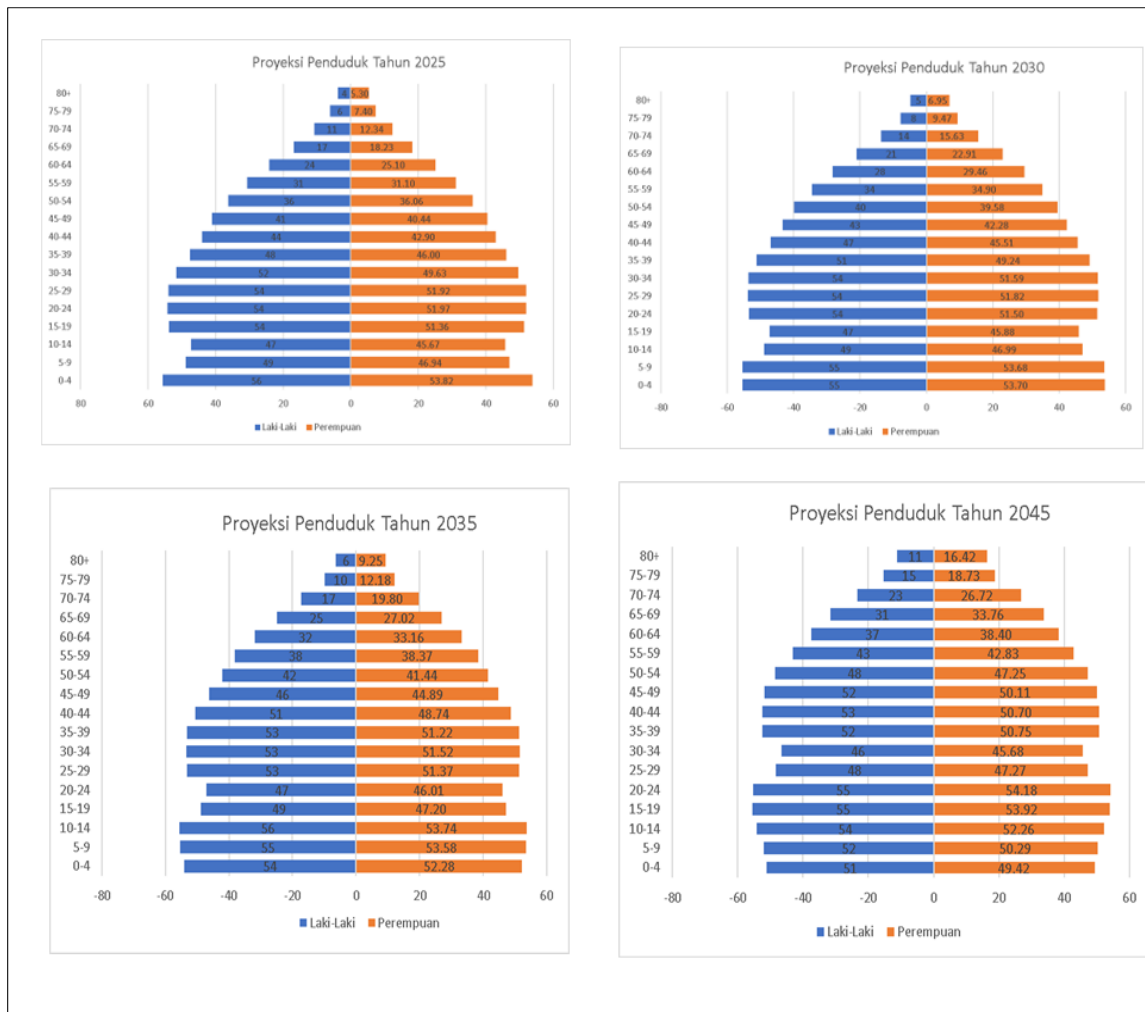
Proyeksi Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi Gorontalo 2020-2035



Sumber : Badan Pusat Statistik RI 2023

Pada tahun 2025-2045 sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik bentuk piramida, penduduk Provinsi Gorontalo termasuk kategori konstruktif. Kategori ini menunjukkan jika penduduk yang berada pada kelompok umur muda jumlahnya lebih sedikit, sementara pada umur pertengahan lebih banyak dan semakin sedikit pada umur-umur atasnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kelahiran menurun dan tingkat kematian rendah.

Grafik 2.28
Piramida Penduduk Provinsi Gorontalo 2025-2045

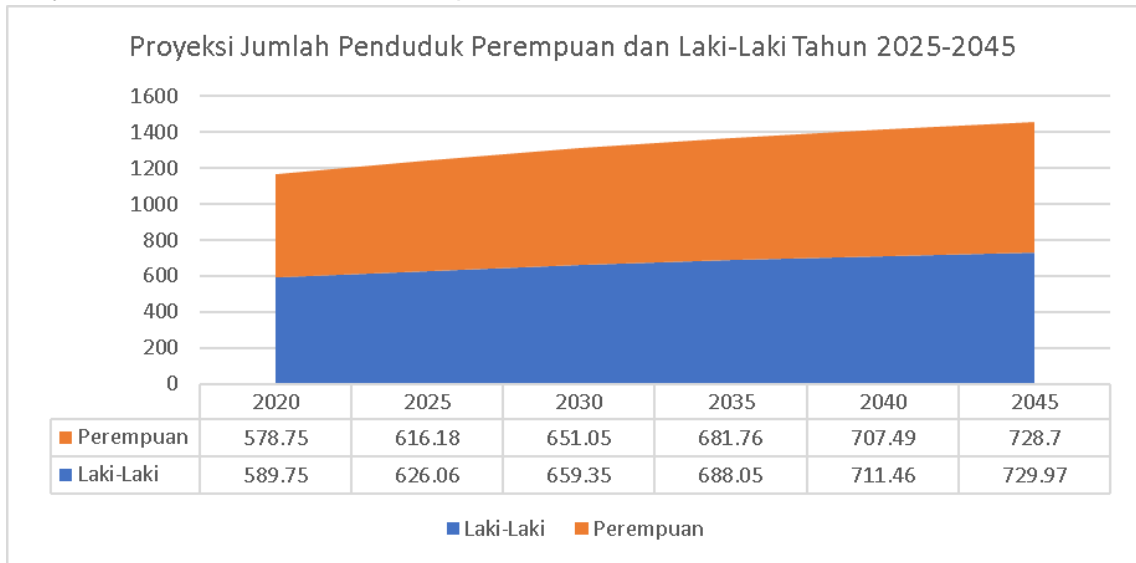


Sumber : Badan Pusat Statistik RI (Diolah)

Jika dilihat menurut jenis kelamin, sesuai Sensus Penduduk pada tahun 2020, secara umum jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 11.000 jiwa dibandingkan dengan penduduk perempuan. Rasio Perempuan dan laki-laki cukup berimbang. Pada tahun 2045 diproyeksikan jumlah penduduk laki-laki sebesar 729.970 jiwa dan perempuan sebesar 728.700 jiwa. Terdapat perbedaan hanya sebesar kurang lebih 1.000 jiwa.

Grafik 2.29

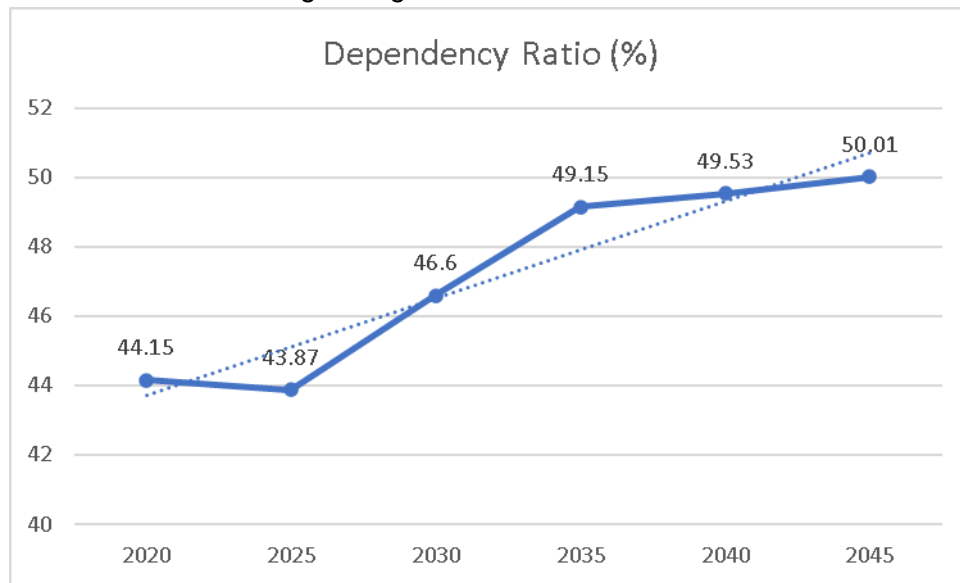
Proyeksi Jumlah Penduduk Perempuan dan Laki-Laki Tahun 2025-2045



Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2023

Kedepan, tantangan pembangunan semakin kompleks, dan hampir semua wilayah mengalami perubahan struktur demografi. Berdasarkan hasil proyeksi Badan Pusat Statistik, di hampir seluruh wilayah di Indonesia mengalami *ageing population*, dimana usia 65 tahun keatas meningkat. Jika pada Sensus Penduduk tahun 2020 sebesar 63,99 ribu orang, Pada tahun 2045 meningkat menjadi 177,01 ribu orang atau meningkat hampir 3 kali lipat. Peningkatan ini seiring dengan kemajuan di bidang Kesehatan yang ditandai dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup. Gorontalo diperkirakan akan memasuki *ageing population* atau penuaan penduduk pada tahun 2035 dimana populasi penduduk lansia sebesar 10 persen. Implikasi dari kondisi tersebut, Rasio ketergantungan juga mengalami peningkatan. Rasio ketergantungan di Provinsi Gorontalo pada tahun 2020 adalah sebesar 44,15 persen dan diproyeksikan akan mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 43,87 persen. Selanjutnya di tahun 2030 naik menjadi 46,6 persen. Kemudian rasio ini terus meningkat sampai mencapai 50,01 di tahun 2045. Hal ini berarti pada tahun 2045 terdapat 50 penduduk usia non produktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

Grafik 2.30
Rasio Ketergantungan Provinsi Gorontalo 2020-2045



Sumber : Badan Pusat Statistik RI, 2023

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

A. Kebutuhan Rumah

Kebutuhan akan rumah merupakan kebutuhan dasar (*home needs*) bagi manusia setelah pangan dan sandang. Kesenjangan untuk memenuhi kebutuhan rumah dalam suatu kawasan (Backlog) semakin tinggi seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk. Kebutuhan akan perumahan pada dasarnya dapat dibagi atas dua hal pokok, yaitu : 1. Kebutuhan rumah berdasarkan tren (kecenderungan) pertumbuhan penduduk secara alamiah dan 2. Kebutuhan dan penyediaan rumah berdasarkan atas banyaknya rumah layak huni. Mengatasi *backlog* perumahan adalah tantangan yang kompleks, tetapi ini juga merupakan peluang untuk menciptakan perubahan positif dalam masyarakat dan memastikan bahwa semua orang memiliki akses ke perumahan yang layak. Tahun 2045 ditargetkan kebutuhan rumah mencapai 332.732 unit, dengan rata-rata peningkatan kebutuhan rumah sebesar 25% pertahun. Selama 20 tahun diperkirakan 18.755 rumah yang dibutuhkan untuk mencukupi kebutuhan rumah di Provinsi Gorontalo untuk penduduk dengan jumlah 1.485.670 dan rumah tangga sebanyak 351.487 Rumah Tangga.

Tabel 2.24
Analisis Kebutuhan Rumah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.212.271	1.242,20	1.310,40	1.369,82	1.418,95	1.458,67
Rumah Tangga	292.409	299.325	315.759	330.077	341.916	351.487
Proyeksi Kebutuhan Rumah	43.861	157.506	196.883	255.947	311.403	332.732

B. Kebutuhan Air Minum

Air minum merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus tersedia dalam kuantitas yang cukup dan kualitas yang memenuhi syarat. Akan tetapi peningkatan populasi manusia dan aktivitasnya telah membawa dampak terhadap ketersediaan dan kualitas air di alam. Akses masyarakat Indonesia pada air, khususnya air minum yang layak dan aman, masih menjadi tantangan. Kebutuhan akan air minum terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, maka diperkirakan kebutuhan air minum sebagai berikut :

Tabel 2.25
Analisis Kebutuhan Air Minum

Kabupaten/Kota	Ketersediaan	Kebutuhan Air Minum						Status
		2020	2025	2030	2035	2040	2045	
Kab. Boalemo	1.113.975.694	250.857.600	264.884.800	279.696.000	295.334.400	311.848.000	329.284.800	Lebih
Kab. Gorontalo	1.223.737/157	620.800.000	649.112.000	678.713.600	709.665.600	724.030.400	775.870.400	Lebih
Kab. Pohuwato	1.343.057.524	245.883.200	259.630.400	274.145.600	289.473.600	305.657.600	322.745.600	Lebih
Kab. Bone Bolango	1.185.912.044	261.528.000	278.859.200	297.339.200	317.043.200	338.052.800	360.454.400	Lebih
Kab. Gorontalo Utara	2.607.144.422	193.188.800	210.028.800	228.336.000	248.238.400	269.876.800	293.400.000	Lebih
Kota Gorontalo	42.734.226	333.696.000	347.203.200	361.256.000	375.876.800	391.091.200	406.921.600	Kurang
Provinsi Gorontalo	7.516.561.067	1.905.953.600	2.009.547.200	2.118.769.600	2.233.929.600	2.355.350.400	2.483.368.000	Lebih

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Berdasarkan hasil analisis KLHS, dari 6 wilayah Kabupaten/Kota, 5 wilayah dalam status lebih jika dibandingkan dengan ketersediaan air, namun 1 wilayah yaitu Kota Gorontalo dengan status kurang. Provinsi Gorontalo dengan ketersediaan air tetap 7.516.561.067 m³, proyeksi kebutuhan air minum sampai dengan tahun 2045 kurang lebih mencapai 2.483.368.000 m³, atau masih berada pada status lebih. Akan tetapi ketersediaan air perlu dilakukan efisiensi dalam pemanfaatannya sehingga kelestarian air untuk lingkungan hidup

yang berkelanjutan menjadi hal penting khususnya dalam menjaga status mutu air. Berdasarkan hasil Studi Kualitas Air Minum Rumah Tangga di Indonesia pada 2022, masih ada 3,84 persen rumah tangga di Indonesia yang tidak memiliki akses air minum yang layak. Bahkan, hanya 26,00 persen proporsi rumah tangga yang memiliki akses air minum yang aman.

C. Kebutuhan Energi/Listrik

Energi listrik merupakan kebutuhan vital bagi masyarakat dan merupakan sumber daya yang paling ekonomis yang dapat digunakan dalam berbagai macam kegiatan. Hampir segala aktifitas manusia didukung oleh keberadaan energi listrik. Penggunaan energi listrik didasarkan atas suplai energi yang murah dan penggunaan energinya lebih mudah dibandingkan dengan energi lainnya. Energi listrik juga sangat berperan penting dalam menunjang segala aktifitas yang berlangsung baik pada sektor industri, bangunan komersial, transportasi maupun rumah tangga.

Tabel 2.26
Proyeksi Kebutuhan Listrik

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.212.271	1.242.200	1.310.400	1.369.820	1.418.950	1.458.670
Jumlah Rumah	292.409	299.325	315.759	330.077	341.916	351.487
Proyeksi Kebutuhan Listrik (MWh)	674.049	3.449.962	3.639.374	3.804.401	3.940.850	4.051.164

D. Persampahan

Masalah persampahan merupakan isu lingkungan yang berkaitan erat dengan pertumbuhan penduduk dan tingkat ekonomi suatu wilayah. Peningkatan penduduk berimplikasi terhadap peningkatan timbulan sampah. Dengan jumlah penduduk tahun 2020 sebanyak 1.171.681 jiwa, diperkirakan jumlah timbulan sampah sebanyak 468.672 kg/hari (IKPLHD Provinsi Gorontalo, 2021).

Dengan demikian, jumlah timbulan sampah tahun 2020 Provinsi Gorontalo sebesar 2.978.053 kg/tahun terus meningkat pada tahun 2045 mencapai 3.880.263 kg/tahun.

Tabel 2.27

Tren Perkembangan Timbulan Sampah di Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Kg pada Tahun (Kg/Tahun)					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Kab. Boalemo	391.965	413.882	437.024	461.460	487.262	514.508
Kab. Gorontalo	970.000	1.014.236	1.060.490	1.108.853	1.159.442	1.212.297
Kab. Pohuwato	384.193	405.672	428.353	452.302	477.590	504.291
Kab. Bone Bolango	408.638	435.717	464.591	495.379	528.207	563.210
Kab. Gorontalo Utara	301.858	328.169	356.774	387.872	421.681	458.438
Kota Gorontalo	521.400	542.504	564.462	587.309	611.080	635.814
Provinsi Gorontalo	2.978.053	3.139.917	3.310.578	3.490.516	3.680.234	3.880.263

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045

Dalam menangani masalah persampahan, Pemerintah Provinsi membangun Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Regional Talumelito jenis sanitary landfill. TPA regional mulai beroperasi mulai tahun 2011 yang berada di Kabupaten Gorontalo dengan luas areal 11,06 Ha. Saat ini TPA Talumelito menampung sampah yang berasal dari Kabupaten Gorontalo, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango, dengan jumlah volume sampah yang dikelola mencapai 22.910 ton. Selain TPA Regional Takumelito, juga terdapat TPA Delo Indah yang melayani wilayah Kabupaten Pohuwato. Selain itu, dalam rangka optimalnya proses pengumpulan, pemilahan sampah dan pemrosesan sampah, Gorontalo juga memiliki 19 TPST yang tersebar di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kota Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Tahun 2018, jumlah sampah yang dikelola mencapai 33.910 ton.

Berdasarkan tren pertumbuhan timbulan sampah tersebut, dapat diproyeksikan jumlah kebutuhan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPST) di Provinsi Gorontalo sebagai berikut :

Tabel 2.28

Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu

Kabupaten/Kota	Timbulan Sampah Kg pada Tahun (Kg/Tahun)					
	2020	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.212.271	1.242.200	1.310.400	1.369.820	1.418.950	1.458.670
Proyeksi Timbulan Sampah	2.978.053	3.139.917	3.310.578	3.490.516	3.680.234	3.880.263
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	2 TPA, dan 19 TPST, 1 Unit Pengelolaan incinerator Limbah B3	2 TPA + 20 TPST	2 TPA + 22 TPST	3 TPA + 24 TPST	3 TPA + 26 TPST	4 TPA + 30 TPST

Tingkat pelayanan sampah ke TPA di Provinsi Gorontalo rata-rata baru mencapai 19,92 persen. Pemerintah daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota belum mampu memberikan

pelayanan pengelolaan sampah. Minimnya sarana prasarana pengolahan dan pemilahan sampah serta teknologi dalam pemrosesan sampah, sehingga volume sampah yang masuk ke TPA semakin tinggi. Sehingga ketersediaan TPST menjadi kebutuhan yang penting dalam pengelolaan sampah, sehingga dalam periode jangka panjang diharapkan setiap wilayah memiliki Tempat Pemrosesan Sampah Terpadu (TPST) yang ditargetkan bertambah 11 unit TPST, dan 2 Unit TPA.

Selain itu tahun 2024, Provinsi Gorontalo telah memiliki 1 unit fasilitas pengolahan Insinerator Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang difungsikan untuk mengolah limbah dari Fasilitas Layanan Kesehatan. Saat ini jumlah Fasyankes di Provinsi Gorontalo sebanyak 147 buah, terdiri dari rumah sakit 14 buah, puskesmas 96 buah dan klinik 37 buah. Berdasarkan jumlah tersebut, laju tumbuh limbah B3 yang dihasilkan dari Fasyankes tersebut diperkirakan mencapai 2.375 Kg perhari atau 856.000 Kg pertahun, dan sekitar 65 persen limbah B3 tersebut belum tertangani dengan baik. Sehingga diharapkan Lokasi unit pengolahan limbah B3 medis ini berada di Desa Talumelito, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dapat mengolah limbah medis kurang lebih 1 ton per hari.

E. Sarana Prasarana Kesehatan

Salah satu hal yang harus diperhatikan di sektor kesehatan untuk menjadikan Indonesia sehat adalah dimulai dengan membangun sarana dan prasaranan ya. Titik berat dari capaian sarana dan prasarana kesehatan oleh Kementerian Kesehatan adalah pembangunan fisik dan penyediaan sarana dan prasarana puskesmas, penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan rujukan, hingga penyediaan sarana dan prasarana untuk instalasi farmasi. Semakin tinggi jumlah penduduk maka semakin tinggi kebutuhan akan layanan kesehatan. Apalagi Gorontalo akan memasuki ageing population dimana jumlah penduduk usia diatas 65 tahun meningkat, sehingga keberadaan sarana kesehatan menjadi salah satu keharusan. Yang menjadi fokus perhatian tidak hanya dari sisi jumlah, namun dari sisi pemerataan dan aksesibilitas sarana dan prasarana kesehatan, dimana diharapkan masing-masing kecamatan dapat terlayani puskesmas maupun puskesmas pembantu, kualitas layanan kesehatan, maupun tenaga kesehatan. Dari hasil analisis kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan di Provinsi Gorontalo, maka diperoleh kebutuhan fasilitas layanan kesehatan rumah sakit dan puskesmas di Provinsi Gorontalo, sebesar 28 Rumah Sakit dan 110 Puskesmas yang tersebar dimasing-masing wilayah.

Jika dibandingkan dengan tahun sekarang, sampai dengan tahun 2045 masih dibutuhkan 17 puskesmas dan 9 rumah sakit baru yang harus dibangun untuk dapat memenuhi standar layanan kesehatan pertama dan rujukan di Provinsi Gorontalo. Hal ini setidaknya 1 puskesmas dibangun setiap 2 tahun dan 1 rumah sakit baru dibangun setiap 2 tahun. Upaya

yang dilakukan selama ini adalah pembangunan Fasilitas Layanan Kesehatan dan Rujukan melalui APBD, DAK, KPBU ataupun skema pembiayaan lainnya sesuai peraturan.

Tabel 2.29
Proyeksi Kebutuhan Sarana Kesehatan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Analisis Kebutuhan Sarana Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.212.271	1.242.200	1.310.400	1.369.820	1.418.950	1.458.670
Proyeksi Fasilitas Kesehatan						
▪ Rumah Sakit	19	20	22	24	26	28
▪ Puskesmas	93	94	99	102	106	110

F. Sarana Prasarana Pendidikan

Peningkatan Sumber Daya Manusia yang handal salah satunya diwujudkan melalui perbaikan tata kelola pendidikan. Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, dan berkualitas serta didukung dengan aksesibilitas yang memadai merupakan penunjang dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017 dan Surat Edaran Menteri Nomor 3 Tahun 2017, jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar untuk SMA idealnya dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 20 peserta didik dan paling banyak 36 peserta didik. Sedangkan SMK dalam satu kelas berjumlah paling sedikit 15 peserta didik, dan paling banyak 36 peserta didik. Untuk Provinsi Gorontalo, Tahun 2022 rasio siswa per kelas SMA/MA sebesar 1 : 30, sedangkan untuk SMK rasio sekolah 1 : 21. Ini menunjukkan dalam satu kelas rata-rata berjumlah 30 peserta didik untuk SMA/MA, dan SMK rata-rata berjumlah 21 peserta didik. Data ini menunjukkan bahwa jumlah sarana sekolah dan kelas di Provinsi Gorontalo masih memenuhi dan sesuai standar yang ditetapkan. Yang menjadi tantangan pembangunan kependidikan adalah pemerataan sarana dan prasarana, tenaga pengajar yang memadai dan berkualitas, serta peningkatan kapasitas pendidikan khususnya pendidikan vokasi melalui peningkatan kualitas sarana prasarana penunjang seperti laboratorium.

Berdasarkan data analisis pertumbuhan jumlah penduduk khususnya pada anak usia sekolah jenjang menengah atas di Provinsi Gorontalo, jumlah sarana prasarana untuk tahun 2022 sudah terpenuhi, namun perlu dijamin dari sisi aksesibilitas dan pemerataan. Olehnya dalam periode 20 tahun diproyeksikan pertumbuhan jumlah fasilitas mengalami peningkatan hingga sebesar 149 unit pada jenjang pendidikan menengah atas baik Umum, kejuruan maupun inklusif.

Tabel 2.30
Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Analisis Kebutuhan Sarana Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	1.212.271	1.242.200	1.310.400	1.369.820	1.418.950	1.458.670
Proyeksi Fasilitas Pendidikan	137	138	141	144	147	149
▪ SMA	71	71	72	74	75	76
▪ SMK	58	59	60	61	62	62
▪ SLB	8	8	9	9	10	11

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah memperhatikan arahan pola ruang dan struktur ruang yang telah dirumuskan dalam kebijakan penataan ruang. Arah kebijakan tata ruang dilaksanakan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang, untuk memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, yang saling bersinergi antara kebijakan pusat, provinsi maupun kabupaten/kota. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilaksanakan dalam rangka mendorong pembangunan ekonomi suatu wilayah atau kawasan sehingga memiliki nilai tambah bagi masyarakat berupa peningkatan investasi dan perluasan lapangan kerja. Dalam RPJPN 2025-2045, memuat arah pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah yang difokuskan pada sentra dan kawasan berbasis potensi unggulan daerah yang didukung oleh kawasan perkotaan, meliputi :

- (i) Sentra pertanian, perikanan, perkebunan dan pertambangan sebagai pusat produksi;
- (ii) Kawasan industri unggulan sebagai pusat pengolahan sumberdaya alam;
- (iii) Kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pusat pengembangan industri dan jasa pariwisata
- (iv) Kawasan perkotaan sebagai pusat pelayanan, jasa dan perdagangan.

Arah kebijakan pengembangan pusat pertumbuhan dalam tahap perencanaan dilakukan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan wilayah dan dinamika pasar, yang diarahkan pada : (a) pembangunan sentra produksi berbasis komoditas unggulan, kawasan industri pengolahan, serta kawasan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi dengan mempertimbangkan kesiapan lahan, keterkaitan kawasan dengan *hinterland*, serta manajemen rantai nilai dan rantai pasok, (b) percepatan pembangunan infrastruktur dan (c) penyediaan SDM yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan dunia usaha, serta (d) penguatan kapasitas dan tata kelola kelembagaan.

Sebagaimana tema kewilayahan dalam RPJPN 2025-2045, Tema Pengembangan Wilayah Sulawesi diarahkan sebagai **"Penunjang Ekonomi IKN dan Industri berbasis Sumber Daya Alam"**, yang berperan sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) dan pintu gerbang internasional Kawasan Timur Indonesia (KTI), melalui pengembangan industri hilirisasi mineral, dan lumbung pangan nasional. Arah Pembangunan wilayah Sulawesi mencakup 5 (lima) prioritas, sebagai berikut :

Pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) terutama untuk mendukung peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, dan ketenagakerjaan, serta mendorong pembangunan ekosistem riset dan inovasi.

Kedua, pembangunan ekonomi yang diarahkan untuk penguatan rantai nilai produksi, serta peningkatan produktivitas dan daya saing perekonomian wilayah secara berkelanjutan yang difokuskan pada kawasan industri pertambangan, ekowisata, perikanan tangkap dan budidaya, serta industri pengolahannya, kawasan pertanian tanaman pangan serta perkebunan kakao, kelapa dan kopi.

Ketiga, pengembangan sarana dan prasarana konektivitas untuk mendukung fungsi hub dan pintu gerbang internasional KTI dengan memanfaatkan ALKI II dan ALKI III, serta peningkatan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital.

Keempat, perbaikan tata kelola pemerintahan, termasuk penataan keuangan daerah untuk mewujudkan good governance dan kemandirian fiskal, serta penguatan stabilitas pertahanan dan keamanan diwilayah Sulawesi.

Kelima, peningkatan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, termasuk penguatan pengendalian rencana tata ruang wilayah dengan mempertimbangkan resiko bencana serta penuntasan RDTR kabupaten/kota untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam kerangka implementasi, memuat agenda kewilayahan dan sarana prasarana berupa program strategis di masing-masing wilayah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan wilayah. Beberapa pembangunan proyek-proyek strategis Nasional yang dilaksanakan di Provinsi Gorontalo antara lain :

1. Pengembangan pelabuhan sebagai simpul utama pembangunan diwilayah Sulawesi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, seperti Pelabuhan Gorontalo/Angrek, sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia;
2. Pembangunan dan Pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas;
3. Pengembangan jalan tol dan penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung

integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara);

4. Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan di beberapa wilayah termasuk Gorontalo yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang dan barang.

Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif dan menjangkau seluruh wilayah Sulawesi meliputi :

1. Pemenuhan rumah layak huni yang disesuaikan dengan karakteristik budaya dan adat, risiko bencana, dan kondisi geografis wilayah pesisir dan kelautan
2. Pengembangan hunian vertikal, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pusat pertumbuhan;
3. Penataan kawasan permukiman, terutama di wilayah perkotaan dan sekitar pertumbuhan
4. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan dan inklusif sesuai dengan karakteristik daerah;
5. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman.
6. Eliminasi praktik BABS diseluruh rumah tangga melalui perubahan perilaku masyarakat serta penyediaan sarana prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
7. Penyediaan pengelolaan persampahan yang terpadu dari hulu hingga hilir dengan target pemilahan sampah sejak dari Rumah tangga dengan target 100 persen sampah terangkut dan tertangani di TPST dengan berorientasi pada prinsip ekonomi sirkuler.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

3.1 Permasalahan Pembangunan Daerah

Provinsi Gorontalo sebagai bagian dari Negara Indonesia telah memiliki pemajuan pada periode sebelumnya dan cukup memberikan kontribusi terhadap pembangunan Nasional. Sebagai daerah berkembang, Gorontalo masih memiliki berbagai permasalahan dan tantangan yang menjadi isu daerah. Isu pembangunan daerah, juga diperhadapkan pada tantangan dimasa depan baik tantangan global, nasional, regional yang perlu diantisipasi dan dibijaksanai sebagai peluang dalam melakukan transformasi melalui langkah-langkah strategis dan inovatif dalam memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan pembangunan daerah.

Gorontalo dalam wilayah regional Sulawesi memiliki peran dalam perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, yang meliputi berbagai aspek baik ekonomi, sosial, tata kelola, supremasi hukum, stabilitas, pertahanan dan diplomasi, ketahanan sosial budaya dan ekologi, kewilayahan dan infrastruktur serta pembiayaan dan manajemen pembangunan. Selain itu, sebagai daerah otonom Pemerintah Provinsi Gorontalo menjalankan kewenangan pemerintah daerah yang meliputi urusan pembangunan dalam mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang selaras dengan pembangunan nasional. Dalam periode jangka panjang isu dan permasalahan pembangunan menjadi sangat kompleks dan melingkupi seluruh aspek pembangunan pembangunan yang diuraikan sebagai berikut :

1. Aspek Ekonomi

- a. Rendahnya produktifitas ekonomi daerah,** yang ditandai dengan kontribusi PDRB hanya 0,12 persen terhadap PDB Nasional dan terendah secara Nasional maupun Regional Sulawesi. PDRB Provinsi Gorontalo mencapai kurang lebih 51.374,40 Miliar Rupiah (2023). Produktifitas sektor perekonomian yang cenderung rendah diantaranya disebabkan karena kualitas SDM, inovasi dan pemanfaatan teknologi yang masih lemah. Proses produksi masih bersifat parsial dan masih rendahnya upaya hilirisasi sektor-sektor perekonomian khususnya disektor pertanian sebagai sumber utama perekonomian di Provinsi Gorontalo. Produktifitas rendah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Gorontalo yang cenderung mengalami pelambatan dalam pertumbuhannya. Rata-rata pertumbuhan ekonomi pada 5 tahun terakhir (2019-2023) sebesar 4,34 persen, tumbuh melambat dibanding periode 2010-2018 yang pertumbuhannya rata-rata diatas 6 persen pertahunnya.

- b. Transformasi ekonomi berjalan lambat.** Struktur ekonomi Provinsi Gorontalo dari sisi lapangan usaha masih didominasi sektor primer Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 38 persen, sedangkan sektor manufaktur hanya memberikan kontribusi rata-rata sebesar 4% terhadap struktur PDRB. Dari sisi produksi permasalahan yang dihadapi disektor industri berkaitan dengan kualitas tenaga kerja dan adaptasi teknologi yang berimplikasi terhadap kualitas dan daya saing produk. Hal lainnya yaitu terkait dengan manajemen kemitraan dan distribusi pemasaran produk baik ekspor maupun perdagangan antar pulau yang cenderung masih belum optimal.
- c. Rendahnya kontribusi koperasi dan UMKM pada penciptaan nilai tambah.** Permasalahan yang dihadapi dari sisi pemodalan, perizinan, literasi digital, manajemen koperasi, SDM, pemasaran dan perluasan bidang usaha koperasi serta belum masifnya penerapan koperasi berbasis syariah.
- d. Produktifitas tenaga kerja dan pendapatan perkapita masyarakat masih cenderung rendah,** yang di antaranya dipengaruhi oleh serapan tenaga kerja lebih besar disumbang dari angkatan kerja dengan tingkat pendidikan lulusan SD/SMP sebesar 34,60 persen, dan pekerja yang tidak pernah mengenyam pendidikan sebesar 28,12 persen (tahun 2023). Selain itu ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja, informasi tenaga kerja belum mampu menjadi sarana pasar kerja yang baik dalam merespons cepat kebutuhan dan jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk dan pola budaya kerja. Persoalan lainnya tingkat serapan tenaga kerja masih cenderung rendah karena kesempatan kerja yang terbatas.
- e. Deindustrialisasi dini dan tingkat produktivitas dan daya saing produk pertanian masih cenderung rendah.** Kontribusi manufaktur terhadap PDRB mengalami stagnansi diangka 4 persen selama 10 tahun terakhir. Penyebabnya diantaranya rendahnya produktifitas faktor-faktor produksi, adaptasi teknologi yang masih rendah serta keterbatasan dukungan ekosistem industri serta biaya logistik yang sangat tinggi.
- Disisi lain, tingkat produktivitas pertanian masih rendah, serta masih didominasi oleh padi dan jagung. Hal ini disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani, kurangnya tingkat keterampilan petani dan nelayan, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, serta belum adanya standar proses dan lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum. Permasalahan jangka panjang lainnya yang perlu diantisipasi adalah semakin menurunnya daya dukung lahan pertanian baik dari

sisi kualitas lahan maupun luasan lahan pertanian akibat alih fungsi lahan. Selain itu, tingkat kesejahteraan petani juga memberikan pengaruh terhadap produktifitas pertanian. Data tahun 2023 menunjukkan NTP umum berada pada angka 111,32. Meskipun terjadi peningkatan dalam 3 (tiga) tahun terakhir dimana tahun 2022 sebesar 105,59 dan 2021 sebesar 99,19, namun NTP masih sering terjadi fluktuasi, yang sangat bergantung dengan faktor alam dan biaya operasional yang juga semakin tinggi. Nilai Tukar petani Provinsi Gorontalo masih lebih rendah dibanding Provinsi lainnya di Sulawesi, khususnya Provinsi Sulawesi Utara dengan NTP mencapai 112,84 dan Sulawesi Tengah 114,63, padahal Gorontalo memiliki potensi pertanian sangat besar khususnya pada komoditi tanaman pangan. Jika ditinjau dari NTP menurut sub sektor, beberapa sektor telah mencapai diatas 100 kecuali pada NTP Nelayan berada dibawah 100. NTP hortikultura mencapai 170,27, NTP Perkebunan 108,88, Peternakan mencapai 112,44 sedangkan NTP Nelayan Tangkap 101,38 dan Budidaya sebesar 92,78.

- f. Sektor pariwisata cukup potensial namun masih belum berkontribusi optimal terhadap perekonomian daerah.** Hal ini karena belum optimalnya pengelolaan kawasan-kawasan wisata strategis di Provinsi Gorontalo, ketersediaan infrastruktur sarana prasarana, amenities, atraksi, dan aksesibilitas, SDM pariwisata masih belum cukup memadai. Pengembangan kawasan wisata dan promosi sektor pariwisata masih digarap secara konvensional dan parsial. Akselerasi investasi sektor pariwisata serta penciptaan branding lokal masih belum optimal.
- g. Kondisi infrastruktur seperti jalan, irigasi masih belum optimal.** Hal ini dilihat dari kondisi mantap jalan yang masih berada pada angka 7,03 persen. Berdasarkan kategori jalan, panjang jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 33,41 Km, dan rusak ringan sebesar 6,55 Km. Jika dilihat dari rasio panjang jalan dibandingkan dengan jumlah kendaraan di Provinsi Gorontalo, setiap tahunnya mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah ruas jalan belum sebanding dengan peningkatan jumlah kendaraan yang setiap tahunnya tumbuh rata-rata 0,12 persen. Disisi lain, kondisi Daerah Irigasi (DI) kewenangan Provinsi untuk jaringan irigasi saluran primer dan sekunder dengan panjang 137.713,58M dalam kondisi Baik 59,45 % sementara Rusak 40,54 %. Selain itu Masih rendahnya konektivitas antar wilayah, belum terbukanya beberapa ruas jalan di antaranya Marisa – Tolinggula, Tapa-Atinggola dan beberapa jalur strategis lainnya dalam mendorong pengembangan ekonomi.

- h. Tingkat partisipasi angkatan kerja masih rendah.** Tingkat pengangguran terbuka Provinsi Gorontalo cenderung rendah dengan rata-rata selama 10 tahun terakhir sebesar 3,9 persen. Tahun 2023 sebesar 3,03 persen. Tingkat Setengah Penganggur tahun 2023 di Provinsi Gorontalo masih mendominasi sebesar 7,43 persen meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 6,10 persen. Selain itu tingkat produktifitas masih rendah. Hal ini disebabkan karena menurut tingkat pendidikan, tenaga kerja didominasi oleh pendidikan menengah kebawah sebesar 86,59 persen tahun 2022. Menurut status pekerjaan utama, tenaga kerja masih didominasi pada sektor informal sebesar 64,97 persen. Sedangkan menurut lapangan pekerjaan utama, serapan tenaga kerja masih didominasi disektor pertanian sebesar 33,3 persen, dengan tingkat upah yang relatif kecil. Fenomena lainnya menunjukkan bahwa kesenjangan tingkat partisipasi angkatan kerja Laki-laki dan perempuan masih cukup tinggi. TPAK laki-laki sebesar 85,30 persen, sedangkan TPAK perempuan 52,64 persen. Sementara persentase usia muda (15-24) tahun yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan Provinsi Gorontalo atau NEET (Not Employment, Education and Training) masih cukup tinggi sebesar 28,03 persen.
- i. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat.** Data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 9,27 persen tahun 2017 menjadi 14,84 persen tahun 2021. Hal ini mengindikasikan bahwa terdapat 14 s/d 15 orang dari 100 orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan energi untuk hidup aktif dan sehat. Ketidakcukupan konsumsi pangan dapat dipengaruhi oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dan pola hidup masyarakat dalam memperoleh dan mengkonsumsi makanan sehat. Tahun 2022 total ketersediaan pangan di Provinsi Gorontalo sebesar 3,219,492,120,142 Kkal, sedangkan kebutuhan pangan Provinsi Gorontalo yaitu 916,489,121,500 Kkal. Ketersediaan pangan terbesar terdapat di Kabupaten Pohuwato, sedangkan Ketersediaan pangan terkecil terdapat di Kota Gorontalo, dan kebutuhan pangan terbesar yaitu di Kabupaten Gorontalo yaitu sebesar 294,134,501,750 Kkal. Hal ini menunjukkan pada beberapa wilayah memiliki kebutuhan pangan terbesar, namun ketersediaan pangan yang cukup rendah.
- j. Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi laut.** Gorontalo merupakan salah satu wilayah yang cukup potensial disektor kelautan dan perikanan, memiliki garis pantai yang cukup luas dan berada di kawasan teluk tomini, namun belum dimanfaatkan secara optimal untuk penciptaan nilai tambah perekonomian. Implementasi ekonomi biru masih dihadapkan pada rendahnya pemanfaatan sumber daya laut, serta belum adanya observasi dalam pengelolaan tentang potensi blue

carbon dipesisir. Tantangan lainnya masih belum optimalnya pengelolaan perikanan budidaya dan perikanan tangkap, sarana prasarana perikanan masih belum memadai dan belum dikelola dengan baik. Masih tingginya illegal dan over fishing karena masih rendahnya sistem pengawasan kelautan. Tingkat kesejahteraan nelayan yang diukur dengan Nilai Tukar Nelayan masih rendah.

k. Masih rendahnya energi terbarukan dan masih rendahnya efisiensi energi.

Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer tahun 2021 baru mencapai 11,08 persen, terjadi peningkatan dari tahun 2015 sebesar 3,45 persen, namun masih jauh dari target 42 persen.

l. Perkembangan teknologi digitasi, infrastruktur dan literasi digital masih terbatas.

Belum meratanya infrastruktur teknologi informasi, jaringan telekomunikasi diseluruh wilayah. Selain itu kapasitas dan kapabilitas infrastruktur TIK berupa jaringan, keterbatasan manajemen spektrum, keterbatasan kapasitas data center, dan rendahnya penerapan kebijakan TIK. Pembangunan TIK juga diperhadapkan pada tantangan dalam mengadopsi teknologi, serta penerapan teknologi berbasis *Artificial Intelligence*. Kondisi ekosistem pendukung digitalisasi seperti talenta digital, investasi untuk digitalisasi riset dan inovasi serta keamanan siber belum memadai. Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika skor indeks literasi sebesar 3,61 atau pada level sedang, berada pada 5 tertinggi se-Indonesia. Pengukuran Indeks Literasi Digital merupakan survei kepada pengguna internet berusia 13 – 70 tahun. Meskipun demikian, penggunaan internet masih terbatas pada sektor-sektor tertentu yang kurang produktif, yang tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan pada perekonomian daerah.

m. Masih rendahnya peranan wilayah perkotaan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hal ini disebabkan karena terbatasnya keterhubungan antara perkotaan sebagai pusat pertumbuhan diwilayah sekitarnya, ketimpangan pembangunan masih tinggi baik intra maupun antar kawasan perkotaan dan perdesaan, kapasitas pengelolaan perkotaan masih terbatas, serta kualitas lingkungan perkotaan yang semakin menurun.

2. Aspek Sosial

a. Perubahan atau transisi struktur demografi. Penduduk sebagai modal pembangunan memiliki dampak positif dan negatif yang perlu disikapi dan diantisipasi pertumbuhannya. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan berdampak pada kondisi sosial ekonomi maupun lingkungan. Data menunjukkan

bahwa selama 10 tahun terakhir Total Fertility Rate (Angka Kelahiran) sebesar 2,3 dan diproyeksikan terus menurun. Provinsi Gorontalo akan mencapai *replacement level* atau kondisi penduduk tumbuh seimbang yang ditandai dengan TFR sebesar 2,07 Tahun 2045. Sejalan dengan perbaikan derajat dan layanan kesehatan, Angka Usia Harapan Hidup terus meningkat tahun 2022 sebesar 68,51 dan diproyeksikan meningkat mencapai 73,13 tahun pada 2045. Sementara Rasio ketergantungan Provinsi Gorontalo sebesar 43,67 persen tahun 2022. Kondisi ini yang perlu diantisipasi bahwa Indonesia dan beberapa wilayah termasuk Provinsi Gorontalo akan mengalami ageing populasi ditahun 2024, dimana dalam jangka panjang diproyeksikan proporsi jumlah penduduk usia lanjut semakin meningkat. Sehingga rasio ketergantungan diproyeksikan meningkat 50,61 tahun 2045. Kondisi ini mengindikasikan bahwa penduduk usia non produktif akan semakin tinggi dibanding penduduk usia produktif.

- b. Kualitas SDM masih cenderung rendah**, berada dibawah rata-rata nasional. Tahun 2022 IPM Provinsi Gorontalo berada pada angka 69,81 persen. Jika dilihat dari ketiga dimensi pembangunan manusia, baik dimensi pendidikan, kesehatan dan maupun ekonomi masih cenderung rendah.

Disektor pendidikan, Kualitas Mutu dan Layanan Pendidikan masih belum optimal. Angka harapan lama sekolah masih berada pada angka 13,10 tahun dan rata-rata lama sekolah berada pada angka 8,02 tahun. Hal ini mengindikasikan tingkat partisipasi sekolah cenderung masih rendah. Tantangan paling besar terjadi pada kelompok umur 16 -18 Tahun dimana capaian APS menurun tajam di posisi 71,68 persen walaupun angka ini terus membaik setiap tahunnya. Permasalahan disektor pendidikan masih berkaitan dengan akses dan kualitas pendidikan di antaranya ketersediaan daya tampung, ketersediaan guru yang profesional dan kompeten, kualitas penyelenggaraan pendidikan yang diwakili oleh jumlah satuan pendidikan terakreditasi, advokasi kepada masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak pendidikan anak yang masih rendah, serta intervensi terhadap masyarakat khususnya rumah tangga miskin yang memiliki anak usia sekolah belum optimal.

Derajat dan sistem layanan kesehatan masih rendah. Angka harapan hidup berada pada 68,51 tahun. Data lainnya menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu, Bayi dan Balita di Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi dan cenderung fluktuatif setiap tahunnya. Tahun 2022 Angka Kematian Ibu sebesar 195 per 100.000 KH, sementara Angka Kematian Bayi pada angka 11 per 1.000 KH. Disisi lain Prevalensi kekurangan Gizi tahun 2022 sebesar 7,6 persen turun dibanding tahun 2021 sebesar 10,2 persen. Demikian halnya dengan prevalensi stunting, berdasarkan Hasil Survei Status Gizi

Indonesia yang dilaksanakan tahun 2022, prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo turun menjadi 23.8% dari angka 29% di tahun 2021, namun angka ini masih jauh dari target nasional 14% pada tahun 2024. Beberapa indikator tersebut menunjukkan adanya perbaikan, namun permasalahan disektor kesehatan masih terus menjadi perhatian yang berkaitan dengan perilaku hidup tidak sehat, akses dan kualitas layanan kesehatan di Provinsi Gorontalo, salah satunya status Rumah Sakit Provinsi yang saat ini masih berada pada Tipe C, selain itu belum ditunjang dengan sarana prasarana yang belum memadai. Berdasarkan data Profil Kesehatan Nasional menunjukkan bahwa rasio Puskesmas Provinsi Gorontalo berada pada angka 1,21 dibawah rata-rata Nasional dan berada pada 4 terendah se-Indonesia. Selain itu kualitas dan pemerataan tenaga kesehatan masih cenderung rendah. Data menunjukkan bahwa tingkat sebaran tenaga medis yang ada di Provinsi Gorontalo kurang merata dan masih terkonsentrasi di wilayah Kota Gorontalo. Selain itu intervensi terhadap jaminan kesehatan cenderung masih rendah.

c. Kemiskinan masih tinggi. Kondisi ini menjadi salah satu permasalahan dan tantangan pembangunan di Provinsi Gorontalo. Tahun 2023 tingkat kemiskinan Provinsi Gorontalo masih berada pada angka 15,15 persen berada di urutan ke-5 tertinggi secara Nasional. Hal ini mengindikasikan tingkat pendapatan masyarakat Gorontalo masih relatif rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingkat kualitas sumber daya manusia, yang di antaranya disebabkan oleh tingkat partisipasi sekolah yang masih cenderung rendah. Selain itu, pendapatan disektor pertanian yang menjadi salah satu penyumbang tertinggi kemiskinan di Provinsi Gorontalo masih relatif rendah. Permasalahan lainnya yaitu masih rendahnya cakupan sistem perlindungan sosial terhadap masyarakat rentan.

d. Kesenjangan pendapatan masih cukup tinggi yang diukur berdasarkan indeks gini masih berada diangka 0,417, diatas rata-rata Nasional dan tertinggi diwilayah Sulawesi. Dalam 3 tahun terakhir, kondisi ketimpangan terbesar berada di daerah perkotaan. Hal ini karena rata-rata pengeluaran perkapita perbulan wilayah perkotaan sebesar 11,63 persen, sementara peningkatan rata-rata pengeluaran perkapita perbulan diwilayah pedesaan tidak sebesar wilayah perkotaan yaitu hanya sebesar 4,40 persen. Tingginya kesenjangan pendapatan dapat disebabkan antara lain ketidakmerataan pembangunan, aktivitas ekonomi, aksesibilitas, kualitas SDM, tingkat produktifitas.

- e. **Belum optimalnya layanan kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang tidak didukung dengan ketersediaan sarana prasarana yang menjadi kewenangan Provinsi, serta cakupan layanan perlindungan dan pemberdayaan sosial masih rendah.
- f. Pelestarian budaya dan kerukunan antar umat beragama menjadi salah satu tantangan pembangunan jangka panjang yang sangat penting untuk diambil langkah antisipatif dalam rangka menghadapi ancaman negatif budaya asing dan **kemerosotan nilai-nilai agama dan budaya dimasyarakat**. Hasil indeks pembangunan kebudayaan Provinsi Gorontalo menunjukkan tahun 2022 sebesar 47,14 persen lebih rendah atau dibawah rata-rata nasional sebesar 51,90 persen. Dari hasil capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan terdapat beberapa dimensi yang pencapaiannya belum maksimal antara lain ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, dan ekspresi budaya, sedangkan untuk dimensi budaya literasi dan gender pencapaiannya lebih tinggi dari angka nasional.

2. Aspek Lingkungan Hidup

- a. **Kualitas Lingkungan Hidup masih cenderung rendah** yang ditandai dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2022 masih berada pada angka 79,79 persen. Jika dilihat dari ke-4 Indikator IKLH, Indeks Kualitas Air (IKA) masih berada pada angka 58,07 atau kategori kurang, sedangkan Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 94,47 persen, dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 85,45 atau berada dalam kondisi sangat baik. Sedangkan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 84,08 kondisi sangat baik. Penurunan kualitas air disebabkan karena aktifitas masyarakat di hulu sungai yang semakin tidak terkendali. Aktifitas pertambangan dan limbah industri, rumah tangga dan pertanian yang jika tidak dilakukan pengendalian ataupun tidak dikelola dengan baik menjadi faktor penyebab dalam penurunan kualitas air.
- b. **Pengurangan luasan dan pendangkalan Danau Limboto**. Danau Limboto telah ditetapkan menjadi salah satu dari 15 danau kritis di Indonesia. Berdasarkan data selang Tahun 2000-2015 luas Danau Limboto berkurang sebesar 1.076 ha atau dengan rata-rata penyusutan sebesar 71,73 ha atau 1,79% pertahunnya. Selain itu terjadinya penurunan kualitas air di Danau Limboto yang disebabkan pada tingginya sedimentasi dan proses eutrofikasi yang terjadi akibat meningkatnya kadar mineral dan nutrisi termasuk nitrogen dan fosfor didalam perairan. Hal lainnya Pertumbuhan enceng gondok yang semakin tidak terkendali yang menyebabkan pendangkalan danau.

Aktifitas masyarakat di hulu sungai dan wilayah sekitar yang memanfaatkan danau sebagai sumber mata pencaharian menyebabkan kondisi danau terus mengalami penurunan.

- c. **Lahan kritis Provinsi Gorontalo masih cukup tinggi** tersebar di luar kawasan dan di dalam kawasan sebesar 217.177 Ha. Adapun yang tersebar di luar kawasan sebesar 144.983 Ha, dan di dalam kawasan sebesar 72.194 Ha. Luasan lahan kritis lebih besar berada pada wilayah Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Boalemo. Aktifitas pemanfaatan lahan pertanian di lahan miring yang semakin tidak terkendali, berdampak pada kondisi dan struktur lahan yang jika tidak diantisipasi menyebabkan kerusakan lahan, erosi dan sedimentasi yang semakin meningkat.
- d. **Cakupan sanitasi dan air bersih masih rendah.** Data menunjukkan bahwa persentase Rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sanitasi Layak di Provinsi Gorontalo masih sebesar 79,82 persen, hal ini menunjukkan bahwa masih sebesar 20,18 persen masyarakat yang belum memiliki sarana sanitasi layak. Untuk persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan dari sebelumnya tahun 32,04 persen menjadi 31,69 persen tahun 2021.
- e. **Pengelolaan Sampah dan limbah masih belum optimal.** Implementasi pelaksanaan kebijakan strategi daerah dalam pengurangan dan penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga masih belum maksimal dilaksanakan. Volume timbulan sampah perharinya semakin tidak terkendali, pengolahan sampah belum terintegrasi dari hulu sampai ke hilir, hal ini juga disebabkan karena kurangnya sarana prasarana pemilahan sampah, peran TPS3R dalam pemilahan sampah, dan sarana prasarana pengelolaan limbah B3 belum tersedia.
- f. **Penataan perkotaan dan penanganan kawasan perumahan dan permukiman masih belum optimal.** Penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan tanah, Prasarana Sarana Umum (PSU) serta penanganan kawasan kumuh dan kondisi permukiman yang belum memenuhi syarat. Akibatnya di satu sisi telah berkembang pusat-pusat kegiatan ekonomi namun di sisi lain pertumbuhan kawasan kumuh dan tidak layak huni juga semakin meningkat
- g. **Daya dukung lahan menurun** seiring dengan alih fungsi lahan yang terus terjadi, aktifitas pertambangan dan dalam jangka panjang berimplikasi pada hilangnya habitat keanekaragaman hayati.

- h. **Daya dukung ekosistem laut mengalami kerentanan** seiring dengan meningkatnya aktivitas manusia dan perubahan iklim. Kerusakan fisik ekosistem pesisir dan laut disebabkan karena pengelolaan yang tidak berkelanjutan. Kerusakan ekosistem terumbu karang dan berkurangnya luasan kawasan mangrove dalam jangka panjang berdampak pada berkurangnya potensi sumber daya kelautan.
- i. **Kerentanan terhadap bencana dan perubahan iklim masih tinggi.** Berdasarkan hasil kajian resiko bencana dan kecenderungan bencana dalam 10 tahun terakhir, Provinsi Gorontalo termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana dengan kelas resiko Bencana pada kategori Sedang dengan indeks Resiko Bencana sebesar 120,61. Sementara berdasarkan hasil perhitungan kerentanan terhadap perubahan iklim menggunakan SIDIK dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka Provinsi Gorontalo termasuk kategori daerah yang relatif rentan terhadap perubahan iklim. Dari hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca menunjukkan bahwa Emisi GRK di Gorontalo cenderung mengalami kenaikan. Jumlah emisi GRK di Provinsi Gorontalo pada tahun 2022 sebesar 1.407,27 Gg CO₂e. Sumber utama emisi GRK Gorontalo pada tahun 2022 adalah pertanian, energi, dan limbah yang menghasilkan emisi 2382,1 Gg CO₂e. Emisi GRK dari sektor pertanian mencapai 47,8% diikuti dengan penggunaan energi sebesar 43,21 %. Sektor limbah berkontribusi sebesar 8,3 % terhadap emisi GRK secara agregrat. Sementara itu sektor kehutanan memberikan rosot atau penyerapan GRK sebesar -974,8 Gg CO₂e. Atau setara dengan penyerapan 40,9% emisi dari sektor lain.

3. Tata Kelola Pemerintahan

- a. **Kapasitas fiskal daerah masih rendah.** Data Kementerian Keuangan RI, indeks kapasitas fiskal daerah berada pada angka 1.350 atau dengan kategori Sangat Rendah. Hal ini sejalan dengan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Gorontalo pada tahun 2021 sebesar 78 atau berada pada kategori perlu perbaikan. Dari hasil pengukuran tersebut dimensi yang pencapaiannya belum maksimal adalah kondisi keuangan daerah dengan beberapa indikator antara lain kemandirian keuangan, fleksibilitas keuangan, solvabilitas operasional, solvabilitas jangka pendek, solvabilitas jangka panjang dan solvabilitas layanan.
- b. **Tata kelola pemerintahan belum optimal.** Aspek Akuntabilitas Kinerja pemerintah masih berada pada kategori dengan capaian SAKIP sebesar 68,66, sedangkan reformasi birokrasi meningkat mencapai 77,75 atau pada kategori BB. Meskipun demikian pada unit-unit tertentu masih terdapat beberapa daerah yang perlu di dorong

percepatan implementasi Reformasi Birokrasi khususnya bagi aspek yang masih belum optimal baik dari sisi Kualitas Kebijakan, Profesionalitas ASN, SPBE, dan Indeks System Merit. Regulasi yang berlebih (*hyper regulation*) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh perangkat daerah, serta ASN yang masih berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik.

- c. **Belum meratanya kualitas pelayanan publik.** Kualitas Pelayanan Publik terlihat dari capaian Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik pada tahun 2023 mencapai 83,36 dengan kategori B, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 72,65 pada kategori C, serta capaian Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2022 sebesar 4,34 dengan kategori Sangat Baik meningkat 0,3 poin dari capaian tahun 2021 serta capaian Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik mencapai nilai 94,9. Perolehan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 85,05 persen. Meskipun terjadi peningkatan dari sisi kepatuhan layanan dan indeks kepuasan masyarakat, namun tingkat pelayanan publik masih perlu didorong, perbaikan tata kelola dan kualitas layanan masih menjadi tantangan karena sejauh ini Pemerintah Provinsi Gorontalo belum memiliki Mall Pelayanan Publik, serta kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.
- d. **Inovasi Pembangunan Daerah masih belum optimal.** Capaian Indeks Inovasi Daerah Provinsi Gorontalo masih berada dalam kategori kurang inovatif. Selain itu daya saing inovasi pembangunan daerah belum berdampak signifikan terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah. Persoalannya belum menjadi perhatian dari sisi pendanaan dan kualitas Sumber Daya Manusia, dan Kerja sama multipihak dalam pengkajian dan implementasi hasil Riset masih rendah.
- e. **Penerapan Digitalisasi pemerintahan belum optimal.** Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Gorontalo pada tahun 2023 berada pada angka 3,22 meningkat dibanding tahun 2022 sebesar 2,48 capaian. Meskipun terjadi peningkatan, namun implementasi SPBE masih belum optimal dalam hal integrasi sistem, keamanan, kematangan kapabilitas sistem dan lain sebagainya.

3.2 Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas yaitu daerah atau masyarakat di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi atau kejadian penting atau keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan atau keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu strategis pembangunan daerah diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu :

1. Permasalahan Pembangunan Provinsi Gorontalo;
2. Penelaahan terhadap kebijakan dan dinamika Internasional, Nasional dan Regional yang mempengaruhi Pembangunan Provinsi Gorontalo;
3. Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang mempengaruhi pembangunan Provinsi Gorontalo;
4. Kebijakan pembangunan di Provinsi Gorontalo yang bersumber dari KLHS RPJPD, dan RTRW Provinsi Gorontalo.

3.2.1 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals)

Komitmen Indonesia untuk ikut mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan bersama dengan negara-negara lain, ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adapun 17 tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan yang harus diwujudkan bersama-sama oleh K/L dan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota), yaitu:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun.
2. Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.

4. Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.
5. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.
6. Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern untuk semua.
8. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.
9. Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.
11. Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudra untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
16. Memperkuat masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17. Memperkuat sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menganalisis 235 indikator yang menjadi kewenangan Provinsi Gorontalo, diperoleh hasil indikator yang tercapai /membaik sejumlah 38 indikator, dan indikator TPB yang sudah tercapai sejumlah 133 indikator. Dari hasil identifikasi tersebut, beberapa tujuan dan sasaran TPB yang masih memerlukan perhatian khusus untuk ditetapkan sebagai isu pembangunan di Provinsi Gorontalo, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1
Hasil Identifikasi Isu Pembangunan Berkelanjutan

Isu Pembangunan Berkelanjutan Strategis	
TPB 1	Tanpa Kemiskinan
TPB 2	Tanpa Kelaparan
TPB 3	Kehidupan Sehat dan Sejahtera
TPB 6	Air Bersih dan Sanitasi Layak
TPB 8	Pekerjaan layak dan Pertumbuhan Ekonomi
TPB 10	Berkurangnya kesenjangan
TPB 11	Kota dan Permukiman berkelanjutan
TPB 12	Konsumsi dan Produksi yang bertanggungjawab
TPB 13	Penanganan Perubahan Iklim
TPB 14	Ekosistem Laut
TPB 15	Ekosistem Darat
TPB 17	Kemitraan untuk mencapai tujuan

Sumber : KLHS RPJPD Provinsi Gorontalo.

Selain dari isu-isu Tujuan pembangunan berkelanjutan, terdapat isu lingkungan yang didasari oleh analisis 6 muatan KLHS yang terdiri dari : (a) kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, (b) kinerja layanan jasa ekosistem, (c) perkiraan dampak dan resiko lingkungan hidup, (d) efisiensi pemanfaatan sumber daya alam, I tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim dan (f) tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati. Analisis 6 muatan KLHS tersebut berdasarkan ecoregion, perubahan penggunaan lahan, vegetasi dan bentang alam yang terdapat di Provinsi Gorontalo. Berdasarkan analisis 6 muatan KLHS tersebut diperoleh isu Lingkungan Hidup sebagai berikut:

1. Kerusakan Kawasan Danau Limboto

Kerusakan ini disebabkan oleh beberapa hal di antaranya : vegetasi di sekitar Danau Limboto menyebabkan proses sedimentasi di dalam danau, banyaknya bahan kimia dan polutan yang masuk kedalam danau sehingga melampaui daya dukung lingkungannya, serta penangkapan ikan secara berlebihan.

2. Kerusakan ekosistem Pesisir

Teluk Tomini merupakan salah satu teluk terbesar di Indonesia, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah. Perairan Teluk Tomini di Provinsi Gorontalo memiliki garis pantai sepanjang 572,5 Km. Kerusakan ekosistem pesisir di wilayah ini disebabkan antara lain : penggunaan bom dan sianida saat menangkap ikan, perambahan mangrove guna

pembangunan dan konversi lahan, eksploitasi pantai untuk pertanian atau industri sehingga menyebabkan abrasi pantai, alih fungsi kawasan mangrove menjadi tambak.

3. Kerusakan hutan dan alih fungsi lahan

Pada wilayah perkotaan pertumbuhan penduduk yang pesat menyebabkan kota melebihi daya dukung dan daya tampungnya. Sehingga menyebabkan alih fungsi hutan menjadi lahan terbangun (permukiman). Pada wilayah non perkotaan, alih fungsi lahan disebabkan penggunaan lahan pertanian, perkebunan, perikanan dan pertambangan.

4. Bencana Alam

Provinsi Gorontalo merupakan salah satu provinsi Indonesia yang rawan terhadap bencana, seperti Banjir, tanah longsor, gempa bumi dan tsunami. Banjir merupakan bencana yang paling sering terjadi di Provinsi Gorontalo, yang disebabkan hujan dengan intensitas tinggi, yang diperburuk dengan sistem drainase. Selain itu bencana tanah longsor juga sering terjadi di wilayah ini disebabkan oleh faktor alam dan manusia. Oleh faktor alam karena curah hujan yang tinggi dan kondisi tanah yang labil. Sedangkan faktor manusia, seperti alih fungsi hutan dan pembangunan di daerah yang rawan longsor. Provinsi Gorontalo juga berada pada daerah tektonik aktif yang dapat menyebabkan gempa bumi dan potensi tsunami. Hal ini disebabkan oleh sesar geser Gorontalo dan dibagian Utara Gorontalo terdapat zona subduksi lengan utara Sulawesi.

5. Penurunan kuantitas dan kualitas air

Sumber daya air yang terdapat di Provinsi Gorontalo terdiri dari sumber daya air tanah dan air permukaan. Sumber daya air tanah tersimpan dalam 9 cekungan air tanah (CAT), sedangkan untuk sumber daya air permukaan tersimpan diatas permukaan tersimpan diatas permukaan tanah atau pada badan-badan air seperti sungai, danau, waduk. Provinsi Gorontalo dibagi kedalam 3 daerah aliran sungai (DAS) utama yaitu DAS Randangan, DAS Paguyaman dan DAS Limboto Bolango Bone. Terdapat 2 danau yaitu Danau Limboto dan Danau Perintis. Penurunan kualitas air di wilayah ini disebabkan oleh pencemaran dari limbah domestik rumah tangga, baik limbah cair maupun limbah padat, juga diakibatkan oleh kegiatan pertanian dan perkebunan, industri, serta pertambangan emas tanpa izin (PETI). Dari 5 sungai yang dipantau pada tahun 2020, sungai tersebut berstatus cemar ringan hingga sedang.

6. Penurunan kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah sebuah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas lingkungan hidup di suatu wilayah, yang dihitung berdasarkan beberapa indikator yaitu kualitas air, udara, tutupan lahan dan kualitas air laut. Di Provinsi Gorontalo penurunan tingkat kualitas udara diakibatkan oleh peningkatan kepemilikan

kendaraan yang signifikan. Alih fungsi lahan dan pengrusakan hutan menjadi pertambangan dan permukiman.

3.2.2 Penelaahan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

Pembangunan Provinsi Gorontalo tidak lepas dari isu dan tantangan pembangunan Nasional dan Global. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pengaruh ekonomi sosial politik Nasional sangat berpengaruh bagi perkembangan daerah. Di lain pihak, tantangan global kedepan semakin kompleks seiring dengan perkembangan disegala bidang yang disebut Megatren Global. Perubahan dan perkembangan global tersebut merupakan perubahan transformatif berskala besar, berjangka waktu panjang, dan bersifat masif terutama disebabkan oleh kemajuan teknologi digital dan komputasi termasuk kecerdasan buatan (*artificial intelligence*). Terdapat 10 (sepuluh) megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren tersebut memiliki dua sisi , yaitu memberikan potensi kemajuan bagi kondisi sosial ekonomi global, tetapi disisi lain juga memberikan disrupsi.

Tantangan megatren meliputi :

1. Perkembangan demografi global
2. Geopolitik dan geokonomi
3. Perkembangan teknologi
4. Peningkatan urbanisasi dunia
5. Konstelasi perdagangan global
6. Tata keuangan global
7. Pertumbuhan kelas menengah (*middle class*)
8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam
9. Perubahan Iklim
10. Pemanfaatan Luar Angkasa (*space economy*)

Dari tantangan megatren global, isu dan tantangan pembangunan kedepan di antaranya adalah :

1. Produktivitas Rendah
2. IPTEKIN dan Riset lemah
3. Deindustrialisasi dini
4. Pariwisata di bawah potensinya
5. Ekonomi Laut belum optimal
6. Kontribusi UMKM dan koperasi kecil
7. Infrastruktur dan literasi digital rendah
8. Pembangunan belum berkelanjutan

9. Integrasi domestik terbatas
10. Kualitas SDM yang makin rendah
11. Tata Kelola Pemerintahan belum optimal
12. Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah
13. Demokratisasi belum optimal
14. Kesenjangan Jawa dan luar Jawa

3.2.3 Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Gorontalo

Berdasarkan rencana tata ruang wilayah Provinsi Gorontalo, beberapa isu penataan ruang yaitu berupa :

1. Alih Fungsi Lahan
2. Degradasi Lahan
3. Illegal Logging
4. Pencemaran Lingkungan
5. Banjir
6. Kerusakan sumber daya laut dan pesisir
7. Pendangkalan Danau Limboto
8. Pertambangan Tanpa Izin
9. Kemiskinan

3.2.4 Isu Pembangunan Daerah

Berdasarkan identifikasi permasalahan lokalitas daerah dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal maka ditetapkan isu strategis pembangunan, sebagai berikut :

- a. Ketahanan dan transformasi ekonomi berjalan lambat
- b. Kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi
- c. Kualitas sumber daya manusia masih rendah
- d. Pembangunan belum berwawasan lingkungan
- e. Rendahnya kualitas infrastruktur dan pengembangan wilayah
- f. Tata kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik belum optimal



BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Visi Gorontalo 2045 mengacu pada pencapaian tujuan nasional yang diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945 dan tidak terlepas dari Visi Indonesia Emas yaitu **Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan. Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang bersatu diartikan sebagai negara tangguh yang memiliki kekuatan geopolitik, militer, dan geoekonomi serta peradaban maritim yang besar di kancah dunia. **Berdaulat** adalah manifestasi dari kemampuan negara kesatuan untuk memiliki kemandirian dan kewenangan penuh untuk mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. **Maju** pada tahun 2045 Indonesia adalah negara yang berdaya, modern, tangguh, inovatif dan adil. **Berkelanjutan** adalah prinsip pembangunan yang menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan pembangunan sosial dan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan. Ketercapaian Visi RPJPN 2025-2045 diukur dengan lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 yaitu : Pendapatan Perkapita Setara Negara Maju (GNI Perkapita, Kontribusi PDB Maritim, Kontribusi PDB Manufaktur), Kemiskinan Menurun dan ketimpangan berkurang (Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini dan Kontribusi PDRB KTI), Kepemimpinan dan Pengaruh Dunia Internasional Meningkat (Global Power Index), Daya Saing Sumber Daya Manusia Meningkat (Human Capital Index), dan Intensitas Emisi GRK Menurun Menuju *Net Zero Emission* (Penurunan Emisi GRK).

Pencapaian Visi Indonesia Emas 2045 dilakukan melalui 8 (delapan) misi (agenda) pembangunan, yaitu Mewujudkan Transformasi Sosial; Mewujudkan Transformasi Ekonomi; Mewujudkan Transformasi Tata Kelola; Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi; Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi; Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan; Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; serta Kestinambungan Pembangunan.

Mengacu dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Panjang Nasional tersebut, maka ditetapkan Visi Provinsi Gorontalo 2045 adalah :

"GORONTALO PROVINSI MADANI, YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN".

Visi pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2025-2045 diarahkan pada pencapaian tujuan dan harapan masyarakat Gorontalo sebagai **Provinsi Madani 2045**. Penyebutan Provinsi Madani berdasarkan kultur dan falsafah hidup masyarakat Gorontalo yang memiliki adab dalam membangun, memaknai dan menjalankan kehidupannya.



Visi pembangunan tersebut diukur melalui tingkat kemajuan peradaban, dan keberlanjutan pembangunan dan lingkungan yang ingin dicapai. Berdasarkan hal tersebut, diberikan penjelasan makna visi untuk membentuk kesamaan pandangan dan pemahaman tentang substansi filosofis yang terkandung, agar semua pemangku pembangunan dapat bersinergi memberikan kontribusi dalam pencapaiannya.

Maju diartikan bahwa di tahun 2045 Provinsi Gorontalo mencapai masyarakat yang Sejahtera, Produktif dan Inovatif. *Sejahtera* adalah masyarakat Gorontalo semakin makmur dengan menurunnya kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran semakin kecil, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkeadilan sosial. *Produktif*, yaitu pengelolaan sumber daya alam untuk perekonomian yang kompetitif, sumber daya manusia yang berkualitas, penguasaan ilmu dan teknologi, meningkatnya konektivitas dan sarana prasarana, pemerintahan yang professional dan berakhlak, berkurangnya kesenjangan antar wilayah dan meningkatnya investasi dengan keamanan dan ketertiban daerah yang terus terjaga. *Inovatif*, yaitu Pembangunan Gorontalo yang mengedepankan strategi pemanfaatan ilmu pengetahuan teknologi dan inovasi untuk mewujudkan daya saing daerah.

Berkelanjutan dimaksudkan Pembangunan di Provinsi Gorontalo menerapkan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pembangunan sosial yang adil, keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup serta didukung oleh tata kelola dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Kualitas hidup masyarakat meningkat ditandai dengan kesehatan yang merata, pendidikan tinggi, lingkungan pemukiman yang bersih dan nyaman, bebas polusi udara air, suara, sampah dan kondisi daratan dan lautan yang tetap lestari dan terjaga dengan baik.

4.2 Sasaran Visi

Dalam mewujudkan Visi Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan, yang selaras dan mendukung Visi Indonesia Emas 2045, maka ditetapkan sasaran Visi Pembangunan dalam menjadi cita-cita pembangunan dalam periode jangka panjang 2025-2045. Sasaran Visi merupakan rumusan target kinerja yang menjadi ukuran pencapaian Visi Pembangunan Daerah dalam 20 tahun kedepan, yang dirumuskan sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran Visi, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan 2045

RPJPD PROVINSI GORONTALO 2025-2045					
VISI	SASARAN VISI		INDIKATOR	BASELINE 2025	TARGET 2045
GORONTALO, PROVINSI MADANI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah	1	PDRB perkapita (Rp. Juta)	46,05 – 46,25	177,62 – 223,84
		2	Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	39,03	69,53
		3	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	4,42 – 5,92	6,00 – 7,14
	Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang	4	Tingkat Kemiskinan (%)	14,21 – 14,50	0,10 – 1,10
		5	Rasio Gini (indeks)	0,394 – 0,400	0,349 – 0,400
		6	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0,25	0,18 – 0,3
		7	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23 – 5,46	5,54 – 7,18
	Peningkatan daya saing daerah	8	Indeks Daya Saing Daerah	3,15	4,5 – 5,0
	Daya saing sumber daya manusia meningkat	9	Indeks Modal Manusia	0,50	0,71
	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emisi	10	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	59,58	98,77
		11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,48	87,77

Sumber: Lampiran SEB Mendagri dan Menteri PPN: Buku II Sistematika Penulisan RPJPD 2025-2045 dan Arah Kebijakan Provinsi Gorontalo; Forum Pemutakhiran Indikator Makro Daerah Antara Kementerian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, diolah

Terwujudnya Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan tercermin dalam lima sasaran visi yang mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, yang dirumuskan dalam lima sasaran visi yaitu : Peningkatan Pendapatan Perkapita, Kemiskinan menurun, menurunnya ketimpangan, Peningkatan Daya Saing Daerah, Meningkatnya daya saing sumber daya manusia, serta menurunnya intensitas emisi GRK (tabel 4.1).

Sasaran Pertama, Peningkatan Pendapatan Perkapita Daerah dalam rangka mendukung Sasaran Visi Indonesia Emas dalam mewujudkan Pendapatan Negara Setara dengan Negara Maju. Sasaran visi tersebut diwujudkan dalam pencapaian PDRB perkapita rata-rata 177,62 – 223,84 (Rp. Juta), peningkatan Indeks Ekonomi Biru (*Blue Economy Development Index*) mencapai 69,53 (nilai indeks) serta Peningkatan Kontribusi PDRB industri Pengolahan rata-rata 6,00 – 7,14 persen, melalui peningkatan produktifitas dan daya saing perekonomian berbasis Sumber Daya Alam, serta penciptaan hilirisasi berbasis SDA melalui implementasi teknologi informasi, inovasi, inklusi dan berkelanjutan.

Sasaran Kedua, Peningkatan ekonomi yang inklusif diharapkan dapat mendorong peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan **Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang**. Sasaran visi tersebut diwujudkan melalui upaya penurunan tingkat kemiskinan hingga mencapai 0,10 – 1,10 %, ratio gini turun menjadi 0,349-0,400, serta kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional mencapai 0,18 – 0,3 %.

Sasaran Ketiga, **Peningkatan Peran Daerah dalam Skala Regional dan Nasional**, yang diwujudkan dalam rangka peningkatan kapasitas dan daya saing daerah dalam mendukung peran dan pengaruh Indonesia di dunia internasional. Perwujudan dari sasaran visi tersebut diupayakan melalui penguatan inovasi yang adaptif dan peran aktif daerah dalam membangun dimensi-dimensi pembangunan serta kolaborasi dan kerjasama multipihak baik skala Nasional maupun Internasional yang diukur melalui Indeks Daya Saing Daerah yang ditargetkan mencapai 4,5 - 5,0 (indeks).

Sasaran keempat, **Peningkatan daya saing sumber daya manusia** diwujudkan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang merata, adil dan inklusif melalui peningkatan pendidikan, pelatihan dan pengembangan sikap dan etos kerja, penguasaan teknologi dan inovasi dan kreativitas. Sasaran visi keempat akan dicapai melalui peningkatan Indeks Modal Manusia mencapai 0,71 ditahun 2045.

Sasaran kelima, dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang dicapai melalui upaya **Penurunan Intensitas emisi GRK menuju net zero emisi**. Sasaran visi kelima Gorontalo diwujudkan melalui intensitas Emisi GRK sebesar 98,77% dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup 87,77 di tahun 2045.









4.3 Misi

Perwujudan Visi Pembangunan 2045, Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan maka ditetapkan 8 Misi (Agenda Pembangunan) yang selaras dengan Misi Pembangunan Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 8 Misi Pembangunan terdiri atas :(1) Mewujudkan Transformasi Sosial, (2) Mewujudkan Transformasi Ekonomi, (3) Mewujudkan Transformasi Tata Kelola, (4) Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah (5) Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi (6) Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, (7) Mewujudkan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan ke (8) Mewujudkan kesinambungan

pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. 8 Misi Pembangunan tersebut dikemas kedalam 3 kerangka pembangunan yaitu : 1. Transformasi menuju Gorontalo Madani 2045, 2. Landasan Transformasi dan 3. Kerangka Implementasi dan Transformasi.

Gambar 4.1

Delapan Misi (Agenda) Pembangunan 2045

VISI GORONTALO 2045 : GORONTALO PROVINSI MADANI, YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN			
Transformasi Menuju Gorontalo Madani 2045			
	1. Mewujudkan Transformasi Sosial		2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi
			3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
Landasan Transformasi			
	4. Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
Kerangka Implementasi dan Transformasi			
	6. Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan		7. Memantapkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan
			8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk mengawal Pencapaian Indonesia Emas

Misi sebagai penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang memiliki makna yang penting. Setiap pernyataan misi dimaksudkan untuk mewujudkan visi sampai tahun 2045. Penjelasan masing-masing misi tersebut adalah :

Misi 1 : Mewujudkan Transformasi Sosial

Transformasi sosial merupakan agenda membangun sumber daya manusia Gorontalo yang sehat, cerdas, tangguh, memiliki pendidikan dan standar kompetensi yang tinggi, kompetitif dan berdaya saing, menjunjung nilai-nilai agama dan budaya serta meningkatkan perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat.



Misi 2 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Transformasi Ekonomi merupakan agenda Percepatan peningkatan produktivitas untuk mendorong peningkatan kontribusi lapangan usaha sektor manufaktur dan jasa dalam pembentukan struktur ekonomi Gorontalo. Optimalisasi sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui inovasi, penguasaan teknologi informasi dan komunikasi, penerapan ekonomi hijau dan ekonomi biru serta energi terbarukan yang ramah lingkungan.

Misi 3 : Mewujudkan Transformasi Tatakelola

Transformasi Tatakelola sebagai upaya peningkatan tata kelola yang kolaboratif, inovatif, profesional, dan adaptif dalam rangka mendorong peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan kinerja pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin akseleratif dan berdaya saing untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat dan kemajuan daerah.

Misi 4 : Memantapkan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah,

Pemantapan Keamanan Daerah Tangguh Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah merupakan landasan transformasi untuk mewujudkan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola. Landasan transformasi dibentuk melalui perwujudan supremasi hukum, stabilitas ekonomi daerah, kohesivitas sosial dan keamanan, serta demokrasi lokal yang semakin substantif untuk mengawal pembangunan agar berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan yang tangguh.

Misi 5 : Memantapkan Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi,

Ketahanan Sosial, Budaya dan Ekologi sebagai Landasan Transformasi dalam memperkuat ketangguhan individu yang memiliki agenda pembangunan untuk memantapkan masyarakat berkebudayaan maju dengan nilai kearifan yang lestari, pengamalan nilai agama untuk kemaslahatan, penguatan keluarga, komunitas masyarakat serta membentuk masyarakat yang inklusif, setara gender dan keluarga berkualitas. Landasan ketahanan ekologi berupaya untuk mewujudkan lingkungan hidup yang lestari, ketahanan energi, air dan kemandirian pangan. Pembangunan karakter dan lingkungan, mampu menyeimbangkan hubungan timbal balik antara sosial budaya dan ekologi. Mengoptimalkan modal sosial budaya agar tangguh dalam menghadapi dinamika pembangunan dan guncangan termasuk perubahan iklim dan bencana. Landasan ini sekaligus sebagai tonggak dalam perwujudan



Gorontalo sebagai Provinsi Madani yang memiliki kultur dan falsafah yang kuat serta mampu menyebarkan kultur sosial dan lingkungan didalamnya.

Misi 6 : Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan

Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan merupakan upaya dalam meningkatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai implementasi agenda transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola yang ditopang dengan landasan transformasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan serta ketahanan sosial budaya dan ekologi. Pembangunan wilayah dilaksanakan merata dan berkualitas di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo, baik di daratan, perbatasan, maupun di wilayah ruang laut. Pembangunan berkualitas yang merata sebagai wujud implementasi pengembangan wilayah yang mengedepankan nilai keadilan bagi seluruh rakyat.

Misi 7 : Memantapkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Memantapkan Sarana Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah yang memperhatikan aspek-aspek kualitas, kebermanfaatan dan aspek lingkungan, yang menjadi pilar dalam mewujudkan agenda transformasi.

Misi 8 : Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan untuk Mengawal Pencapaian Indonesia Emas

Kestinambungan Pembangunan sebagai wujud pelaksanaan kaidah pelaksanaan yang efektif serta pembiayaan pembangunan melalui upaya perencanaan, implementasi, pengendalian dan evaluasi yang sinergis melalui pendekatan holistik tematik, integratif, spasial, serta membangun koordinasi dan kolaborasi pembangunan yang didukung pendanaan pembangunan yang stabil, inovatif, serta kolaborasi sumber pendanaan pembangunan non-APBD.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Untuk Mencapai Visi Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan dan berkontribusi pada pencapaian Visi Negara Menuju Indonesia Emas 2045, maka Langkah pembangunan Gorontalo juga dilakukan dengan transformasi menyeluruh di semua bidang pembangunan. Upaya pencapaian visi tersebut diterjemahkan dalam 8 (delapan) misi, 17 (tujuh belas) arah kebijakan pembangunan dan 45 (empat puluh lima) indikator sasaran utama pembangunan.

Delapan misi pembangunan tersebut terdiri dari 3 (tiga) misi transformasi yang ditopang 2 (dua) misi landasan pelaksanaan transformasi pembangunan serta 3 (tiga) misi sebagai kerangka implementasi yang terjabarkan ke dalam 17 arah kebijakan pembangunan Gorontalo dua puluh tahun kedepan.

Tabel 5.1

Arah Kebijakan/Tujuan Pembangunan Provinsi Gorontalo 2025-2045

VISI :		
"Gorontalo Provinsi Madani yang Maju dan Berkelanjutan Untuk Indonesia Emas 2045"		
Landasan Pembangunan		
Mewujudkan Transformasi Sosial	Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola
<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesehatan Untuk Semua 2. Pendidikan Berkualitas 3. Perlindungan Sosial yang Adaptif 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi 5. Penerapan Ekonomi Hijau 6. Transformasi Digital 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global 8. Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi 	<ol style="list-style-type: none"> 9. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif
Keberhasilan transformasi pembangunan daerah perlu didukung oleh landasan pembangunan		
Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
<ol style="list-style-type: none"> 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial 11. Stabilitas Ekonomi Makro 12. Kerjasama Pembangunan 	<ol style="list-style-type: none"> 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju 14. Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif 15. Lingkungan Hidup Berkualitas 16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim 	
Kerangka Implementasi Transformasi		
Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan Kesenambungan pembangunan

Pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan pada Bab IV menjadi dasar bagi perumusan arah kebijakan Provinsi Gorontalo selama 20 tahun. Arah kebijakan pembangunan memberikan panduan tahapan pencapaian visi dan misi melalui 4 (empat) periode RPJMD di Provinsi Gorontalo yaitu periode I (2025-2030), Periode II (2030-2035), Periode III (2035-2040) dan Periode IV (2040-2045). Prioritas kebijakan pembangunan dalam setiap tahapan/periode dapat saja berbeda-beda, tetapi memiliki keselarasan dan kesinambungan pentahapan pembangunan yang dilakukan pada tiap 5 (lima) tahun selama 4 periode. Selanjutnya arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah menjadi fokus kebijakan 5 (lima) tahunan yang memberi panduan bagi pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Pembagian 4 (empat) periode dalam perumusan arah kebijakan pembangunan RPJPD Provinsi Gorontalo dituangkan dalam RPJMD I Tahun 2025–2030, RPJMD II Tahun 2030–2035, RPJMD III Tahun 2035–2040, dan RPJMD IV Tahun 2040–2045.

Pencapaian visi dan misi pembangunan 20 tahun dalam RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2005-2025 ditempuh melalui 4 (empat) tema besar pada masing-masing tahapan pembangunan :

Gambar 5.1

Pentahapan Implementasi RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045



Periode I (2025-2029)

Pelaksanaan Periode I RPJPD merupakan pelaksanaan penguatan pondasi transformasi pembangunan, pada tahap ini pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,7 persen per tahun. Tahapan awal ini diwujudkan melalui; Transformasi social focus pada pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social. Transformasi Ekonomi Fokus Pada Penguatan proses hilirisasi berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja. Transformasi tata Kelola focus pada kelembagaan tepat fungsi

dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada memperkuat supremasi hukum dan stabilitas daerah. Ketahanan social Budaya dan Ekologi Fokus pada penguatan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan.

Periode II (2030-2034)

Pelaksanaan Periode II RPJPD menjadi tahapan akselerasi dalam mewujudkan transformasi pembangunan. Di fase ini harapan pertumbuhan ekonomi semakin baik di kisaran 5,5 persen per tahun. Fase ini akan diwujudkan melalui; Transformasi social focus pada mempercepat pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif. Transformasi Ekonomi fokus pada Peningkatan produktivitas secara massif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi. Transformasi tata Kelola focus pada Sumber daya manusia ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, demokrasi yang lebih baik dan masyarakat sipil partisipatif. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada memantapkan supremasi hukum dan stabilitas daerah. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi focus pada memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan social ekonomi yang inklusif

Periode III (2034-2039)

Pelaksanaan Periode III RPJPD menjadi tahapan penguatan dan pemantapan pembangunan transformasi. Pada tahapan ini pertumbuhan ekonomi di prediksi berada dikisaran 5,8 persen pertahun yang akan diwujudkan melalui ; Transformasi social focus pada penguatan daya saing SDM dan kesejahteraan. Transformasi Ekonomi fokus pada Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta peningkatan ekspor. Transformasi Tata Kelola focus pada kelembagaan yang adaptif, Sumberdaya manusia ASN yang kompetitif, demokrasi yang lebih modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada Meneguhkan supremasi hukum dan stabilitas daerah Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi focus pada mewujudkan ketangguhan masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan.

Periode IV (2040-2045)

Periode terakhir RPJPD menjadi tahapan dalam upaya mewujudkan pembangunan transformasi Gorontalo untuk mendukung pencapaian Indonesia emas 2045. Pada tahap ini,

pertumbuhan ekonomi berada dikisaran 6,1 persen pertahun. Fase ini akan diwujudkan melalui ; Transformasi Sosial mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul. Transformasi Ekonomi fokus pada Perwujudan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat. Transformasi tata Kelola focus pada mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan focus pada mewujudkan Gorontalo sebagai daerah yang aman, damai dan berkontribusi dalam pembangunan nasional. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi focus pada mewujudkan Gorontalo sebagai daerah yang maju dan berkelanjutan Dalam mengimplementasikan fokus pembangunan tersebut, maka dirumuskan arah kebijakan dan Sasaran Pokok. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah disusun tidak lagi dengan pendekatan perbidang, namun mengedepankan agenda utama pembangunan yang lebih menjamin terlaksananya kolaborasi dalam pembangunan untuk mewujudkan Visi Misi Pembangunan jangka panjang daerah.

5.1.1 Mewujudkan Transformasi Sosial

Pembangunan Gorontalo dalam kurun waktu dua puluh tahun kedepan akan menghadapi perubahan besar, seperti perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim, pergeseran ekonomi dan kemajuan budaya. Untuk itu diperlukan Transformasi social dalam menghadapi tantangan yang lebih besar dan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi.

Tujuan Transformasi social adalah untuk mempercepat peningkatan taraf hidup manusia agar tercipta masyarakat Gorontalo yang lebih sejahtera, adil dan Makmur. Dengan demikian, transformasi social diarahkan untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam berbagai bentuk; memberikan pelayanan Kesehatan, gizi, Pendidikan, perlindungan social dan perlindungan dari kekerasan bagi setiap orang; mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang; menciptakan sumberdaya manusia yang berwawasan lingkungan untuk menciptakan masa depan Gorontalo yang berkelanjutan; meningkatkan peran agama dan kebudayaan untuk pembangunan dan membentuk keluarga berkualitas, kesetaraan gender serta masyarakat inklusif. Sebagai bentuk mewujudkan tercapainya misi transformasi social, maka arah pembangunannya diarahkan pada; Kesehatan untuk semua, Pendidikan yang berkualitas dan merata serta perlindungan social yang adaptif.

1. Kesehatan Untuk Semua

Kebijakan Pembangunan Kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat dan memperkuat system Kesehatan yang difokuskan pada: 1) Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat. 2)

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak. 3) Percepatan penanganan stunting dan percepatan eliminasi penyakit menular seperti HIV AIDS, tuberkolosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multisektor. 4) Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (mobile health services), khususnya untuk daerah kepulauan dan daerah terpencil dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam. 5) Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan daerah afirmasi. 6) Perluasan cakupan layanan kuratif. 7) Pengembangan transformasi sistem layanan kesehatan. 8) Pengembangan sistem telemedicine yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)

2. Pendidikan yang berkualitas dan merata

Kebijakan pembangunan Pendidikan diarahkan untuk mewujudkan Sumberdaya manusia Gorontalo yang unggul dan berdaya saing yang difokuskan pada: 1) Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya. 2) Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat kebecerjaan tinggi. 3) Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. 4) Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3. 5) Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahannya, serta ketertarikan dengan DUDI. 6) Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka. 7) Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk pengembangan lapangan kerja.

3. Perlindungan social yang adaptif

Kebijakan pembangunan perlindungan social yang adaptif bertujuan untuk mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif. Yang dilaksanakan melalui; 1) Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui

perlindungan sosial adaptif dan satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), 2) Perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal antara lain melalui peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas, 3) Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran 4) Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial, 5) Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim, 6) Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat – setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas, 7) Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T, 8) Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah, 9) Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan, dan 10) Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.

5.1.2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi

Pembangunan ekonomi kedepan juga menghadapi beberapa perubahan besar seperti perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan iklim serta geopolitik dan geoekonomi yang mengalami pergeseran. Pembangunan ekonomi Gorontalo kedepan akan diupayakan untuk memberikan kontribusi pada pembangunan ekonomi nasional untuk dapat keluar dari *Middle Income Trap*, sehingga diperlukan transformasi ekonomi dari yang berbasis pada komoditas yang bernilai tambah rendah bergeser pada perkembangan industry dengan teknologi dan inovasi sehingga lebih produktif, efisien dan berdaya saing tinggi.

Transformasi ekonomi akan dilakukan melalui beberapa kebijakan, sebagai berikut :

1. Pembangunan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

Kebijakan pembangunan Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi bertujuan untuk terus mempercepat produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya. 2) Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya). 3) Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah. 4) Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism). 5) Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif. 6) Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan potensi unggulan. 7) Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah seperti pengembangan ekonomi maritim di wilayah Laut Sulawesi dan Teluk Tomini, 8) Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif. 9) Peningkatan produktivitas BUMD. 10) Pengembangan Hilirisasi peningkatan nilai tambah Sektor Pertambangan, antara lain dengan pembangunan smelter. 11) Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan. 12) Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah. 13) Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan. 14) Peningkatan pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri. 15) Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung. 16) Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. 17) Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha. 18) Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja. 18) Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.

2. Penerapan Ekonomi Hijau

Kebijakan pembangunan Penerapan ekonomi hijau bertujuan agar pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan. 2) Mendorong penerapan ekonomi sirkuler. 3) Pengelolaan lahan pertanian dan kehutanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan. 4) Mendorong perwujudan investasi hijau di berbagai sektor. 5) Mendorong Inovasi dan Membangun Kemitraan antar pihak dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau, dan 6) Mendorong Pemeliharaan dan Pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian dari peningkatan koridor hijau dan perlindungan aset biodiversitas.

3. Pembangunan Transformasi Digital

Kebijakan pembangunan transformasi digital ditujukan untuk mendukung perwujudan transformasi ekonomi. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. 2) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran). 3) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital

skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

4. Integrasi ekonomi domestic dan global

Kebijakan pembangunan Integrasi ekonomi domestic dan global ditujukan untuk mendorong peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok nasional. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Penguatan Integrasi konektivitas antar Kawasan pertumbuhan ekonomi. 2) Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang efisien seperti Kawasan Industri, Kawasan ekonomi Khusus. Kawasan strategis pariwisata. 3) Mendorong Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas darat, laut dan udara. 4) Peningkatan pangsa ekspor barang komoditi unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi di pasar global.

5. Pembangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Kebijakan pembangunan Perkotaan dan Perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mengembangkan wilayah perkotaan sebagai hub ekonomi nasional, dan mendorong perdesaan yang maju dan bertransformasi menjadi perkotaan. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Menerapkan pembangunan perkotaan dan perdesaan dan pedesaan yang inklusif, berkelanjutan dan berbudaya dengan membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi, Transportasi multimoda, pengelolaan sampah dan limbah, Pendidikan dan Kesehatan berbasis akses pada platform pembelajaran digital dan akses online pada pelayanan Kesehatan terpadu serta mendorong budaya yang disiplin dan sehat. 2) Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan, dan 3) Mendorong perwujudan kota hijau melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial.

5.1.3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola

Transformasi tata Kelola memegang peranan penting dalam pengelolaan sector public dalam rangka mewujudkan pemerintah yang bekerja lebih efektif, efisien, akuntabel dan mematuhi kerangka hukum. Untuk mewujudkan transformasi tata Kelola dilakukan melalui arah kebijakan berikut.

1. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif

Kebijakan pembangunan Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif dilakukan melalui; 1) Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah. 2) Peningkatan kualitas produk hukum daerah. 3) Peningkatan

partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4) Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 5) Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 6) Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 7) Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 8) Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 9) Penguatan integritas partai politik.

5.1.4 Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah

Keamanan dan ketertiban daerah dengan demokrasi yang berintegritas serta stabilitas ekonomi daerah yang terjaga menjadi landasan dalam mendukung transformasi pembangunan di daerah, untuk mewujudkannya dilakukan melalui arah kebijakan berikut.

1. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial

Kebijakan pembangunan Hukum dan Keamanan Daerah ditujukan untuk menciptakan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, menciptakan keamanan dan ketertiban daerah. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Penguatan dukungan kerja sama antarnegara dengan Malaysia dan Filipina dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme. 2) Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. 3) Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan laut. 4) Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan.

2. Stabilitas Ekonomi Makro

Pembangunan stabilitas makro diarahkan untuk mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. 2) Penguatan

pengendalian inflasi daerah. 3) Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.

3. Kerjasama Pembangunan

Kebijakan Kerjasama pembangunan untuk memantapkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional maupun internasional dalam mendukung pelaksanaan dan ketersediaan sumber pendanaan pembangunan, melalui; 1) penguatan Kerjasama untuk mendukung perluasan investasi dan ekspor. 2) meningkatkan Kerjasama dalam menjaga stabilitas daerah dan Kawasan. 3) Penguatan dan perluasan Kerjasama ekonomi skala regional, nasional maupun internasional.

5.1.5 Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan social budaya dan ekologi menjadi landasan pembangunan yang penting untuk menjamin terwujudnya transformasi pembangunan social, ekonomi dan tata Kelola. Arah pembangunan ini ditujukan untuk membangun ketangguhan masyarakat dalam menjaga alam dan lingkungannya agar tercipta keseimbangan dalam menghadapi berbagai perubahan, agar daya dukung dan daya tampung lingkungan terus terjaga secara berkelanjutan dan masyarakat dapat hidup berkualitas. Dalam mewujudkan ketahanan social budaya dan ekologi dilakukan melalui kebijakan berikut.

1. Kehidupan Beragama maslahat dan berkebudayaan maju

Kebijakan pembangunan ini di tujukan untuk memperkuat peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal pembangunan Pengembangan kearifan lokal dan. Kebijakan ini dilakukan melalui; 1) Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama. 2) Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal dan warisan budaya berlandaskan falsafah *adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah*, serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.

2. Pembangunan Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif

Kebijakan pembangunan ini ditujukan untuk meningkatkan ketangguhan masyarakat, keluarga dan individu untuk memastikan terbentuknya sumberdaya manusia yang berkualitas sebagai pelaku pembangunan, yang di fokuskan melalui; 1) Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. 2) Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. 3) Pemberdayaan

perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. 4) Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah.

3. Pembangunan Berketahanan energi, Air dan kemandirian pangan

Arah Kebijakan pembangunan ini ditujukan untuk memastikan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air, yang dilakukan melalui; 1) Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. 2) Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting. 3) Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai. 4) Pengembangan Flood Forecasting Warning System. 5) Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi. 5) Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energy-Water (FEW) Nexus.

4. Lingkungan hidup berkualitas

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup berkualitas bertujuan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan yang dilakukan dengan kebijakan; 1) Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, terutama pengolahan sampah, limbah domestik/industri diantaranya upaya konservasi TPA dan pembangunan dan pengelolaan limbah B3. 2) Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (*home range*) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya anoa, babi rusa dan maleo. 3) Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air minum yang aman dan layak, 4) Penguatan Konservasi air dan tanah melalui pengelolaan Pertanian Berkelanjutan, 5) Penguatan Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Di Lokasi Pertambangan, 6) Reklamasi dan restorasi lahan pasca pertambangan.

5. Resilience terhadap bencana dan perubahan iklim

Arah kebijakan pembangunan ini bertujuan untuk mencapai penurunan emisi GRK serta menerapkan pembangunan yang Transportasi iklim, melalui kebijakan; 1) Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim. 2) Penerapan teknologi

climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas. 3) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim. 4) Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim. 5) Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energy-Water (FEW) Nexus, 6) Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan, 7) Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, 8) Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), 9) Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana, 10) Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan, 11) Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat.

5.1.6 Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Dalam mewujudkan pembangunan kewilayahan yang ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pengurangan kesenjangan antar wilayah serta kelompok pendapatan yang merupakan pelaksanaan dari misi transformasi ekonomi, transformasi social dan transformasi tata Kelola yang didukung oleh landasan Transportasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan serta ketahanan social budaya dan ekologi akan dilakukan melalui; 1) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem. 2) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut. 3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria. 4) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Sulawesi untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi, terutama Pelabuhan Gorontalo/Anggrek (Gorontalo) sehingga dapat berperan sebagai hub komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia. 5) Pemanfaatan ALKI II dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global. 6) Dukungan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi. 7) Dukungan pengembangan Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo dan integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas. 8) Penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara).

9) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang.

5.1.7 Mewujudkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan





Dalam melaksanakan perwujudan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan untuk mendukung agenda transformasi social kebijakan yang dilakukan adalah; 1) Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif. 2) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim. 3) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik. 4) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh. 5) Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi. 6) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah. 7) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan. 8) Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal. 9) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum. 10) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman. 11) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah. 12) Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).

5.1.8 Mewujudkan kesinambungan pembangunan

Arah kebijakan kesinambungan pembangunan diarahkan melalui; 1) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah. 2) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi. 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas nasional. 4) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko. 5) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan. 6) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance. 7) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

Tabel 5.2

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah per Periode Pembangunan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
AGENDA PEMBANGUNAN					
GORONTALO, PROVINSI MADANI YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	1 Mewujudkan Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar Kesehatan, Pendidikan dan perlindungan social yang inklusif.	Mempercepat pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif.	Penguatan daya saing SDM dan kesejahteraan.	Mewujudkan masyarakat Gorontalo yang unggul.
	2 Mewujudkan Transformasi Ekonomi	Penguatan proses hilirisasi berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja.	Peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	Pemantapan struktur perekonomian yang berkualitas berbasis Sumberdaya Alam (SDA) serta peningkatan eksport. lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Perwujudan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan dengan pendapatan masyarakat yang meningkat.
	3 Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan public, peningkatan demokrasi dan pemberdayaan masyarakat sipil.	Sumber daya manusia ASN yang berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif, demokrasi yang lebih baik dan masyarakat sipil partisipatif.	Kelembagaan yang adaptif, Sumberdaya manusia ASN yang kompetitif, demokrasi yang lebih modern, regulasi adaptif dan masyarakat sipil mandiri.	Mewujudkan regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan adaptif.

	4	Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penguatan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Penegakan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah.	Pemantapan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Mewujudkan Gorontalo sebagai daerah yang aman, damai dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.
	5	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai landasan pelaksanaan pembangunan	Memantapkan ketahanan social budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan social ekonomi yang inklusif	Mewujudkan ketangguhan masyarakat beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai perubahan	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi focus pada mewujudkan Gorontalo sebagai daerah yang maju dan berkelanjutan
	6	Mewujudkan Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI			
	7	Mewujudkan Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan				
	8	Mewujudkan Kesenambungan pembangunan				

5.2 Sasaran Pokok

Penjabaran 17 Arah Kebijakan Pembangunan Daerah, diwujudkan kedalam sasaran pokok dan indikator pembangunan daerah yang menjadi landasan dan ukuran ketercapaian pembangunan Visi Misi Pembangunan Daerah 2025-2045. Ukuran pencapaian yang tergambarkan dari indikator sasaran pembangunan daerah telah selaras dan mendukung pencapaian Visi Misi Indonesia Emas 2045 yang terdiri dari 45 indikator utama pembangunan.

Tabel 5.3
Kebijakan dan Sasaran Pokok Pembangunan RPJPD

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
MISI 1	MEWUJUDKAN TRANSFORMASI SOSIAL			
IE1	Kesehatan untuk semua	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penguatan Sistem Kesehatan		
	1. Perluasan upaya promotif, preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	1. Usia Harapan Hidup	71,14	76,65
	2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2. Kesehatan Ibu dan Anak		
	3. Percepatan penanganan stunting dan percepatan eliminasi penyakit menular seperti HIV AIDS, tuberkolosis, malaria (ATM) melalui pendekatan integrasi multisektor	a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	200	22
	4. Penyediaan pelayanan kesehatan bergerak (<i>mobile health services</i>), khususnya untuk daerah kepulauan dan daerah terpencil dengan moda yang sesuai dengan karakteristik alam.	b. Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,8	7,0
	5. Perkuatan pemenuhan tenaga medis dan kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif dan afirmasi pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan dari masyarakat lokal terutama di daerah sulit akses dan daerah afirmasi.	3. Penanganan Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):		
	6. Perluasan cakupan layanan kuratif	a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (<i>treatment coverage</i>) (%)	95	95
	7. Pengembangan transformasi sistem layanan kesehatan	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91,14	98,00
		4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
	8. Pengembangan sistem <i>telemedicine</i> yang didukung oleh peningkatan cakupan jaminan sosial (kesehatan dan ketenagakerjaan)			
IE2	Pendidikan berkualitas yang merata	Mewujudkan Sumberdaya manusia Gorontalo yang unggul dan berdaya saing		
	1. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun prasekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dan kualitasnya	5. Hasil Pembelajaran		
	2. Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan dan antardaerah untuk memastikan lulusan dengan kualitas yang setara dan tingkat ke bekerjaan tinggi	a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca - Numerasi	0,00 – 16,67 0,00 – 16,67	66,67 – 66,67 66,67 – 66,67
	3. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi, serta pengadaan prodi perguruan tinggi (STEAM) yang sesuai dengan potensi unggulan wilayah seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata	b. Persentase Satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesment tingkat nasional untuk : - Literasi Membaca - Numerasi	21,73 – 23,73 14,93 – 16,93	62,50 – 64,50 56,73 – 58,73
	4. Penguatan pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif, serta dukungan peningkatan proporsi dosen kualifikasi Strata-3.	c. Rata-rata Lama Sekolah penduduk Usia diatas 15 Tahun	8,74 – 8,75	11,06 – 11,11
	5. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan vokasi sesuai dengan potensi ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahannya, serta ketertarikan dengan DUDI.	d. Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,38 – 13,39	14,80 – 14,86
	6. Penyediaan afirmasi akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan TIK yang menjangkau daerah terpencil, penyediaan asrama siswa dan guru, dan penguatan sekolah terbuka.	6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,84	12,84 – 16,09
	7. Pembangunan ekosistem riset dan inovasi, serta ekosistem pariwisata yang berbasis digital untuk pengembangan lapangan kerja.	7. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	78,14	85,00
IE3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif		
		8 Tingkat Kemiskinan	14,21 -14,50	0,1 – 1,10

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengentasan kemiskinan terutama pada perdesaan dan daerah afirmasi melalui perlindungan sosial adaptif, pemberdayaan ekonomi berbasis satu sistem Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek). 2. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu, serta bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas. 3. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran 4. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDes, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial. 5. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim. 6. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat – setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas. 7. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif, terutama untuk daerah 3T. 	9	51,00	91,99
	10	15	45

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045	
	<p>8. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</p> <p>9. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.</p> <p>10. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan</p>				
MISI 2	MEWUJUDKAN TRANSFORMASI EKONOMI				
IE4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi dan inovasi			
	<p>1. Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian dan perikanan yang berkelanjutan, serta pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.</p> <p>2. Penumbuhan dan peningkatan kapasitas emerging sectors (bioekonomi dan bioteknologi, pendidikan dan riset, serta manajemen sumber daya).</p> <p>3. Peningkatan peran pusat-pusat pertumbuhan untuk pengembangan produk unggulan dalam mendukung pengembangan wilayah.</p> <p>4. Peningkatan nilai tambah dan penerapan pariwisata berkelanjutan termasuk pengembangan wilayah konservasi alam sebagai sumber pertumbuhan ekonomi (eco-tourism).</p> <p>5. Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.</p> <p>6. Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan potensi unggulan, melalui pengembangan Digitalisasi UMKM.</p> <p>7. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah seperti pengembangan ekonomi maritim di wilayah Laut Sulawesi dan Teluk Tomini</p> <p>8. Penguatan kemandirian pangan dan ketahanan air, antara lain melalui pertanian regeneratif</p> <p>9. Peningkatan produktivitas BUMD.</p> <p>10. Pengembangan Hilirisasi peningkatan nilai tambah Sektor Pertambangan, antara lain dengan pembangunan smelter.</p>	11	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,42 – 5,92	6,00 – 7,14
		12	Pengembangan Pariwisata		
		a.	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,36	4,01
		b.	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	2,94	7,35
		13	Nilai Investasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	120 Miliar Rp	1,9 Triliun Rp
		14	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
		a.	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	8,12	9,84
		b.	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	0,62	1,21
		c.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	3,38	9,58
		d.	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	0,80	4,33
		e.	Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,41	4,68
		15	Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
		a.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,87 – 3,08	1,93 – 2,94
		b.	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	65
		16	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,37	67,40

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045
	<p>11.Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.</p> <p>12.Penguatan ekonomi dan keuangan syariah dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal, di antaranya melalui penguatan ekosistem industri halal, penguatan rantai nilai industri halal, penguatan kewirausahaan dan UMKM industri halal, dan perluasan infrastruktur ekonomi dan keuangan syariah</p> <p>13.Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja, terutama di bidang pariwisata, pertanian, perikanan, dan industri pengolahan.</p> <p>14.Peningkatan pengembangan IPTEKIN menuju komersialisasi oleh industri</p> <p>15.Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.</p> <p>16.Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</p> <p>17.Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</p> <p>18.Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di KI, KEK, dan kawasan strategis lainnya, khususnya untuk pekerja.</p> <p>19.Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</p>	17	a. Indeks Daya Saing Digital	40	70
			b. Indeks Inovasi Daerah	50,42	84
IE5	Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk menjamin keberlanjutan			
18	<p>1. Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi pembangkit fosil melalui cofiring dan peralihan menjadi pembangkit terbarukan; (iii) pengembangan sistem</p>	18	Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
			a. Indeks Ekonomi Hijau Daerah	78,52	94,81
			b. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)	16,43	74,32

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045
	<p>interkoneksi untuk meningkatkan kestabilan dan keandalan pasokan listrik; (iv) pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (smart grid) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; (v) pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (isolated mini/micro-grid) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas; (vi) pengembangan sistem penyimpanan/ cadangan energi; (vii) perluasan pemanfaatan elektrifikasi rumah tangga dan sektor transportasi; (viii) pengembangan penelitian dan pengembangan serta kapasitas SDM ketenagalistrikan bersertifikat; dan (ix) pengembangan skema pendanaan dan pembiayaan serta kebijakan subsidi tepat sasaran serta tarif dan harga listrik yang berkelanjutan</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan ekonomi sirkular Pengelolaan lahan pertanian dan kehutanan serta produk-produk turunannya secara berkelanjutan Mendorong perwujudan investasi hijau di berbagai sektor Mendorong Inovasi dan Membangun Kemitraan antar pihak dalam pelaksanaan Ekonomi Hijau Mendorong Pemeliharaan dan pemanfaatan hutan lestari sebagai bagian dari peningkatan koridor hijau dan perlindungan aset biodiversitas 				
IE6	Tranformasi Digital	Mewujudkan Transformasi Digital yang mendukung Transformasi Ekonomi			
	<ol style="list-style-type: none"> Penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan 	19	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	7,5

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045
	SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).				
IE7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Mewujudkan peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok nasional			
	1. Penguatan Integrasi konektivitas antar Kawasan pertumbuhan ekonomi	20	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	0,43	0,42
	2. Penciptaan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang efisien seperti Kawasan Industri, Kawasan ekonomi Khusus. Kawasan strategis pariwisata	21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	27,85	29,59
	3. Mendorong Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur konektivitas darat, laut dan udara	22	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	2,10	4,05
	4. Peningkatan pangsa ekspor barang komoditi unggulan daerah yang bernilai tambah tinggi di pasar global				
IE8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Mewujudkan pengembangan wilayah perkotaan dan perdesaan sebagai sub ekonomi nasional			
	1. Menerapkan pembangunan perkotaan dan perdesaan yang inklusif, berkelanjutan dan berbudaya dengan membangun perumahan layak huni, air minum siap konsumsi, Transportasi multimoda, Pendidikan dan Kesehatan berbasis akses pada platform pembelajaran digital dan akses online pada pelayanan Kesehatan terpadu serta mendorong budaya yang disiplin dan sehat.	23	Kota dan Desa Maju, Inklusif dan Berkelanjutan		
			a. Proporsi Kontribusi PDRB Provinsi terhadap Nasional	0,25	0,18 – 0,3
			b. Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	78,91	100
			c. Persentase Desa Mandiri (%)	0,91	10,65
	2. Pengembangan infrastruktur jalan, jembatan dalam menunjang aksesibilitas perdesaan dan perkotaan				
	3. Mendorong perwujudan kota hijau melalui peningkatan efisiensi dan pemanfaatan energi baru terbarukan, penerapan prinsip rendah karbon di pemukiman, perkantoran, bisnis dan komersial				
MISI 3	MEWUJUDKAN TRANSFORMASI TATA KELOLA				
IE9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif			
	1. Optimasi dan harmonisasi regulasi, termasuk proses praregulasi yang memadai di daerah.	24	Indeks Reformasi Hukum	70	100
	2. Peningkatan kualitas produk hukum daerah	25	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65	5,00
		26	Indeks Pelayanan Publik	4,31	5,00

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045
	<ol style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. 4. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat. 5. Pengembangan smart government serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah. 6. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. 7. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi. Transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa; serta transparansi layanan perizinan berbasis digital. 8. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi. 9. Penguatan integritas partai politik. 	27	Indeks Integritas Nasional	74,77	89,99
MISI 4 MEWUJUDKAN KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH					
IE10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, menciptakan keamanan dan ketertiban daerah			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan dukungan kerja sama antarnegara dengan Malaysia dan Filipina dalam pencegahan dan penanggulangan ancaman terorisme. 2. Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal. 3. Pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pengawasan keamanan di wilayah perbatasan laut. 4. Penguatan lembaga demokrasi melalui perbaikan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada, penguatan komunikasi publik, kesetaraan dan kebebasan 	28	a. Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	100
			b. Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	85
		29	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,72	69,1
		30	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045	
IE11	Stabilitas Ekonomi Makro	Mewujudkan kesinambungan fiskal dan meningkatkan kemandirian daerah				
	<p>1. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem dan pasar karbon, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional.</p> <p>2. Penguatan pengendalian inflasi daerah.</p> <p>3. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</p>	31	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,6	4,5	
		32	Tingkat Inflasi (%)	2,6 – 3,3	0,9 – 2,7	
		33	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan			
		a.	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)		13,15	73,20
		b.	Aset Dana Pensiun / PDRB (%)		0,15	11,94
		c.	Nilai Transaksi Saham per Kapita/Provinsi (Rp)		622.723,5	6.333.113,48
		d.	Total Kredit/PDRB		36,5	68,0
		34	Inklusi Keuangan (%)	94,46	99,04	
IE12	Kerjasama Pembangunan	Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional maupun internasional				
	<p>Kebijakan Kerjasama pembangunan akan dioptimalkan untuk memantapkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional maupun internasional dalam mendukung pelaksanaan dan ketersediaan sumber pendanaan pembangunan, melalui; 1) penguatan Kerjasama untuk mendukung perluasan investasi dan ekspor. 2) meningkatkan Kerjasama dalam menjaga stabilitas daerah dan Kawasan. 3) Penguatan dan perluasan Kerjasama ekonomi skala regional, nasional maupun international.</p>	35*	Jumlah Kerjasama antar Daerah dan Internasional	32	92	
		36*	Nilai Investasi : - Penanaman Modal Asing (PMA) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)		500,8 M	1,200 T
				5,014 T	9,000 T	
MISI 5	MEWUJUDKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI					
IE13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Mewujudkan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal pembangunan Pengembangan kearifan lokal				
	<p>1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.</p> <p>2. Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan local dan warisan budaya berlandaskan falsafah <i>adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah</i> serta pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak.</p>	37	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,62 – 53,67	62,40 – 62,86	
		38	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,96 – 74,00	81,04 – 81,44	

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045
IE14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif			
	1. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	39	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,78 – 66,79	71,54 – 71,59
	2. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang	40	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,371 – 0,369	0,174 – 0,152
	3. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.				
	4. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan wilayah				
IE15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Mewujudkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
	1. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, terutama pada pengelolaan sampah, limbah domestik/industri diantaranya upaya konservasi TPA dan pembangunan dan pengelolaan limbah B3	41	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	0,524	0,611
	2. Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi di antaranya anoa, babi rusa dan maleo.	42	Kualitas Lingkungan Hidup		
	3. Peningkatan pengelolaan sanitasi dan air minum yang aman dan layak		a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	81,48	87,77
	4. Penguatan Konservasi air dan tanah melalui pengelolaan Pertanian Berkelanjutan,		b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	4,14	50,00
	5. Penguatan Pengendalian dan Pencegahan Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Di Lokasi Pertambangan,		c. Pengelolaan Sampah		
	6. Reklamasi dan restorasi lahan pasca pertambangan.		- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	14	90,00
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	23	100
IE16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air			

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah		Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan		Baseline 2025	Target 2045
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat. 2. Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting 3. Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai. 4. Pengembangan <i>Flood Forecasting Warning System</i> 5. Perlindungan pulau-pulau kecil dan pesisir dari risiko abrasi 	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan		
			a. Ketahanan Energi		
			- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	1.100	3.425
			- Intensitas Energi Primer (SBM.Rp Milyar)	72	55
			b. Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	13,57	0,82
			c. Ketahanan Air		
			- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	0,68	1,62
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan Terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,33	100
IE17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Mewujudkan Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim 2. Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas. 3. Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim. 4. Peningkatan upaya pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim. 5. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu Food, Energy-Water (FEW) Nexus 6. Diversifikasi pangan termasuk untuk meningkatkan derajat kesehatan. 7. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, dan wilayah jelajah satwa spesies dilindungi. 8. Penguatan efektivitas Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) 	44	Indeks Resiko Bencana (IRB)	120,61	98,29 – 79,24
		45	Persentase Penurunan Emisi GRK (%)		
			a. Kumulatif	21,05	49,72
	b. Tahunan	35,1	91,63		

Misi/Arah Pembangunan/Kebijakan Transformasi Daerah	Sasaran Pokok dan Indikator Utama Pembangunan	Baseline 2025	Target 2045
9. Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pascabencana. 10. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan 11. Pemanfaatan dan penguatan teknologi berbasis tanggap bencana, serta peningkatan kapasitas kesiapsiagaan masyarakat.			

Sumber : SEB Bappenas, Kemendagri Tahun 2023 (diolah)

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah, dijabarkan kedalam 4 periodisasi pembangunan jangka menengah daerah, sebagai berikut :

Tabel 5.4
Sasaran Pokok, Indikator Pembangunan dan Target Pembangunan per periodisasi Pembangunan

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET			
					I	II	III	IV
I. Mewujudkan Transformasi Sosial	1. Kesehatan untuk semua	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Penguatan Sistem Kesehatan	1. Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	71,14	72,2	74,6	75,3	76,65
			2. Kesehatan Ibu dan Anak					
			a. Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	200	143	112	68	22
			b. Prevalensi Stunting pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	23,8	16,0	11,0	9,0	7,0
			3. Penanganan Tuberkulosis					
			a. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis	95	95	95	95	95

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET			
					I	II	III	IV
			(<i>treatment coverage</i>) (%)					
			b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (<i>treatment success rate</i>) (%)	91,14	93	95	97	98
			4. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5
	2. Pendidikan berkualitas yang merata	Mewujudkan Sumberdaya manusia Gorontalo yang unggul dan berdaya saing	5. Hasil Pembelajaran:					
a. Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi pada assessmen tingkat Nasional								
- Literasi Membaca			0,00 – 16,67	16,67-28,67	28,67-45,67	45,67-66,67	66,67-66,67	
- Numerasi			0,00 – 16,67	16,67-28,67	28,67-45,67	45,67-66,67	66,67-66,67	
b. Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk:								
- Literasi Membaca	21,73-23,73	21 – 35	35 – 42	42 – 60	62,50-64,50			
- Numerasi	14,93-16,93	17 – 24	24 – 39	39 - 56	56,73-58,73			
			c. Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	8,74-8,75	8,75-9,25	9,25-10,15	10,15-11,06	11,06-11,11
			d. Harapan Lama Sekolah	13,38-13,39	13,39-13,92	13,92-14,12	14,12-14,80	14,80-14,86

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET							
					I	II	III	IV				
			6.	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	12,84	12,84-16,09	12,84-16,09	12,84-16,09	12,84-16,09			
			7.	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	78,14	80,00	81,50	83,50	85,00			
			3.	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Mewujudkan percepatan penuntasan kemiskinan dan meningkatkan cakupan perlindungan social bagi seluruh penduduk Gorontalo secara berkeadilan dan inklusif	8.	Tingkat Kemiskinan (%)	14,21-14,50	11,10-12,50	9,2-10,15	6,7 – 7,9	0,10 – 1,10
			9.	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)	51,00	68,00	79,00	84,00	91,99			
			10.	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	15	21	29	36	45			
II. Mewujudkan Transformasi Ekonomi	4. Pembangunan Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi	Mewujudkan percepatan produktivitas sektor-sektor ekonomi dengan penerapan ilmu, teknologi dan inovasi	11.	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	4,42-5,92	4,8 – 5,94	4,9 – 5,1	5,1 – 6,0	6,0 – 7,14			
			12.	Pengembangan Pariwisata :								
			a)	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	2,36	2,91	3,43	3,80	4,01			
			b)	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)	2,94	3,4	4,7	5,6	7,35			
			13.	Nilai Investasi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (%)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
			14.	Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN								

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET			
					I	II	III	IV
			a. Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi (%)	8,12	8,46	8,93	9,21	9,84
			b. Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	0,62	0,73	0,89	1,02	1,21
			c. Rasio Kewirausahaan Provinsi	3,38	4,54	6,72	7,93	9,58
			d. Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	0,80	1,21	2,68	3,97	4,33
			e. Return on Aset (ROA) BUMD (%)	1,41	2,67	3,11	3,95	4,68
			15. Persentase Lapangan Kerja yang Baik					
			a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,87 – 3,08	2,6 – 3,05	2,4 – 3,02	2,1 – 2,98	1,93-2,94
			b. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	35	45	52	59	65
			16. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	56,37	58,4	60,5	63,5	67,40
			17. Indeks Daya Saing Digital	40	45	56	63	70
			Indeks Inovasi Daerah	50,42	62	74	79	84
	5. Mewujudkan Penerapan Ekonomi Hijau	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi sejalan dengan meningkatnya daya dukung dan daya tampung lingkungan	18. Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					
			a) Indeks Ekonomi Hijau	78,52	81,34	85,42	90,21	94,81
			b) Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	16,43	24,32	39,56	53,21	74,32

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET				
					I	II	III	IV	
		untuk menjamin keberlanjutan							
	6. Pembangunan Tranformasi Digital	Mewujudkan Transformasi Digital yang mendukung Transformasi Ekonomi	19. Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	5,7	5,9	6,4	7,1	7,5	
	7. Integrasi ekonomi domestic dan global	Mewujudkan peningkatan produktivitas perekonomian daerah yang terintegrasi dan mendukung partisipasi dalam rantai pasok nasional	20. Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Provinsi	0,43	0,42	0,42	0,42	0,42	
21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)			27,85	28,15	28,82	29,10	29,59		
22. Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)			2,10	2,5	3,0	3,5	4,05		
	8. Pembangunan Perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Mewujudkan pengembangan wilayah perkotaan sebagai sub ekonomi nasional dan transformasi perdesaan yang maju dan inklusif	23. Kota dan Desa Maju Inklusif dan Berkelanjutan						
			a) Proporsi kontribusi PDRB Provinsi Gorontalo terhadap Nasional	0,25	0,23	0,21	0,20	0,18	
			b) Rumah Tangga Dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)	78,91	81,7	89,9	94,5	100	
			c) Persentase Desa Mandiri (%)	0,91	2,4	4,6	6,8	10,65	
Mewujudkan Transformasi Tata Kelola	9. Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif	Mewujudkan Regulasi dan tata Kelola yang berintegritas dan Adaptif	24. Indeks Reformasi Hukum	70	79	86	95	79,4	
			25. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,65	3,97	4,25	4,7	5,00	

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET					
					I	II	III	IV		
Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi substansial dan Stabilitas Ekonomi Daerah	10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah dan Demokrasi Substansial	Mewujudkan hukum yang berkeadilan dan berkepastian, menciptakan keamanan dan ketertiban daerah	26.	Indeks Pelayanan Publik	4,31	4,5	4,7	4,9	5,00	
			27.	Indeks Integritas Nasional	74,7	78,00	80,00	85,00	89,99	
			28.	a.	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	70	79	86	95	100
				b.	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM	65	70	75	80	85
			29.	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)	51,72	53,21	58,43	65,42	69,1	
			30.	Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi	Tinggi	
	11. Meningkatkan Stabilitas Ekonomi Makro	Mewujudkan kesinambungan fiscal dan meningkatkan kemandirian daerah	31.	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	1,6	2,4	3,6	4,0	4,5	
			32.	Tingkat Inflasi (%)	2,6 – 3,3	2,4 – 2,8	2,0 – 2,4	1,8 – 2,2	0,9 – 2,7	
			33.	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan						
				a)	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	13,15	42,98	53,64	67,37	73,2
				b)	Aset Dana Pensiun / PDRB (%)	0,15	3,4	6,7	8,4	11,94
				c)	Nilai Transaksi Saham per Kapita/Provinsi (Rp)	611.723,5	2.051.571,00	3.480.418,49	4.909.265,99	6.338.113,48
			d)	Total Kredit/PDRB (%)	36,5	40,24	48,45	56,72	68,0	

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET			
					I	II	III	IV
			e) Tingkat Inklusi Keuangan per Provinsi (%)	94,46	95	96	97	99,04
	12. Kerjasama Pembangunan Daerah	Mewujudkan kepemimpinan yang lebih proaktif dalam membangun kerjasama regional, nasional maupun internasional	35. Jumlah Kerjasama Antar Dalam Negeri dan Internasional	32	47	62	77	92
			36. Nilai Investasi : - Penanaman Modal Asing (PMA) - Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	500,8 Milyar 5,014 T	780 Milyar 6.000 T	820 Miliar 7.000 T	970 Miliar 8.000 T	1.200 Miliar 9.000 T
Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13. Meningkatkan kehidupan Beragama masalah dan berkebudayaan maju	Mewujudkan penguatan peran agama sebagai landasan spiritual, etika, moral dan modal pembangunan Pengembangan kearifan lokal	37. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	53,62-53,67	53,67-55,12	55,12-59,73	59,73-62,40	62,40-62,86
			38. Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73,96-74,00	74,00-76,00	76,00-79,00	79,00-81,00	81,04-81,44
	14. Mewujudkan pembangunan Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Meningkatnya kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	39. Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	66,78-66,79	67 – 68	69-70	70-71	71,54-71,59
			40. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,371-0,369	0,349-0,321	0,310-0,246	0,223-0,192	0,174-0,152
	15. Mewujudkan Lingkungan hidup berkualitas	Mewujudkan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	41. Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Daerah	0,524	0,56	0,58	0,60	0,611
42. Kualitas Lingkungan Hidup								

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET			
					I	II	III	IV
			a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	81,48	84,1	85,1	86,3	87,77
			b. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	4,14	20,00	30,00	40,00	50,00
			c. Pengelolaan Sampah					
			- Timbulan sampah terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah	14,00	25,00	50,00	75,00	90,00
			- Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Pengumpulan Sampah	23	35,00	55,00	75,00	100
	16. Mewujudkan pembangunan Berketahanan energi, Air dan kemandirian pangan	Mewujudkan kemandirian pangan yang didukung dengan ketahanan energi dan air	43	Ketahanan Energi, Air dan Pangan				
			a) Ketahanan Energi					
			- Konsumsi Listrik per kapita (KWH)	1.100	2.200	2.800	3.100	3.425
			- Intensitas energi primer (SBM/Rp Milyar)	72	68	63	59	55
			b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (<i>Prevalence of Undernourishment</i>) (%)	13,57	11,12	9,32	6,43	0,82
			c) Ketahanan Energi, Air dan Pangan					

MISI	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	SASARAN POKOK PEMBANGUNAN	INDIKATOR SASARAN	BASELINE 2025	TARGET			
					I	II	III	IV
			- Ketahanan Air Baku (m ³ /detik)	0,68	0,82	0,94	1,42	1,62
			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	38,33	45	67	86	100
	17. Meningkatkan Resilience terhadap bencana dan perubahan iklim	Meningkatnya Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	44. Indeks Resiko Bencana	120,61	119	118	110	98,29-79,24
45. Persentase Penurunan Emisi GRK (%)								
a. Kumulatif			21,05	28,5	32,5	40,4	49,72	
b. Tahunan			35,1	46,2	65,8	73,9	91,63	

5.3 Kerangka Implementasi

Kerangka implementasi Pembangunan wilayah dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, dan dalam rangka mewujudkan fokus pembangunan Provinsi Gorontalo berdasarkan Tema Pembangunan Kewilayahan yaitu sebagai **"Sentra Pengolahan Tanaman Pangan dan Perkebunan"**, maka arah pembangunannya ditujukan untuk mendorong pembangunan sarana prasarana, seperti konektivitas, komunikasi dan informatika, energi serta sarana prasarana dasar

- (1) Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem.
- (2) Penuntasan RDTR kab/kota serta kewenangan tata ruang laut.
- (3) Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.
- (4) Pengembangan pelabuhan-pelabuhan simpul utama di Sulawesi untuk mendukung
- (5) Pengembangan kawasan ekonomi, terutama Pelabuhan Gorontalo/Anggrek (Gorontalo) sehingga dapat berperan sebagai *hub* komoditas untuk Kawasan Timur Indonesia.
- (6) Pemanfaatan ALKI II dan ALKI III di sisi wilayah Sulawesi secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/nilai domestik dan global.
- (7) Dukungan pengembangan konektivitas *feeder* angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (*Roll-On/Roll-Off*) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi.
- (8) Dukungan pengembangan Bandar Udara Djalaluddin Gorontalo dan integrasi dengan pengembangan wilayah untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas.
- (9) Penyelesaian Trans Sulawesi serta pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan daerah pada koridor utama untuk mendukung integrasi rantai pasok domestik (menghubungkan kawasan ekonomi dan pelabuhan/bandara.
- (10) Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal yang andal serta modern dalam melayani mobilitas penumpang.
- (11) Percepatan pemenuhan sarana dan prasarana dasar yang inklusif
- (12) Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim
- (13) Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.

- (14) Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.
- (15) Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah kepulauan dan afirmasi.
- (16) Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
- (17) Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
- (18) Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
- (19) Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
- (20) Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
- (21) Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan air minum dan sanitasi yang aman.
- (22) Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).
- (23) Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
- (24) Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.
- (25) Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
- (26) Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
- (27) Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.
- (28) Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan *blended finance*.
- (29) Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.

5.4 Upaya Transformatif Super Prioritas (Game Changers)

Upaya transformasi super prioritas merupakan agenda pembangunan yang diharapkan menjadi lompatan dan prioritas dalam mentransformasi pembangunan di wilayah Provinsi Gorontalo. Penyusunan upaya transformasi super prioritas atau game changers berbasis dan terintegrasi dengan game changers nasional. Rumusan game changers pembangunan jangka panjang Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 5.4

Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) Provinsi Gorontalo

Game Changers Nasional	Game Changers Provinsi Gorontalo
Transformasi Sosial	
Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dan pendidikan menengah).	Percepatan wajib belajar 13 tahun dengan fasilitas peningkatan kualitas pendidikan pra sekolah dan dasar, serta optimalisasi kualitas pendidikan menengah
Peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan.	Dukungan dan fasilitasi partisipasi pendidikan tinggi dan lulusan STEAM berkualitas termasuk pemanfaatan dana abadi pendidikan
Restrukturisasi kewenangan pengelolaan tenaga pendidikan dan kesehatan seperti guru, tenaga medis dan tenaga kesehatan	Peningkatan kompetensi dan kesejahteraan SDM pendidikan dan kesehatan
Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta.	Investasi pelayanan kesehatan primer, penuntasan stunting, serta eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan, terutama tuberkulosis dan kusta
Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem Regsosek dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi.	Penuntasan kemiskinan dengan dukungan pada kualitas satu data regsosek, perlindungan sosial adaptif dan pemberdayaan masyarakat
Transformasi Ekonomi	
Peningkatan anggaran IPTEKIN nasional menuju komersialisasi oleh industri	Dukungan kebijakan dan anggaran, serta hilirisasi IPTEKIN.
Industrialisasi: hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi serta berorientasi ekspor	Pengembangan pusat industri hijau dan biru
Percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.	Pengembangan lumbung energi baru dan terbarukan
Superplatform untuk percepatan transformasi digital dan produksi talenta digital	Peningkatan talenta digital

Integrasi infrastruktur konektivitas dengan kawasan pertumbuhan ekonomi	Peningkatan infrastruktur konektivitas untuk mendukung kawasan pertumbuhan ekonomi
	Pengembangan pusat pertumbuhan baru di wilayah Kawasan Strategis Nasional dan Provinsi
Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN)	Peningkatan produksi pertanian, perikanan dan peternakan serta produksi olahan turunannya dalam memperkuat daerah sebagai wilayah potensial dalam penyangga IKN
Transformasi Tata Kelola	
	Pengembangan dan Penataan Wilayah sebagai akselerasi pembangunan dan pelayanan publik
Pembentukan lembaga tunggal pengelolaan regulasi, transformasi manajemen ASN (terutama sistem penggajian tunggal dan pensiun), serta pemberantasan korupsi.	Sistem kerja birokrasi yang dinamis, adaptif dan berintegritas, serta kebijakan daerah yang berkualitas
Penguatan integritas partai politik	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Landasan Transformasi Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia	
Transformasi perencanaan dan fiskal: perencanaan dan pengendalian pembangunan berbasis risiko, penerapan aturan fiskal adaptif, reformasi APBN, serta transformasi kelembagaan perencanaan dan fiskal	Penguatan manajemen risiko dalam proses pembangunan dan penganggaran inovatif.
Reformasi subsidi terutama energi terbarukan dan pupuk tepat sasaran	Fasilitasi reformasi subsidi tepat sasaran, serta bantuan keuangan dari provinsi yang berorientasi kinerja.
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	
Penguatan karakter dan jati diri bangsa	Pembudayaan nilai Pancasila
Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir	Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir, dan penguatan budaya ramah lingkungan
Ketahanan energi dan air serta kemandirian pangan dengan pendekatan terpadu FEW nexus (Food, Energy, Water)	Penguatan ketahanan energi, air dan kemandirian pangan berbasis potensi

Pengembangan kawasan merupakan upaya yang terintegrasi dan berkesinambungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Upaya ini dapat dilakukan melalui berbagai program dan kebijakan yang mendukung pengembangan sumber daya manusia, peningkatan infrastruktur, serta pemanfaatan potensi sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, maka ditetapkan kawasan strategis Nasional dan Kawasan Strategis Provinsi.

A. Kawasan Strategis Nasional

- (1) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu Kawasan Strategis Gorontalo – Paguyaman – Kwandang
- (2) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan fungsi daya dukung lingkungan hidup terdiri atas :
 - a. KSN Danau Limboto, dan
 - b. KSN Teintegrasi Ekoregion Laut Sulu - Sulawesi
- (3) Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan, yaitu :
 - a. KSN Perbatasan Negara Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara, diwilayah Kabupaten Gorontalo Utara

B. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi terdiri atas :

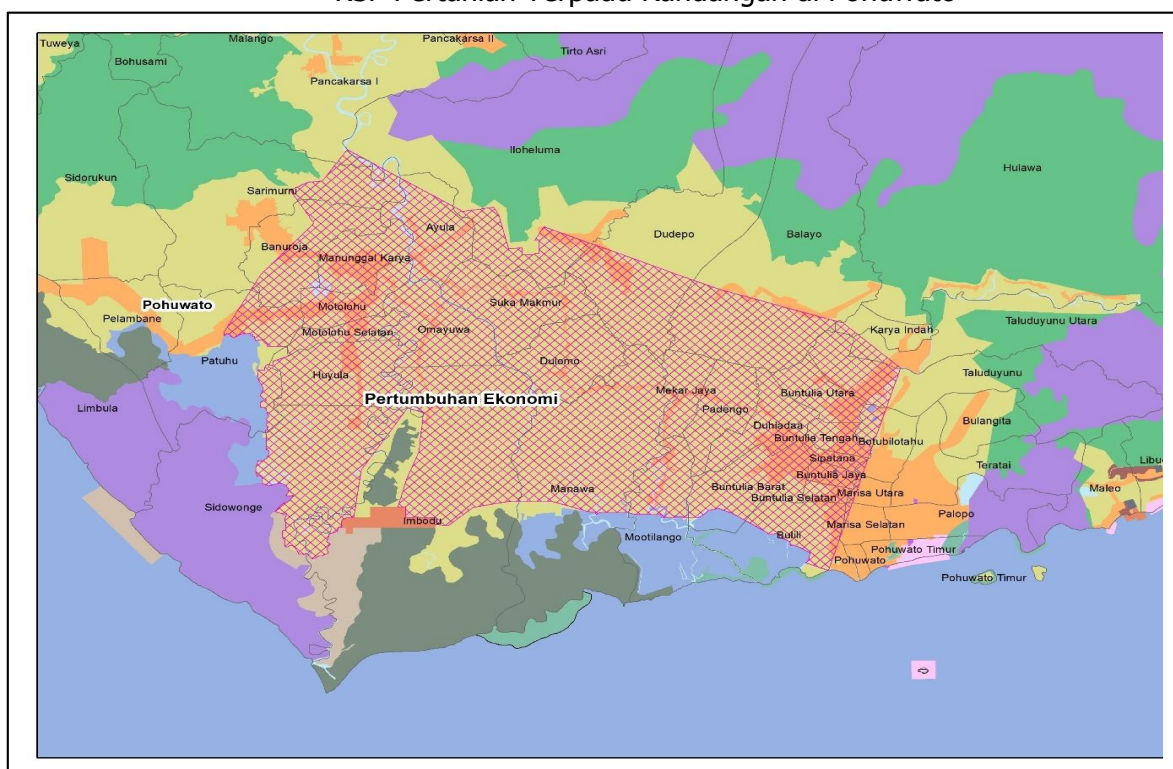
- (1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi
 - a. KSP Pariwisata Botumoito di Kabupaten Boalemo dan Laut
 - b. KSP Pariwisata Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;
 - c. KSP Pertanian Terpadu Paguyaman – Wonosari di Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo;
 - d. KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya di Kabupaten Pohuwato
 - e. KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;
 - f. KSP Industri Terpadu Tibawa Pulubala di Kabupaten Gorontalo

Wilayah Paguyaman – Wonosari menjadi salah satu daerah yang memiliki potensi pertanian yang cukup potensial untuk dikembangkan, yang didukung dengan ketersediaan lahan yang masih memadai. Pengembangan kawasan strategis Provinsi (KSP) Pertanian, Terpadu Paguyaman – Wonosari di Kabupaten Boalemo, dikembangkan melalui upaya :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan pertanian berkelanjutan;
2. Peningkatan kapasitas sarana prasarana pertanian seperti jaringan irigasi;
3. Mengembangkan fasilitas penunjang pertanian melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan;
4. Mengembangkan industri pertanian berbasis pada agrobisnis;
5. Pengembangan sistem pertanian terpadu yang terintegrasi;
6. Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian.

Gambar 5.5

KSP Pertanian Terpadu Randangan di Pohuwato



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

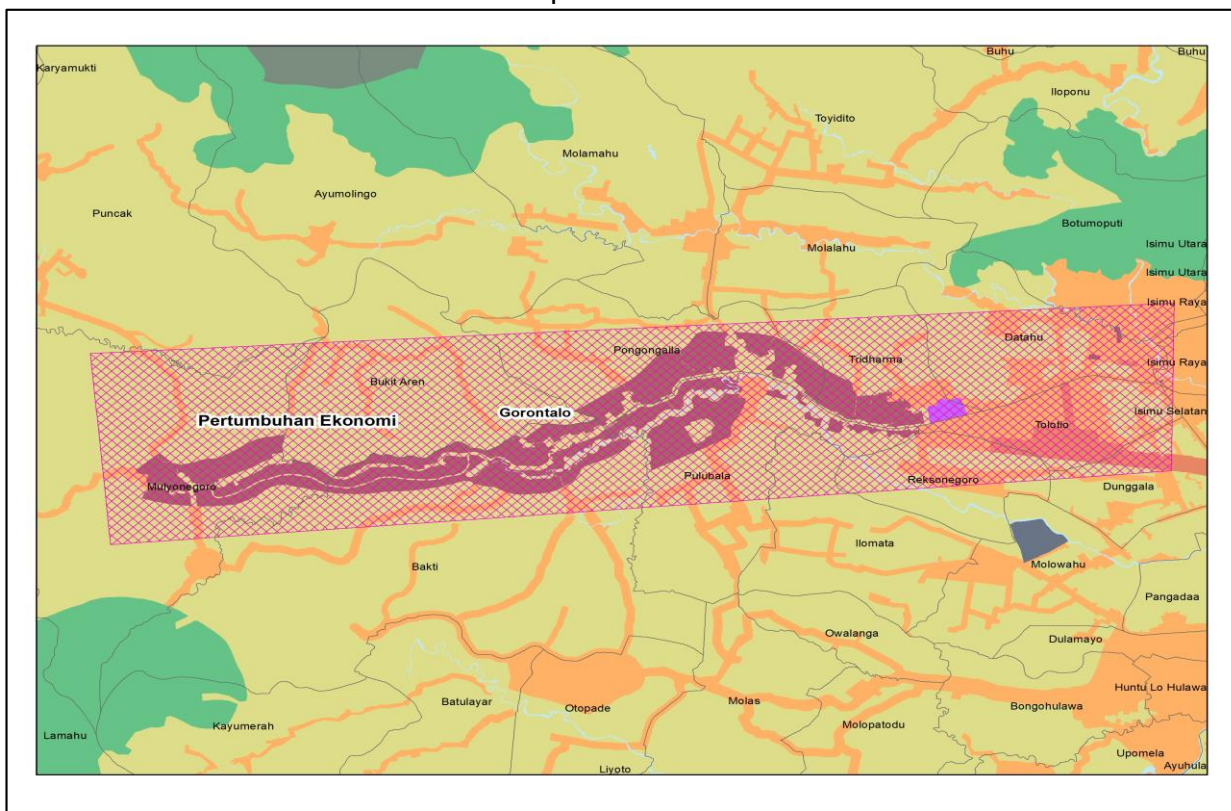
Kawasan randangan ditetapkan sebagai salah satu KSP Pertanian karena memiliki produksi pertanian sangat potensial ditunjang dengan Bendungan Randangan yang dapat mengairi areal persawahan teknis seluas 8.963 Ha. Komoditi potensial di kawasan randangan

diantaranya Padi, Jagung, Kelapa, Sawit dan Kakao. Pengembangan kawasan strategis Provinsi (KSP) Pertanian Terpadu Rancangan di Kabupaten Pohuwato, dikembangkan melalui upaya :

1. Peningkatan kapasitas sarana prasarana pertanian seperti jaringan irigasi;
2. Pengembangan sistem pertanian terpadu yang terintegrasi;
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas lahan pertanian berkelanjutan;
4. Mengembangkan fasilitas penunjang pertanian melalui pengembangan teknologi tepat guna dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan;
5. Mengembangkan industri pertanian berbasis pada agrobisnis;
6. Pengembangan sarana prasarana pengolahan dan peningkatan nilai tambah produk-produk pertanian.

Gambar 5.3

KSP Industri Terpadu Tibawa – Pulubala Kab. Gorontalo



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

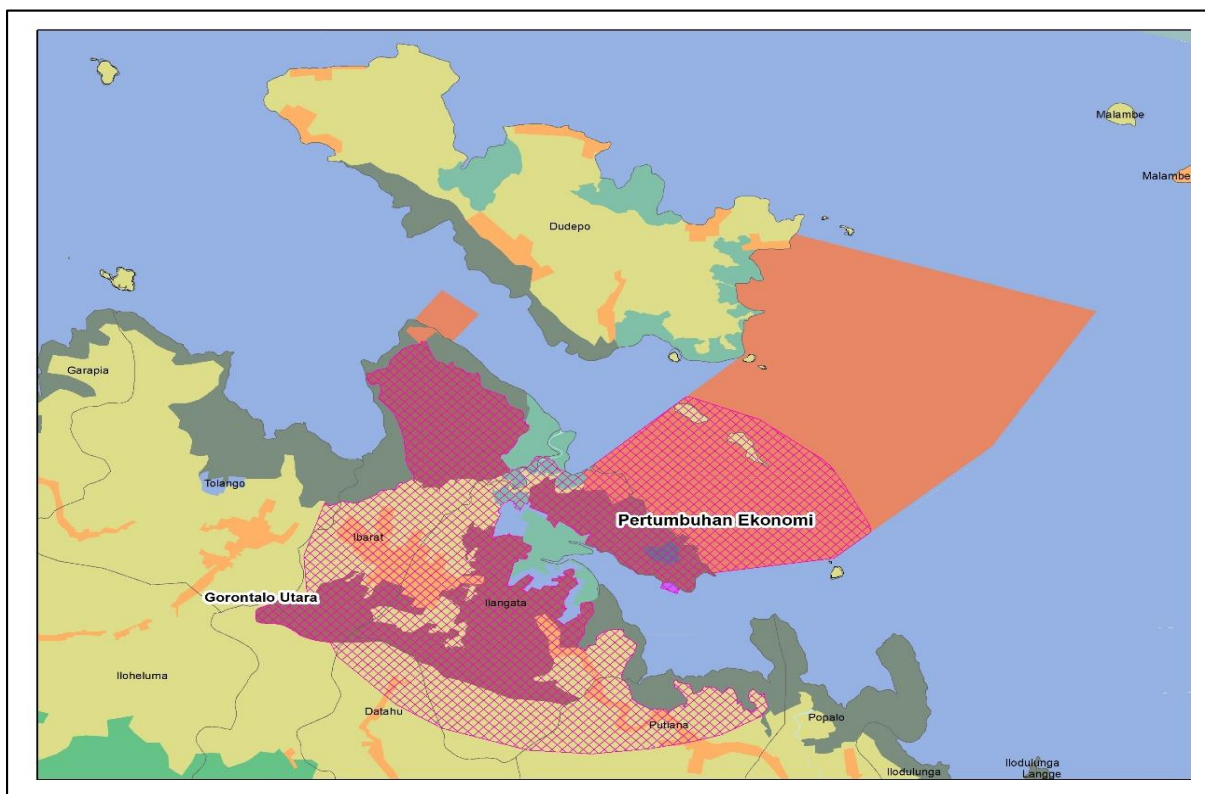
Pengembangan Kawasan Strategis Industri Terpadu Tibawa – Pulubala di Kabupaten Gorontalo, diupayakan melalui :

1. Pengembangan simpul-simpul Transportasi untuk menunjang kegiatan industri.
2. Peningkatan aksesibilitas dan konektifitas antar wilayah hulu dan hilir industri.

3. Pembangunan sarana prasarana pergudangan bahan baku maupun barang hasil produksi untuk mendorong ekspor.
4. Ketersediaan bahan baku (kualitas, kuantitas dan kontinuitas) melalui koordinasi dengan instansi terkait dan kemitraan serta integrasi antara sisi hulu dan sisi hilir didukung oleh infrastruktur yang memadai.
5. Pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk.
6. Pengembangan Teknologi dalam meningkatkan kualitas produk.
7. Memperluas kerjasama industri melalui peningkatan investasi dan penguasaan pasar ekspor.
8. Peningkatan ketersediaan utilitas dan energi untuk meningkatkan daya saing industri.

Gambar 5.4

KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kab. Gorontalo Utara dan Laut

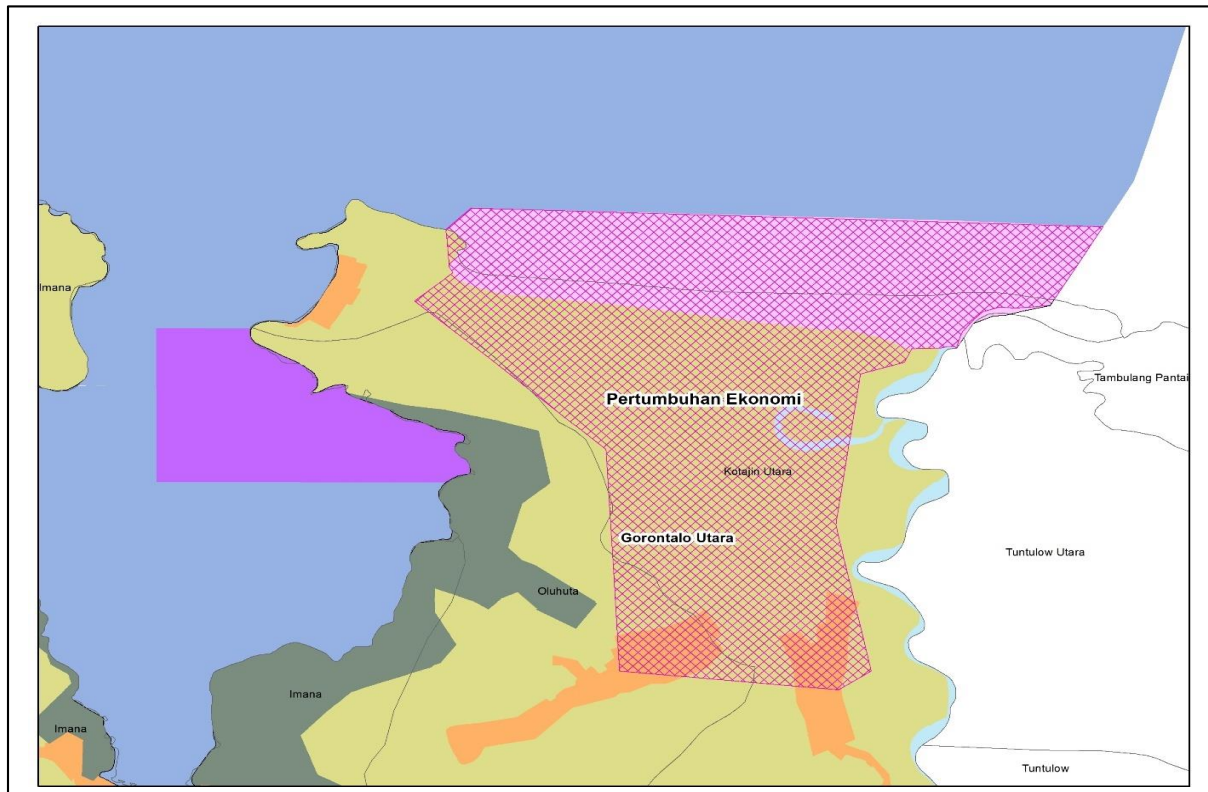


Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo, 2023-2024

Kawasan strategis Provinsi (KSP) Terintegrasi Anggrek berada di Kabupaten Gorontalo Utara dan Wilayah Laut pesisir utara Pulau Sulawesi. KSP Terintegrasi Anggrek menjadi sangat strategis sebagai pendorong utama percepatan pembangunan Gorontalo. KSP Provinsi berada di kawasan Pelabuhan Anggrek sebagai jalur transportasi laut, dengan akses mudah ke jalur perdagangan internasional utama, yang ditunjang dengan potensi agribisnis yang kuat dengan

produk unggulan pertaniannya. Pengembangan kawasan strategis Anggrek diupayakan melalui (1) Peningkatan sarana dan prasarana melalui skema pendanaan alternatif (KPBU), dan (2) Pengembangan aksesibilitas dalam menunjang konektifitas logistik.

Gambar 5.5
KSP Pariwisata Minanga di Kab. Gorontalo Utara dan Laut



Sumber : RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2043

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Minanga di Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kawasan sangat potensial karena memiliki garis pantai yang cukup panjang diwilayah Laut Sulawesi, serta berada dijalur trans sulawesi. Pengembangan KSP Minanga diupayakan melalui :

1. Membangun dan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dikawasan Pariwisata yang memperhatikan aspek keberlanjutan.
2. Mendorong peningkatan 3 A (Amenitas, Aksesibilitas dan Atraksi) dikawasan pariwisata.
3. Mendorong sarana prasarana infrastruktur dasar dikawasan pariwisata yang dapat menunjang kegiatan wisata seperti jalan, drainase dan sebagainya.
4. Mendorong investasi sektor pariwisata dalam penyediaan sarana pokok, penunjang dan pelengkap pariwisata (*tourisme superstructures*).

5. Mendorong peningkatan UMKM dan ekonomi kreatif melalui pemberdayaan kelompok masyarakat dalam menunjang pariwisata.

(2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, yaitu KSP Geopark Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, Kota Gorontalo dan Laut. KSP Geopark dimaksudkan untuk peningkatan konservasi dan preservasi terhadap sumber daya alam berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah kegiatan pariwisata berkelanjutan berbasis lingkungan hidup dan ekonomi, peningkatan kegiatan pariwisata edukasi terhadap sumber daya geologi.

5.5 Pengembangan Kewilayahan

Pengembangan wilayah juga didasarkan pada karakteristik wilayah kabupaten dan kota se-provinsi Gorontalo. Beberapa Isu dan potensi wilayah kabupaten dan kota di provinsi Gorontalo yaitu, Belum optimalnya konektivitas, **tingkat kemiskinan** dimana hanya kota Gorontalo yang tingkat Kemiskinan dibawah rata-rata provinsi, **persebaran penduduk tidak merata**, daerah perkotaan dengan kemajuan pembangunan yang pesat memiliki daya tarik kuat untuk dijadikan tempat penduduk bermigrasi. Data empiris menunjukkan bahwa kepadatan penduduk di Gorontalo terpusat di Kota Gorontalo. Dengan luas wilayah sebesar 79,59 kilometer persegi kepadatan penduduk mencapai 2.510 jiwa per kilometer persegi. **Tingkat kesejahteraan dan pendidikan** dimana data BPS tentang Indeks Pembangunan Manusia memperlihatkan hanya kota Gorontalo yang angkanya berada di bawah rata-rata Provinsi.

Tabel 5.5
Gambaran Pembangunan Kabupaten-kota Tahun 2022

No	Indikator	Provinsi	Kota Gorontalo	Kabupaten Gorontalo	Kabupaten Boalemo	Kabupaten Bone Bolango	Kabupaten Pohuwato	Kabupaten Gorontalo Utara
Bidang Ekonomi								
1	Pertumbuhan Ekonomi (persen)	4,04	4,1	3,93	3,05	4,01	3,1	3,30
2	Persentase Kemiskinan (persen)	15,42	5,73	17,71	18,74	16,05	17,87	17,24
3	Indeks Gini	0,418	0,396	0,413	0,391	0,400	0,390	0,434
Bidang Sosial								
3	Indeks Pembangunan Manusia	69,81	78,22	68,28	67,27	70,90	66,53	66,01



4	Tingkat Pengangguran (persen)	2,58	3,50	1,83	2,07	3,29	3,41	2,02
Bidang Kesehatan								
5	Usia Harapan Hidup (tahun)	68,51	72,88	67,89	69,61	68,88	64,62	66,30
6	Prevalensi Stunting (Persen)	23,8	19,1	30,8	29,9	22,3	6,4	28,3
Bidang Pendidikan								
7	Rata-rata lama sekolah (Tahun)	8,02	10,39	7,61	7,03	8,33	7,35	7,16
8	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13,12	14,57	13,19	12,46	13,66	12,39	12,47
9	Angka Partisipasi Murni							
	- SD/Sederajat (persen)	98,74	99,97	99,03	98,97	98,50	96,09	99,51
	-SMP/Sederajat (persen)	71,66	73,88	66,46	69,37	77,56	70,67	81,22
	-SMA/Sederajat (persen)	58,47	59,12	60,06	52,97	60,81	56,00	61,18
Bidang Sarana Prasarana								
10	Air minum layak	79,82	92,09	75,14	74,62	76,75	78,32	81,80
11	Rumah Layak Huni	69,48	85,48	66,45	60,85	66,12	68,38	63,03
12	Kemantapan Jalan (%)	60,46	79,35	45,8	51,6	62,62	38,53	39,3
Bidang Tata Kelola								
13	Indeks Reformasi Birokrasi	77,75	74,61	63,81	59,12	69,98	63,10	63,73
14	Indeks SPBE	2,48	2,59	2,03	2,02	2,30	2,05	1,54
Bidang Lingkungan Hidup dan Kebencanaan								
15	Indeks Resiko Bencana	120,61	84,34	94,04	116,77	135,07	161,60	131,85
16	Indeks Ketahanan Pangan	80,35	80,95	79,79	81,71	78,84	80,47	80,34

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo, 2023.

Warna Merah; lebih rendah dari capaian rata-rata provinsi

Warna Biru; lebih baik dari capaian rata-rata Provinsi

Dalam konteks pengembangan kewilayahan provinsi Gorontalo dalam mendorong pemerataan pembangunan serta mengoptimalkan pembangunan diwilayah Kabupaten dan Kota yang terintegrasi, maka dirumuskan beberapa arahan kebijakan pembangunan, dengan memperhatikan arahan RTRW Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

A. Kota Gorontalo

Arah pengembangan Wilayah Kota Gorontalo sebagai Ibu Kota Provinsi, diarahkan sebagai

Sentra Perdagangan dan Jasa, dengan fokus pengembangan sebagai berikut :

1. Pengembangan sarana prasarana wilayah sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
2. Pengembangan dan fasilitasi infrastruktur transportasi, seperti Fasilitasi Penyelesaian Pembangunan GORR Segmen 3
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi, seperti Jl. Beringin, Jl. Brigjen Piola Isa, Jl. Moh. Tayeb Gobel.
4. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Geopark dan Peti Kemas dan Pergudangan
5. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air
6. Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dengan Sumber Energi Baru Terbarukan
7. Peningkatan layanan pendidikan
8. Peningkatan layanan kesehatan seperti layanan Laboratorium Kesehatan Daerah
9. Pengembangan Kawasan Perkotaan, seperti Kawasan Kota Tua, Perdagangan dan Jasa, dan Permukiman.
10. Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
11. Optimalisasi pengelolaan Persampahan, Limbah B3, dan Sanitasi Perkotaan
12. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
13. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana.
14. Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Sarana Prasarana Olah Raga, Seni dan Budaya

B. Kabupaten Gorontalo

Pengembangan kewilayahan di Kabupaten Gorontalo sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi, didorong sebagai **Sentra Pengolahan Berbasis Sumber Daya Alam serta pusat konektivitas antar wilayah**, dengan arah pembangunan sebagai berikut :

1. Dukungan Pengembangan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Danau Limboto
2. Pengembangan Kawasan Terpadu Industri Terpadu Tibawa – Pulubala, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Geopark Gorontalo.
3. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Tibawa, Pusat Kegiatan Lokal (PKL) Limboto dan Tolangohula
4. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Isimu – Batudaa, Tenilo – Iluta, Pilohayanga – Dulamayo Selatan, Pangadaa – Bakti

5. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air, seperti Daerah Irigasi Huludupitango, Daerah Irigasi Bongo, Daerah Irigasi Buliya, Daerah Irigasi Pilohayanga
6. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
7. Fasilitasi Pengembangan Terminal Tipe A Isimu dan Pembangunan Terminal Tipe B Limboto
8. Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Pengumpan Bilato
9. Fasilitasi pengembangan Bandar Udara Djalaludin
10. Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi dan Jaringan Telekomunikasi
11. Fasilitasi pengembangan dan penerapan Sumber Energi Baru Terbarukan
12. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
13. Pengembangan Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya, Kawasan Konservasi, dan Kawasan Hutan Produksi
14. Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman.
15. Pengembangan Kawasan Pariwisata seperti Pendaratan Soekarno, Pentadio Resort, juga Desa Wisata seperti Desa Bongo
16. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Tibawa-Pulubala, Kawasan Pertahanan dan Keamanan
17. Pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
18. Peningkatan layanan Pendidikan termasuk pendidikan vokasi
19. Peningkatan layanan Kesehatan seperti Pengembangan Rumah Sakit Ainun Habibie serta penuntasan Stunting
20. Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
21. Pengembangan TPA Talumelito, Pembangunan dan Pengembangan Limbah B3
22. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
23. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan.

C. Kabupaten Bone Bolango

Pengembangan kewilayahan Kabupaten Bone Bolango akan berfokus pada pembangunan sosial dan ekonomi sebagai **Sentra Pengolahan Sumber Daya Alam dan Mineral serta Jasa Pendidikan**, yang diarahkan pada :

1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Geopark Gorontalo

2. Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Bone Raya dan Suwawa
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Gorontalo – Suwawa – Tulabolo, Kabila – Tapa, Tapa – Atinggola,
4. Fasilitasi Penyelesaian Pembangunan GORR Segmen 3.
5. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
6. Pengembangan Terminal Tipe B (Terminal Suwawa dan Tapa).
7. Pengembangan Pelabuhan Perikanan.
8. Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan
9. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Alur Pipa Air Bersih, Bangunan Pengendali Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air).
10. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3.
11. Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi.
12. Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).
13. Kawasan Pariwisata, seperti Olele, Botubarani, dan Lombongo
14. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting
15. Penguatan Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
16. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
17. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan.
18. Pembangunan Infrastruktur Fasilitas Sarana Prasarana Olah Raga, Seni dan Budaya.

D. Kabupaten Gorontalo Utara

Pengembangan kewilayahan di Kabupaten Gorontalo Utara akan berfokus pada pembangunan sarana prasarana dalam mendukung peran dan fungsi Kabupaten Gorontalo Utara sebagai **Sentra Pertanian, Perikanan, dan Perdagangan Internasional** dalam mendorong ekonomi maritim, yaitu:

1. Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi Pariwisata Minanga, KSP Terintegrasi Pelabuhan Anggrek di Kabupaten Gorontalo Utara dan Laut;

2. Fasilitasi Pengembangan PKSN Kwandang dan Anggrek, PKW Kwandang, PKL Atinggola, dan Tolinggula
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi, seperti Labano – Tolongio, Tolinggula Ulu – Cempaka Putih
4. Pengembangan Pelabuhan Pengumpul dan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan
5. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
6. Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan
7. Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air seperti Daerah Irigasi Tolinggula
8. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
9. Fasilitasi Penyediaan Air Baku
10. Fasilitasi perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi
11. Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
12. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting
13. Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
14. Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi
15. Peningkatan kinerja birokrasi berbasis kompetensi dan pemanfaatan teknologi informasi / digital dalam penyelenggaraan Pemerintahan.
16. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan

E. Kabupaten Boalemo

Pengembangan kewilayahan Kabupaten Boalemo sebagai daerah pusat pengembangan Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri dan Pariwisata dikawasan Teluk Tomini, sehingga diarahkan sebagai **Sentra Pengolahan Pertanian dan Pengembangan Pariwisata**, yang diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut:

1. Pengembangan KSP Pariwisata Botumoito, KSP Geopark Gorontalo, KSP Pertanian Terpadu Paguyaman-Wonosari

2. Pengembangan PKW Tilamuta, PKL Paguyaman
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Tangkoku – Pentadu, Molombulahe – Bubaa
4. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
5. Pengembangan Terminal Tilamuta
6. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan
7. Fasilitasi Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan
8. Fasilitasi dan Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air seperti Daerah Irigasi Tabulo – Latula
9. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3
10. Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi
11. Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B)
12. Pengembangan Kawasan Transportasi, Kawasan Pertahanan dan Keamanan
13. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting
14. Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
15. Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi
16. Pembangunan Infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan

F. Kabupaten Pohuwato

Pengembangan wilayah di Kabupaten Pohuwato, sebagai wilayah potensial disektor pertanian, perikanan dan pertambangan, yang didukung dengan jalur transportasi darat dan udara, sehingga Kabupaten Pohuwato diarahkan sebagai **Sentra Pengolahan Pertanian, Perkebunan dan Pertambangan** yang didorong melalui :

1. Pengembangan KSP Pertanian Terpadu Randangan dan sekitarnya
2. Pengembangan PKL Marisa dan Popayato
3. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Provinsi seperti Wonggarasi – Taluditi - Randangan, Akses Bandara Imbodu
4. Fasilitasi Pengembangan Jaringan Tol, Jalur Kereta Api dan Stasiun Kereta Api
5. Pengembangan Terminal Tipe B (Terminal Marisa)
6. Pengembangan Pelabuhan Penyeberangan (Pelabuhan Marisa)

7. Pengembangan Pelabuhan Pengumpan, Pelabuhan Terminal Khusus, Pelabuhan Perikanan
8. Fasilitas Pengembangan Bandar Udara Pohuwato
9. Fasilitas dan Pengembangan Sistem Jaringan Energi Sumber Energi Baru Terbarukan
10. Pengembangan Sistem Jaringan Sumber Daya Air (Jaringan Irigasi, Alur Pipa Air Bersih, Bangunan Pengendali Banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air)
11. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya (Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL), Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3)
12. Pengembangan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan konservasi, serta kawasan hutan produksi
13. Pengembangan Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Perikanan, Kawasan Pertanian, Kawasan Permukiman, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B), Kawasan Industri Pagueat, Kawasan Transportasi
14. Peningkatan Layanan Pendidikan dan Kesehatan termasuk penuntasan Stunting
15. Penguatan Perlindungan Sosial untuk pengurangan kemiskinan
16. Optimalisasi pengelolaan Persampahan dan Sanitasi
17. Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan serta penguatan sistem peringatan dini kebencanaan
18. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa padang lamun dan mangrove di Tanjung Panjang.

BAB VI PENUTUP

6.1 Implementasi Pelaksanaan

a. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antardokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan untuk memastikan perencanaan yang berkualitas, kesesuaian pelaksanaan pembangunan dengan perencanaannya serta ketersediaan penadanaan dan pemanfaatan secara optimal. Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun pelaku pembangunan nonpemerintah.

Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan juga perlu didukung dengan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas. Hal tersebut dilakukan, khususnya untuk menentukan prioritas pembangunan daerah sampai dengan level proyek/keluarah, memastikan pelaksanaannya. Penguatan mekanisme proses utamanya dilakukan dengan penekanan pada kolaborasi dan partisipasi aktif seluruh pelaku pembangunan.

b. Keterkaitan RPJPD Provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota

RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan tertinggi dalam perencanaan pembangunan daerah yang selanjutnya menjadi pedoman bagi dokumen perencanaan turunannya yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dokumen perencanaan tersebut harus menjadi pedoman bagi penyusunan anggaran pemerintah daerah (APBD).

Konsistensi antara RPJPD dengan dokumen perencanaan turunannya adalah sebagai berikut :

1. Sinkronisasi periodisasi dan substansi dilakukan dalam penjabaran RPJPD Provinsi ke RPJPD Kabupaten/Kota dan RPJMD Provinsi. Periodisasi RPJPD Kabupaten/Kota mengikuti periode RPJPD Provinsi. Substansi delapan misi (agenda) pembangunan berikut upaya transformatif prioritas menjadi bagian dari muatan RPJPD Kabupaten/Kota disesuaikan dengan karakteristik dan kewenangan pemerintah daerah.

2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Gorontalo bersifat jangka panjang sehingga memberikan arah pembangunan jangka panjang dan khusus memuat upaya transformatif untuk mencapai Gorontalo Madani 2045 dan Indonesia Emas 2045. Hal-hal lain yang bersifat spesifik daerah akan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Provinsi.
3. Arah (tujuan) Pembangunan dan Indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran dan indikator prioritas Pembangunan daerah dalam RPJMD Provinsi dan menjadi pedoman bagi RPJPD Kabupaten/Kota dalam menentukan sasaran, arah kebijakan, dan indikator pembangunan.
4. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan Provinsi Gorontalo dalam RPJMD menjadi pedoman sasaran dan indikator prioritas pembangunan Provinsi dalam RKPD.
5. Sasaran dan indikator prioritas pembangunan daerah dalam RKPD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD). Indikator prioritas pembangunan daerah dilaksanakan melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD yang nantinya akan dipergunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja PD.
6. Dokumen RPJPD, RPJMD dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral daerah seperti rencana induk/*Master Plan/Grand Design*, strategi daerah, peta jalan, atau sebutan lainnya terkait perencanaan pembangunan daerah.
7. Dokumen RPJPD Provinsi Gorontalo menjadi pedoman visi, misi, dan program bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, calon anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta pasangan calon bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota.

c. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD Provinsi Gorontalo dan dokumen perencanaan turunannya menerapkan kerangka Kerja Logis (KKL) Pembangunan. Pemanfaatan KKL ditujukan agar intervensi kebijakan relevan dengan tujuan Pembangunan yang telah direncanakan. Penyusunan KKL juga mendukung pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pembangunan.

Penggunaan KKL dilakukan dengan menerapkan pendekatan Tematik, Spasial, Holistik dan Integratif.

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan, serta mampu menjawab tujuan Pembangunan
- Spasial adalah penjabaran beberapa program Pembangunan terkait dalam satu kesatuan wilayah

- Holistik adalah penjabaran tematik program Pembangunan ke dalam perencanaan ke dalam perencanaan yang komprehensif, mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarusutamaan pembangunan, yang mencakup : pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, ekonomi hijau, tranformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan, serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.
- Penerapan Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial.

Kerangka kerja logis menggambarkan hubungan antara input-proses-output-outcome-impact. Sasaran utama pembangunan dalam RPJPD bersifat impact-outcome, harus diterjemahkan dengan baik hingga ke level input. Pendetailan sasaran tersebut dilakukan melalui dokumen turunannya, meliputi rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek, baik untuk perencanaan provinsi maupun kabupaten/kota.

Setiap alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja setidaknya menerapkan kriteria Specific, Measurable, Achievable, Result Oriented/Relevant, dan Time-Bound (SMART), sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dalam memastikan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah

d. Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi dan RKPD Provinsi, perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan.

Sebagai Upaya menjamin pencapaian sasaran pembangunan daerah, perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun nonpemerintah secara lebih inovatif, integrative, dan tepat sasaran. Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektivitas dalam belanja, pemerintah daerah juga dapat memanfaatkan pendanaan pembangunan yang bersumber dari pinjaman dan hibah serta sumber pendanaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan untuk pencapaian prioritas pembangunan secara berkelanjutan.

6.2 Kerangka Pengendalian

a. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan nasional, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan system elektronik terpadu dan tata Kelola data pembangunan.

Pengendalian dilaksanakan melalui kegiatan pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko yang dilakukan pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Aktivitas pengendalian didukung oleh system elektronik yang terintegrasi dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Sistem elektronik terpadu juga diintegrasikan dengan tata Kelola data pembangunan yang mendorong kebijakan pembangunan berbasis bukti.

Pengendalian RPJPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang hasilnya disampaikan kepada Gubernur. Berdasarkan tahapan pelaksanaannya, ruang lingkup pengendalian pembangunan nasional terbagi menjadi dua bagian.

a. Pengendalian perencanaan. Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan provinsi, serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran, baik dari pemerintah maupun nonpemerintah. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek.

Pengendalian jangka menengah mencakup: (i) penjabaran perencanaan RPJPD Provinsi ke dalam RPJMD Provinsi, dan RPJMD Provinsi ke dalam Renstra PD, (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

Pengendalian jangka pendek mencakup : (i) penjabaran perencanaan RPJMD Provinsi ke dalam RKPD Provinsi dan dokumen RKPD Provinsi ke dalam Renja PD; (ii) kesiapan desain proyek prioritas pembangunan nasional termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; (iii) konsistensi perencanaan dan penganggaran; dan (iv) identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

b. Pengendalian pelaksanaan. Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanakan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi mencakup : (i) pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah; (ii) pemantauan mitigasi risiko pembangunan; (iii) evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan

nasional; dan (iv) evaluasi pencapaian sasaran kinerja utama dan program Perangkat Daerah yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung dengan tatanan regulasi agar pelaksanaannya berjalan efektif. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi, pengendalian, manajemen resiko pembangunan, dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi diperlukan untuk konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja PD terkait yang akan menjadi satu dasar pengaturan system manajemen kinerja pemerintah daerah.

Kerangka kelembagaan pengendalian yang komprehensif juga diperlukan agar pelaksanaannya berjalan dengan baik. Dalam hal ini, diperlukan kelembagaan pengendalian yang mengoordinasikan pengendalian lintas dan internal Perangkat Daerah.

b. Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Gorontalo memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Pelaku pembangunan meliputi unsur pemerintah dan nonpemerintah, seperti dunia usaha, lembaga penelitian, dan kelompok masyarakat lainnya.

Unsur mendorong partisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan, perlu diciptakan system insentif yang baik. System insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan pelaku pembangunan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan provinsi. Untuk pelaku pembangunan unsur pemerintah, system insentif diintegrasikan di dalam system manajemen kinerja dan system manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja PD terhadap pencapaian sasaran pembangunan provinsi. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro daerah, pencapaian indikator-indikator kinerja utama lainnya, dan pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan nonpemerintah, system insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

6.3 Mekanisme Perubahan

Dokumen perencanaan yang adaptif memerlukan ruang penyesuain atas factor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi perubahan geopolitik, geoekonomi, dan bencana, serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan pencapaian sasaran pembangunan jangka Panjang, target RPJPD dapat

dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target ini dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penerapan kaidah pelaksanaan didukung oleh pemanfaatan transformasi digital melalui penggunaan system elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan pada seluruh tahapan siklus pembangunan. Sistem elektronik terpadu tersebut bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan ketangkasan proses bisnis perencanaan dan pelaksanaan RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045. Adapun tata Kelola data bertujuan untuk meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang sama.

6.4 Komunikasi Publik

Komunikasi publik sangat penting untuk mewujudkan system pemerintahan yang dinamis, transparan, responsive, dan komunikatif. Dengan komunikasi public yang baik, diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh public dan dapat mengundang partisipasi public dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi public terdiri dari 3 hal pokok, yaitu : (i) struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional; (ii) penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, dan dapat dimanfaatkan oleh para pihak secara mudah dan murah; serta (iii) keterlibatan semua kelompok masyarakat secara demokratis berbasis data yang valid dengan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan public yang beragam.

Komunikasi public RPJPD Provinsi Gorontalo 2025-2045 memiliki prinsip "tidak ada yang tertinggal" (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Komunikasi publik melibatkan para pemangku kepentingan yakni Perangkat Daerah Provinsi, DPRD Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat umum termasuk swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, diaspora, pemuda, dan kelompok rentan, seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia dilakukan berbagai metode komunikasi yang memudahkan masyarakat memahami dan berpartisipasi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan. Komunikasi dilakukan melalui forum-forum perencanaan mulai dari Konsultasi Publik, Forum Perangkat Daerah, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah dan forum-forum perencanaan tematik lainnya dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan sesuai kebutuhan dan substansi forum termasuk juga melalui media cetak dan elektronik yang tersedia.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian komunikasi public dapat

mendorong partisipasi public yang lebih bermakna dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pembangunan.

6.5 Pembiayaan Pembangunan

Upaya untuk mewujudkan Gorontalo Madani Tahun 2045 untuk mendukung Indonesia Emas 2045 memerlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui pengembangan inovasi pembiayaan, baik berupa perluasan sumber-sumber pembiayaan, penerapan skema atau mekanisme pelaksanaan yang baru, hingga optimalisasi peran sektor keuangan.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor public dilakukan melalui perluasan sumber dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup : (i) penguatan perencanaan pembiayaan yang meliputi : penataan regulasi dan pembentukan kelembagaan yang adaptif, pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis, dan pengembangan inovasi mekanisme pelaksanaan yang mendukung ruang gerak untuk mendapatkan skema pembiayaan yang berdampak; dan (ii) perluasan kerjasama keuangan lainnya untuk mengembangkan sumber pembiayaan yang inovatif.

Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor nonpublik dilakukan melalui (i) pemanfaatan instrument pendanaan jangka panjang seperti dana pensiun, asuransi, dan instrumen pasar modal; (ii) inovasi produk pembiayaan syariah yang disusun berdasarkan prinsip sewa menyewa, jual beli dan bagi hasil; dan (iii) sumber pembiayaan nonpublik lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Akhirnya, patut kita sadari bersama bahwa keberhasilan pelaksanaan RPJPD Provinsi Gorontalo Tahun 2025-2045 sangat tergantung pada komitmen antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Gorontalo. Untuk itu perlu sinergi dan kerjasama guna terwujudnya Gorontalo Madani 2025-2045 "Maju dan Berkelanjutan" Tahun 2045.

Pj. GUBERNUR GORONTALO



RUDY SALAHUDDIN



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPEDA) PROVINSI GORONTALO 2024**